



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL) DAN NON HUKUM PIDANA  
(NON PENAL) DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT**

**TESIS**

**Disusun Oleh :**

**SAIFUL ABDULLAH, SH  
B4A 006024**

**Dosen Pembimbing :  
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.**

**Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana  
Universitas Diponegoro  
Semarang  
2008**

# **LEMBAR PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL) DAN NON HUKUM PIDANA  
(NON PENAL) DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT**

## **TESIS**

**Disusun Oleh :**

**SAIFUL ABDULLAH, SH  
B4A 006024**

**Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 28 Agustus 2008**

**Pembimbing,**

**Peneliti,**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP. 130 350 519**

**Saiful Abdullah, SH  
NIM B4A 006024**

**Mengetahui ,  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH,MH  
NIP. 130 531 702**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Saiful Abdullah, SH, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/ Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 28 Agustus 2008

Penulis,

**Saiful Abdullah, SH**  
**NIM B4A 006024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS- Al- Baqoroh 32)

Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya *Rabbmu* Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" (QS- An-Nahl 125).

Hadapi dan jalani hidup ini dengan sabar, tabah, semangat jiwa besar, merdeka, yang tiada bertengadah kecuali kepada Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

### **Kupersembahkan Karya Ini:**

#### **1. Kepada Abi Wa Ummi serta kedua mertua**

Atas do'a dan pengorbanan yang tidak pernah berbalas

#### **2. Kepada Isteri dan ananda R. Ayu FD dan Si Jabang Bayi**

Kasih Sayangnya adalah dian tak kunjung padam

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan Tesis dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rosulallah SAW, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa risalah, Pencerah terhadap umat manusia dari jalan penuh dengan kesesatan menuju zaman berkeberadaban, berketertiban, egalitarian dan ilmu pengetahuan.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril spirituil maupun materiel sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ucapan terima kasih, disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med. Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk mengarungi luasnya samudera ilmu hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, sebagai mantan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro sekaligus sebagai pembimbing yang penuh dengan kesabaran, kearifan, ketelitian, kecermatan telah banyak memberikan nutrisi pikir penulis akan pentingnya bersungguh-sungguh, cermat dan teliti terhadap amanat dan tugas.
4. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MS sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro saat ini sekaligus pembimbing

metodologi, penguji, dan Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH, Prof. Abdullah Kelib, SH yang penuh dengan perhatian dan kesabaran mendampingi dan membimbing dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dengan perantara penyampaian penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir tetapi juga hidup penulis dimasa depan.
6. Ibu Ani Purwanti S.H., MHum., Sekertaris Bidang Akademik dan Bapak Eko Sabar Prihatin S.H., MS., Sekertaris Bidang Keuangan, staf dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
7. Prof. Dr. Ir. M. Ariffin, MS selaku Rektor Universitas Trunojoyo membesarkan hati penulis, memfasilitasi, mendorong, perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menempuh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Pembantu Rektor I, II, II Universitas Trunojoyo, utamanya kepada Bapak Boedi Mustiko, SH, MH selaku Pembantu Rektor III
9. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Bapak H. Moh. Amir Hamzah, SH, MH yang membesarkan hati penulis, memfasilitasi, mendorong, perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menempuh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, terutama "ibunda" Dr. Nunuk Nuswardani, SH, MH dan segenap staf pengajar, karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, khususnya Deni SB Yuherawan, SH, MS sebagai guru, mantan pembimbing skripsi, sekaligus teman berdiskusi yang baik dalam berbagai hal.
11. Kepada guru-guru yang telah mendidik Penulis mulai dari SD, SMP, SMA sampai Universitas maupun para masyayikh, asatidz wal asatidzah yang membimbing kehidupan rohani penulis, utamanya PP. Darul Ulum Jombang.
12. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku Abi RH. Abdullah, MA dan Ummi Hj. Muzayyah Azmi, kasih sayangnya, doa dan restunya adalah dian yang tak kunjung padam. Kedua mertua penulis, Bapak

Slamet Sutrisno, dan Ibu Sumilah, dengan segala doa dan restunya tesis ini terselesaikan

13. Istriku tercinta, Hanik Atun Nik 'Amah, SH, yang penuh kesabaran, pengertian dan kesetiaan mendampingi, mendoakan. Juga ananda R. Ayu Farhatut Daroini dan Jabang bayi tersayang sebagai pemacu semangat dalam penyelesaian tesis ini
14. Saudara, ipar dan handai taulan, utamanya Ni'matul Luaily, S.Pd, Zainal Arifin, S.Pd, Faishol, Kholis, Ita, Musoffa Azmi, Aris S, David, Nia dan lainnya.
15. Teman-teman PMIH baik di SPP maupun di HET. Utamanya Laely, Reymond, Riyal, Suroso, Soleh dan tlang-tlung sukses selalu.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu demi kesempurnaan tesis ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan.

Akhirnya semoga Allah, SWT Yang Maha Agung memberikan anugerah dan mencatat sebagai amal ibadah serta menggantinya dengan nikmat yang lebih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis ini dapat terselesaikan.

Semarang, 28 Agustus 2008

Saiful Abdullah, SH

## ABSTRAK

Meningkatnya masalah-masalah kejahatan dan kekerasan yang berlatar belakang agama dan kepercayaan, terutama mengenai aliran sesat sampai saat ini dinilai sangat meresahkan, dan mengawatirkan, yang jika tidak ditanggulangi, diawatirkan akan menimbulkan perpecahan di kalangan anggota keluarga dan masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bertolak dari hal tersebut diatas, substansi permasalahannya ada dua, yaitu kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang maupun kebijakan non penal dalam menanggulangi aliran sesat. Dua permasalahan pokok ini pada intinya ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang, maupun untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan non penal dalam menanggulangi aliran sesat

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/ horisontal, dan sistemik hukum diterapkan. Sedangkan, pendekatan yuridis empiris pada prinsipnya hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan secara empiris yang teramati dalam pengalaman.

Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini maka kebijakan penanggulangan aliran sesat dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama UU No 1 Pnps 1965. Sedangkan upaya antisipatif di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkut-paut dengannya. Sedangkan upaya *non penal* dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan agama, budaya/kultural, moral/edukatif sebagai upaya preventif dengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus penguatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pemantapan keyakinan terhadap agama melalui pendidikan agama.

Konsepsi kebijakan penanggulangan aliran sesat adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan *non penal* dan *penal* itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh dan suburnya aliran sesat di Indonesia. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan, umat dapat hidup berampingan secara damai dalam menjalankan agama, keyakinan, ibadah dan kepercayaannya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Aliran Sesat, Kebijakan Hukum Pidana (*penal*) dan Kebijakan Non Hukum Pidana (*non penal*)



## ABSTRACT

The increasing of problem of hardness and badness which [is] have religion background [to] and trust, especially [regarding/ hit] errant stream [is] till now assessed [by] very is freting, and menghawatirkan, what [is] otherwise overcome, dihawatirkan will generate dissolution among family member and society, even life of nation and state.

Starting from [the] mentioned above, its problems subtansi there [is] two , that is policy of criminal law in overcoming errant stream to in this time and for moment to come and also policy of [is non penal in overcoming errant stream. Two problems of this fundamental [at] its nucleus;core [is] addressed to know and analyse policy of criminal law in overcoming errant stream to in this time and to a period of/to to come, and also to know and analyse policy of [is non penal in overcoming errant stream

This research [is] executed by using analytical descriptive method with approach of normatif yuridis and of yuridis empirical. Approach of normatif yuridis used to know how far principle of justices, vertical synchronization/ horizontal, and systematical [of] law applied. While, approach of empirical yuridis in principle punish conception by sosiologis as empirical symptom able to perceive in life empirically perceived in experience

From result of research [in] earning that in this time hence policy of penanggulangan of errant stream can be [done/conducted] by using criminal law ( penal) by using Criminal Code ( KUHP) and also [code/law] outside KUHP, especially UU No 1 Pnps 1965. While anticipative effort in the future can be [done/conducted] with anticipation of yuridis, that is drawing up various regulation which related to with him. While effort of [is non penal can be gone through by [doing/conducting] approach of religion, cultural / cultural, moral / edukatif as effort of preventif by with refer to activity program with strong focus, cultivation of august ethic kindness value, social ethics, and also stabilization of confidence to religion [pass/through] education of religion

Conception policy of penanggulangan of errant stream [is] to integrate and activity mengharmonisasikan or policy of [is non and penal of penal that up at emphasis or reduction of potential factors to grow and its fertility [of] errant stream in Indonesia. With integrating approach this is expected , ummat earn life of berampingan in peace in running religion, confidence, religious service and [his/its] trust as mentioned in Constitution 1945

Keyword: Errant Stream, Criminal Law Policy (*penal*) and Non Criminal Law Policy( non penal)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK .....	
ABSTRACT .....	
DAFTAR ISI.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	22
1. Metode Pendekatan.....	22
2. Jenis dan Sumber Data .....	22
3. Metode Pengumpulan Data.....	23
4. Metode Analisa Data.....	24
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
<b>A. LANDASAN PEMAHAMAN KEBIJAKAN</b>	
<b>HUKUM PIDANA TERHADAP ALIRAN SESAT.....</b>	<b>25</b>
A.1. Pengertian kebijakan .....	25
A.2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	34
A.3. Ruang Lingkup Kebijakan hukum pidana	
Terhadap Aliran Sesat.....	45
A.3.1. Pengertian Agama, Aliran Sesat dan Teori	

Perlindungan Agama .....	45
A.3.2. Ruang lingkup delik-delik agama	
terhadap aliran sesat.....	52
A.3.3. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana Terhadap	
Aliran Sesat.....	61
 B. LANDASAN PEMAHAMAN TENTANG KEBIJAKAN	
(UPAYA) NON PENAL TERHADAP ALIRAN SESAT.....	67
B.1. Pengertian Kebijakan Non Penal.....	67
B.2. Ruang Lingkup Kebijakan (Upaya) Non Penal	
Terhadap Aliran Sesat.....	67
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	87
A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL) DALAM	
PENANGGULANGAN ALIRAN SESAT .....	87
A.1. Kebijakan hukum pidana terhadap aliran sesat saat ini .....	87
A.1.1. Kebijakan Menurut UU No 1 Pnps 1965 .....	90
a. Sejarah dan Landasan Yuridis .....	90
b. Tugas dan Fungsi Institusi Pemerintah Dalam	
Penanggulangan Aliran Sesat .....	101
1. Menteri Agama (Departemen Agama) .....	105
2. Menteri/ Jaksa Agung (Kejaksaan RI) .....	106
3. Menteri Dalam Negeri (Departemen Dalam Negeri). .....	107
c. Mekanisme Penanggulangan Aliran Sesat .....	116
d. Tindakan Pemerintah Terhadap Aliran Sesat .....	132
A.1.2 Kebijakan Menurut Pasal 156 KUHP .....	147
A.1.3 Kebijakan hukum pidana terhadap aliran sesat saat ini .....	154
A.2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Aliran Sesat	
Yang Akan Datang.....	165
A.2.1. Konsep KUHP .....	166
A.2.2. Penanggulangan Aliran Sesat Dalam Perbandingan.....	173
A.2.3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi	
Aliran Sesat Yang Akan Datang.....	184

<b>B. KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN ALIRAN SESAT .....</b>	<b>206</b>
<b>B.1. Penelusuran Historis Kebijakan <i>Non penal</i>.....</b>	<b>206</b>
<b>B.2. Kebijakan Pendekatan Non Penal Terhadap Aliran Sesat .....</b>	<b>221</b>
<b>B. 2.1 Pendekatan Pendidikan/ Edukatif .....</b>	<b>231</b>
<b>B. 2.2 Pendekatan Kultural .....</b>	<b>239</b>
a. Komitmen bersama.....	239
b. Pendekatan Dakwah .....	244
c. Pendekatan dialog .....	249
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>263</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>263</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>265</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>267</b>

# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL) DAN NON HUKUM PIDANA (NON PENAL) DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bagi setiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadapnya; maka berlombalah kamu dalam mengejar kebaikan. Di manapun kamu berada, Allah akan menghimpun kamu karena Allah berkuasa atas segalanya. (Al-Qur'an, Surat Al Baqoroh; 148)<sup>1</sup>.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan dan peranan yang penting, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Pasal 29 UUD 1945 menentukan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>2</sup>

Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) menyatakan;

"Semua orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk mengambil atau

---

<sup>1</sup> **Al –Qur'an dan terjemahnya.** Mujamma' Khadim al Haramain Asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at aal Mús.-haf asy-Syarif, Medinah al Munawwaroh, 1971, hal 38.

<sup>2</sup> **Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR No II/MPR/1978**, BP-7 Pusat, Jakarta 1993 hal 7. Muh. Yamin memberikan tafsir bahwa Negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukanlah negara teokrasi, negara bukanlah negara agama, bukan negara yang berdasarkan pada agama tertentu saja. Lihat Krissantono ED, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1976, hal. 27.

memeluk agama atau kepercayaan sesuai pilihannya, dan kebebasan, baik secara individual atau bersama-sama dan di ranah umum maupun privat, untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam pemujaan, pelaksanaan perintah agama, praktek dan pengajaran”.<sup>3</sup>

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, kebebasan beragama dan menjalankan agamanya sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, sepanjang sejarah keberagaman hidup dan pemikiran manusia dalam beragama, jalan untuk menemukan Tuhan dan agama itu tidak selalu mulus dan sampai pada sasaran yang dituju.

Sejarah pemikiran filsafat dan perkembangan-perkembangan agama di dunia, hampir bisa dipastikan terdapat sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual-ritual menyimpang atau *nyeleneh* dari agama yang dianutnya. Akibatnya, selalu ada pihak yang dinyatakan salah, *sesat* menyimpang dan keluar dari rel keagamaan umum.

Istilah *Aliran sesat* terdiri dari dua suku kata, yakni ”*aliran*” dan ”*sesat*”.

Suku kata pertama adalah ”*Aliran*”, artinya; bergerak maju, meleleh, berpindah tempat secara beramai-ramai, yang mengalir, sungai kecil, saluran untuk benda cair yang mengalir.<sup>4</sup> Padanan katanya adalah ”*madzhab*”,<sup>5</sup> ”paham”<sup>6</sup>, ”*Sekte*”,<sup>7</sup> selanjutnya diartikan suatu haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan kelompok tertentu dalam agama.

---

<sup>3</sup> Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik*, Esai-esai pilihan, ELSAM, Jakarta 2001, hal 241

<sup>4</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta 1990, hal 22, 836, 831

<sup>5</sup> dapat diartikan sebagai jalan. Lihat, Hussein Bahreisj, **Kamus Lengkap Pengetahuan Islam Populer**, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1995: hal 192

<sup>6</sup> dapat diartikan sebagai haluan, pendapat, pendirian dan lain sebagainya. Lihat, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, 1990. op.cit. hal 636

<sup>7</sup> sebuah **kelompok** keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Lihat, "[http:// id.wikipedia.org/wiki/Sekte](http://id.wikipedia.org/wiki/Sekte)" diakses 2 Januari 2007

Padanan kata untuk “sekte” dalam bahasa-bahasa Eropa selain Inggris, seperti misalnya “*secte*”, “*secta*”, “*sekta*”, atau “*sekte*”, digunakan untuk merujuk kepada sekte keagamaan atau politik yang berbahaya, dalam pengertian yang sama ketika orang di negara-negara berbahasa Inggris menggunakan kata *kultus* (*cult*).<sup>8</sup>

Selain itu, di Amerika Latin, kata ini seringkali digunakan untuk merujuk kelompok keagamaan non-Katolik Roma manapun, tak peduli berapa besar kelompok itu, seringkali dengan konotasi negatif yang sama yang dimiliki kata “kultus” dalam bahasa Inggris. Demikian pula di beberapa negara Eropa di mana Protestanisme tidak pernah benar-benar populer. Gereja-gereja Ortodoks (baik Yunani maupun Katolik) sering menggambarkan kelompok-kelompok Protestan (khususnya yang lebih kecil) sebagai sekte. Hal ini, antara lain, tampak di Rusia, Ukraina, Belarus dan Polandia.<sup>9</sup>

Selanjutnya suku kata kedua adalah “*sesat*” artinya; salah jalan, tidak melalui jalan yang benar, salah, keliru, menyimpang dari kebenaran.<sup>10</sup> Padanan katanya dalam berbagai bahasa asing adalah “*dalal*”<sup>11</sup>, “*bid’ah*”<sup>12</sup>, “*Heresy*”<sup>13</sup>. Term sesat yang disebut dalam Al-Qur’an sebanyak

---

<sup>8</sup> Lihat, "<http://id.wikipedia.org/wiki/Sekte>" diakses 2 Januari 2007

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta 1990, hal 22, 836, 831

<sup>11</sup> Berasal dari bahasa Arab artinya berbelok dari jalan yang benar, menyimpang dari kebenaran. Lihat, Attabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003: hal 1210

<sup>12</sup> Secara umum, bid'ah bermakna melawan ajaran asli suatu agama (artinya mencipta sesuatu yang baru dan disandarkan pada perkara agama/ibadah). Bidah merupakan pelanggaran yang sangat besar dari sisi melampaui batasan-batasan hukum Allah dalam membuat syariat, karena sangatlah jelas bahwa hal ini menyalahi dalam meyakini kesempurnaan syariat. "[http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran\\_sesat](http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_sesat)", diakses 19 Januari 2008

<sup>13</sup> Kata "heresy" lazim digunakan dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, αἵρεσις, *haireisis* (dari αἵρεομαι, *haireomai*, "memilih"), yang berarti *pilihan* keyakinan atau *faksi* dari

191 kali, memiliki pengertian yang bervariasi. Sesat dengan pengertian berpaling dari jalan yang benar dan lurus dan sebagai lawan dari hidayah.<sup>14</sup>

Singkatnya, *Aliran sesat* secara sederhana dapat diartikan sebagai haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan sekte/ kelompok tertentu dalam agama yang menyimpang dari kebenaran<sup>15</sup>. Al-qur'an surat Al-Fatihah ayat 6-7 menyatakan; “ Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat”<sup>16</sup>.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, dalam perspektif deskripsi sosiologis [Max Weber](#) dan [Ernst Troeltsch](#) (1931) menyatakan;

Dalam [tipologi gereja-sekte](#) mereka digambarkan sebagai kelompok-kelompok keagamaan yang baru terbentuk untuk memprotes unsur-unsur dari agama asalnya (biasanya suatu [denominasi](#)). Motivasinya cenderung terletak dalam tuduhan kemurtadan atau [ajaran sesat](#) dalam denominasi asalnya. Mereka seringkali memprotes kecenderungan-kecenderungan liberal dalam perkembangan denominasi dan menganjurkan umat untuk kembali ke agama yang sejati.<sup>17</sup>

Selanjutnya, dalam sosiologi agama, aliran sesat/ sekte umumnya adalah sebuah [kelompok](#) keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari

---

pemeluk yang melawan. Menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan doktrin Katolik atau Ortodok Gereja Kristen, atau, dalam pengertian yang lebih luas, dari gereja, keyakinan, atau sistem keagamaan manapun, yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar." [http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran\\_sesat](http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_sesat), diakses 19 Januari 2008.

<sup>14</sup> Aibdi Rahmat, *Kesesatan Dalam Perspektif Al-Qur'an, Kajian Tematik terhadap istilah dalam Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007 hal 10

<sup>15</sup> Al- Mahalliy, Imam Jalaluddin, dan As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Ayat*. Sinar Baru, Bandung 1990, hal 3

<sup>16</sup> Adapun orang yang sesat, ialah mereka yang tidak betul kepercayaannya, atau tidak betul pekerjaan dan amal ibadatnya, serta rusak budi pekertinya. Lihat, Al Qur'an dan Tafsirnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemaha/ Pentafsir Al Qur'an, Departemen Agama, 1975 hal 42

<sup>17</sup> Diperoleh dari "<http://id.wikipedia.org/wiki/Sekte>" 2 Januari 2007



kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Dalam sejarah, penggunaannya di lingkungan agama Kristen mengandung konotasi *penghinaan* dan biasanya merujuk kepada suatu gerakan yang menganut keyakinan atau ajaran yang sesat dan yang seringkali menyimpang dari ajaran dan praktik ortodoks.<sup>18</sup>

Sosiolog Amerika [Rodney Stark](#) dan [William Sims Bainbridge](#) menegaskan:

“Sekte-sekte mengklaim dirinya sebagai kelompok yang otentik dan bersih, sebagai versi dari iman yang telah diperbarui, yang daripadanya mereka memisahkan diri, sekte *memiliki tingkat ketegangan yang tinggi dengan lingkungan sekitarnya*”.<sup>19</sup>

Akhirnya, perbedaan pemikiran, pemahaman dan keyakinan terhadap agama, disamping membawa dampak positif,<sup>20</sup> tetapi juga membawa dampak negatif,<sup>21</sup> yaitu sebagai faktor penghancur sendi-sendi sosial masyarakat apabila perbedaan pemahaman itu berimplikasi pada sikap mencari benarnya sendiri.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, UU No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama, <sup>22</sup> intinya

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Dalam hadits Rosulullah dinyatakan bahwa perbedaan diantara ulama' adalah rahmat. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa perbedaan pendapat diantara orang-orang yang alim justru merupakan sesuatu hal yang baik. Jika dikaitkan dengan kondisi terkini dapat diartikan bahwa dengan adanya perbedaan diantara para alim ulama dapat berimplikasi pada terbukanya kebebasan berpikir, berekspresi dan menyampaikan pendapat secara demokratis

<sup>21</sup> Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kepincangan-kepincangan dalam masyarakat. Kepincangan mana dikarenakan menyangkut hal-hal yang berlawanan dan tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat

<sup>22</sup> Penjelasan pasal 1 UU No 1 Tahun 1965 dinyatakan bahwa agama-agama di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Hal ini bukan berarti bahwa agama-agama selain itu dilarang, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1965 dan perundangan lain.

menyatakan aliran sesat sebagai “aliran terlarang”, yakni apabila seseorang/ organisasi melakukan kegiatan terlarang<sup>23</sup> sebagaimana pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 yang menyatakan;

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; ***penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.***

Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga pemegang otoritas atas tafsir agama di Indonesia, mengeluarkan fatwa dan daftar aliran kepercayaan yang dianggap sesat dan menyesatkan,<sup>24</sup> diantara aliran yang dianggap menyesatkan itu antara lain Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa, dan Lia Eden.<sup>25</sup>

Bertitik tolak fatwa MUI dan pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama, maka *aliran sesat* secara sederhana dapat diartikan sebagai haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan sekte tertentu dalam agama yang menyimpang dari kebenaran, dengan kata lain dapat diartikan/ diidentikkan sebagai paham yang menyimpang pada pokok-pokok ajaran agama, khususnya agama-agama di Indonesia, sehingga dalam istilah yuridisnya dikenal dengan

---

<sup>23</sup> Dapat atau tidaknya suatu paham dinyatakan sebagai aliran sesat atau aliran terlarang, pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 1 Tahun 1965 menyatakan bahwa, “Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang (garis bawah dari penulis), satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

<sup>24</sup> Jawa Pos, ***Pelarangan Al-Qiyadah***. 31 Oktober 2007 hal 4

<sup>25</sup> TEMPO Interaktif, Jakarta 02 November 2007 | 23:45 WIB

istilah ”*aliran terlarang*”, bukan ”*aliran sesat*” yang selama ini dikenal oleh masyarakat secara umum.

Puncaknya, selain MUI mengeluarkan 10 fatwa sesat untuk aliran yang dianggap melanggar syariat Islam<sup>26</sup>, di antara pemimpin sekte atau aliran yang dituduh sesat seperti Lia Aminuddin, diadili oleh pemerintah<sup>27</sup> dengan tuduhan melakukan penodaan, penyimpangan agama<sup>28</sup>. Nasib sama juga dialami Yusman Roy yang mengajarkan solat dua bahasa, sehingga yang bersangkutan didakwa melanggar pasal 156 KUHP dan pasal 157 KUHP.<sup>29</sup>

Walaupun di antara pemimpin sekte atau aliran yang dituduh sesat diadili dan diberi sangsi pidana dengan tuduhan melakukan penodaan, penyimpangan agama, namun pengikutnya masih tetap patuh dan setia. Bahkan selepas dari penjara, yang bersangkutan tetap bertekad melanjutkan ajaran dan keyakinan bersama komunitasnya.<sup>30</sup> Akibatnya, sebagian masyarakat yang tidak puas, melakukan tindakan main hakim sendiri berupa serangkaian tindakan anarkis seperti eksekusi paksa massa, pengrusakan, pembakaran sarana fasilitas ibadah dan tindakan kekerasan lainnya.

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat umumnya dilakukan karena salah satu penyebabnya adalah ketidak tegasan pemerintah menindak

---

<sup>26</sup> <http://www.ppi-india.org>, 21 September 2005

<sup>27</sup> Negara (pemerintah) dalam perspektif **L.V. Ballard** memiliki tujuan memelihara ketertiban dan peradaban, juga melakukan serangkaian kebijakan ketertiban, perlindungan, mendamaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk aliran sesat sebagai masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal 45

<sup>28</sup> M. Yuanda Zara, *Aliran-aliran Sesat di Indonesia*, Banyu Media, Yogyakarta, 2007 hal. 82

<sup>29</sup> A. Yogaswara, Maulana Ahmad jalidu, *Aliran Sesat dan Nabi-nabi Palsu*, Narasi, Yogyakarta 2008, hal 93

<sup>30</sup> M. Yuanda Zara, 2007, op.cit, hal 45

para pelaku,<sup>31</sup> selain itu substansi ajarannya<sup>32</sup> dinilai menimbulkan keresahan, kekhawatiran, perpecahan di kalangan anggota keluarga dan masyarakat.

Kondisi di atas tentu menimbulkan kontroversi, diversi opini di kalangan masyarakat luas, ada yang setuju ada yang tidak setuju terhadap MUI dan pemerintah dalam menghadapi masalah aliran sesat. Artinya, kebijakan hukum pidana<sup>33</sup> sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang seharusnya menurut Sudarto sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan,<sup>34</sup> disamping secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*),<sup>35</sup> namun usaha dan upaya tersebut, seolah-olah masih belum terpenuhi, indikasinya adalah meningkatnya masalah-masalah kejahatan<sup>36</sup> dan kekerasan-kekerasan yang berlatar belakang agama dan kepercayaan.

Pemerintah dan semua pihak seharusnya mencoba mencari solusi yang baik dalam rangka mensintesis antara hak-hak individu (*human rights*) dan hak-hak komunal (*communal rights*) dengan tetap menjaga kepentingan politik negara (*state policy*), dengan kata lain, sepatutnya hukum pidana di

---

<sup>31</sup> Gatra edisi VI, 13 Maret 2008

<sup>32</sup> Khususnya menurut agama Islam dinilai mendekonstruksi *ushuluddin* (pokok-pokok agama) khususnya *rukun iman* dan *rukun Islam*, mengubah hal-hal yang berkaitan dengan *furu'iyah* dalam keagamaan, serta mengubah aspek yang berkaitan dengan akidah, seperti mengubah bacaan syahadat atau tauhid dan lain sebagainya

<sup>33</sup> Hukum pidana difungsikan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Prakteknya, delik-delik agama digunakan untuk menanggulangi aliran sesat.

<sup>34</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung 1996 hal. 38.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief. 1994. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 2

<sup>36</sup> Pada sisi lain, pelaku yang telah divonis sesat merasa hak-hak dasarnya berupa bebas untuk memeluk agama dan keyakinannya tidak dipenuhi oleh undang-undang

satu sisi memproteksi hak-hak individual, dan kepentingan publik tetapi di sisi lain juga memproteksi kepentingan negara.<sup>37</sup>

Kenyataan di atas harus disadari sebagai persoalan yang mendasar dan mendesak yang harus dibenahi dalam praktek bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. *Mendasar*, karena menyangkut harkat dan martabat manusia. *Mendesak*, karena yang dipertaruhkan, eksistensi kekinian manusia, selain tentu saja masa depan kemanusiaan kita. Sebenarnya yang disakiti bukan hanya manusia, tetapi juga Pencipta manusia. Harkat dan martabat manusia sebagai citra Sang Khalik dilecehkan oleh anak-anak bangsa yang secara *de jure* mengklaim dirinya sebagai bangsa yang beriman, manusiawi, demokratis dan berkeadilan sosial.

Bertolak dari hal demikian, diperlukan kajian mendalam untuk setiap langkah kebijakan, terutama menyangkut kebijakan hukum pidana (*Penal*) dan kebijakan non hukum pidana (*non penal*) terhadap aliran sesat sebagai bagian dari masalah-masalah “agama” dan “kehidupan/ berhubungan dengan agama”. Karena bagaimanapun juga kajian ini pada akhirnya diharapkan bisa memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi kerukunan hidup beragama berdampingan secara damai dalam rangka menopang pencapaian cita hukum dan tujuan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>37</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Mengkritisi RUU KUHPidana Dalam Perspektif HAM*. Makalah. Dalam Beberapa tulisan Terkait kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP. Bahan Bacaan untuk *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (*Democratic Reform Support Program*) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: “Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”. Hotel Ibis Tamrin, Jakarta 28 September 2006 hal 47.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang diatas, substansi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang?
2. Bagaimanakah kebijakan non penal dalam menanggulangi aliran sesat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman sebagai berikut:

1. untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang.
2. untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan non penal dalam menanggulangi aliran sesat

## **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat akan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah-masalah delik agama, khususnya mengenai *aliran sesat*

## 2. Kontribusi Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang penanganan hukum, khususnya hukum pidana dalam rangka penanggulangan aliran sesat.
- b. Bagi pembuat dan pemegang kebijakan legislasi termasuk aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan demi terciptanya improvisasi dan reformasi hukum untuk lebih tanggap dan kritis akan adanya perubahan dan perkembangan, karena perubahan, perkembangan dan perilaku masyarakat menuntut pula hukum untuk proaktif, progresif, terlebih lagi di era reformasi.
- c. Menambah bahan kepustakaan di bidang hukum pidana, khususnya hukum yang mengatur kehidupan beragama
- d. Penelitian ini juga memberikan manfaat dalam penanggulangan *aliran sesat* melalui non penal, sehingga kekerasan yang berlatar belakang perbedaan pemahaman dan keyakinan dalam kehidupan beragama dapat diantisipasi sedini mungkin, dan tujuan hidup berdampingan secara damai bisa tercapai.
- e. Dapat menciptakan model pengaturan dan perlindungan hukum terhadap kehidupan beragama yang berdampingan secara damai

## E. Kerangka Teori

Kalau ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai institusi pencarian kebenaran, maka pada waktu yang sama harus dikatakan bahwa pencarian kebenaran itu adalah proses yang dramatis. Ilmu pengetahuan memang

berburu kebenaran, tetapi sekaligus juga disadari, bahwa kebenaran itu sendiri, kebenaran absolut, tidak pernah akan ditemukan. Memang suatu yang tragis, tetapi benar, karena hanya Allah tempat kebenaran yang sempurna.<sup>38</sup>

Bertolak dari hal tersebut di atas, dalam rangka menanggulangi *aliran sesat* yang semakin marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, diperlukan suatu ilmu yang dapat memberi solusi antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya kerusuhan maupun ketidak stabilan sosial, sehingga tujuan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan pembangunan nasional tidak terhambat.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan yang penting, dan mempunyai peranan, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Munawir Sadzali menyatakan, “ Orde Baru telah memberikan penafsiran terhadap Pancasila, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Tafsiran tersebut diikuti dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama”<sup>39</sup>

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Di samping itu pemerintah juga berkewajiban memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara, meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 15 Desember 2000, hal 11

<sup>39</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*. Jakarta Press, Jakarta, 1990, hal 210



mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama.

Selanjutnya pemerintah juga berkewajiban melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Bahwa walaupun secara ideal Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan yang penting, namun dalam praktek kehidupan beragama sampai saat ini masih mengalami berbagai masalah yang masih sulit untuk diatasi, diantaranya adalah adanya *aliran sesat* yang makin marak terjadi di Indonesia.

**Soedarto**<sup>40</sup> menyatakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defense planning*. Selanjutnya *social defense planning* ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Bertolak dari pendapat di atas, secara singkat tujuan-tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang. 2000.hlm 32

<sup>41</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, hal 64-66

- a. pemeliharaan tertib masyarakat
- b. perlindungan masyarakat dari kejahatan
- c. memasyarakatkan kembali para pelanggar, dan
- d. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial.

Pada posisi inilah, agama merupakan bagian dari tiga kepentingan yang harus mendapat perlindungan. Artinya, jika kepentingan itu dilanggar, pasti merugikan salah satu atau bahkan seluruh kepentingan sosial.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi, yaitu; kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.<sup>42</sup> Oleh karena itu agama sebagai bagian dari tiga kepentingan diatas, wajar kalau kemudian negara memberikan perlindungan secara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam perspektif inilah hukum menjadi aturan sekaligus norma perilaku menjadi sangat penting, oleh karena itu hukum dituntut untuk melingkupinya. Aturan hukum tidaklah berada di ruang hampa, tetapi hukum ada dan bergerak di dalam komunitas sosial yang disebut masyarakat, sehingga hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dari dinamika sosial perkembangan masyarakat sebagai ruang gerak dan faktor pembentuknya. Mengutip pendapat **Von Savigny**, "Hukum merupakan perwujudan dari

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Eresco, Bandung 1986, hal 6

kesadaran masyarakat dan semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang”<sup>43</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Oemar Senoadji** mengemukakan tiga teori mengenai delik agama, yaitu,<sup>44</sup>

1. Friedensschutz Theorie, yaitu yang memandang ketertiban/ ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi
2. Gefuhlsschutz Theorie, yaitu teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi
3. Religionsschutz Theorie, yaitu teori yang memandang agama itu ansich sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/ diamankan oleh negara

Teori di atas, secara tidak langsung memberikan sinyal bahwa harus ada paradigma baru, cara pandang baru dan kebijakan secara menyeluruh, terutama kebijakan kriminal yang harus segera ditempuh oleh negara dalam menyelesaikan berbagai masalah, terutama *aliran sesat* yang saat ini makin sering terjadi.

Terminologi kebijakan diambil dari istilah asing yaitu bahasa Inggris “*policy*” dan Bahasa belanda “*Politiek*”. Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris: “*policy*” atau dalam bahasa Belanda: “*politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian

---

<sup>43</sup> Otje Salman, dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. PT Alumni, Bandung, 2004, hal 1

<sup>44</sup> Oemar Senoadji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*. Erlangga, Jakarta 1976 hal 75

hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga Negara) <sup>45</sup>

Terkait dengan kebijakan kriminal, Sudarto<sup>46</sup> mengemukakan tiga pengertian sebagai berikut:

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

G P. Hoefnagels<sup>47</sup> menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu;

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan
4. dan pemidanaan melalui media masa ( *influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Berdasarkan pendapat G P. Hoefnagels diatas dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan kejahatan (termasuk aliran sesat) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.

Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

---

<sup>45</sup> Al. wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hal 10

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Op.cit. hal 1

<sup>47</sup> Ibid hal 48

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”<sup>48</sup>. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Terkait dengan masalah ini, harus disadari bahwa sampai saat ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia warisan Belanda (Wvs) (KUHP) sebagai sarana pengendalian sosial, yaitu dengan sanksinya dijadikan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya untuk mengatur dan memelihara ketentraman antar dan intra umat beragama dianggap ketinggalan zaman, oleh karena itu sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia masih tetap harus diciptakan.<sup>49</sup> Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beriktikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukan semata mata pekerjaan legislator ( perundang-undangan ) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar dibidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Pada uraian tersebut tampak

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hal 28. Dalam hal ini marc Ancel mendefinisikan penal policy sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (dalam hal ini hukum pidana ) dirumuskan secara lebih baik”

<sup>49</sup> Dalam perspektif ini Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Hukum Progresif dan Ilmu Hukum Progresif barangkali tidak bisa disebut sebagai tipe hukum yang khas dan selesai, melainkan merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak ke dalam status quo, sehingga menjadi mandek (*stagnant*). Ia selalu ingin setia pada asas besar, bahwa “hukum adalah untuk manusia”, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, vol. 2 nomor 1/ April/ 2006 hal 19-20

bahwa ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.

Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut;<sup>50</sup>

- (1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila;
- (2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat;
- (3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- (4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).

Apabila dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan sarana penal bukan kebijakan yang strategis, karena kebijakan mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisi-sisi negatif) antara lain<sup>51</sup>;

- a. secara dogmatis/idealis sanksi pidana merupakan sanksi yang paling tajam/ keras;
- b. secara fungsional/ pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan pendukung yang lebih bervariasi;
- c. sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat *kontradiktif/ paradoksal* dan mengandung unsur/ atau efek samping yang negatif;

---

<sup>50</sup> Sudarto, 1981 op.cit. hal. 36-40

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op.Cit , hal 139-140

- d. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am sympton*" (menanggulangi/ menyembuhkan gejala). Jadi hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif" karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan hukum pidana ;
- e. hukum/ sanksi hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya) ;
- f. sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/ personal, tidak bersifat struktural atau fungsional;
- g. keefektifan pidana masih tergantung pada banyak faktor dan oleh karena itu masih sering dipermasalahkan.

Jadi, jika dilihat dari sudut kebijakan, maka penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.<sup>52</sup> Hal ini penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan kejahatan dalam masyarakat karena sumber/penyebab terjadinya perilaku menyimpang, terutama dalam kehidupan beragama sangat kompleks, dan jika hanya bertumpu pada hukum pidana/ penal tentu belum cukup.

Antisipasi terhadap *aliran sesat* dan penanggulangan terhadap kejahatan dalam kehidupan beragama tidak memadai jika hanya dengan pendekatan penal, karena aliran sesat semata-mata bukan masalah yuridis, tetapi banyak faktor terlibat didalamnya seperti faktor nilai kemasyarakatan, ekonomi, politik bahkan budaya, disamping masalah psikiatrik dan psikologis, yaitu masalah ekonomi, ketidakadilan, ketidak seimbangan sosial, pendidikan, dan kultural.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan *aliran sesat*) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana

---

<sup>52</sup> Ibid, hal 48

“penal”), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Dengan demikian, jika *Aliran sesat* ini diasumsikan/ dipersamakan sebagai bagian dari “*tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana yang berhubungan dengan agama*”, maka adalah wajar jika upaya penanggulangannya ditempuh melalui **pendekatan agama** (*religion Approach*) di samping **pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif**, dan lain sebagainya.

Paradigma kebijakan integral di atas pada dasarnya tidak lepas dari cara pandang terhadap kejahatan sebagai masalah kemanusiaan sekaligus kemasyarakatan. Oleh karena itu Barda Nawawi Arief menyatakan,<sup>53</sup>

1. ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem poleksosbud;
2. ada keterpaduan antara "*treatment of offenders*" (dengan pidana/ tindakan) dan "*treatment of society*".
3. ada keterpaduan antara "penyembuhan/pengobatan simptomatik" dan "penyembuhan/pengobatan kausatif";
4. ada keterpaduan antara "*treatment of offenders*" dan "*treatment of the victim*";
5. ada keterpaduan antara "individual/personal responsibility" dengan "structural/functional responsibility";
6. ada keterpaduan antara sarana penal dan non-penal;
7. ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal/ tradisional; keterpaduan antara "*legal system*" dan "*extra-legal system*";
8. ada keterpaduan antara "pendekatan kebijakan" ("*policy oriented approach*") dan "pendekatan nilai" ("*value oriented approach*").

Konkretnya, kebijakan kriminal itu harus dilakukan dengan pendekatan terpadu (*integrated approach*) antara politik, kriminal dan sosial serta keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebjkn Hukum Pidana dalam Penanggulangnn Kejahatan*”, Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 82-83.



penal. Disamping adanya keterbatasan apabila hanya dipergunakan penal saja, sarana non penal sangat diperlukan karena secara tidak langsung memberi dampak/ pengaruh preventif terhadap kejahatan. Oleh karena itu upaya non penal yang bisa dilakukan misalnya:

1. Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia
2. memfasilitasi **perkembangan keberagamaan** dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa;
3. **mencegah konflik sosial** antar umat beragama dan meningkatkan ( “meningkatkan kerukunan” ) antar umat bangsa.

Terkait dengan penulisan ini, benar apa yang dinyatakan dalam Al-Quran , “ Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya *Rabbmu* Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS- An-Nahl 125).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Imam Jalaluddin Al- Mahalliy, dan As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, op.cit 1990, hal 118-119

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.<sup>55</sup> Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/ horisontal, dan sistemik hukum diterapkan. Pendekatan yuridis empiris dalam perspektif Soetandyo Wigjosoebroto, pada prinsipnya hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan secara empiris yang teramati dalam pengalaman.<sup>56</sup> Untuk memudahkan penelusuran data maka dapat di gunakan pendekatan penegakan hukum berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>57</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, keduanya saling melengkapi dan mendukung. Sumber data, diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer di samping ada yang bersumber dari pengalaman-pengalaman, yakni apa yang dilihat dan dirasakan sendiri oleh penulis, juga diperoleh dari wawancara terhadap para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penanggulangan aliran sesat.

---

<sup>55</sup> Pendekatan demikian dapat pula disebut pendekatan *doctrinal* atau yang biasa disebut pendekatan *normative* dan pendekatan *non doctrinal* atau yang biasa disebut dengan pendekatan empirik. Lihat Kamri Ahmad, ***Peranan Masyarakat dalam penyelesaian Tindak Pidana Di Sulawesi Selatan***, Ringkasan Desertasi, disampaikan pada Rapat Senat Terbatas Ujian Doktor Dalam Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip, tanggal 30 Mei 2007, hal 16

<sup>56</sup> Lihat, Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum: *Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM HUMA, Jakarta 2002, hal 146

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Cet. III, Jakarta, 1993;

Data Sekunder : berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpul data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan penggunaan daftar pertanyaan (*kuisisioner*).<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indept Interview*) terhadap para narasumber dan studi kepustakaan.

Penelitian ini berusaha untuk menggunakan data primer dan data sekunder secara sekaligus yang kiranya saling melengkapi. Pengumpulan data primer ditempuh dengan wawancara mendalam dan kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti.

Melalui teknik wawancara akan digali selengkapnya tidak hanya tentang apa yang diketahui, dialami responden, tetapi juga pendapat dan pandangan. Penetapan informan dilakukan sesuai kepentingan dan keperluan analisis. Untuk pengumpulan data sekunder ditempuh dengan studi pustaka dan studi dokumen.

---

<sup>58</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 51;

#### **4. Metode Analisa Data**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisa data dilakukan secara kualitatif. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan kajian empirik, sehingga analisa data lebih bersifat komparatif. Metode yang digunakan adalah metode induktif, kemudian mengkonstruksikan data/fakta.

#### **G. Sistematisasi Penulisan**

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, yakni BAB I sebagaimana diuraikan di depan. BAB II berisi Tinjauan Pustaka yang menjelaskan Landasan Pemahaman Tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aliran Sesat yang terdiri dari dua bagian, yaitu pengertian kebijakan hukum pidana dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana terhadap aliran sesat. dan landasan pemahaman tentang kebijakan non penal terhadap aliran sesat. Sedangkan landasan pemahaman tentang kebijakan (upaya) non penal terhadap aliran sesat, terdiri atas Pengertian Kebijakan *Non penal* dan Ruang lingkup kebijakan (upaya) Non penal Terhadap Aliran Sesat.

Bab III uraian hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Aliran Sesat saat ini dan untuk masa yang akan datang. Sedangkan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Aliran Sesat, terdiri atas bentuk-bentuk Kebijakan *Non penal* Terhadap Aliran Sesat yang pernah dilakukan dan Bentuk-bentuk Kebijakan Non Penal Yang dapat dilakukan Terhadap Aliran Sesat. Bab IV Kesimpulan yang berisi Kristalisasi hasil penelitian dan analisis data keseluruhan; dan Rekomendasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. LANDASAN PEMAHAMAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL) TERHADAP ALIRAN SESAT**

##### **A.1. Pengertian kebijakan**

Istilah kebijakan ditransfer dari bahasa Inggris: “*policy*” atau dalam bahasa Belanda: “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>59</sup>

Selain rumusan seperti di atas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberi istilah “Politik” sebagai berikut;<sup>60</sup>

- 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);

---

<sup>59</sup> Lihat: **Henry Campbell Black, et.al.,ed., Black’s Law Dictionary**, Fifth Edition, St. Paulminn West Pubicing C.O., 1979, hal1041, antara lain disebutkan bahwa Policy merupakan: The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community”.

<sup>60</sup> Lihat **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002, hal. 780

- 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
- 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan .

**Sutan Zanti Arbi** dan **Wayan Ardana**, menterjemahkan “policy” dengan istilah “kebijakan”. yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.<sup>61</sup>

Menurut **Barda Nawawi Arif** , istilah “kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Politik berarti “*acting of judging wisely, prudent*”, jadi ada unsur “*wise*” dan “*prudent*” yang berarti bijaksana. “*Politics*” berarti “*the science of the art of government*”. *Policy* berarti a) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b) *art of government*, dan c) *wise conduct*.<sup>62</sup>

Selain itu, **Al Wisnubroto** secara umum mengartikan “*policy*” sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan

---

<sup>61</sup> Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana , *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan Rajawali, Jakarta 1984: hal 65

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan , Bandung tanggal 9-13, hal. 780

(umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga Negara) <sup>63</sup>

Bertitik tolak dari berbagai pengertian di atas, diperoleh gambaran bahwa istilah “*Policy*” atau kebijakan, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “*Hikmah*”<sup>64</sup> akan ditemukan makna “Kebijaksanaan”, di dalam kebijaksanaan terkandung “sepatutnya/ seharusnya” suatu kebijakan. Dengan kata lain, bukan kebijakan kalau tidak mengandung kebijaksanaan, dan bukan kebijaksanaan jika didalamnya tidak terkandung kebijakan. Jadi, membicarakan kebijakan berarti membicarakan kebijaksanaan, demikian pula membicarakan kebijaksanaan berarti juga membicarakan kabajikan/ kebaikan. Menarik apa yang tersurat dalam Al-Qur’an;

Maka berlombalah kamu dalam **kebaikan**. Kepada Allah tempat kamu kembali, lalu ditunjukkan kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (Al-Maidah: 48) <sup>65</sup>

Bertitik tolak dari ayat tersebut di atas, terdapat sebuah ajakan untuk melakukan suatu kebaikan/ kabajikan bersama dalam sebuah komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut **Romli Atmasasmita**, bahwa perekat untuk menjadi satu bangsa (*one nation*) adalah selain ideologi, juga komitmen dan solidaritas dari elemen bangsa untuk tetap menjadi satu, dan tidak terpecah-pecahkan

---

<sup>63</sup> Al. wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, halaman 10

<sup>64</sup> Dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125 dijumpai kata “*Hikmah*”, artinya kebijaksanaan. Demikian pula rumusan dalam Pancasila dijumpai kata “*Hikmah*” sila IV menyebutkan; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah (garis bawah dari penulis) kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terdjemahnja*, Djamunu, Jakarta, 1965, hal 63, 168

atau tidak mau dipisah-pisahkan (*divide et impera*); yang diperkuat unsur kewilayahan dan diakui menurut hukum internasional.

Sedangkan perekat menjadi satu bangsa dunia atau “*international community*” adalah kesadaran akan kebersamaan dalam cita-cita dan komitmen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sebagai pasangan yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Tidak ada kesejahteraan tanpa keadilan dan sebaliknya pula tidak akan ada keadilan tanpa kesejahteraan.<sup>66</sup>

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*), merupakan dasar fundamental pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, menyiratkan sebuah cita-cita dan tujuan bersama hidup berbangsa dan bernegara. Cita-cita atau tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia adalah *terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Ini berarti, bahwa puncak dari cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merealisasikan sila kelima Pancasila dengan bertumpu pada empat sila sebelumnya.<sup>67</sup>

Untuk merealisasikan cita-cita bangsa dan negara Indonesia tersebut di atas, kemudian diimplementasikan dalam bentuk berbagai kebijakan lanjutan yang ditetapkan/ dirumuskan sebagai kebijakan sosial. Selanjutnya “kebijakan sosial” dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan

---

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, *Hubungan Negara Dan Masyarakat Dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Makalah, disampaikan pada Seminar Dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh DEPKEH HAM, Bali, 14 – 18 Juli 2003

<sup>67</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV



masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *sosial policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.<sup>68</sup>

Selanjutnya, berbagai kebijakan sosial yang bersifat organik ini (sebagai sarana pengejawantahan/ penjabaran lebih lanjut) dapat diidentifikasi dari ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasannya yang dioperasionisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kerangka dasar dan tujuan utama dari cita-cita bangsa dan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan itulah yang kemudian dikenal dengan istilah “politik hukum”.

Menurut **Sudarto**, “politik hukum” adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat pada suatu saat.
- kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai yang dicita-citakan.

Selain itu, menurut **Solly Lubis**, Politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>70</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, politik hukum yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>68</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta:1997, hal 23

<sup>69</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung 1991:hal. 159. Lihat pula, Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung 1993 hal. 20.

<sup>70</sup> Solly Lubis, *Serba-serbi Politik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hal. 49.

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Jadi jelas, bahwa kerangka dasar dan tujuan utama dari kebijakan sosial bangsa dan negara Indonesia adalah mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya terdapat rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*sosial policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat *social defence policy*.

Terkait dengan masalah ini, salah satu wujud dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*, adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Oleh karena itu dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal menurut para pakar hukum pidana dapat didefinisikan sebagai berikut;

**Marc Ancel** merumuskan sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam

menanggulangi kejahatan). Sedangkan **G.P. Hoefnagels** yang bertolak dari pendapat Marc Ancel tersebut memberikan pengertian sebagai *the rational organization of the social reaction to crime*.<sup>71</sup>

Selanjutnya **G.P. Hoefnagels** sendiri juga mengemukakan dengan berbagai rumusan seperti *criminal policy is the science of responses*, *criminal policy is the science of crime prevention*, *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime* dan *criminal policy is rational total of the responses to crime*.<sup>72</sup>

**Sudarto** mendefinisikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>73</sup> Sementara pada kesempatan yang lain beliau mengemukakan tiga pengertian sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Jadi, penegakan norma-norma sentral tersebut dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hal 2.

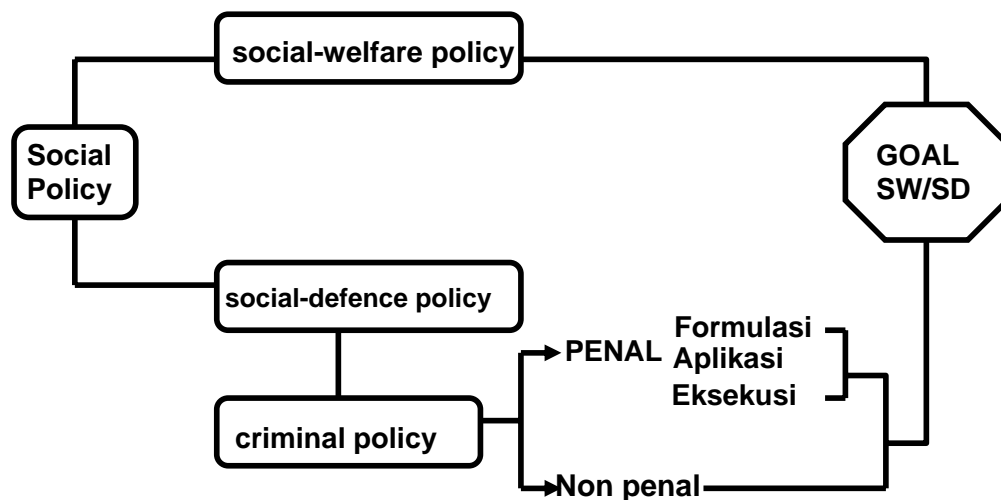
<sup>72</sup> Ibid

<sup>73</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung 1996: hal. 38.

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, 2002. Op.cit. hal 1

Selain pendapat-pendapat di atas, politik kriminal menurut **Barda Nawawi Arif** merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “*perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat*”.<sup>75</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hubungan tersebut secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>76</sup>



Skema di atas berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) “ *social welfare*” dan “*social defence* ” Kedua aspek tersebut yang sangat penting adalah aspek

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arif, 2002 Op.Cit, hal 2, lihat juga Muladi, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995 hal. 8

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung:2001, hal 74

kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.<sup>77</sup>

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.<sup>78</sup>

Selanjutnya, kebijakan penal ditinjau dari segi atau sudut bekerjanya hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari tahap perumusan pidana (kebijakan formulatif/legislatif), tahap penerapan hukum pidana (kebijakan aplikatif/yudikatif), dan tahap pelaksanaan hukum pidana (kebijakan administratif/eksekutif).

Bertitik tolak dari beberapa pendapat dan skema sebagaimana terurai, diperoleh pemahaman, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan, merupakan bagian dari kebijakan melindungi masyarakat dari kejahatan. Oleh karena itu pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) “ *social welfare*” dan “*social defence* ”. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

---

<sup>77</sup> Lihat, Barda Nawawi Arief, 2001, op.cit. hal.74

<sup>78</sup> Lihat, Barda Nawawi Arif, 2002. Op.Cit, hal. 3

## A.2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut **G P.**

**Hoefnagels**, yaitu;<sup>79</sup>

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

**Jadi**, penanggulangan kejahatan pada intinya terdiri dari dua hal pokok, yaitu pendekatan *penal* dan pendekatan *non penal*. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

**Sudarto** berpendapat, bahwa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan

---

<sup>79</sup> ibid. hal. 48

terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.<sup>80</sup>

Secara umum, substansi hukum (pidana, pen) dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial (kejahatan, pen) yang kontemporer. Hukum demikian dinamakan hukum responsif yang menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.<sup>81</sup>

Terdapat ungkapan menarik **Satjipto Rahardjo**, ” Hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum”,<sup>82</sup>. Hal ini berarti, hukum bisa diibaratkan sebagai papan petunjuk, yang selalu memperingatkan, membebaskan, dan sebagai alat untuk melayani serta mencapai tujuan manusia.

Bertolak dari pemikiran Satjipto Rahardjo di atas, hukum sebagai hasil karya manusia mencerminkan sekumpulan kehendak dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu ada beberapa teori-teori tentang tujuan hukum sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> ibid. hal 35-36

<sup>81</sup> Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Sinar Harapan, Jakarta: 1998 hal. 483.

<sup>82</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, edisi 2 April 2006 hal 20.

1. **Teori Etis**, hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Singkatnya hukum untuk mewujudkan keadilan. Tokoh teori ini adalah **Geny** yang mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan.<sup>83</sup> **Aristoteles** membagi keadilan menjadi dua yaitu "*justicia distributive*" yang menghendaki setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya serta "*Justicia Commutative*" yang menghendaki setiap orang mendapat hak yang sama banyaknya.<sup>84</sup>
2. **Teori Utilitas**, tokohnya **Jeremy Bentham**, tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*The greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak.<sup>85</sup>
3. **Teori Campuran**, tujuan hukum adalah ketertiban, karena ketertiban merupakan syarat bagi adanya masyarakat yang teratur. **Mokhtar Kusumaatmadja** mengatakan, selain ketertiban, tujuan lainnya adalah untuk mencapai keadilan secara berbeda-beda (baik isi maupun ukurannya) menurut masyarakat dan zamannya. **Purnadi Purbacaraka** dan **Soedjono Soekanto** mengatakan, tujuan hukum ialah demi kedamaian hidup antara pribadi dan ketenangan interen pribadi. **Van Apeldorn**, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. **Soebekti** berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara untuyk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya, karena mengabdikan pada tujuan Negara hukum mewujudkan keadilan dan ketertiban.<sup>86</sup>

Bertitik tolak dari teori-teori tujuan hukum di atas, pada intinya hukum (pidana) adalah untuk manusia, hukum dan masyarakat (manusia) berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengatur masyarakat bekerja di dalam masyarakat dilaksanakan oleh pula oleh masyarakat.

---

<sup>83</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989:Hal 43-44

<sup>84</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi terjemahan, Pradnya Paramita, Jakarta 2001: hal 11

<sup>85</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 1990: hal 44

<sup>86</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 74-75



Hubungan tersebut bisa bersifat simbiosis mutualistik yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum. Hal ini mensyaratkan hukum juga harus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara memiliki makna penting sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, yaitu menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.<sup>87</sup>

Selain bertujuan menciptakan tata tertib di dalam masyarakat, hukum pidana memiliki tujuan sebagai berikut,<sup>88</sup>

1. Prevensi Umum; tujuan pokok pidana adalah pencegahan agar orang-orang tidak melakukan perbuatan pidana
2. Prevensi Khusus; tujuannya pencegahan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. memperbaiki diri penjahat
4. pidana yang dijatuhkan bersifat menyingkirkan baik untuk seumur hidup atau dikenakan pidana mati oleh karena tidak mungkin diperbaiki lagi
5. memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu.

Ajaran moderen berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas tersirat hukuman-hukuman apa yang dapat

---

<sup>87</sup> Ajaran moderen berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban. Lihat Lili Rasjidi, 1990. *op.cit.* hal 65

<sup>88</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yakarta 1978 : hal 23

dijatuhkan kepada para pelanggar ketertiban, baik yang membahayakan jiwa, harta benda atau kepentingan masyarakat lainnya.<sup>89</sup>

Selanjutnya, dilihat dari hakikat tujuan keseluruhan politik kriminal maupun politik sosial, pidana jelas dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problema-problema sosial dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu wajar kalau akhirnya Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.<sup>90</sup>

Selain itu, digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Ada beberapa alasan hukum pidana sampai saat ini masih digunakan untuk menanggulangi kejahatan;

**Von Liszt** (1851-1919), **A Prins** (1845-1919), dan **Van Hamel** (1842-1917) yang pada tahun 1888 mendirikan *Union Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereiniging*, disingkat *IKV*.

---

<sup>89</sup> Lili Rasjidi, 1990 op.cit, hal 65

<sup>90</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005: hal 67

Pemikiran yang menjadi landasan kegiatan *Internationale Kriminalistische Vereiniging (IKV)* adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. tujuan terpenting hukum pidana adalah memberantas kejahatan yang dianggap sebagai suatu gejala masyarakat.
2. ilmu hukum pidana dan peraturan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
3. pidana adalah salah satu sarana yang paling ampuh, yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Namun demikian pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi sebaliknya harus dipergunakan dalam kombinasi dengan upaya sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan upaya preventif.

**H.L. Packer** mengemukakan perlunya penggunaan (hukum) pidana - dengan segala keterbatasannya- sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan alasan sebagai berikut;<sup>92</sup>

- a. sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana
- b. sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. sanksi pidana merupakan 'penjamin yang utama/ terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Terkait dengan pernyataan di atas, **Sudarto** mengemukakan pandangannya, bahwa pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang

---

<sup>91</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bhina Cipta, Jakarta, 1984 hal. 30

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1996, hal155-156

berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.<sup>93</sup>

Menurut **Bassiouni**, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya diarahkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi berupa:<sup>94</sup>

1. pemeliharaan tertib masyarakat;
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Jadi, penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sampai saat ini masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal. Selain itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penggunaan hukum pidana ini termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal), maka penggunaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Artinya, pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan,

---

<sup>93</sup> Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung 2005 halaman 89

<sup>94</sup> Barda nawawi Arief, 1996, op.cit. hal 39-40

harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang fungsional, dan inipun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>95</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dapat dikatakan efektif, efisien dan sungguh-sungguh mencegah, menurut **Ted Honderich** apabila memenuhi beberapa syarat;<sup>96</sup>

- e. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- f. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya, merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan
- g. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya, kerugian yang lebih kecil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penggunaan hukum pidana atau dengan kata lain suatu pidana akan efektif, apabila ;<sup>97</sup>

- a. dapat mencegah<sup>98</sup> dilakukannya tindak pidana;
- b. dapat membimbing<sup>99</sup> terpidana menjadi orang yang baik dan berguna; dan
- c. dapat menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana<sup>100</sup>

---

<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *ibid.* hal. 37,38.

<sup>96</sup> *Ibid.* hal 39

<sup>97</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *op.cit.* hal 101

<sup>98</sup> mencegah agar si pembuat tidak melakukan lagi tindak pidana dan mencegah orang lain, calon pembuat potensiil atau masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana

<sup>99</sup> membimbing terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, agar tidak lagi melakukan tindak pidana

<sup>100</sup> dalam perspektif Barda Nawawi Arief memulihkan kembali keseimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, atau dikenal dengan istilah restitusi. Bahkan lebih dari itu, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar ("*basic ideas*") Pancasila yang mengandung di dalamnya **keseimbangan nilai/ide/paradigma : (a) moral religius** (Ketuhanan), **(b) kemanusiaan** (humanistik), **(c) kebangsaan**, **(d) demokrasi**, dan **(e) keadilan sosial**. Hal ini

Jadi, jika pilihan dan penetapan hukum pidana dijadikan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang fungsional, dan inipun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

Menurut **J. Andenaes** pendekatan rasional itu adalah;

Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/ *social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkan serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macam sanksi.<sup>101</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kebijakan Hukum Pidana Nasional dalam perspektif **Barda Nawawi Arif**, seyogyanya berorientasi pada ide-ide dasar (“*basic ideas*”) Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma : **(a) moral religius** (Ketuhanan), **(b) kemanusiaan** (humanistik), **(c) kebangsaan**, **(d) demokrasi**, dan **(e) keadilan sosial**.<sup>102</sup>

Hal ini berarti juga, bahwa hukum pidana diharapkan didalamnya terkandung prinsip-prinsip tujuan untuk menegaskan (atau menegaskan kembali) nilai-nilai sosial yang mendasar (*basic social values*) bagi pembentukan perilaku hidup bersama.

---

berarti juga, bahwa hukum pidana diharapkan dapat menyeimbangkan “**kepentingan umum**/masyarakat” dan “**kepentingan individu**/perorangan .

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, op.cit. hal 39

<sup>102</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2005: hal 4

Dengan diformulasikannya delik-delik agama dalam berbagai aturan, terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana, maka kejahatan yang berkaitan dengan masalah-masalah agama (termasuk aliran sesat) telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana Indonesia.

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara, terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pembedaan atau pemberian pidana.

Dengan demikian, dengan diberlakukannya/ diformulasikannya suatu perbuatan yang dianggap meresahkan masyarakat sebagai perbuatan terlarang dalam berbagai aturan, terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat

dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana.

Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Kerangka berpikir seperti di atas, juga berlaku dalam konteks kejahatan yang berkaitan dengan masalah agama maupun *aliran sesat* sebagai bagian dari masalah-masalah sosial.<sup>103</sup>

Akhirnya, menarik apa yang dinyatakan **Muladi** , bahwa Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama diatur dalam Bab Khusus (Bab VII RUU) merupakan refleksi bahwa Indonesia merupakan *nation state* yang religius, di mana semua agama (*religion*) yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> **Muladi** mengatakan; pengaturan Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam bab tersendiri (Bab VII) guna menunjukkan bahwa Indonesia memang bukan negara yang berdasarkan atas agama, tetapi juga bukan negara sekuler, melainkan negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini yang dilindungi adalah perasaan hidup keagamaan, ketenteraman hidup beragama dan agama yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sendiri sebagai kepentingan hukum yang besar. Muladi. *Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas dalam RUU KUHP*. Makalah. Dalam Beberapa tulisan Terkait kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP. Bahan Bacaan untuk *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (*Democratic Reform Support Program*) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: “Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”. Hotel Ibis Tamrin, Jakarta 28 September 2006, hal 24

<sup>104</sup> Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional. Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, 17 Januari 2004. hal 8



### **A.3. Ruang Lingkup Kebijakan hukum pidana terhadap aliran sesat**

#### **A.3.1. Pengertian Agama, Aliran Sesat Dan Teori Perlindungan Agama**

Penelusuran secara historis pemikiran orang-orang tentang agama, jika diapresiasi dengan baik niscaya akan sampai pada kesimpulan sederhana bahwa gagasan tentang agama telah ada sejak manusia ada. Hal ini berawal ketika Manusia dalam menjalani hidupnya pasti menemukan sesuatu yang ia sendiri tidak bisa menyelesaikan dan memahaminya.

Banyak peristiwa luar biasa yang datang dari kekuatan alam, yang manusia sama sekali tidak bisa mengatasinya. Dari pengalaman semacam itulah kemudian manusia kemudian mengakui akan kelemahan dirinya yang melahirkan pengakuan akan kebesaran dan kemahakuasaan yang selain dirinya. Dari kondisi semacam inilah kemudian lahir konsep Tuhan dan agama.<sup>105</sup>

Selanjutnya, **Agama** menurut [\*Kamus Besar Bahasa Indonesia\*](#) adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada [Tuhan](#), atau juga disebut dengan nama [Dewa](#) atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.<sup>106</sup>

Kata “agama” berasal dari bahasa [Sansekerta](#) āgama yang berarti “tradisi”.. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah **religi** yang berasal dari [bahasa Latin](#) religio dan berakar pada [kata kerja](#)

---

<sup>105</sup> Muhammad Wahyuni Nafis, dalam **Passing Over melintasi batas agama**, Gramedia Pustaka Agama, Jakarta 1999 halaman 84

<sup>106</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Agama>. diakses pada tanggal 4 Februari 2008.

re-ligare yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan ber-religi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.<sup>107</sup>

Kata “agama” dalam berbagai bahasa adalah sebagai berikut;<sup>108</sup>

- Sansekerta , kata "agama" berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti "tradisi". Dalam bahasa Sansekerta artinya tidak bergerak (Arthut Mac Donnell). Agama itu kata bahasa Sansekerta (yaitu bahasa agama Brahma pertama yang berkitab Veda) ialah peraturan menurut konsep Veda (Dr. Muhammad Ghalib).
- Latin, agama itu hubungan antara manusia dengan manusia super (Servius) . Agama itu pengakuan dan pemuliaan kepada Tuhan (J. Kramers Jz)
- Eropa, agama itu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan tenaga akal dan pendidikan saja (Mc. Muller dan Herbert Spencer). Agama itu kepercayaan kepada adanya kekuasaan mengatur yang bersifat luar biasa, yang pencipta dan pengendali dunia, serta yang telah memberikan kodrat ruhani kepada manusia yang berkelanjutan sampai sesudah manusia mati (A.S. Hornby, E.V Gatenby dan Wakefield)
- Indonesia, agama itu hubungan manusia Yang Maha Suci yang dinyatakan dalam bentuk suci pula dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu (Drs. Sidi Gazalba). Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997)
- Arab, agama dalam bahasa arab ialah ”din”, yang artinya : Taat, takut dan setia, paksaan, tekanan, penghambaan, perendahan diri, pemerintahan, kekuasaan, siasat, balasan, adat, pengalaman hidup, perhitungan amal, hujan yang tidak tetap turunnya, dan lain sebagainya . Sinonim kata din dalam bahasa arab ialah milah. Bedanya, milah lebih memberikan titik berat pada ketetapan, aturan, hukum, tata tertib, atau doktrin dari *din* itu.

Menurut **Koentjaraningrat**, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen:<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Ibid

<sup>108</sup> Ibid

<sup>109</sup> Koentjaraningrat, 1985. loc.cit hal 144-145

1. emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius
2. sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan
3. sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib
4. umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut nomor 2, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut nomor 3

Keempat komponen di atas terjalin erat satu sama lain sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara utuh. Kepentingan agama menyangkut kepentingan mengenai emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan umat yang merupakan satu kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap agama atau kepentingan agama.<sup>110</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, secara substansial manusia sudah sejak awalnya mengakui dan meyakini adanya agama, meyakini adanya satu kekuatan (Tuhan) yang mampu mengatasi segala permasalahan yang diyakininya telah menciptakan dan menguasai kehidupan alam raya ini. Ini artinya, pengetahuan tentang adanya Tuhan telah secara sadar dimiliki oleh setiap manusia. Inilah yang kemudian yang menjadikan manusia disebut sebagai *Homo Religiosus*.

Namun demikian, mengingat agama dan sifat Tuhan bersifat abstrak yang tidak dapat ditangkap oleh kemampuan nalar manusia, kemudian begitu sulit dipahami kehadiran-Nya oleh manusia. Sehingga Tuhan yang diyakini sebagai serba Mahakuasa itu tidak dapat diterima secara tunggal, yang

---

<sup>110</sup> Ibid

akhirnya dari ketidakmampuan cara berpikir manusia semacam itu melahirkan cara beragama dan berkeyakinan yang berbeda.

Sepanjang perjalanan sejarah pemikiran manusia, Tuhan dan agama ditemukan oleh manusia dengan berbagai nama dan istilah. Artinya, jalan untuk menemukan Tuhan dan agama itu tidak selalu mulus dan sampai pada sasaran yang dituju. Dalam sejarah pemikiran filsafat pernah muncul sekian banyak pemikir, teolog, pendeta, pastur, mubaligh yang berusaha meyakinkan orang dan menjajakan teorinya bahwa satu-satunya agama yang benar, yang menjamin keselamatan hanyalah agama yang ia anut, sementara agama yang lain membawa kesesatan.<sup>111</sup>

Memperhatikan masa lampau dan menggunakan methode ini akan diperoleh keterangan yang sangat berarti bahwa dalam sejarah perkembangan agama-agama di dunia, hampir bisa dipastikan terdapat sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual-ritual menyimpang atau nyeleneh dari agama yang dianutnya. Dengan cara ini pula akan terlihat bahwa akar sejarah munculnya aliran sesat, fenomena pengkafiran terhadap kelompok lain, dan kekerasan dalam kehidupan beragama, sesungguhnya telah lama ada dan muncul jauh sejak munculnya agama itu sendiri.

Ini berarti bahwa sejak dahulu, agama selalu menampilkan diri sebagai sebuah cermin retak. Secara internal, keretakan terjadi karena perbedaan cara pemaknaan dan penafsiran atas simbol-simbol dan ajaran agama. Cara pandang yang berbeda dari para tokoh yang berbeda menimbulkan

---

<sup>111</sup> Komarudin Hidayat, **Agama-agama Besar Dunia; Masalah Perkembangan dan Interelasi**. Makalah disampaikan pada Kajian Agama, Paramadina, 23 Januari 1992.

ketegangan-ketegangan, dan bahwa akibatnya selalu ada pihak yang dinyatakan salah, sesat menyimpang dan keluar dari rel keagamaan umum

Secara teoritis, aliran sesat dalam perspektif deskripsi sosiologis [Max Weber](#) dan [Ernst Troeltsch](#) (1931) menyatakan;<sup>112</sup>

Dalam [tipologi gereja-sekte](#) mereka digambarkan sebagai kelompok-kelompok keagamaan yang baru terbentuk untuk memprotes unsur-unsur dari agama asalnya (biasanya suatu [denominasi](#)). Motivasi mereka cenderung terletak dalam tuduhan kemurtadan atau ajaran sesat dalam denominasi asalnya. Mereka seringkali memprotes kecenderungan-kecenderungan liberal dalam perkembangan denominasi dan menganjurkan umat untuk kembali ke agama yang sejati.

Dalam sosiologi agama, aliran sesat/ sekte umumnya adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Dalam sejarah, penggunaannya di lingkungan agama Kristen mengandung konotasi penghinaan dan biasanya merujuk kepada suatu gerakan yang menganut keyakinan atau ajaran yang sesat dan yang seringkali menyimpang dari ajaran dan praktik ortodoks.<sup>113</sup>

Sosiolog Amerika [Rodney Stark](#) dan [William Sims Bainbridge](#) menegaskan bahwa "sekte-sekte mengklaim dirinya sebagai kelompok yang otentik dan bersih, sebagai versi dari iman yang telah diperbarui, yang daripadanya mereka memisahkan diri". Lebih jauh, mereka menegaskan bahwa, berbeda dengan gereja, sekte *memiliki tingkat ketegangan yang tinggi dengan lingkungan sekitarnya*.<sup>114</sup>

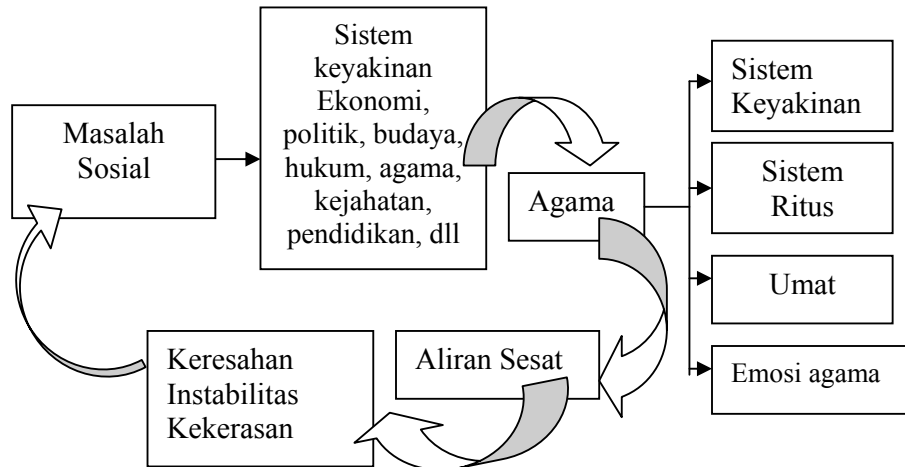
---

<sup>112</sup> Diperoleh dari "<http://id.wikipedia.org/wiki/Sekte>" 2 Januari 2007

<sup>113</sup> Ibid

<sup>114</sup> Ibid

Sebagai masalah sosial, maka aliran sesat secara skematis akan tampak sebagai berikut;



Berdasarkan uraian dan skema di atas, terdapat beberapa hal mendasar sebagai berikut;

Pertama, *Aliran sesat* secara sosiologis merupakan kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya **karena pertikaian** tentang masalah-masalah doktrin ajaran masing-masing.

Kedua, *aliran sesat* adalah kelompok yang memiliki haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan sekte tertentu dalam agama yang menyimpang dari kebenaran pokok-pokok ajaran agama, Ketiga, keberadaan aliran sesat **memiliki tingkat ketegangan yang tinggi** dengan lingkungan sekitarnya.

Ketiga, perbedaan ajaran dan doktrin yang ada dalam agama maupun kepercayaan seringkali menimbulkan keresahan, instabilitas yang tidak jarang memicu aksi kekerasan

Hal ini berarti bahwa;

- aliran sesat merupakan bagian dari masalah-masalah “agama”
- masalah-masalah “agama” merupakan masalah-masalah berkaitan dengan sistem keyakinan, sistem ritus, ummat, dan emosi keagamaan. Singkatnya, aliran sesat juga terkait dengan masalah “kehidupan beragama”
- sebagai masalah “agama” dan “kehidupan beragama”, aliran sesat dapat dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang bisa menghambat cita-cita nasional, dan dalam hal-hal tertentu dapat diannggap sebagai kejahatan, misalnya penistaan, penyalahgunaan, peniadaan agama dan lain sebagainya.
- oleh karena itu, harus ada upaya yang rasional untuk mencegah atau menanggulangi masalah-masalah sosial (aliran sesat) dengan hukum pidana, yaitu sebagai;
  - sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidak sukaan masyarakat (*Social dislike*)
  - alat melindungi warga masyarakat dari dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
  - pencelaan/ kebencian sosial (*Social disapproval/ Social abhorrence*)
  - sarana perlindungan sosial (*Social defence*)

Bertolak dari hal-hal di atas, **Oemar Senoadji** menyampaikan teori mengenai delik agama sebagai berikut;<sup>115</sup>

1. **Religionsschutz Theorie** (teori perlindungan “agama”), yaitu teori yang memandang “agama” itu ansich sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/ diamankan oleh negara
2. **Gefuhlsschutz Theorie** (teori perlindungan “perasaan keagamaan), yaitu teori yang memandang rasa (perasaan, pen) keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi
3. **Friedensschutz Theorie** (teori perlindungan “perdamaian/ ketentraman umat beragama), yaitu yang memandang kedamaian/ ketentraman beragama interkonfessional (di antara pemeluk agama/ kepercayaan). Jadi lebih tertuju pada ketertiban/ ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi

Jadi, substansi teori yang dibangun oleh **Oemar Senoadji** diatas, pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap agama maupun “perasaan keagamaan” dan kedamaian/ ketentraman beragama interkonfessional sebagai kepentingan hukum yang dilindungi.

### **A. 3.2 Ruang lingkup delik-delik agama terhadap aliran sesat**

Secara garis besar, pengertian dan teori-teori sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, hakikatnya sudah tertuang dalam KUHP maupun di luar KUHP. **Barda Nawawi Arief** memberi istilah sebagai ”Tindak Pidana/delik agama” dengan berbagai pengertian, yaitu; 1) Tindak pidana/delik ”menurut agama”; 2) Tindak pidana/ delik ”terhadap agama”; dan, 3)

---

<sup>115</sup> Oemar Senoadji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta 1976 hal 75. Lihat juga, Barda awawi Arief, Barda awawi Arief, *Delik-delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemi) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2007 hal 2



Tindak pidana/ delik ”yang berhubungan dengan agama” atau ”terhadap kehidupan beragama”.<sup>116</sup>

Selanjutnya penjabaran dari istilah-istilah di atas, adalah sebagai berikut;

#### 1. Tindak Pidana “Menurut Agama”

Delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, menurut **Barda Nawawi Arief**, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/ tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (hukum pidana, pen) tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/ tercela (dosa, pen).<sup>117</sup>

Melihat rumusan **Barda Nawawi Arief** di atas, ada beberapa hal yang patut dipahami sebagai berikut;

**Pertama**, dalam pengertian perbuatan-perbuatan yang menurut hukum agama dan hukum pidana merupakan perbuatan terlarang/ tercela/ dosa. Perbuatan dalam pengertian ini banyak tersebar di dalam KUHP, seperti misalnya delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya).<sup>118</sup> Dalam pengertian ini, baik dalam hukum agama maupun KUHP sama-sama mengatur sebagai perbuatan terlarang/ tercela/ dosa

---

<sup>116</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama*, Makalah pada Forum “**Debat Publik RUU Tentang KUHP**”, diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, di Jakarta, tgl. 21 – 22 Nopember 2000. hal 2

<sup>117</sup> Lihat, Barda awawi Arief, 2007, op.cit hal 1

<sup>118</sup> Lihat, Barda Nawawi Arief, Makalah, 2000. op.cit hal 2

**Kedua**, perbuatan lainnya yang menurut hukum agama merupakan perbuatan terlarang/ tercela/ dosa, tapi tidak merupakan perbuatan terlarang/ tercela/ dosa menurut hukum pidana. Contoh, orang yang tidak solat menurut agama Islam merupakan perbuatan dosa /terlarang/ tercela, tapi menurut KUHP bukan merupakan perbuatan terlarang/ tercela/ dosa.

Jadi, KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, pada hakikatnya terdapat suatu norma/ kaedah agama yang memberi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Atau dengan kata lain, norma atau kaedah memberi petunjuk kepada manusia, bagaimana harus bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Kaedah/ norma pada prinsipnya terdiri dari norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, norma agama, dan lain sebagainya.<sup>119</sup>

Semua norma/ kaedah, memiliki nilai-nilai luhur. Norma agama misalnya, di dalamnya terdapat sumber kedamaian, membawa pesan kepada seluruh ummat manusia tentang kasih sayang, keadilan, dan saling memahami. Sebagai berkah bagi semua makhluk, agama merupakan pengingat abadi bagi seluruh umat manusia tentang adanya percikan Ilahiyah pada setiap orang<sup>120</sup>

Pada abad pertengahan, orang berpendapat bahwa norma agama adalah satu-satunya norma yang mengatur peribadatan, yaitu kehidupan keagamaan

---

<sup>119</sup> CST Kansil, 1989; op.cit hal 84

<sup>120</sup> Kompas, *Agama dan perdamaian, hentikan kekerasan atas nama agama*, teropong Internasional 18 Juni 2007 hal 39,

dalam arti sesungguhnya dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memuat peraturan-peraturan hidup yang bersifat kemasyarakatan, dikenal dengan istilah “muamalat”, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dan memberi perlindungan terhadap diri dan harta bendanya.<sup>121</sup>

Contoh norma agama yang memiliki persamaan dengan norma hukum pidana adalah misalnya larangan berbuat riba menurut Islam; barangsiapa berbuat riba akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya ( Al-Qur’an Al Baqoroh; 275).

Selain itu dalam agama Kristen terdapat larangan misalnya; jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu dan lain sebagainya.<sup>122</sup> Sementara ajaran Hindu Budha di antaranya penekananan pada jalan penerangan untuk membantu manusia menemukan kebahagiaan spiritual.<sup>123</sup> Jadi, norma agama itu bersifat umum (universal) serta berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia.

KUHP sebagai aturan yang berlaku di negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, secara substansial, di dalamnya banyak terdapat norma-norma yang bersumber dari norma agama, misalnya perbuatan-perbuatan yang menurut KUHP merupakan perbuatan terlarang/ tercela, dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/ tercela/ dosa.<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup> CST Kansil, 1989; op.cit hal 85

<sup>122</sup> Lihat, Sepuluh perintah Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, tanpa nama penerbit, Jakarta, 2003: hal 80

<sup>123</sup> Muhammad Wahyuni Nafis, 1999. op.cit. hal 203

<sup>124</sup> Larangan yang ada di dalam KUHP pada hakikatnya sebagian besar dilarang/tercela/ dosa menurut agama, seperti pembunuhan, penganiayaan, penipuan, pencurian, perjudian dan lain

## 2. Tindak Pidana “terhadap agama”

Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, terlihat terutama dalam UU No 1 Pnps 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama) . Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama” (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi Keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/ Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya.

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama” , yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya UU No. 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 UU No 1 Pnps 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156 a.

Dikeluarkannya UU No. 1/PNPS/1965 berdasarkan pertimbangan timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Ajaran dan perbuatan aliran-aliran itu telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama,<sup>125</sup>

---

sebagainya. Tipikal delik ini dalam KUHP WvS sudah diatur bahkan tersebar hampir di keseluruhan Pasal.

<sup>125</sup> Lihat penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 romawi I angka 1

Latar belakang yang mendasari dikeluarkannya UU No. 1 Pnps 1965 tidak terlepas dari aspek ideologis, integralistis nasionalis dan aspek sosial kemasyarakatan keagamaan atau sosial relegius. Dengan kata lain, adalah ironis, sebuah negara yang masyarakatnya beragama tidak ada perangkat hukum yang menjamin, melindungi agama dari perbuatan penyimpangan dan menodai agama bahkan ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang banyak menimbulkan bahaya bagi persatuan nasional dan bahaya bagi agama serta ketentraman beragama.

Berdasarkan uraian di atas, maka agama dilihat sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi, hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tidak bisa dipisahkan dengan agama, merupakan landasan moral dan landasan kesatuan nasional.

### 3. Tindak Pidana “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”

Adapun delik agama dalam pengertian “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”, tersebar antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan : <sup>126</sup>

- merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Psl. 175);
- mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Psl. 176);
- menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Psl. 177 ke-1);
- menghina benda-benda keperluan ibadah (Psl. 177 ke-2);

---

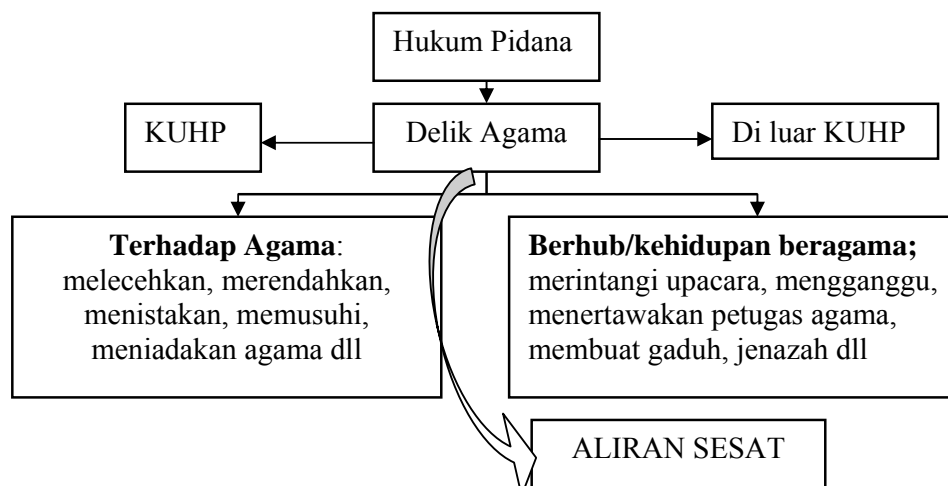
<sup>126</sup> Barda Nawawi Arief, *makalah*, 2000. op.cit hal 2

- merintangangi pengangkutan mayat ke kuburan (Psl. 178); menodai./merusak kuburan (Psl. 179); menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Psl. 180); menyembunyikan /menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan
- kematian/kelahiran (Psl. 181);
- membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Psl. 503 ke-2)

Delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragama dalam melaksanakan aktifitas agama dan keagamaan. Keamanan dan ketentraman dalam menjalankan agama dan keagamaan, merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam rangka ketertiban umum.

Agama dalam delik ini tidak menjadi obyek perlindungan, karena dianggap bukan kepentingan hukum, yang menjadi kepentingan hukum adalah aktifitas agama dan keagamaan, seperti merintangangi upacara agama dan upacara penguburan jenazah atau membuat suasana gaduh ditempat ibadah sehingga mengganggu jalannya ibadah.

Bertolak dari uraian di atas, delik-delik agama secara skematis tampak sebagai berikut;



Delik-delik agama yang terdapat dalam KUHP misalnya; penistaan dan peniadaan agama pasal 156 a, merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Psl. 175); mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Psl. 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Psl. 177 ke-1); menghina benda-benda keperluan ibadah (Psl. 177 ke-2); merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Psl. 178); menodai./merusak kuburan (Psl. 179); menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Psl. 180); menyembunyikan /menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Psl. 181); membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Psl. 503 ke-2) Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP <sup>127</sup>

Delik-delik agama yang terdapat di luar KUHP misalnya UU No 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965. Selain UU No 1 Pnps 1965, terdapat UU No. 32 tahun 2002 (Penyiaran).

Pasal 57 jo. 36 (6) terdapat UU No. 32 tahun 2002 (Penyiaran) mengancam pidana terhadap **siaran** yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau **mengabaikan nilai-nilai agama**, martabat manusia Indonesia. Psl. 58 jo. 46 (3) mengancam pidana terhadap **siaran iklan niaga** yang di dalamnya memuat (antara lain) : **hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama**.

---

<sup>127</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama*, Makalah pada Forum “**Debat Publik RUU Tentang KUHP**”, diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, di Jakarta, tgl. 21 – 22 Nopember 2000 hal 2

Selain itu, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (2) jo.

Pasal 5 ayat (1) , jo. Pasal 13 huruf a menyatakan ;

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 5 ayat (1) mewajibkan Pers nasional memberitakan peristiwa dan opini dengan ***menghormati norma-norma agama*** dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Selanjutnya Pasal 13 huruf a menyebutkan bahwa Perusahaan pers dilarang memuat iklan: a. yang berakibat ***merendahkan martabat suatu agama*** dan atau ***mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama***, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Jadi, secara teoritis maupun yuridis, aliran sesat sebagai bagian dari masalah “agama” dan masalah yang “berhubungan dengan agama” maupun “kehidupan beragama”, merupakan bagian dari cakupan (ruang lingkup) delik-delik agama sebagaimana terdapat dalam KUHP dan tersebar di luar KUHP, khususnya Pasal 156a KUHP dan UU No Pnps 1965. Oleh karena itu **Muladi** menyatakan;

Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama diatur dalam Bab Khusus (Bab VII RUU) merupakan refleksi bahwa Indonesia merupakan *nation state* yang religius, di mana semua agama (*religion*) yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Muladi, ***Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru***. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional. Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, 17 Januari 2004. hal 8



### A.3.3. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aliran Sesat

Indonesia sebagai suatu negara yang rakyatnya menganut keragaman agama, wajar kalau kemudian dalam aspek-aspek dasar Negara Republik Indonesia tercantum hal-hal sebagai berikut;

- Pancasila sila pertama menyatakan, “ Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukan nama Tuhan agama tertentu.
- alinea ke-4 Pembukaan UUD'45 yang intinya menyatakan : "... , maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia ..... dengan berdasar kepada *Ketuhanan Yang Maha Esa*...., " .
- Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 , menyatakan : “Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Hal ini berarti, bahwa Negara Indonesia bukanlah negara agama. Oleh karena itu Menurut **Munawir Sadzali**<sup>129</sup>, “ Orde Baru telah memberikan penafsiran terhadap Pancasila, bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Tafsiran tersebut diikuti dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama” .

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa tidak ada sesuatu agama yang dijadikan agama resmi negara serta tidak hanya satu agama yang

---

<sup>129</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*. Jakarta Press, 1990, halaman 210

dijadikan sebagai sumber moral dan sumber hukumnya. Oleh karena itu penjelasan UUD 1945 menyatakan;

Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam "pembukaan" ialah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Bertolak dari hal demikian, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 , menyatakan;

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu

Aspek-aspek mendasar Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 adalah sebagai berikut;

- kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang senantiasa dirumuskan dalam setiap konstitusi dan dokumen deklarasi adalah kebebasan beragama.
- negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Terhadap pasal 29 UUD 1945 di atas, pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno sebagai anggota (bukan ketua) Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), menyampaikan pidatonya tentang

”Philosophische Grandslag” atau ”Landasan dasar falsafah” Undang - Undang

Dasar yang sedang disiapkan,<sup>130</sup> **Soekarno** menyatakan,

Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat Indonesia ber-Tuhan secara kebudayaan yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber Tuhan.<sup>131</sup>

**Soekarno** menekankan bahwa menjalankan sikap beragama haruslah dengan cara berkeadaban yang diartikan dengan sikap hormat-menghormati satu sama lain atau beragama dengan penuh toleransi seperti yang diteladankan oleh Nabi Muhammad. Dengan kalimat lain, Soekarno menyatakan;

“Dasar negara ke lima (pancasila dalam konsep Soekarno, pen) dari negara ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, dalam artian hormat-menghormati, “ Di sinilah, dalam pangkuan asas yang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat sebaik-baiknya. Dan negara kita akan ber-Tuhan pula”.<sup>132</sup>

Bertolak dari pernyataan Soekarno di atas, diperoleh pengertian, bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia. Namun demikian, walaupun kebebasan seseorang di dalam berideologi, beragama, berkepercayaan dan berkeyakinan, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan lain sebagainya, merupakan hak asasi manusia. Namun menurut UUD 1945 bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan. **Harun**

---

<sup>130</sup> Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal.12.

<sup>131</sup> Sumber, dari Yamin. Naskah. 1, hal. 115-116, dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, 1981, op.cit hal. 77

<sup>132</sup> ibid hal 78

Utuh menyatakan bahwa,” kebebasan itu pasti selalu bersyarat dan tidak melampaui batas, batasnya adalah hukum (undang-undang, pen)”.<sup>133</sup>

Pasal 28J UUD 1945 (amandemen ke-2) menyatakan;

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, **setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan** yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bertitik tolak dari Pasal 28J UUD 1945, kebebasan dalam berideologi, beragama, berkepercayaan dan berkeyakinan, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan lain sebagainya, selanjutnya di atur dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia, di antaranya sebagaimana terdapat dalam KUHP dan UU No 1 Pnps 1965.

Menurut penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, negara/ pemerintah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 dengan tujuan;

1. Perlindungan terhadap kesatuan nasional

Dalam penjelasan umum angka 1 alinea kedua dinyatakan, “.....tetapi juga memastikan kesatuan nasional”. Jadi yang menjadi objek perlindungan adalah persatuan nasional

2. perlindungan terhadap ketentraman beragama,

Dalam penjelasan umum Bab I angka 4 UU No 1 tahun 1965, tujuannya adalah **ketentraman** beragama. Jadi yang menjadi titik

---

<sup>133</sup> Lihat, Saiful Abdullah, *Tindakan Pamswakarsa dan Oknum ABRI pada saat Sidang Istimewa MPR 1998 Ditinjau Dari Segi Perundang-undangan dan Peradilan Yang Berwenang Mengadili*, Skripsi, Universitas Bangkalan, 1999, hal 14

fokus tujuan undang-undang ini adalah ketentraman. Berbicara masalah ketentraman, pasti selalu terkait dengan masalah ketertiban umum, yang jika dibiarkan bisa memecah *persatuan nasional*.

3. perlindungan ansich terhadap agama.

Dalam penjelasan umum Bab I angka 4 UU No 1 tahun 1965 menyatakan, bahwa tujuan dari dikeluarkannya UU No 1 tahun 1965 adalah ;

- mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari “ajaran agama” yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.
- Melindungi dari penodaan/ penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Bertitik tolak dari tujuan-tujuan sebagaimana penjelasan umum UU No 1 tahun 1965, terlihat bahwa substansi yang hendak dilindungi oleh UU No 1 tahun 1965 ini sebenarnya adalah perlindungan;

1. “ketentraman beragama” (baca; perasaan kehidupan beragama); (penjelasan umum angka 4 alinea pertama). namun demikian kalau dicermati sekali lagi, maka UU No 1 tahun 1965 ini juga hendak memberi pelindungan;
2. “terhadap agama”, (penjelasan umum angka 4 alinea pertama). Di samping secara tesirat bertujuan menjaga
3. “persatuan nasional”. (penjelasan umum angka 1 alinea kedua)

Tujuan dikeluarkannya UU No 1 tahun 1965, hakikatnya memiliki tujuan yang sama seperti tujuan hukum pidana pada umumnya dalam menanggulangi kejahatan yaitu menciptakan tata tertib di dalam masyarakat

sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.<sup>134</sup>

Bertolak dari hal demikian, salah satu wujud dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*, adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Oleh karena itu dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Menurut **G P. Hoefnagels**, upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah <sup>135</sup> dengan cara ; penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan. dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Selanjutnya, jika pendekatan pertama yang ditempuh “penerapan hukum pidana (*criminal law application*), maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Implikasi berikutnya, dengan difungsikannya hukum pidana, diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma

---

<sup>134</sup> Ajaran moderen berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban. Lihat Lili Rasjidi, ***Dasar Dasar Filsafat Hukum***, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1990, hal 65

<sup>135</sup> ibid. hal. 48

yang telah ditetapkan dalam hukum pidana, khususnya Pasal 156a KUHP dan UU No 1 Pnps 1965.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan (termasuk tindak pidana/delik agama) dengan menggunakan hukum pidana, hakekatnya berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## **B. LANDASAN PEMAHAMAN TENTANG KEBIJAKAN (UPAYA) NON PENAL TERHADAP ALIRAN SESAT**

### **B.1. Pengertian Kebijakan Non Penal**

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan non *penal*.<sup>136</sup>

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintergrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan **Sudarto** yang menyatakan

---

<sup>136</sup> Barda Nawawi Arif, 2002, Op.Cit, hal. 3

bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*planning for social defence*". *Social Defence Planning* ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>137</sup>

Beberapa kali konggres PBB mengenai *Prevention of Crime and the tretment of Offender* juga mengisyaratkan hal yang sama tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.<sup>138</sup>

Bertitik tolak dari hal-hal tersbut di atas, **G P. Hoefnagels**<sup>139</sup> menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan , yaitu;

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan
4. dan pembedaan melalui media masa ( *influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Jadi, kalau dicermati pendapat **G P. Hoefnagels** di atas, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh

---

<sup>137</sup> Sudarto, 1986, op.cit. hal. 96

<sup>138</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, op.cit hal. 5-9. Pernyataan tersebut antara lain terlihat dalam konggres PBB ke-4 tahun 1970, Konggres PBB ke-5 tahun 1975, Konggres PBB ke-6 tahun 1980, Konggres PBB ke-7 tahun 1985 dan konggres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba, lihat juga Muladi, 1995, op.cit. hal. 9-11

<sup>139</sup> Muladi, 1995 op.cit hal. 48



melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, **Muladi** menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “*masalah kemanusiaan*” dan “*masalah sosial*” yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.<sup>140</sup>

Bertitik tolak dari pendapat Muladi tersebut di atas, dapat dipastikan, bahwa hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga diperlukan upaya lain selain upaya *penal* dalam menanggulangi masalah kejahatan.

Selain Muladi, ada beberapa pendapat yang memberi pendapat senada diantaranya **Donald R.Taf** dan **Ralp W England**, menyatakan;

Bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Muladi, 1995. *ibid* hal. 7

<sup>141</sup> Lebih tegas **R. Hood** dan **R. Sparks** menyatakan bahwa beberapa aspek lain dari “*general prevention*” seperti “*reinforcing social values*”, “*strengthening the common conscience*”, “*alleviating fear*”, dan “*providing a sense of communal security*” sulit untuk diteliti Donald R.

Beberapa pendapat senada selain Muladi, Donald R.Taf dan Ralph

W England, adalah sebagai berikut;

1. **Schult**, menyatakan;

Bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidak berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.<sup>142</sup>

2. Menurut **Rubin**;

Bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan<sup>143</sup>

3. Menurut **Johannes Andenaes**;

Bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.<sup>144</sup>

4. Menurut Wolf **Middendorf** ;

Sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari "general deterrence" karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan tidak adanya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan.<sup>145</sup>

Selanjutnya **Middendorf** menandakan;

bahwa dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena

---

Taft and Ralph W. England, *Criminology*, 1964, hal 315, dalam Barda Nawawi Arief, 2005 69-70

<sup>142</sup> H.D. Hart (ed), 1971, *ibid.* hal 21, dalam Barda Nawawi Arief, 2005 *op.cit.* halaman 69

<sup>143</sup> H.D. Hart (ed), *Punishment: for and againts*, New york, 1971, hal 21, dalam Barda Nawawi Arief, 2005, *op.cit* hal 69

<sup>144</sup> J. Andenaes, *Does Punishment Deter Crime?* dalam Gertrude Ezorsky (Ed), *Philosophical Perspective on Punishment*, New York, 1972, hal 346, Lihat juga Barda Nawawi Arief, 2005 *op.cit* hal 69

<sup>145</sup> H.D. Hart (ed), 1971, *op.cit.* hal 21, dalam Barda Nawawi Arief, 2005, *op.cit.* hal69-70

tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan lamanya pidana.<sup>146</sup> Akhirnya ditegaskan olehnya, " kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan aktifitas kejahatan."<sup>147</sup>

5. Menurut **Karl O. Christiansen** ;

Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas ("*general prevention*", pen.) sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.<sup>148</sup>

Selanjutnya ditandaskan,

husus mengenai pengaruh dari pidana penjara, kita mengetahui pengaruhnya terhadap si pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh "*general prevention*", pen.) merupakan "*terra incognita*", suatu wilayah yang tidak diketahui ("*unknown territory*").<sup>149</sup>

6. Menurut **S. R. Brody**;

dari sembilan penelitian (mengenai pemidanaan) yang diamati olehnya, lima diantaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*).<sup>150</sup>

7. Menurut **M. Cherif Bassiouni**;

kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan

---

<sup>146</sup> H.D. Hart (ed), 1971 ibid hal 13, dalam Barda Nawawi Arief, op.cit, 2005 hal 70

<sup>147</sup> H.D. Hart (ed), 1971, ibid 18, dalam Barda Nawawi Arief, 2005. ibid

<sup>148</sup> Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy*, *Resource Material Series* Nomor 7, UNAFEI, 1974 hal 58, lihat juga Barda Nawawi Arief, 2005 ibid. hal 71

<sup>149</sup> Karl O. Christiansen, 1974 ibid hal 58 dalam Barda Nawawi Arief, 2005 hal 71

<sup>150</sup> S. R. Brody, *The Effectiveness of Sentencing*, 1976 hal 39 dalam Barda Nawawi Arief, 2005 ibid

memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia”.<sup>151</sup>

Bertolak dari pendapat-pendapat di atas, **Sudarto** mengemukakan, bahwa Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan penanggulangan suatu gejala "kurieren am symptom", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya "pengobatan kausatif".<sup>152</sup>

Jadi, keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/ hakikat dan fungsi hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit.<sup>153</sup> . Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “obat kausatif”, melainkan hanya sekedar ”pengobatan simpomatik”.

Pengobatan simtomatik lewat obat berupa ”sanksi pidana” ini pun masih mengandung kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat (pidana) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/ paradoksal dan unsur-unsur negative yang

---

<sup>151</sup> M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, 1978 hal 99 dalam Barda Nawawi Arief, 2005 ibid hal 72

<sup>152</sup> Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung, 1983 hal 35

<sup>153</sup> Ibaratkan orang sakit TBC, gejalanya panas dan muntah-muntah, tapi dikasih obat penurun panas dan obat anti mabuk, tentu pengobatan semacam ini hanya menyembuhkan gejalanya saja, tidak mengobati sumber penyakitnya

membahayakan atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan efek-efek samping yang negatif.<sup>154</sup>

Selain itu, pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini terbatas dan “fragmentair”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/ penyembuhan (treatment atau kurieren) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah orang tidak melakukan tindak pidana/ kejahatan” dan bukan “mencegah agar kejahatan itu (secara structural) tidak terjadi. Dengan kata lain, keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/fungsi pidana selama ini, yaitu pidana individual/ personal, dan bukan pidana yang bersifat structural/ fungsional. Pidana yang bersifat individual/ personal kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara structural/ fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. “sisi lain yang bersifat structural/ fungsional” ini misalnya pihak korban/ penderita lainnya dan struktur/ kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/ tindak pidana.<sup>155</sup>

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai obat/remedium) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan system perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperative, seperti halnya perumusan sanksi

---

<sup>154</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, op.cit. hal 73

<sup>155</sup> Ibid

pidana secara tunggal dan kumulatif. System demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (obat) yang dianggapnya paling tepat bagi terpidana.<sup>156</sup>

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:<sup>157</sup>

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya.);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”
- d. Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Bertitik tolak dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan, baik dilihat dari sudut hakikat terjadinya kejahatan dan dari sudut bekerjanya/berfungsinya hukum (sanksi) pidana itu sendiri.

---

<sup>156</sup> Ibid hal 73-74

<sup>157</sup> Ibid hal 74-75

Akhirnya patut dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/ bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/ bervariasi, baik berupa undang-undang organiknya, instansi dari aparat pelaksanaannya, sarana/ prasarana, maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasional yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan bersifat transnasional.<sup>158</sup>

Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi "*penal*" sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus dipanggil/ digunakan dalam setiap penanggulangan kejahatan.

Walaupun sarana penal/ penggunaan sarana penal "*terpaksa*" harus digunakan dalam penanggulangan kejahatan, namun **Nigel Walker** mengingatkan adanya "*prinsip-prinsip pembatas (the limiting principles)*" yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain;<sup>159</sup>

- a. jangan hukum pidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan/retributif;
- b. jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;

---

<sup>158</sup> Ibid. hal 74

<sup>159</sup> Nigel Walker dalam Barda Nawawi Arief, 2005, ibid. hal 75-76

- d. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- e. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.
- g. hukum pidana jangan memuat larangan/ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan/dipaksakan ("*unenforceable*").

**Muladi** pernah mengatakan bahwa dalam mempidana atau mengkriminalisasi harus sangat memperhatikan syarat-syarat yang banyak dan sifatnya limitatif. Ini karena hukum pidana sifatnya adalah *Ultimum Remedium*. Syarat-syarat limitatif itu adalah : <sup>160</sup>

- 1. jangan menggunakan hukum pidana untuk membalas dendam semata-mata,
- 2. jangan menggunakan hukum pidana jika korbannya tidak jelas,
- 3. jangan menggunakan hukum pidana jika ada cara-cara lain yang lebih efektif,
- 4. jangan menggunakan hukum pidana jika kerugian pembiayaan akibat dari pembedaan lebih besar daripada kerugian pembiayaan akibat tindak pidana itu sendiri.
- 5. jangan menggunakan hukum pidana jika efek sampingnya lebih besar dari perbuatan yang dikriminalisasikan,
- 6. jangan menggunakan hukum pidana jika tidak mendapat dukungan masyarakat luas,
- 7. jangan menggunakan hukum pidana apabila hukum tersebut diperkirakan tidak bisa berlaku secara efektif,
- 8. hukum pidana harus bisa menjaga kepentingan negara, individu dan masyarakat, dan
- 9. harus selaras dengan pencegahan yang sifatnya non-penal.

---

<sup>160</sup> Muladi. *Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan terhadap Martabat Dilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*. Makalah Seminar pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) FH Universitas Udayana. 20-21 Maret 2006



Secara lebih singkat **Jeremy Bentham** pernah juga menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila;<sup>161</sup>

- "groundless,
- needless,
- unprofitable or
- inefficacious"

Demikian pula **Herbert L. Packer**, juga pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/ tidak pandang bulu/menyamaratakan ("*indiscriminately*") dan digunakan secara paksa ("*coercively*") akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" ("*prime threatener*")<sup>162</sup>

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, maka harus ada upaya lain yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan

Hal ini berarti, bahwa upaya lain selain hukum pidana yang berusaha menanggulangi kejahatan inilah kemudian dapat dikatakan sebagai upaya "*non penal*", yaitu suatu upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan dengan upaya-upaya lain selain hukum pidana (*penal*). Oleh karena itu dilihat dari kebijakan/ politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) sebaiknya ditempuh dengan pendekatan/ kebijakan integral, baik dengan menggunakan "penal" maupun dengan sarana "non-penal".

---

<sup>161</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, op.cit hal 76

<sup>162</sup> Ibid

## B.2. Ruang Lingkup Kebijakan Non Penal Terhadap Aliran Sesat

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, di samping KUHP memiliki banyak keterbatasan, Muladi menyatakan, “bahwa hakikatnya kejahatan itu merupakan “*masalah kemanusiaan*” dan “*masalah sosial*” yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.”<sup>163</sup>

Poin terpenting dari ungkapan Muladi di atas adalah, “kejahatan itu merupakan “*masalah kemanusiaan*” dan “*masalah sosial*”. Hal ini berarti, bahwa kejahatan itu selalu terkait dengan “*masalah kemanusiaan*”<sup>164</sup> dan “*masalah sosial*”.<sup>165</sup>

Begitu menariknya untuk mengungkap masalah kemanusiaan dan masalah sosial, akhirnya banyak orang yang kemudian berusaha mengungkap sesuatu di balik kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan masalah sosial, para ahli

---

<sup>163</sup> Muladi, 1995, op.cit. hal. 7

<sup>164</sup> Bahwa yang dimaksud dengan masalah kemanusiaan adalah masalah yang sifatnya segera (*immediate problems*), yaitu masalah-masalah praktis sehari-hari yang berkenaan dengan keperluan-keperluan pribadi yang mendesak, yang tidak seorangpun dapat mengelakkan darinya. Sedangkan masalah kemanusiaan selanjutnya adalah masalah yang sifatnya asasi (*ultimate problems*), yaitu berkenaan dengan hakikat manusia itu sendiri, alam semesta, dan Tuhan. Namun masalah terbesar yang dihadapi yang dihadapi manusia sepanjang masa adalah masalah dirinya sendiri Ahmad Mustofa, *Ilmu Budaya Dasar*, Pustaka Setia, Bandung 1997, hal 61

<sup>165</sup> Kriteria utama suatu masalah sosial yaitu tidak adanya persesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan sosial. Unsur-unsur yang pertama dan pokok dari masalah sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi nyata kehidupan. Artinya, ada kepincangan-kepincangan antara anggapan-anggapan masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi, dengan apa yang terjadi dalam kenyataan pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, hal, 402-403

kemudian mencari sebab-sebab kejahatan, dan kemudian berusaha untuk merumuskannya secara sistematis mungkin dalam suatu teori.<sup>166</sup>

Kenyataannya, sampai sekarang diterima secara umum bahwa tidak mungkin dicari hanya satu faktor saja yang dapat menerangkan sebab kejahatan pada umumnya ataupun suatu kejahatan yang khusus. Oleh karena itu **Barda Nawawi Arief** menyatakan, bahwa Kejahatan dan pelanggaran semakin lama bukannya semakin habis, malah semakin meningkat, baik mengenai kuantitas maupun kualitasnya.<sup>167</sup>

Khusus Indonesia, kejahatan yang mendapat perhatian serius bahkan oleh dunia internasional dewasa ini salah satunya adalah kejahatan-kejahatan terorisme, *cyber crime*, pornografi dan pornoaksi, kejahatan yang bersifat rasis dengan segala bentuknya termasuk rasialisme berdasarkan jenis agama, kepercayaan, sekte-sekte tertentu (*racism religious/racial crime and all its forms*).

Kejahatan rasialisme berdasarkan jenis agama ini tampaknya sedang hangat dibicarakan oleh publik tanah air khususnya terkait dengan penutupan, perusakan, pembakaran sejumlah tempat ibadah yang dinilai sesat menyesatkan serta menangkap dan memenjarakan ketua, kepala aliran, sekte keagamaan tersebut.

Menurut kongres PBB ke enam tahun 1980 mengenai *Prevention of Crime and The treatment of Offenders* menyatakan bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah; ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan

---

<sup>166</sup> JE Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Alumni, Bandung 1981, hal 2

<sup>167</sup> Selengkapnya, Lihat, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996 hal 12-13

(kebodohan) di antara golongan besar penduduk. (*"The main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population"*)<sup>168</sup>

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan sebagaimana tersebut di atas,

**M. Cherif Bassiouni** menyatakan;

“Kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.”<sup>169</sup>

Kongres-kongres PBB (mengenai *"the prevention of crime and the treatment of offenders"*) menyatakan hal-hal sebagai berikut;<sup>170</sup>

- Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogya-nya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh. (*"Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex and wideranging activities ....."*);
- Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan" (*the basic crime prevention strategy*). (- *"Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime"*; - *"The basic crime prevention strategy must consist in eliminating the causes and conditions that breed crime"*);

---

<sup>168</sup> Ibid, hal 34

<sup>169</sup> M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, 1978, hal 99 dalam Barda Nawawi Arief 1996, ibid. hal 72

<sup>170</sup> Barda Nawawi Arief, 2005 op.cit. hal 77-78

- Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

*("Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political systems, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order");*

Selain pernyataan PBB, terdapat beberapa pendapat lainnya sebagai berikut;

**Habib-Ur-Rahman Khan** dalam tulisannya berjudul "Prevention of Crime

- It is Society Which Needs "The Treatment" and Not the Criminal" menyatakan, *"it is society which needs the 'treatment' and not the criminal"*.<sup>171</sup> Artinya, apabila kejahatan dipandang sebagai produk masyarakat, maka masyarakatlah yang membutuhkan perawatan/pembinaan dan bukan si penjahat. Dengan demikian, perawatan/ penyembuhan/ pengobatan suatu kejahatan tidak hanya diorientasikan/ ditujukan kepada si pembuat saja, tetapi masyarakat/ kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan/ penyembuhan dan pembinaan.

**Wolf Middendorf**, menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari *"general deterrence"* karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan, atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Prevention of Crime-it is Society Which needs "The Treatment", Not The Criminal, dalam Resource Material Series Nomor 6, 1973 halaman 132-133 dalam Barda Nawawi Arief, 2005.op.cit hal 77

<sup>172</sup> H.D. Hart (ed) dalam Barda Nawawi Arief, , 2005.ibid. hal 69-70

**Karl O. Christiansen**, sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya;<sup>173</sup>

- pencegahan (*deterrence*),
- pencegahan umum (*general prevention*),
- memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*),
- memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*),
- menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*),
- mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*),
- melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

**Pernyataan** PBB dan para pakar hukum pidana di atas dapat disimpulkan bahwa;

1. sebab-sebab kejahatan selalu terkait dengan masalah-masalah sosial, atau dengan kata lain kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks
2. strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, **G P. Hoefnagels** menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu;<sup>174</sup>

- penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan

---

<sup>173</sup> Karl O. Christiansen, dalam Barda Nawawi Arief, *ibid.* hal 71

<sup>174</sup> Muladi, 1995 *op.cit.* hal. 48

- dan pembedaan melalui media masa ( *influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dilihat dari politik kriminal, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, maka upaya penanggulangannya sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana “non-penal”, terlebih mengingat karena keterbatasan dari sarana penal itu sendiri.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal selain diharapkan mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.<sup>175</sup> Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang *non penal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang sangat penting untuk diintensifkan dan diefektifkan.

Upaya penggulungan kejahatan (aliran sesat) melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan (aliran sesat). Fakto-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu pendekatan integral antara usaha penal dan non penal merupakan keharusan.

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk

---

<sup>175</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005.op.cit. hal 159

menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha yang bersifat "non- penal". Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.<sup>176</sup>

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur terpadu.<sup>177</sup>

Pada posisi inilah kegiatan preventif<sup>178</sup> yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan sangat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.<sup>179</sup> Oleh karena itu, suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.<sup>180</sup>

Selain itu, kebijakan kriminal tersebut sepatutnya mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh dan suburnya

---

<sup>176</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, op.cit. hal 33

<sup>177</sup> Ibid hal 33-34

<sup>178</sup> Menurut **Radzinowicz**, " kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif itu dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur. Radzinowics, *"criminal policy must combine the various preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an organized system of activity"*159 dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005.op.cit. hal 159

<sup>179</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005.op.cit. hal 159

<sup>180</sup> ibid. hal159



kejahatan. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan perlindungan sosial ”*social defence planning*” benar-benar dapat berhasil. Dengan demikian pula, diharapkan tercapainya hakikat tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam perencanaan pembangunan nasional yaitu ”kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna”.<sup>181</sup>

Terkait dengan masalah ini, masalah aliran sesat bukanlah semata-mata masalah hukum pidana (atau bahkan jauh dari jangkauan hukum pidana karena menyangkut masalah keyakinan dan keimanan), melainkan masalah sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu usaha-usaha non penal meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial,<sup>182</sup> merupakan upaya yang dapat melengkapi keterbatasan-keterbatasan upaya penal.

**Muladi dan Barda Nawawi Arief** menyatakan, usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.<sup>183</sup>

Satu hal penting yang patut dipahami bersama, bahwa adanya berbagai masalah dalam praktek kehidupan beragama (aliran sesat), pada intinya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah “tidak beres” dalam praktek kehidupan beragama itu sendiri.

---

<sup>181</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005. op.cit. hal160

<sup>182</sup> Ibid. hal. 159

<sup>183</sup> Ibid

Oleh karena itu, jika yang menjadi inti masalahnya terletak pada cara penghayatan dalam kehidupan beragama, maka resep atau “obat” *non penal* yang tepat adalah dengan menjadikan agama sebagai sarana atau “obat” yang paling tepat untuk menanggulangi atau mengobati “penyakit” atau masalah-masalah aliran sesat/ perbedaan pandangan keagamaan . Upaya non penal yang bisa dilakukan misalnya:

1. Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia
2. memfasilitasi **perkembangan keberagamaan** dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa;
3. **mencegah konflik sosial** antar umat beragama dan meningkatkan ( “meningkatkan kerukunan” ) antar umat bangsa.

Sangat *menarik* sekali solusi yang ditawarkan Al-Qur’an, “Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya *Rabbmu* Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS- An-Nahl 125).<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup> Imam Jalaluddin Al- Mahalliy, dan As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Ayat*. Edisi terjemahan, Sinar Baru, Bandung 1990, halaman 118-119

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT

###### A.1. Kebijakan hukum pidana terhadap aliran sesat saat ini

Secara kodrati, manusia adalah makhluk pribadi dan sosial.<sup>185</sup> Sebagai makhluk pribadi maupun sosial tidak pernah lepas dari pergesekan dan kepentingan maupun ketergantungan antara yang satu dengan yang lain. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, **Moeljatno** menyatakan, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;<sup>186</sup>

- menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang (perbuatan pidana, istilah Belanda; *Strafbaar feit*), disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>185</sup> lihat C.A. Van Peursen, *Orientasi di Alam Filsafat*, edisi terjemahan, Gramedia Jakarta, 1988, hal 222

<sup>186</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2000, hal 2

KUHP sebagai dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, memiliki tujuan-tujuan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya. Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara, terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.

Jadi, kebijakan *penal* (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidak sukaan masyarakat (*Social dislike*) atau pencelaan/ kebencian sosial (*Social disapproval/ Social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*Social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*Penal policy*” merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (*Social Defence Policy*) yang memiliki sifat universal di semua negara.

Patut dicatat, digunakannya **hukum pidana** sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang **lazim**

**digunakan** di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktek perundang-undangan selama ini menunjukkan, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan diformulasikannya delik-delik agama (aliran sesat merupakan bagian dari delik agama) dalam berbagai aturan, terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana, beratri usaha rasional<sup>187</sup> dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, serta merupakan bagian dari kebijakan sosial untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. .

Secara singkat, dalam perspektif hukum pidana, aliran sesat merupakan bagian dari cakupan delik-delik agama, dan merupakan bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana delik-delik agama dalam UU No 1 Pnps 1965, dan Pasal 156 a KUHP. Pada posisi inilah, negara memiliki kewajiban untuk mengatur, melarang, mengawasi, menanggulangi dan seterusnya terhadap aliran sesat atas nama perlindungan masyarakat maupun ketertiban umum.

---

<sup>187</sup> Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sampai saat ini masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

### **A.1.1 Kebijakan UU No 1 Pnps1965**

#### **a. Sejarah dan Landasan Yuridis**

Merunut aspek kesejarahan kebijakan penanggulangan mengenai delik-delik agama (termasuk aliran sesat) sampai dikeluarkannya UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965 berdasarkan pertimbangan timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Ajaran dan perbuatan aliran-aliran itu telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama,<sup>188</sup>.

Tugas-tugas untuk melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran keagamaan paling tidak telah dimulai sejak tahun 1954 ketika RI masih berdasarkan UUDS 1950. Latar belakang perlunya pemerintah menangani tugas-tugas itu mengingat masa awal tahun 1950 an banyak terjadi perkawinan di beberapa daerah yang dilaksanakan oleh penganut aliran kepercayaan dengan tata perkawinan sendiri. Selain itu banyak muncul aliran kepercayaan yang menyatakan dalam ajarannya, bahwa aliran tersebut mempunyai nabi dan kitab suci sendiri.<sup>189</sup>

Perdana Menteri RI telah membentuk Panitia Interdepartemental Peninjauan Kepercayaan - kepercayaan di dalam Masyarakat (Panitia Interdep Pakem) dengan Surat Keputusan No. 167/PROMOSI/1954. Panitia diketuai

---

<sup>188</sup> Lihat penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 romawi I angka 1

<sup>189</sup> Djoko Prakoso *Tugas-tugas Kejaksaan di bidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta, 1989: hal 1,2

oleh RHK Sosrodanukusumo, Kepala Jawatan Reserse Pusat Kejaksaan

Agung pada Mahkamah Agung RI dengan tugas sebagai berikut: <sup>190</sup>

- Mempelajari dan menyelidiki bentuk; corak dan tujuan dari kepercayaan/kepercayaan di dalam masyarakat beserta cara-cara perkawinaan yang terjadi di dalam masyarakat.
- Mempertimbangkan mengusulkan kepada Pemerintah, Peraturan peraturan/ Undang - undangan yang mengatur apa yang tersebut pada Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 dan membatasinya untuk ketentraman kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 33 UUD Sementara RI.

Secara struktural, baru pada tahun 1958 Kejaksaan Agung RI membentuk Bagian Gerakan Agama dan Kepercayaan Masyarakat, dan pada Tahun 1960 bagian ini ditingkatkan menjadi Biro Pakem dengan tugas mengkoordinir tugas pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan di dalam masyarakat bersama instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kepentingan keagamaan dan ketertiban umum. <sup>191</sup>

Selanjutnya pada tahun 1963 diadakan seminar hukum nasional pertama yang menghasilkan sebuah resolusi, bahwa perlu dimasukkan delik agama di dalam KUHP yang akan datang. Ide dasar pentingnya delik agama ini di dalam KUHP nasional adalah sila pertama dari negara ini, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. <sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> Ibid

<sup>191</sup> Ibid hal 2

<sup>192</sup> Aliansi Nasional Reformasi KUHP- Komnas HAM – USAID – DRSP, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaharuan KUHP*, Notulensi diskusi panel C, Konsultasi Publik RUU KUHP dengan tema “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Reformasi KUHP*” Jakarta 4 Juli 2007: hal 6

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, **Oemar Senoadji** mengemukakan teori mengenai delik agama, yaitu;<sup>193</sup>

1. **Religionsschutz Theorie** (teori perlindungan “agama”), yaitu teori yang memandang “agama” itu ansich sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/ diamankan oleh negara
2. **Gefuhlsschutz Theorie** (teori perlindungan “perasaan keagamaan), yaitu teori yang memandang rasa (perasaan, pen) keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi
3. **Friedensschutz Theorie** (teori perlindungan “perdamaian/ ketentraman umat beragama), yaitu yang memandang kedamaian/ ketentraman beragama interkonfessional (di antara pemeluk agama/ kepercayaan). Jadi lebih tertuju pada ketertiban/ ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi

Singkatnya, pada tanggal 27 Januari 1965, ditetapkanlah UU No 1 Pnps 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 UU No 1 Pnps 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156 a. Penambahan tersebut didasarkan pada usul dan saran Oemar Seno Adji dalam Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963.

Secara yuridis, penanggulangan terhadap tindak pidana agama, Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, bab I angka 2 menyatakan;

Telah ternyata, bahwa akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama

Di antara ajaran-ajaran/ perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/ atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah

---

<sup>193</sup> Oemar Senoadji, 1976 loc.cit hal 75. Lihat juga, Barda awawi Arief, , 2007, op.cit hal 2



banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.

Melihat uraian dan penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, maka latar belakang munculnya UU No. 1/PNPS/1965 adalah sebagai berikut;<sup>194</sup>

- sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang tidak dapat dipisahkan dengan agama, merupakan landasan moral dan landasan kesatuan nasional
- banyak muncul aliran kepercayaan yang menyatakan dalam ajarannya, bahwa aliran tersebut mempunyai nabi dan kitab suci sendiri
- aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama
- aliran-aliran tersebut sudah banyak menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama.
- menyalahgunakan dan/ atau mempergunakan agama sebagai pokok sangat membahayakan agama-agama yang ada.
- ketentraman beragama perlu di pupuk dengan melakukan pencegahan terhadap “penyelewengan terhadap ajaran pokok agama” dan “penodaan agama serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama

Selanjutnya, tujuan dikeluarkannya UU No. 1/PNPS/1965 adalah sebagai berikut;

1. Perlindungan terhadap kesatuan nasional

---

<sup>194</sup> Bandingkan; K. Wantjik Saleh; latar belakang dikeluarkannya UU No 1 tahun 1965;

- sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang tidak dapat dipisahkan dengan agama, merupakan landasan moral dan landasan kesatuan nasional (penjelasan umum no 1)
- banyaknya penyimpangan dan penodaan agama telah menimbulkan bahaya bagi persatuan nasional dan bahaya bagi agama serta ketentraman beragama (penjelasan umum nomor 2-4)
- ketentraman beragama perlu di pupuk dengan melakukan pencegahan terhadap “penyelewengan terhadap ajaran pokok agama” dan “penodaan agama serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama” (penjelasan umum nomor 4)

K. Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHPidana*, Ghalia Indonesia, 1976 hal 103, lihat juga Barda Nawawi Arief, 2007 op.cit hal 8

Dalam penjelasan umum angka 1 aliena kedua dinyatakan, “.....tetapi juga memastikan *kesatuan nasional*”. Jadi yang menjadi objek perlindungan adalah persatuan nasional

2. perlindungan terhadap ketentraman beragama,

Dalam penjelasan umum Bab I angka 4 UU No 1 tahun 1965, tujuannya adalah *ketentraman* beragama. Jadi yang menjadi titik fokus tujuan undang-undang ini adalah ketentraman. Berbicara masalah ketentraman, pasti selalu terkait dengan masalah ketertiban umum, yang jika dibiarkan bisa memecah *persatuan nasional*.<sup>195</sup>

3. perlindungan ansich terhadap agama.

Penjelasan umum Bab I angka 4 UU No 1 tahun 1965 menyatakan, bahwa tujuan dari dikeluarkannya UU No 1 tahun 1965 adalah ;*Pertama*, mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari “ajaran agama” yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan. *Kedua*, Melindungi dari penodaan/ penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan dan penodaan terhadap agama, undang-undang No 1 Pnps 1965 menyatakan;

---

<sup>195</sup> lihat kembali penjelasan umum angka 2 UU No 1 Pnps 1965

## Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; *penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu*.

Jadi menurut Pasal di atas, objek yang hendak dilindungi adalah “agama”, sebagaimana terlihat dari rumusan, “....penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran **agama** itu”.

Sedangkan Pasal 4 UU No 1 Pnps 1965 jo Pasal 156 a huruf a KUHP menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu **agama** yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut **agama** apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 4 No 1 Pnps 1965 di atas menjadi Pasal 156 a pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Aturan ini juga pada hakikatnya juga ditujukan untuk melindungi “agama” dari penodaan, penyalahgunaan atau penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Patut dicatat, bahwa agama-agama yang hendak dilindungi dalam undang-undang ini, penjelasan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 menyatakan;

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang di berikan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka

mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini.

Selain 6 agama sebagaimana disebutkan, masih ada agama lain yang mendapat jaminan sama, seperti penjelasan selanjutnya menyatakan;

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya; Jahudi, Zaratustrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkannya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain

Patut dicatat, selain agama-agama tersebut dalam penjelasan UU No 1 Pnps 1965 sebagai agama “resmi” (agama yang diakui); Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha, kemudian kini Konghucu, masuk ke [Nusantara](#) atau [Indonesia](#), di setiap daerah telah ada agama-agama “tidak resmi” atau kepercayaan asli seperti ;<sup>196</sup>

- [Sunda Wiwitan](#) yang dipeluk oleh [masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten](#); *Sunda Wiwitan aliran Madrais*, juga dikenal sebagai agama *Cigugur* (dan ada beberapa penamaan lain) di [Cigugur, Kuningan, Jawa Barat](#);
- agama *Buhun* di Jawa Barat; *Kejawen* di [Jawa Tengah](#) dan [Jawa Timur](#); agama *Parmalim*, agama asli [Batak](#); agama *Kaharingan* di [Kalimantan](#); *kepercayaan Tonaas Walian* di [Minahasa, Sulawesi Utara](#); *Tolottang* di [Sulawesi Selatan](#); *Wetu Telu* di [Lombok](#); *Naurus* di [Pulau Seram](#) di Propinsi [Maluku](#), dan lain-lain.

Agama-agama asli Nusantara tersebut didegradasi sebagai ajaran [animisme](#), penyembah berhala/ batu atau hanya sebagai [aliran kepercayaan](#). Hingga kini, tak satu pun agama-agama dan kepercayaan asli Nusantara yang diakui di [Republik Indonesia](#) sebagai agama dengan hak-

---

<sup>196</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Agama\\_Aslis\\_Nusantara](http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Aslis_Nusantara), di akses pada tanggal 17 Januari 2008

hak untuk dicantumkan di KTP, Akta Kelahiran, pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil ,dan sebagainya.<sup>197</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dan jaman, “agama asli nusantara” semakin punah dan menghilang, walaupun ada yang menganutnya, biasanya berada didaerah pedalaman seperti contohnya pedalaman [Sumatera](#) dan pedalaman [Irian Jaya](#). Data Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 mengungkapkan, dari 245 aliran kepercayaan yang terdaftar, jumlah total penghayat mencapai 400 ribu jiwa lebih.<sup>198</sup>

Sampai saat ini, Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 ini dikenal dengan delik penyimpangan/ penyelewengan agama. Penyimpangan agama menurut Pasal ini adalah, “.....perbuatan-perbuatan penafsiran dan kegiatan mana *menyimpang* dari pokok-pokok ajaran agama itu”

Jadi, inti yang terlarang menurut Pasal 1 di atas ialah “melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Dengan kata lain, mencegah agar jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan/ penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.

Pada prinsipnya setiap orang itu boleh dan dibenarkan untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan, sebab hal ini merupakan kebebasan dan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945, hanya saja perbuatan melakukan penafsiran

---

<sup>197</sup> Ibid

<sup>198</sup> Ibid

dan kegiatan-kegiatan keagamaan itu bukannya tanpa syarat, syaratnya adalah undang-undang. Sedangkan syarat melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan menurut undang-undang ini adalah “tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”

Selanjutnya Pasal 156 a KUHP menyatakan;

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, **penyalahgunaan** atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melihat rumusan teks Pasal 156 a KUHP di atas, unsur-unsur yang dilarang dalam Pasal 156 a KUHP adalah “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” yang diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut;

- yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan (Pasal 156 a huruf a KUHP)
- dengan maksud tidak menganut/meniadakan (Pasal 156a huruf b KUHP)

Jadi, kebebasan “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” keagamaan menurut Pasal 156 a KUHP ini pada prinsipnya sama dengan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965. Artinya, siapapun boleh dan dibenarkan untuk “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” keagamaan, sebab hal ini juga merupakan kebebasan dan hak asasi manusia yang sepenuhnya dijamin oleh undang-undang, khususnya Pasal 29 UUD 1945..

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus juga hak asasi masyarakat, termasuk kebebasan seseorang di dalam berideologi, beragama, berkepercayaan dan berkeyakinan, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan lain sebagainya, namun bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan. kebebasan itu pasti selalu bersyarat dan tidak melampaui batas, batasnya adalah hukum atau undang-undang.

Pasal 28J UUD 1945 (amandemen ke-2) menyatakan;

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan hak dan **kebebasannya**, setiap orang **wajib tunduk kepada pembatasan** yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bertitik tolak dari Pasal 28J UUD 1945 (amandemen ke-2) di atas, kebebasan dalam berideologi, beragama, berkepercayaan dan berkeyakinan, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan lain sebagainya dibatasi oleh;

- hak dan kebebasan orang lain dan,
- undang-undang,

Selanjutnya hak dan kebebasan seseorang dibatasi dan diatur dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia, di antaranya sebagaimana terdapat dalam KUHP dan UU No 1 Pnps 1965.

Syarat dan batasan melakukan “penafsiran, kegiatan-kegiatan keagamaan, mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan keagamaan” menurut undang-undang ini adalah;

- tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama ,
- tidak bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan,
- tidak bermaksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, siapapun yang melakukan “penafsiran, kegiatan-kegiatan keagamaan, mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan keagamaan” yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama , bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, konsekuensinya, berdasarkan undang-undang ini, dilarang dan diancam dengan sangsi pidana.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, rumusan delik yang ada dalam UU No 1 Pnps 1965 ada dua, yaitu ;

- Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 , “penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”, penempatannya tetap berada dalam UU No 1 Pnps 1965, dan;
- Pasal 4 UU No 1 Pnps 1965 dikenal dengan delik delik permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia permusuhan, penyalahgunaan, penodaan dan peniadaan agama. Selanjutnya ditempatkan di KUHP sebagai Pasal 156 a yang berada dalam bab ketertiban umum.

Bertitik tolak dari pengaturan demikian, secara normatif ada perbedaan mendasar tentang kebijakan penanggulangan terhadap pelanggar Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 dan kebijakan penanggulangan terhadap pelanggar Pasal 156 a KUHP, dengan kata lain; seseorang/ badan/ aliran yang melanggar



Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965, kebijakan penanggulangannya dilakukan dengan cara sebagaimana dinyatakan Pasal 2 dan 3 UU No 1 Pnps 1965. Sedangkan seseorang/ badan/ aliran yang melanggar Pasal 156 a KUHP langsung diproses melalui serangkaian penyidikan, penuntutan dan peradilan.

#### **b. Tugas dan Fungsi Institusi Pemerintah Dalam Penanggulangan Aliran Sesat**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kebijakan penanggulangan aliran sesat dapat dilihat dari tugas-tugas untuk melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran keagamaan, paling tidak telah dimulai sejak tahun 1954 ketika RI masih berdasarkan UUDS 1950.

Latar belakang perlunya pemerintah menangani tugas-tugas itu mengingat masa awal tahun 1950-an banyak terjadi perkawinan di beberapa daerah yang dilaksanakan oleh penganut aliran kepercayaan dengan tata perkawinan sendiri. Selain itu banyak muncul aliran kepercayaan yang menyatakan dalam ajarannya, bahwa aliran tersebut mempunyai nabi dan kitab suci sendiri.<sup>199</sup>

Perdana Menteri RI telah membentuk Panitia Interdepartemental Peninjauan Kepercayaan - kepercayaan di dalam Masyarakat (Panitia Interdep Pakem) dengan Surat Keputusan No. 167/PROMOSI/1954. Panitia diketuai oleh RHK Sosrodanukusumo, Kepala Jawatan Reserse Pusat

---

<sup>199</sup> Djoko Prakoso, 1989. op.cit hal 2

Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung RI dengan tugas sebagai berikut:<sup>200</sup>

1. Mempelajari dan menyelidiki bentuk; corak dan tujuan dari kepercayaan/kepercayaan di dalam masyarakat beserta cara-cara perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Mempertimbangkan mengusulkan kepada Pemerintah, Peraturan peraturan/ Undang - undang yang mengatur apa yang tersebut pada Pasal 1 di atas dan membatasinya untuk ketentraman kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 33 UUD Sementara RI.

Sebelum UU No 1 Pnps 1965 dikeluarkan, pada tahun 1958 Kejaksaan Agung RI membentuk Bagian Gerakan Agama dan Kepercayaan Masyarakat, dan pada Tahun 1960 bagian ini ditingkatkan menjadi Biro Pakem dengan tugas mengkoordinir tugas pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan di dalam masyarakat bersama instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kepentingan keagamaan dan ketertiban umum.<sup>201</sup>

Pada tanggal 7 April 1961 dikeluarkan surat edaran Departemen Kejaksaan Biro Pakem Pusat No. 34/Pakem/S.E./61 tertanggal 7 April 1961 yang ditandatangani oleh Menteri/Jaksa Agung Mr. R. Gunawan. Dalam surat edaran itu tercantum tugas-tugas yang harus dijalankan oleh bagian Pakem, yaitu;<sup>202</sup>

- mengikuti, memperhatikan, mengawasi gerak-gerik serta perkembangan dari semua gerakan agama, semua aliran-aliran kepercayaan / kebatinan,
- memeriksa/mempelajari buku-buku brosur-brosur keagamaan/aliran kepercayaan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, demi kepentingan dan ketertiban umum.

---

<sup>200</sup> Ibid hal 1,2

<sup>201</sup> Ibid. hal 2

<sup>202</sup> Ibid

Surat Instruksi Jaksa Agung No. 1/Insr/Secr/1963 memperjelas tugas-tugas Pakem. Dirumuskan bahwa pengawasan diarahkan kepada gejala-gejala yang dapat menghalangi jalannya pembangunan seperti:

1. Ajaran-ajaran/gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban/keamanan umum.
2. Ajaran-ajaran/gerakan gerakan yang dapat merugikan para pengikutnya atau masyarakat umumnya di bidang mental spirituil dan materiil.

Dalam hal suatu gerakan agama/aliran kepercayaan menampakkan tanda-tanda dan kecenderungan ke arah kesesatan, maka Tim Pakem Harus Mengambil tindakan pencegahan. Selanjutnya pada tahun 1965 dikeluarkanlah 1 UU No 1 Pnps 1965 yang intinya mengatur tentang kebijakan Pencegahan Penyalah Gunaan Dan/ Atau Penodaan Agama

Secara garis besar, kebijakan penanggulangan terhadap seseorang/ badan/ aliran yang melanggar Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 yang melakukan penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu adalah sebagai berikut;

- melakukan “penafsiran” dan “kegiatan keagamaan” menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu
- diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Pnps 1965)
- pembubaran organisasi / aliran kepercayaan atau menyatakannya sebagai organisasi terlarang oleh Presiden RI setelah memperoleh

pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Pnps 1965)

- apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, (Pasal 3 UU No 1 Pnps 1965)
- Ancaman hukuman yang ditentukan oleh undang - undang ini maksimum 5 (lima) tahun pidana penjara.

Melihat rumusan Pasal 2 di atas, maka kebijakan untuk memberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan adalah;

1. Menteri Agama,
2. Menteri/ Jaksa Agung dan;
3. Menteri Dalam Negeri.

Hal ini berarti, bahwa dilihat dari segi kebijakan hukum pidana, maka secara yuridis (dijamin oleh undang-undang), Menteri Agama (Departemen Agama), Menteri/ Jaksa Agung (Kejaksaan RI) dan Menteri Dalam Negeri (Departemen Dalam Negeri) memiliki hak untuk melakukan serangkaian kebijakan berupa memberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan terhadap siapa saja yang melanggar pasal 1 UU No Pnps 1965 terurai sebagai berikut;

## 1. Menteri Agama (Departemen Agama)

Implementasi ketentuan konstitusi yang mengatur jaminan negara atas kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, maka organisasi pemerintahan yang mempunyai tugas di bidang ini menurut ketentuan Pasal 2 UU No 1 Pnps 1965 adalah Menteri Agama/ Departemen Agama.

Departemen Agama sebagai salah satu unit birokrasi pemerintah yang diberi tanggung jawab sebagai pengendali dan pengarah kegiatan keagamaan dan pembangunan bidang agama sebagai pelaksanaan amanat GBHN. Secara garis besar adalah sebagai berikut;<sup>203</sup>

1. Menetapkan ideologi Pancasila di kalangan umat beragama.
2. Memantapkan stabilitas dan keamanan Nasional.
3. Meningkatkan partisipasi umat beragama dalam Pembangunan Nasional dan mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, dan mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Berdasarkan kerangka kerja di atas, dirumuskan suatu kebijaksanaan program Pembangunan Lima Tahun yang meliputi: <sup>204</sup>

- Bimbingan kehidupan beragama.
- Kerukunan hidup beragama.
- Pendidikan agama.
- Pembinaan Badan-badan Peradilan Agama.
- Kegiatan Lintas Sektoral.
- Sarana kehidupan beragama.
- Pembinaan aparatur dan sarana fisik

---

<sup>203</sup> Redaksi, *Era Pembangunan 25 Tahun*. CV Sumadjaja, Bandung. 1973. hal. 146.

<sup>204</sup> Abdul Munir Mul Khan. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam*, Rajawali Pers, Jakarta 1989. hal 99

Operasionalisasi kebijaksanaan program tersebut di atas dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip operasional Pembangunan Lima Tahun yaitu.<sup>205</sup>

- Pelestarian Pancasila.
- Kemerdekaan beragama.
- Sejalan dengan tujuan Pembangunan Nasional.
- Keserasian dan kesesuaian dengan P4.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, tugas dan wewenang Departemen Agama adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Segi pemerintahan umum adalah dalam tertib eksistensi dan gerak langkahnya, sedang segi pembangunan adalah dalam bimbingan kemasyarakatan melalui Ditjen-Ditjen Bimas yang bersangkutan. Ditjen Bimas yang ada sekarang adalah Ditjen Bimas Islam dan Haji. Ditjen Bimas Katolik dan Protestan. Ditjen Bimas Hindu dan Budha.<sup>206</sup>

## **2. Menteri/ Jaksa Agung (Kejaksaan RI)**

Jaksa Agung/Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai berbagai tugas dan wewenang, di antaranya dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dengan menyelenggarakan kegiatan. Terkait dengan hal ini maka Pasal 30 ayat (3) huruf e UU no 16 tahun 2004 menyatakan,<sup>207</sup>

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum,

---

<sup>205</sup> Ibid

<sup>206</sup> Zaini Ahmad Noeh, *Berawal dari mobilisasi Tokoh Pergerakan Islam*, Artikel pada Republika, 6 Januari 1995, hal. 8.

<sup>207</sup> Lihat, Pasal 2 ayat (3) UU No 15 tahun 1961 jo Pasal 27 ayat (3) huruf e UU No 5 tahun 1991 jo Pasal 30 ayat (3) huruf e UU no 16 tahun 2004. Lihat pula, Marwan Effendi, *Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005, hal 222, 258, 266

- c. pengamanan peredaran barang cetakan,
- d. *pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara,*
- e. *pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama,*
- f. penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal.

Penjelasan Pasal 30 UU No 30 UU No 16 tahun 2004, menyatakan, bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan/edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, yang dimaksud dengan “ turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerjasama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.<sup>208</sup>

### 3. Menteri Dalam Negeri (Departemen Dalam Negeri)

Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini membawahi Departemen Dalam Negeri. Dalam pertimbangan huruf (e) UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah menyatakan;

Bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam *membina kestabilan politik* serta *kesatuan Bangsa* ,maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi

---

<sup>208</sup> Lihat, Pasal 2 ayat (3) UU No 15 tahun 1961 jo Pasal 27 ayat (3) huruf e UU No 5 tahun 1991 jo Pasal 30 ayat (3) huruf e Uu no 16 tahun 2004. Lihat pula, Marwan Effendi, 2005, op.cit hal 222, 258, 266

Berdasarkan Pasal 7 UU No 5 tahun 1974, daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 81 UU No 5 tahun 1974 menyatakan, bahwa Kepala Wilayah memiliki kewenangan sebagai berikut;

- a. membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan, ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- b. melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan Bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah

UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah yang selanjutnya digantikan oleh UU No 32 tahun 2004, terkait dengan masalah ini, pada prinsipnya memberikan pengaturan yang sama. Bahkan secara tegas dalam Pasal 10 ayat (3) pada intinya menyatakan, bahwa ***urusan agama itu wewenang pusat, kecuali di delegasikan kepada daerah.***

Patut dicatat, UU No 1 Pnps 1965 tidak merumuskan atau menjelaskan secara tegas tentang ***instansi yang paling berhak*** untuk melakukan pengawasan dan atau penilaian terhadap suatu aliran. Konsekuensi dari pengaturan demikian terkesan masing-masing instansi memiliki kewenangan yang sama.

UU No 1 Pnps 1965 hanya memberi kewenangan kepada Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri serta kewenangan untuk memberikan peringatan keras kepada aliran/paham yang dianggap



menyimpang (baca:sesat), sedangkan tindakan pembubaran dan pelarangan diberikan kepada Presiden RI.

Artinya, sebelum suatu aliran/ paham agama atau aliran kepercayaan diberi peringatan keras atau dilarang/ dibubarkan, maka tahapan awal yang harus dilakukan adalah pengawasan oleh tiga instansi tersebut di atas. Dengan kata lain, sebelum suatu aliran diberi peringatan keras atau dibubarkan, tiga instansi inilah yang melakukan pengawasan dan atau penelitian menyimpang atau tidaknya suatu aliran.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka pembinaan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan Bangsa, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama menjadi tanggung jawab bersama, dalam hal ini menurut UU No 1 Pnps 1965, yaitu Departemen Agama, Kejaksaan RI dan Departemen Dalam Negeri.

Mengingat keberadaan aliran sesat ini juga terkait dengan aspek-aspek kebebasan beragama dan juga menyangkut kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, maka di samping Departemen Agama, Kejaksaan RI dan Departemen Dalam Negeri, terdapat beberapa instansi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;

## - **Kepolisian Republik Indonesia**

Tugas-tugas pokok dan wewenang Kepolisian RI berdasarkan Pasal 2 UU No 13 tahun 1961 yang berkaitan dengan pokok bahasan tulisan ini adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.<sup>209</sup>

Berdasarkan UU No 28 tahun 1997 jo UU No 2 tahun 2002 fungsi Kepolisian RI terkait dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut;

### Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

---

<sup>209</sup> Sadijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governace*, LaksBang, Yogyakarta, 2005, hal 122

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Selanjutnya tugas-tugas pokok dan wewenang Kepolisian RI berdasarkan UU No 28 tahun 1997 jo UU No 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. ***memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;***
- f. ***melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;***
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;**
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 15 ayat (1)

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;**
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Jadi, dalam rangka menanggulangi masalah-masalah aliran sesat, UU

No 28 tahun 1997 jo UU No 2 tahun 2002 pada intinya memberikan tugas

dan wewenang kepada Kepolisian RI untuk menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; *mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;*

- **Departemen Pertahanan Keamanan**

Bahwa di samping UU No 28 tahun 1997 jo UU No 2 tahun 2002 (Kepolisian RI), masih ada lagi peraturan yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu UU No 20 tahun 1982 jo UU No 2 tahun 2002 UU No 20 tahun 1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia jo UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu;

Pasal 6

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa,serta *menanggulangi setiap ancaman.*

Pasal 7 ayat (3)

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Pasal 10 ayat (3) huruf d

Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk ikut serta secara *aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional*

Bertitik tolak dari sekian undang-undang yang telah dipaparkan, hanya UU No 15 tahun 1961 jo UU No 5 tahun 1991 jo UU No 16 tahun 2004 tentang **Kejaksaan RI**, dan UU No 13 tahun 1961 jo UU No 28 tahun 1997 tentang **Kepolisian RI** yang secara tegas **memberikan kewenangan melakukan pengawasan** terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat, negara dan bangsa dan pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama.

Hal ini berarti bahwa seolah-olah yang paling berwenang melakukan kebijakan penanggulangan terhadap aliran/ paham keagamaan dan aliran kepercayaan adalah Kejaksaan RI dan Kepolisian RI. Namun demikian, pada prakteknya hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Artinya instansi yang lain tidak bisa diabaikan begitu saja, terutama Departemen Agama yang secara khusus memang memiliki kompetensi di bidang keagamaan.

Patut dicatat, ada beberapa hal mendasar mengenai kebijakan penanggulangan aliran sesat/ kepercayaan sebagai berikut;

- bahwa UU No 1 Pnps 1965 mengamanatkan kepada Menteri agama/ Departemen Agama, Jaksa Agung/ Kejaksaan RI, dan Menteri Dalam Negeri/ Departemen Dalam Negeri untuk memberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama
- bahwa UU No 28 tahun 1997 tentang Kepolisian RI dan UU No 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan

Keamanan Negara Republik Indonesia, memberikan tugas dan wewenang mengenai perlindungan masyarakat, menciptakan ketertiban umum dan lain sebagainya.

- bahwa keberadaan aliran sesat/ kepercayaan terkait erat dengan masalah agama dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka merealisasikan UU No 1 Pnps 1965, mutlak **diperlukan suatu koordinasi** yang baik antar instansi, karena bagaimanapun juga, aliran sesat terkait erat dengan masalah penyimpangan, penistaan, penyalahgunaan, bahkan penistaan agama dan terkait erat pula dengan masalah ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Contoh koordinasi antar departemen yang pernah dilakukan dalam menanggulangi adalah sebagai berikut:<sup>210</sup>

Kasus Ahmadiyah Lobok Barat, menurut TGH Mahally Fikri, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok barat, warga sudah lama menolak keberadaan anggota Ahmadiyah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar telah menyatakan ajaran Ahmadiyah sebagai terlarang dalam SK Bupati Lobar No. 35/2001.<sup>211</sup> Instruksi pelarangan tersebut diterbitkan setelah Pemkab Lobar **berkoordinasi** dengan MUI Lobar dan Departemen Agama.

Berbagai instansi sebagaimana diuraikan, pada hakikatnya memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban untuk

- mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
- memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat beragama

---

<sup>210</sup> Gatra, Edisi VI 13 Maret 2006

<sup>211</sup> Pelarangan terhadap suatu ajaran menurut UU No 1 Pnps 1965 bukan dilakukan oleh Bupati

- melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat, negara dan bangsa
- pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama

Jadi, uraian di atas menunjukkan, bahwa koordinasi antar instansi dalam penanggulangan suatu aliran yang diduga menyimpang dari pokok-pokok agama itu, mutlak diperlukan. Hal ini penting, sebab untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu aliran dikategorikan sebagai aliran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi saja, apalagi UU No 1 Pnps 1965 menyatakan menunjuk secara tegas, tiga instansi yang berhak untuk memberikan peringatan.

Artinya, tidak bisa, misalnya Departemen Agama saja tanpa koordinasi dengan instansi yang lain tiba-tiba mengambil kebijakan dan menyatakan suatu aliran keagamaan tertentu sebagai aliran sesat, karena sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa aliran sesat terkait erat dengan masalah ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang harus ditangani oleh berbagai departemen.

### **c. Mekanisme Penanggulangan Aliran Sesat**

Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 menyatakan;

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana *menyimpang* dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Selanjutnya Pasal 2 UU No 1 Pnps 1965 menyatakan;



- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 di atas, mengisyaratkan adanya larangan untuk melakukan penafsiran dan kegiatan mana *menyimpang* dari pokok-pokok ajaran agama. Jadi, jika diindikasikan terdapat perbuatan terlarang sebagaimana pasal 1 UU No 1 Pnps 1965, maka berdasarkan pasal 2 UU No 1 Pnps 1965, Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri berhak memberikan *peringatan keras* untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama.

Patut dicatat, sebelum dikeluarkan UU No 1 Pnps 1965, pada tahun 1958 Kejaksaan Agung RI membentuk Bagian Gerakan Agama dan Kepercayaan Masyarakat, dan pada tahun 1960 bagian ini ditingkatkan menjadi Biro Pakem dengan tugas mengkoordinir tugas pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan di dalam masyarakat bersama instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kepentingan keagamaan dan ketertiban umum.<sup>212</sup>

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No Kep-108/J.A/1984 tertanggal 15 Januari 1994, tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, tugas-tugas

---

<sup>212</sup> Djoko Prakoso, 1989.op.cit. hal 2

bidang Pakem ternyata harus melibatkan instansi-instansi pemerintah lainnya sehingga penyempurnaan organisasi perlu diadakan (Tahun 1984 dan terakhir pada tahun 1994) yaitu dengan membentuk suatu team, Team Pakem, yang terdiri dari Team Pakem Pusat, Team Pakem Daerah Propinsi dan Team Pakem Daerah Kabupaten/ kota. Baik Tim Pakem Pusat, Propinsi ataupun Kabupaten selalu **dipimpin oleh pimpinan Kejaksaan RI** ditambah dengan anggota-anggota yang merupakan wakil-wakil dari Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ABRI (Mabes ABRI/ Kodam/ Korem/ Kodim, Mabes POLRI/ Polda/ Polwil/ Polres).<sup>213</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tugas Kejaksaan RI sangat penting dalam rangka penanggulangan aliran kepercayaan masyarakat (aliran sesat), dengan alasan yuridis sebagai berikut;

- Keputusan Presiden RI No 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
  - Pasal 5 ayat (1) huruf e yang intinya menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang melakukan **pencegahan dan pelarangan** terhadap penyalahgunaan dan /atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - Pasal 12 huruf (d) yang intinya menyatakan, bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik **preventif maupun represif** mengenai masalah aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan/ atau penodaan

---

<sup>213</sup> Lihat Surat Keputusan Jaksa Agung RI No Kep-108/J.A/1984 tertanggal 15 Januari 1994, tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Lihat pula Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, 2001.op.cit. hal 160

agama, persatuan kesatuan bangsa, lingkungan hidup serta penanggulangan tindak pidana umum

- Keputusan Jaksa Agung RI, No Kep-115/J.A/ 10/ 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
  - Pasal 145 huruf (c), intinya Direktorat Sosial dan Politik menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan, penggalangan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan atau turut menyelenggarakan ketertiban, ketentraman umum, pengamanan pembangunan serta hasil-hasilnya untuk meanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan dalam mendukung operasi yustisi di bidang ideologi, politik, media massa dan barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, pertahanan keamanan dan ketertiban umum, ***aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, suku, ras.***
  - Pasal 163, Subdirektorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama.
  - Pasal 164, Subdirektorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis
    - b. pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data mengenai Aliran Kepercayaan Masyarakat penyalahgunaan dan penodaan agama terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum
    - c. pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisial yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Aliran Kepercayaan Masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama
    - d. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya

- e. penyiapan bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan mengenai masalah di bidang aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama
- f. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja penghimpunan dan pengadministrasian laporan aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama

- Pasal 166 ayat;

- (1) Seksi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang aliran kepercayaan masyarakat
- (2) Seksi Pengawasan kegiatan Keagamaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan data sebagai bahan laporan intelijen berkala, insidentil dan perkiraan keadaan, serta melakukan kegiatan dan tindakan untuk mendukung operasi yustisi dalam rangka menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di bidang pengawasan penyalahgunaan dan penodaan agama

Jadi, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No Kep-108/J.A/1984 tertanggal 15 Januari 1994,<sup>214</sup> tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keputusan Presiden RI No 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka tugas-tugas Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dilakukan oleh Kejaksaan RI. Pada posisi inilah berbagai instansi Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri,

---

<sup>214</sup> Lihat, Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, 2001.op.cit. hal 160

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ABRI (Mabes ABRI/ Kodam/ Korem/ Kodim, Mabes POLRI/ Polda/ Polwil/ Polres).

Keterlibatan berbagai instansi sebagaimana disebutkan, merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan, mengingat masalah aliran sesat (aliran kepercayaan dalam masyarakat) sangat terkait erat dengan masalah agama dan kepercayaan. Pada posisi inilah, maka kemudian Departemen Agama sangat memiliki peran penting untuk mempertimbangkan menyimpang atau tidaknya suatu aliran kepercayaan dalam masyarakat. Sedangkan departemen lainnya memiliki peran lain, terutama dalam ketertiban dalam masyarakat.

Untuk menilai suatu ajaran, khususnya aliran-aliran keagamaan menyimpang dari ajaran yang pokok, Departemen Agama pada batas-batas tertentu memang mempunyai kemampuan untuk melakukan kajian atau penelitian. Hal ini dimungkinkan karena secara historis Departemen Agama dipimpin oleh ulama-ulama baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>215</sup> Atau dengan kata lain, Departemen Agama adalah instansi yang menangani bidang keagamaan.

Walaupun secara organisasi Departemen Agama memiliki bagian-bagian khusus yang menangani masalah kehidupan beragama, namun ketika menyangkut masalah hukum-hukum agama, Departemen Agama tidak bisa secara sepihak memutuskan dan “memaksakan” sebuah hukum agama, karena ini sudah masuk wilayah internal masing-masing agama. Oleh karena

---

<sup>215</sup> Zaini Ahmad Noeh, Artikel, 1995, op.cit hal. 8

itu pendapat para alim ulama yang bisa berupa “fatwa” atau “ijmak” merupakan faktor penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja.

Ijmak merupakan salah satu Ushul Fiqh yang berarti konsensus kesepakatan para ulama mengenai satu masalah masyarakat yang berdimensi hukum.<sup>216</sup> Ijma’ merupakan salah satu sumber hukum Islam.<sup>217</sup> Dalam banyak hal, ijma’ sangat membantu umat Islam sebagai pedoman dalam memutuskan, menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama.

Begitu pentingnya peran para alim ulama di bidang agama, tanggal 30 Nopember 1974, Soeharto pada saat menerima peserta Lokakarya Mubaligh Seluruh Indonesia menyerukan agar dibentuk suatu forum antar agama, di mana para ulama dan pemuka-pemuka agama yang terdapat di Indonesia dapat berhimpun, berembuk dan bekerjasama untuk terus menerus memupuk kerukunan dan saling pengertian. Untuk itulah pada tanggal 21 s/d 27 Juli 1975 diadakan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama (MUI). Salah satu hasilnya adalah terbentuknya Majelis Ulama Indonesia.<sup>218</sup>

Walaupun telah ada komisi Fatwa MUI, namun fatwa MUI tidak memiliki daya ikat dalam penanganan penyimpangan aliran keagamaan/kepercayaan. Artinya, dalam penanganan suatu aliran keagamaan/kepercayaan, pemerintah bisa menerima/menyetujui atau menolak fatwa-

---

<sup>216</sup> lihat Jhon Gilissen dan Frits Gorle, 2005. op.cit hal 388

<sup>217</sup> A. Hanafi merumuskan istilah ijma’, kebulatan fuqaha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW. Ijma merupakan sumber yang kuat dalam menetapkan hukum - hukum Islam dan menempati urutan ketiga dalam urutan sumber hukum Islam. Kekuatan ijma sebagai sumber hukum ditunjukkan oleh beberapa ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang mengatakan bahwa kebulatan ahli ilmu dan pikiran menjadi pegangan di samping ayat-ayat Quran yang menyuruh memperkokoh kesatuan dan melarang pemisahan diri. Lihat A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 60.

<sup>218</sup> Team Dokumentasi Presiden RI, *Jejak Langkah Pak Harto, 27 Maret 1973-23 Maret 1978*, Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1991, hal 175, 268.

fatwa yang dikeluarkan MUI. Hal ini mengingat fatwa hanyalah bersifat pendapat yang dikeluarkan sebagai hasil kesepakatan para alim ulama yang terhimpun di dalamnya.

Fatwa MUI dalam banyak hal memang seringkali berkesesuaian dengan sikap pemerintah yang menyebabkan adanya anggapan bahwa MUI hanyalah lembaga yang memberikan legitimasi kehendak pemerintah.<sup>219</sup> Kondisi seperti inilah yang kemudian menyebabkan fatwa MUI justru sering menuai kontroversi,<sup>220</sup> namun demikian fatwa MUI tetap diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai pertimbangan penyimpangan suatu aliran kepercayaan dalam masyarakat, perlu dipertimbangkan terdapat hal-hal pokok sebagai berikut:

- penyimpangan tersebut tidak lebih dari sekedar perbedaan pandangan dan paham dalam menafsirkan suatu ajaran agama, yang memang dalam agama merupakan bagian dari perkembangan sejarah pemikiran agama itu sendiri;<sup>221</sup>
- Penyimpang tersebut merupakan perbuatan terlarang dalam undang-undang, yaitu menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama dan merupakan terlarang menurut .<sup>222</sup>

---

<sup>219</sup> Lihat pendapat Jalaludin Rahmat dalam wawancaranya dengan Mingguan Berita SIMPONI. MUI: Sekedar Melegitimasi Keputusan Pemerintah. Hal. 6. Nomor pengenalan 27 September - 3 Oktober 1994

<sup>220</sup> Walaupun MUI sudah berdiri mulai tahun 1975, sampai saat ini masih banyak yang masih meragukan keberadaan MUI, bahkan dengan nada yang ekstrem, Gus Dur menyebut MUI ikut berperan secara tidak langsung dalam peristiwa kekerasan terhadap penganut aliran agama Jawa Pos, *Pemerintah gagal Jamin Kebebasan Beragama*, 23 Desember 2007 hal 2

<sup>221</sup> Contoh, perbedaan dalam penentuan 1 Syawal tahun Hijriyah (hari raya idul fitri) akhir-akhir ini dapat diartikan sebagai perbedaan pandangan yang biasa.

<sup>222</sup> Contoh Jemaat Ahmadiyah di wilayah Negara Republik Indonesia berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara: tanggal 31-3-1953 No. 26), bagi ummat Islam menimbulkan Keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam, Perpecahan,

Selanjutnya, penjabaran pertimbangan penyimpangan suatu aliran kepercayaan dalam masyarakat terurai sebagai berikut:

1. Perbedaan pandangan dan paham dalam menafsirkan suatu ajaran agama.

Dalam sejarah perkembangan agama-agama di dunia, hampir bisa dipastikan terdapat perbedaan pandangan manusia dalam sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual-ritual menyimpang atau nyeleneh dari agama yang dianutnya. Ini berarti bahwa sejak dahulu, agama selalu menampilkan diri sebagai sebuah “cermin retak”.

Secara internal, keretakan terjadi karena perbedaan cara pemaknaan dan penafsiran atas simbol-simbol dan ajaran agama. Sejak adanya cara pandang yang berbeda dari para tokoh yang berbeda, sejak itulah lahir lahir pula madzhab-madzhab ketuhanan (akidah) atau tauhid dan syari’ah (fikih) serta sufisme dalam agama.<sup>223</sup>

Perbedaan pandangan di atas merupakan sesuatu yang wajar, contohnya perbedaan pandangan pemikiran keagamaan dalam agama Islam khususnya kalangan *ahlus sunnah wal jamaah* . Ada 4 madzhab atau aliran yang memiliki cara pandang dalam menetapkan hukum Islam, misalnya beberapa tahun terakhir antara NU dan Muhammadiyah berbeda pendapat tentang penentuan 1 Syawal tahun hijriyah (penentuan hari raya idul fitri ).

---

khususnya dalam hal ubudiyah (shalat), bidang munakahat dan lain-lain. **Bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara**, [www.eramuslim.com](http://www.eramuslim.com). Diakses 28 Desember 2007

<sup>223</sup> Dalam sejarah perkembangan agama Islam pernah pecah perang Jamal atau perang onta pada tahun 658 M yang melibatkan Siti Aisyah, isteri Nabi, melawan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Sejak itu lahir perbedaan pandangan dan pemikiran mengenai hubungan ketaatan pada pemimpin, dosa besar dan iman yang antara lain berkaitan dengan perebutan kekuasaan khalifah. Pembelaan setiap pihak dengan menggunakan wahyu dan sunnah, melahirkan madzhab-madzhab ketuhanan (akidah) atau tauhid dan syari’ah (fikih) serta sufisme. Lihat, Abdul Munir Mulkhan, 2002 op.cit. hal 21



Contoh selanjutnya adalah perbedaan pandangan mengenai membaca doa *qunut* <sup>224</sup> pada saat solat subuh. Bagi madzhab tertentu, ada yang membaca *qunut*, sementara bagi yang lain tidak membaca *Qunut*. Demikian pula pandangan mengenai ziarah kubur, pelurusan sbarisan pada saat solat, adzan satu kali atau atau dua kali pada saat solat Jum'at,<sup>225</sup> dan lain sebagainya.

Terhadap perbedaan demikian sepatutnya negara tidak boleh memaksakan pendapat golongan tertentu kepada yang lain, dan memang negara tidak akan memasuki wilayah internal perbedaan pemikiran seperti ini.<sup>226</sup> Negara hanya mengambil bagian jika perbedaan itu mengarah pada terjadinya keresahan masyarakat dan berakibat pada munculnya kejahatan terhadap ketertiban umum.

## 2. Penyimpangan dari ajaran-ajaran pokok agama.

Inti larangan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 adalah melakukan *penafsiran* dan *kegiatan* mana *menyimpang* dari *pokok-pokok ajaran agama itu*. Bertolak dari Inti larangan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965, dirasa

---

<sup>224</sup> doa yang dibaca sebelum sujud pada rakaat kedua solat subuh

<sup>225</sup> selengkapnya lihat, *Konflik NU dan Muhammadiyah: Perbedaan Paham Agama Dalam Teori Fungsional Konflik*, dalam Thoha Hamim, et al, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, LkiS Pelangi Aksara, LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007: hal 247-260

<sup>226</sup> Bandingkan dengan pendapat Yusril Ihza Mahendra pada saat Debat Publik “Pro Kontra Syariat Islam” TV One, 16 Juli 2008. 19.00 tentang Syariat Islam:

- Peribadatan: Negara bersifat mengayomi, melindungi dan memfasilitasi
- Privat: Negara tidak berhak memasuki ranah ini. Contoh di bidang perkawinan, negara tidak berhak untuk memaksa orang Islam menikah menurut agama lain.
- Publik: contoh pelanggaran lalulintas. Negara berhak memaksakan, karena hukum publik bersifat memaksa.

penting untuk memperjelas arti dan makna **agama** maupun **pokok-pokok ajaran** agama/ aliran tertentu sebagaimana hal berikut;

**Pertama**, agama menurut [\*Kamus Besar Bahasa Indonesia\*](#) adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada [Tuhan](#), atau juga disebut dengan nama [Dewa](#) atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.<sup>227</sup>

Kata “agama” berasal dari bahasa [Sansekerta](#) *āgama* yang berarti “tradisi”.. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah **religi** yang berasal dari [bahasa Latin](#) *religio* dan berakar pada [kata kerja](#) *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan ber-religi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.<sup>228</sup>

---

<sup>227</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Agama>. diakses pada tanggal 4 Februari 2008.

<sup>228</sup> “Agama” dalam berbagai bahasa adalah sebagai berikut;

- Sansekerta , kata "agama" berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti "tradisi". Dalam bahasa Sansekerta artinya tidak bergerak (Arthut Mac Donnell). Agama itu kata bahasa Sansekerta (yaitu bahasa agama Brahma pertama yang berkitab Veda) ialah peraturan menurut konsep Veda (Dr. Muhammad Ghalib).
- Latin, agama itu hubungan antara manusia dengan manusia super (Servius) . Agama itu pengakuan dan pemuliaan kepada Tuhan (J. Kramers Jz)
- Eropa, agama itu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan tenaga akal dan pendidikan saja (Mc. Muller dan Herbert Spencer). Agama itu kepercayaan kepada adanya kekuasaan mengatur yang bersifat luar biasa, yang pencipta dan pengendali dunia, serta yang telah memberikan kodrat ruhani kepada manusia yang berkelanjutan sampai sesudah manusia mati (A.S. Hornby, E.V Gatenby dan Wakefield)
- Indonesia, agama itu hubungan manusia Yang Maha Suci yang dinyatakan dalam bentuk suci pula dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu (Drs. Sidi Gazalba). Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997)
- Arab, agama dalam bahasa arab ialah ”din”, yang artinya : Taat, takut dan setia, paksaan, tekanan, penghambaan, perendahan diri, pemerintahan, kekuasaan, siasat, balasan, adat, pengalaman hidup, perhitungan amal, hujan yang tidak tetap turunnya, dan lain sebagainya . Sinonim kata din dalam bahasa arab ialah milah. Bedanya, milah lebih memberikan titik berat pada ketentuan, aturan, hukum, tata tertib, atau doktrin dari *din* itu.

Selanjutnya, lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Agama>. diakses pada tanggal 8 Februari 2008

Menurut **Koentjaraningrat**, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen:<sup>229</sup>

1. emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius
2. sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan
3. sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib
4. umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut nomor 2, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut nomor 3

Keempat komponen di atas terjalin erat satu sama lain sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara utuh. Kepentingan agama menyangkut kepentingan mengenai emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan umat yang merupakan satu kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap agama atau kepentingan agama.<sup>230</sup>

**Kedua**, pokok-pokok agama dapat disebut *Ushuluddin*.<sup>231</sup> Menurut **Thahir Abdul Muin**, *Ushuluddin* (pokok-pokok agama) , yaitu ajaran tentang soal-soal yang wajib, *mustahil* (tidak mungkin, pen) dan *Djaiz* (boleh, mungkin, pen) bagi Allah dan bagi sekalian utusan-utusanNya.<sup>232</sup>

---

<sup>229</sup> Koentjaraningrat, 1985. loc.cit hal 144-145

<sup>230</sup> Ibid

<sup>231</sup> Abd. Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Pustaka Setia, Bandung, 2006: hal 13.

<sup>232</sup> Thahir Abdul Muin, *Ichtisar Ilmu Tauhid*, Djajanurni, Jakarta, tanpa tahun, hal 9

Menurut **William L Reese**, *theology* adalah *Scourse or reason concerning god* (Pemikiran tentang Tuhan).<sup>233</sup> Jadi, jika berpedoman pada pendapat William L Reese, maka pokok-pokok agama dapat diartikan dengan pokok-pokok pikiran tentang Tuhan. Sementara menurut **Gove**, Teologi adalah penjelasan tentang keimanan, perbuatan dan pengalaman agama secara rasional. Jadi, pokok terpenting dari pendapat Gove, adalah keimanan, perbuatan dan pengalaman agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menarik apa yang dinyatakan oleh **Imam Abu Hanifah**;

“bahwa ajaran-ajaran pokok agama terbagi atas dua bagian bahasan, *pertama*, *Fiqh al-akbar*, yaitu membahas keyakinan atau ilmu tauhid, *kedua*, *Fiqh al-asghor*, membahas tentang masalah *muamalah* (amal perbuatan).”<sup>234</sup>

Jadi, pokok-pokok ajaran agama dapat disimpulkan sebagai suatu pemahaman/ pandangan tentang sistem keyakinan atau keimanan (akidah)<sup>235</sup>, sistem ritus, upacara atau amal ibadah yang merupakan usaha manusia untuk menjalankan ketentuan-ketentuan agamanya. (Syariah)<sup>236</sup> Sehingga dengan emosi keagamaan, menyebabkan manusia bersikap religius dan terikat dalam satu kesatuan umat atau sosial.

---

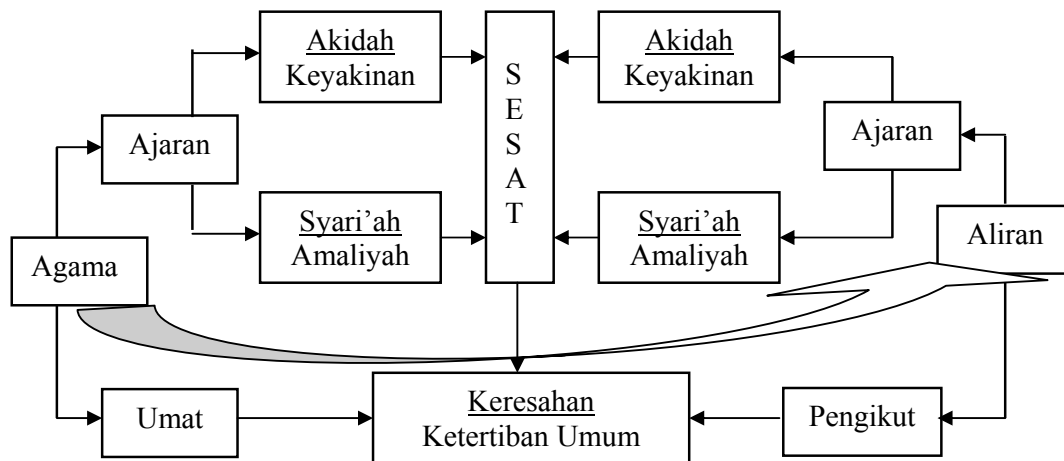
<sup>233</sup> William L Reese, *Dictionary of Philosophy and Religion*, Humanities Press Ltd, USA, 1980. hal 28

<sup>234</sup> Abd. Rozak dan Rosihan Anwar, op.cit hal 13

<sup>235</sup> Misalnya dalam Islam dikenal dengan istilah **Rukun Iman**, yaitu kewajiban untuk yakin dan iman kepada Allah Swt, para malaikatNya, Kitab-kitabNya, para UtusanNya, hari akhir, dan takdir (*qodlo' dan qodar*)

<sup>236</sup> Misalnya dalam Islam dikenal dengan istilah **Rukun Islam**, yaitu kewajiban untuk memaca Syahadat, menjalankan solat, memberi zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, ibadah haji bagi yang mampu. Tata cara untuk menjalankan peribadatan seperti ini lazim disebut dengan syari'ah.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, maka suatu aliran tertentu dapat dianggap menyimpang<sup>237</sup> dari ajaran-ajaran pokok agama apabila substansi ajarannya, perbuatannya (melakukan kegiatan dan penafsiran) bertentangan<sup>238</sup> dengan keyakinan (akidah) dan syari'ah (ketentuan-ketentuan/ajaran) agama, sehingga ajarannya dinamakan ajaran sesat<sup>239</sup>, sedangkan organisasinya dinamakan aliran sesat<sup>240</sup>. Oleh karena itu secara skematis akan tampak sebagai berikut;



<sup>237</sup> Secara umum, sesat bermakna *melawan ajaran asli suatu agama* (artinya mencipta sesuatu yang baru dan disandarkan pada perkara agama/ibadah). Setiap pandangan yang *non konformis* di dalam bidang apapun juga dapat dianggap "sesat" oleh yang lainnya di dalam bidang tersebut yang yakin bahwa pandangan mereka adalah yang "benar" (ortodoks).

<sup>238</sup> Menurut **Abdi Rahmat**; sesat itu berarti bertentangan dengan akidah, ibadah, interaksi sosial, akhlak, pemikiran, dan hukum. Lihat Abdi Rahmat, *Kesesatan dalam perspektif Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006: hal 118-156

<sup>239</sup> Ajaran sesat (bahasa Inggris: Heresy) atau Bidah atau kadangkala ditulis sebagai bid'ah, bid'ah (dari *bahasa Arab* yang secara harafiah berarti *memulai*), menurut *Oxford English Dictionary*, adalah "pandangan atau *doktrin* teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan doktrin *Katolik* atau *Ortodoks* Gereja Kristen, atau, dalam pengertian yang lebih luas, dari gereja, keyakinan, atau sistem keagamaan manapun, yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar. Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, seni, dan lain-lain., yang berbeda dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa." Lihat "[http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran\\_sesat](http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_sesat)" diakses, pada tanggal 19 Januari 2008

<sup>240</sup> ada anggapan bahwa "ajaran sesat" tidak mempunyai arti yang sepenuhnya obyektif. Kategori ini hanya ada sebagai kebalikan dari posisi suatu *sekte* yang sebelumnya telah didefinisikan sebagai "ortodoks". Jadi, setiap pandangan yang *non konformis* di dalam bidang apapun juga dapat dianggap "sesat" oleh yang lainnya di dalam bidang tersebut yang yakin bahwa pandangan mereka adalah yang "benar" (ortodoks). Lihat "[http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran\\_sesat](http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_sesat)" *ibid*.

Jadi, skema di atas menunjukkan bahwa semua agama dan penganut ajaran, apa pun isi ajarannya, meyakini bahwa ajaran yang mereka anut itu benar. Mereka juga dapat mengatakan bahwa ajaran di luar yang mereka anut adalah sesat. Kedua belah pihak dapat saling menuduh yang lain sesat dengan dasar suatu ketetapan yang menguntungkan pihak tersebut, oleh karena itu setiap agama memiliki titik tolak ukur masing-masing, misalnya agama Kristen dan agama Islam.

Umumnya gereja menggunakan Alkitab sebagai tolak ukur suatu ajaran menyeleweng dari ajaran Tuhan. Berikut beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan penilaian. Gereja-gereja di sepanjang zaman, terutama di lingkungan gereja-gereja [reform](#), tetap sepakat menerima ajaran dasar tentang [keselamatan](#) yang bertumpu pada [Sola Gratia](#) , [Sola Fide](#) , dan [Sola Scriptura](#) , yaitu bahwa keselamatan ini hanya oleh anugerah Allah yang diterima dengan iman berdasarkan berita Alkitab. "241

Tolak ukur menurut Islam di Indonesia adalah merujuk pada fatwa MUI, yaitu apabila bertentangan dengan akidah dan syariah dalam agama Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga pemegang otoritas atas tafsir agama mengeluarkan 10 fatwa sesat sebagai tolak ukur untuk menentukan bahwa suatu aliran dianggap telah menodai, menyimpang, bertentangan dan meragukan otentisitas substansi ajaran agama tertentu khususnya syariat Islam, yaitu: 242

---

<sup>241</sup> Ibid

<sup>242</sup> Jawa Pos, **Pelarangan Al-Qiyadah**. 31 Oktober 2007 hal 4

1. mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam;
2. meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan sunnah;
3. meyakini turunnya wahyu setelah al-Quran;
4. mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al-Quran;
5. melakukan penafsiran al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
6. mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam;
7. menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul;
8. mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir;
9. mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak 5 waktu;
10. mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Berdasarkan tolok ukur yang dimiliki oleh masing-masing agama, jika terdapat aliran keagamaan patut diduga melanggar pokok-pokok agama, maka Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Bakor Pakem) melakukan pemantauan sekaligus merujuk kepada MUI untuk menentukan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 dan merekomendasikan kepada Kejaksaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan tindakan sebagaimana ditunjuk Pasal 2 UU UU No 1 Pnps 1965 yang dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB), yaitu diberi peringatan keras sekaligus perintah penghentian kegiatan.<sup>243</sup>

Selanjutnya , jika ternyata suatu aliran/ paham bertentangan dengan pokok-pokok suatu ajaran agama, maka aliran/ paham tersebut menurut

---

<sup>243</sup> Selanjutnya lihat Bakorpakem Rekomendasikan Peringatan Keras kepada Ahmadiyah, [hukumonline.com](http://hukumonline.com).

Pasal 2 No 1 UU Pnps 1965 dapat diperingatkan untuk menghentikan kegiatan dan penafsiran-penafsiran agama. Jika masih tetap melanggar, maka dapat dinyatakan sebagai aliran terlarang, karena dianggap bertentangan dengan agama yang “sah” dan dianggap dapat meresahkan ketentraman kehidupan beragama maupun kehidupan sosial secara umum.

#### **d. Tindakan Pemerintah Terhadap Aliran Sesat**

Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 menyatakan;

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; *penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*

Inti larangan dari pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 adalah melakukan penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, di Indonesia terdapat banyak kasus yang patut untuk dicermati sebagai berikut;

- Agama Salamullah, pimpinanya adalah Lia Aminuddin. Aliran ini menganggap Lia Aminuddin sebagai Imam Mahdi, mengaku nabi, Reinkarnasi Siti Maryam dan mengaku mendapat bimbingan langsung dari malaikat Jibril, mengaku kitab sucinya adalah “Perkenalkan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir” karangan Lia Aminuddin sendiri. Sifat *agama ini campur aduk*, ada Islam, Kristen, Hindu, Budha dan sebagainya.<sup>244</sup>
- Agama Baha’i, diduga aliran ini muncul dari negeri Iran, namun pada perkembangannya sampai di tanah air. Sepintas isi ajaran Baha’i *mirip Islam*, namun bila diamati lebih jauh ternyata banyak perbedaan. Berdasarkan SK Perdana Menteri No 122/PM/ 1959 tertanggal 1959, ajaran ini secara resmi dilarang oleh pemerintah.

---

<sup>244</sup> Posmo, *Innalillahi, Lahir Agama Baru*. Edisi 68, 1 Juli 2000, hal 7



Pada tahun 2000 aliran ini terungkap kembali di Bandung dan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat.<sup>245</sup>

- Majelis Taklim Hikmatul Hidayah, Tangerang Banten. Kelompok ini diduga *mengajarkan ajaran sesat*, di antaranya mengajarkan ibadah *haji cukup di Padepokan*<sup>246</sup>. Akibatnya pada tanggal 16 September 2002, padepokan yang dipimpin Ustad Haetami ini dibakar dan diluluh lantakkan massa.<sup>247</sup>
- Sekte Sibuea, Bandung. Tim Crisis Center FKKI (Forum komunikasi Kristen Indonesia) yang diketuai pendeta Timorason menyatakan bahwa ajaran pendeta Sibuea *bertentangan dengan prinsip kristen secara umum*.<sup>248</sup>
- Gereja Pondok Daud, Pancoran Jakarta Selatan, di antara ajarannya adalah cambuk rotan bagi mereka yang melanggar ketentuan, pengaturan jodoh hingga perpuluhan tahun ditentukan atasan, *penganiayaan terhadap anak kecil*<sup>249</sup> merupakan doktrin dalam ajaran ini. Ajaran ini terungkap pada bulan September 2004, kehadirannya sangat meresahkan masyarakat.<sup>250</sup>
- Ajaran/ Aliran Sholat Hak Dzat Qudrat Pasti (SHDQP) Desa Pamengkang kecamatan kramat watu Banten. Pemimpinnya H. Ahmad Yani. Inti Ajarannya adalah; di samping melaksanakan sholat lima waktu juga wajib melakukan sholat yang dinamakan Sholat Hak Dzat yang pelaksanaannya setelah sholat subuh, dluhur dan magrib. Dalam ajaran SHDQP, syahadat mereka disebut syahadat hak dzat yang *kalimatnya berbeda dengan syahadat sebagaimana dikenal dalam agama Islam*.<sup>251</sup> Aliran ini akhirnya mendapat reaksi keras dari masyarakat.<sup>252</sup> Sementara itu, di Malang Jawa Timur, aliran yang mengajarkan sholat dua bahasa pimpinan ustadz Roy terpaksa dipenjara selama setengah tahun. Yusman Roy, Inti Agama Adalah Akhlak Mulia.<sup>253</sup>
- Ajaran/ Aliran Buki Syahidin, dikembangkan di Tasikmalaya, Jabar. Ajaran Buki Syahidin dianggap menyimpang dari keyakinan yang lazim di kalangan Islam. Antara lain tentang datangnya Imam

---

<sup>245</sup> Posmo, mengenal Seluk-beluk “agama” (Aliran Kepercayaan) Baha’i. Edisi 75, 25 Agustus 2000 hal 22

<sup>246</sup> Ajaran demikian bertentangan dengan syariat Islam yang mewajibkan (apabila mampu) untuk beribadah haji ke tanah suci Makkah, **bukan di padepokan**

<sup>247</sup> Posmo, Ibadah Haji Cukup di Padepokan, Edisi 183, 30 September 2002, hal 20

<sup>248</sup> Posmo, Dengar Suara Tuhan, Kiamat tak terbukti, Edisi 241, 19 Nopember 2003 hal 9

<sup>249</sup> ini bertentangan dengan ajaran agama secara umum, sebab tidak ada suatu agama apapun yang mengajarkan kekerasan dan penganiayaan

<sup>250</sup> Posmo, *Gereja Pondok Daud Dituduh Sesat*. Edisi 296, Desember 2004, hal 05

<sup>251</sup> lafal syahadat menurut Islam adalah; Asyhadu anla Ilaha Illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rosulullah

<sup>252</sup> Posmo, *Banten Geger Sholat Hak Dzat Qudrat Pasti*. Edisi 344, tahun 2005 hal 6.

<sup>253</sup> Jawa Pos 15 Juni 2007 hal 10

Mahdi, lalu *mengubah kalimat syahadat dari versi otentik*, pengertian malaikat yang tidak lazim. Jumlah pengikut aliran ini mencapai ratusan orang. Posmo, Ajaran Buki “Imam Mahdi” Syahidin,<sup>254</sup>

- Ajaran/ Aliran Buya Mako. Ajaran/ aliran ini dikembangkan di Cigondewah, Bandung, September 1999. Inti ajarannya *membolehkan tidak solat*<sup>255</sup> dan tidak berpuasa Ramadhan.<sup>256</sup>
- Ajaran/ Aliran Solat Tiga Waktu Joglo Semar. Ajaran/ aliran ini dikembangkan di Bandung sekitar September 2002. Di antara ajarannya, umat Islam *tidak diharuskan menjalankan salat lima waktu*, tapi cukup *solat tiga waktu* dengan menghadap empat arah mata angin.<sup>257</sup>
- Ajaran Utamakan Zikir, ajarkan Islam tanpa salat. Ajaran ini mencuat pada bulan Juli 2005 di Pontianak yang dipimpin oleh ustad Fauzi. Kasus ini mencuat setelah kegiatan pengajiannya dihentikan petugas setelah mendapat laporan dari warga. Ustad Fauzi *menganjurkan tidak perlu salat*.<sup>258</sup>
- Aliran Kunci Suci, pada tanggal 13 Desember 2007 Pondok Pesantren Miftahul Huda, Serang Banten dihancurkan dan dibakar ratusan warga, diduga Pondok Pesantren ini mengajarkan aliran sesat. Salah satu ajarannya menyatakan bahwa seseorang *bisa melihat Tuhan melalui cahaya*, saat mata ditutup.<sup>259</sup>
- Aliran Ahmadiyah. Aliran ini cukup menarik untuk dicermati. Di samping diduga *mengajarkan ajaran sesat, aliran ini menimbulkan keresahan* masyarakat secara luas dan cenderung menimbulkan kekerasan. Jemaat Ahmadiyah sudah ada sejak tahun 1925 di Tapak Tuan, Aceh. Pada tahun 1953, jemaat Ahmadiyah memperoleh Badan Hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No JA 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 dan Tambahan Berita Negara RI No 26 tanggal 31 Maret 1953. Pada tahun 2005 sampai sekarang terjadi aksi menentang keberadaan Ahmadiyah karena dianggap sesat dan menyesatkan, serta berada di luar Islam. Bukan hanya aksi menentang, namun pengusiran, penghancuran aset-aset

---

<sup>254</sup> Posmo, Edisi 344 2005 hal 6

<sup>255</sup> solat dan puasa di bulan Romadlan merupakan kewajiban dalam syari’at Islam, jadi kalau ajaran ini membolehkan tidak solat dan membolehkan tidak berpuasa di bulan Romadlan bertentangan dengan syari’at Islam

<sup>256</sup> Posmo, *Ajaran Buki “Imam Mahdi”* Syahidin, Edisi 344 2005 hal 7

<sup>257</sup> solat wajib dalam agama Islam adalah lima waktu, bukan tiga waktu. Sedangkan *kiblat* (arah menghadap) solat adalah Ka’bah Baitullah, di Makkah, bukan penjurur mata angin

<sup>258</sup> Posmo, Utamakan Zikir, Ajarkan Islam tanpa salat. Edidi 327, 27 Juli 2005

<sup>259</sup> Posmo, Aliran Kunci Suci dituding sesat. Edisi 451 26 Desember 2007, hal 6

Ahmadiyah, pengrusakan, pengusiran terhadap aliran/ kelompok ini terjadi secara luas di berbagai wilayah Indonesia.<sup>260</sup>

- Aliran Sesat Mahdi, Palu Sulteng. Kasus dugaan aliran sesat Mahdi di Palu sangat mengagetkan masyarakat. Di antara ajarannya yang dianggap sesat adalah *menganjurkan orang Islam tidak solat, melarang puasa, melarang orang Islam ke Masjid, melarang orang Kristen ke Gereja, mengajak kembali kepada kepercayaan nenek moyang yang animisme dan atheisme*. Bukan hanya karena ajarannya saja, tapi akibat munculnya aliran ini, telah *mengakibatkan gugurnya tiga aparat Polri* dan satu orang penganut aliran Mahdi tewas tertembak..<sup>261</sup>
- Pelarangan Aliran Haur Koneng di Dusun Guruh Seureuh, Majalengka, oleh Kejati Jawa Barat antara lain karena doktrin aliran ini menuntut kepatuhan mutlak pada sang guru serta diikuti dengan *doktrin tidak perlu patuh pada orang tua, mengajarkan pertentangan antara Islam dan Pancasila*. Sedangkan tindakan penggerebekan atas kompleks jemaah Haur Koneng disebabkan masalah kriminal yaitu *pembunuhan atas Kapolsek* Lemah Sugih.<sup>262</sup>
- Al-Qiyadah Al-Islamiah<sup>263</sup> ini yang didirikan oleh Ahmad Moshaddeq alias H. Salam yang berpusat di Kampung Gunung Sari, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulan, 20 KM dari Bogor. Dari penjelasan para saksi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Al-Qiyadah Al-Islamiah memiliki ajaran-ajaran yang jauh menyimpang dari pokok-pokok Ajaran Islam<sup>264</sup>

<sup>260</sup> Posmo, Geliat Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, Edisi 449 12 Desember 2007, hal 6.

<sup>261</sup> Posmo, **Dibalik Dugaan Aliran Sesat Mahdi Di Palu, Sulteng**. Edisi 342, 16 Nopember 2005

<sup>262</sup> Lihat laporan Tempo, *Aliran Sesat: Setelah Haur Koneng Dilarang*, Nomor 24 Tahun XXIII, 14 Agustus 1993, hal 37-38

<sup>263</sup> Ajaran-ajaran Alqiyadah yang dianggap menyimpang antara lain:

1. Menghilangkan Rukun Islam yang telah dipegangi oleh seluruh Kaum Muslimin dan jelas-jelas bersumber dari hadits-hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadits yang diterima oleh seluruh kaum muslimin dari kalangan ahlussunnah (Suni)
2. Menganggap bahwa pimpinannya adalah Rasulullah yaitu bernama Al-Masih Al Maulud (Al Masih yang dijanjikan /dilahirkan)
3. Menghilangkan syariat sholat lima waktu dalam sehari semalam, dengan diganti sholat lail, mereka mengatakan bahwa dalam dunia yang kotor (belum menggunakan syariat Islam-penulis) seperti ini tidak layak kaum muslimin melakukan sholat lima waktu.
4. Menganggap orang yang tidak masuk kepada kelompoknya dan mengakui bahwa pemimpin mereka adalah Rasul adalah orang musyrik. Hal ini sesuai yang di ungkapkan oleh seorang saksi yang anak kandungnya sampai saat ini setia dan mengikuti kajian-kajian kelompok ini. Anak kesayangannya tersebut tidak mau pulang ke rumah bersama kedua orang tua karena menganggap kedua orangtuanya musyrikin.

<sup>264</sup> alatsar.wordpress.com

Fakta-fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa aliran-aliran tersebut pada intinya dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama dan menyebabkan terganggunya ketertiban umum, indikasinya sebagai berikut;

- a. penyimpangan dalam hal keimanan;
  - ada yang mencampur adukkan berbagai agama,
  - merubah syahadat,
  - mengaku nabi,
  - dan lain sebagainya
- b. penyimpangan dalam hal syariat/ ibadah
  - ada yang mengajarkan solat dua bahasa, membolehkan tidak solat,
  - solat tiga waktu dengan menghadap empat arah mata angin.
  - membolehkan tidak puasa romadlon
  - menganjurkan orang Islam tidak solat, melarang puasa, melarang orang Islam ke Masjid, melarang orang Kristen ke Gereja, mengajak kembali kepada kepercayaan nenek moyang yang animisme dan atheisme.
  - dan lain sebagainya
- c. dalam hal kesusilaan
  - ritual penganiayaan terhadap anak kecil
  - jodoh ditentukan pemimpin
  - doktrin tidak perlu patuh pada orang tua,
- d. dalam hal ketertiban umum
  - secara umum kehadiran aliran sesat dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dan dapat memicu instabilitas atau mengganggu ketertiban umum
  - mengakibatkan gugurnya tiga aparat Polri dan satu orang penganut aliran Mahdi tewas tertembak.

- Aliran Haur Koneng misalnya di Dusun Guruh Seureuh, Majalengka, mengajarkan pertentangan antara Islam dan Pancasila<sup>265</sup>. Sedangkan tindakan penggerebekan atas kompleks jemaah Haur Koneng disebabkan masalah kriminal yaitu pembunuhan atas Kapolsek Lemah Sugih.
- akibat penafsiran atau perbuatan yang menyimpang sebagaimana huruf a-c tersebut di atas menimbulkan keresahan pada masyarakat, memicu aksi anarkis

Melihat fakta-fakta di atas, jika mengacu pada fatwa MUI, maka dapat dipastikan bahwa hampir semua ajaran yang disampaikan oleh pemimpin aliran sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, sedangkan perbuatannya merupakan kegiatan yang terlarang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 UU No 1 Pnps 1965, yakni melakukan kegiatan dan penafsiran yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama, khususnya Islam.

Jadi, penyimpangan aliran-aliran sebagaimana tersebut di atas, jika dilihat dari segi agama, dapat dianggap;

- menyimpang dari sistem keyakinan atau keimanan (akidah)<sup>266</sup>

---

<sup>265</sup> perbuatan demikian dapat dikategorikan makar

<sup>266</sup> Misalnya dalam Islam dikenal dengan istilah *Rukun Iman*, yaitu kewajiban untuk yakin dan iman kepada Allah Swt, para malaikatNya, Kitab-kitabNya, para UtusanNya, hari akhir, dan takdir (*qodlo' dan qodar*).

- menyimpang dari istem ritus, upacara atau ibadah yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib. (Syariah)

Bahwa di samping aliran-aliran tersebut di atas menyimpang dari ajaran-ajaran pokok suatu agama di Indonesia khususnya Islam, jika dilihat dari segi kesusilaan dan ketertiban umum, dapat dikategorikan;

- sangat meresahkan dan membahayakan ketertiban umum;
- berpotensi memecah persatuan nasional
- bertentangan dengan norma hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat<sup>267</sup>

Jadi, jika suatu aliran ternyata dinilai berpotensi melanggar poin-poin di atas, dalam konteks inilah negara tidak lagi ansich melihat kehadiran sebuah paham aliran sebagai perbedaan pemahaman dalam agama tapi lebih memfokuskan pada ketertiban umum dan memainkan perannya dalam konteks ketertiban, ketentraman masyarakat, sebab jika tidak, maka berdasarkan penjelasan umum UU No 1 Pnps 1965 bisa mengarah ke perpecahan Nasional.

Contoh suatu aliran yang bersikap ekstrem terhadap kelompok lain dan dapat memicu perpecahan persatuan nasional, ketertiban umum adalah sebagai berikut;<sup>268</sup>

- Faham Islam Jama'ah mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan

---

<sup>267</sup> contohnya adalah Aliran Mahdi, Palu Sulteng yang mengakibatkan gugurnya tiga aparat Polri dan satu orang penganut aliran Mahdi tewas tertembak, tentu ini meresahkan. Posmo, op.cit .Edisi 342, 16 Nopember 2005.

<sup>268</sup> www.eramuslim.com. diakses 28 Desember 2007

keresahan di masyarakat, faham ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1971. Larangan pemerintah tersebut tidak diacuhkan. Mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak pada sekitar 1977/1978.

- Faham Islam Jama'ah menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jama'ah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka, umat Islam harus mengangkat "Amirul Mukmini" yang menjadi pusat pimpinan dan harus mentaatinya, umat Islam yang masuk golongan ini harus dibai'at dan setia kepada "Amirul Mukminin" dan dijamin masuk surga, ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari "Amirul Mukminin".
- Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun orang tuanya sendiri, tidak sah shalat di belakang orang yang bukan Islam Jama'ah, pakaian shalat pengikut Islam Jama'ah yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mengusahakan agar isterinya turut masuk golongan Islam Jama'ah, dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh "Amirul Mukminin", dan khutbah yang sah bila dilafazkan dalam bahasa Arab<sup>269</sup>

Selain Islam Jama'ah, di Jakarta Selatan pernah muncul Gereja Pondok Daud, di antara ajarannya adalah cambuk rotan bagi mereka yang melanggar ketentuan, pengaturan jodoh hingga perpuluhan tahun ditentukan atasan. Penganiayaan terhadap anak kecil merupakan doktrin dalam ajaran ini. Ajaran ini terungkap pada bulan September 2004, kehadirannya sangat meresahkan masyarakat.<sup>270</sup>

Berdasarkan contoh dan uraian-uraian di atas, akhirnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa perbedaan pemahaman dalam agama merupakan sesuatu yang wajar

---

<sup>269</sup> [www.eramuslim.com](http://www.eramuslim.com), diakses 28 Desember 2007

<sup>270</sup> Posmo, Edisi 296. op.cit. hal 05

- Bahwa perdedaan pemahaman itu dalam konteks Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat
- “aliran sesat” dalam perspektif agama merupakan aliran/ faham yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama, terutama mengenai akidah dan syari’ah.
- “aliran sesat” menurut UU No 1 Pnps 1965 adalah aliran/faham yang bukan hanya bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga aliran sesat sebagaimana istilah umum saat ini, sama dengan “aliran terlarang” dalam istilah yuridis apabila sudah dilakukan tahapan-tahapan kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 UU No 1 Pnps 1965
- Bahwa maraknya keberadaan aliran sesat seringkali berimplikasi pada situasi yang meresahkan, membahayakan, dan mengganggu ketertiban masyarakat.
- Bahwa negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan amanat pembukaan UUD 1945 dalam konteks ini wajar melakukan kebijakan penanganan sebagaimana UU No 1 Pnps 1965

Melihat fakta-fakta perkembangan aliran sesat sebagaimana diuraikan di atas, ada yang direspon secara beragam oleh masyarakat. Ada yang pro ada yang kontra terhadap munculnya sebuah aliran. Bagi anggota masyarakat



umumnya, sampai batas tertentu perbedaan paham keagamaan ini memang dapat ditolelir.

Simposium “ Pengaruh kebudayaan dan agama terhadap hukum pidana” di Bali pada tahun 1975, kesimpulan ke lima menyatakan;<sup>271</sup>

Agama dilihat sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Oleh karena itu perlu diatur dalam bab tersendiri, dimana Pasal-Pasal nya memberikan perlindungan terhadap Tuhan, Sabda dan sifatNYA, Agama, Nabi/ Rosul, Kitab suci, Lembaga-lembaga agama, ajaran ibadah keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat-tempat suci lainnya.

Seseorang yang melakukan serangkaian kegiatan penafsiran keagamaan, kegiatan keagamaan, dan mengeluarkan perasaan keagamaan, pada hakikatnya tidak dilarang oleh undang-undang (apalagi perbuatan yang dimaksud merupakan hak asasi manusia) selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak menyebabkan rusaknya ketertiban dalam masyarakat.

Jika ternyata suatu aliran dianggap melanggar pasal 1 UU No 1 Pnps 1965, maka maka Bakor Pakem dapat merekomendasikan kepada pemerintah, yakni Kejaksaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, agar aliran keagamaan/ kepercayaan tertentu yang melanggar UU No 1 Pnps 1965 diberi peringatan keras sekaligus penghentian kegiatan, dituangkan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama.<sup>272</sup>

Patut di catat, berdasarkan Surat Keputusan No. 167/PROMOSI/1954. tentang Panitia Interdepartemental Peninjauan Kepercayaan - kepercayaan di

---

<sup>271</sup> Lihat, Barda Nawawi Arief, 2007, op.cit hal 10

<sup>272</sup> Lihat, **Bakorpakem Rekomendasikan Peringatan Keras Kepada Ahmadiyah**, Hukumonline.com, Rabu 12 Juni 2008

dalam Masyarakat (Panitia Interdep Pakem) yang kemudian ditingkatkan menjadi Biro Pakem yang disempurnakan menjadi Surat Keputusan Jaksa Agung RI No Kep-108/J.A/1984 tertanggal 15 Januari 1994, tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, memiliki tugas mengkoordinir tugas pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan di dalam masyarakat bersama instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kepentingan keagamaan dan ketertiban umum,<sup>273</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mendasarkan diri pada pasal Pasal 2 UU No 1 Pnps 1965, maka barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Terkait dengan Pasal 2 UU No 1 Pnps 1965, maka tindakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

---

<sup>273</sup> Lihat Djoko Prakoso Tugas-tugas Kejaksaan di bidang Non Yustisial, Jakarta, Bina Aksara, 1989. hal 2

Jadi, keputusan yang menjadi wewenang aparat pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri hanya sebatas memberikan *peringatan keras* kepada pelaku penyimpangan agama dan harus dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Berikut contoh enam butir Surat Keputusan Bersama terhadap Jamaat Ahmadiyah Indonesia,<sup>274</sup>

1. Memberi *peringatan* dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 965 tentang pencegahan penodaan agama.
2. Memberi *peringatan* dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
3. Memberi *peringatan* dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenakan saksi sesuai peraturan perundangan.
4. Memberi *peringatan* dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
5. Memberi *peringatan* dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku
6. Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

Selanjutnya, jika peringatan keras sudah dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, tetapi pelanggaran masih terus terjadi, berdasarkan Pasal 2 ayat (2)

---

<sup>274</sup> Hukumonline.com. diakses 18 Juni 2008

UU No 1 Pnps 1965, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut *sebagai organisasi/ aliran terlarang*, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Sepanjang penelitian ini dilakukan, banyak sekali aliran-aliran yang dibubarkan dan dinyatakan terlarang di Indonesia. Contoh tindakan pelarangan pembubaran terhadap organisasi / aliran kepercayaan adalah sebagai berikut:

- Keputusan Perdana Menteri RI ( Ir. Djuanda No. 122/PROMOSI/1959, tertanggal 21 Maret 1950, tentang Melarang adanya Organisasi Agama Eyang yang berada di desa Maparah, kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis beserta cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.<sup>275</sup>
- SK Perdana Menteri No 122/PM/ 1959 tertanggal 1959, ajaran Baha'i secara resmi dilarang oleh pemerintah.<sup>276</sup>
- Keputusan Presiden RI Ir. Soekarno, Nomor 264 Tahun 1962, tertanggal 15 Agustus 1962, tentang larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi. Rotary Club, Devine Life Society, Vrijmentselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), agama baha'i.<sup>277</sup>
- Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1963, tertanggal 3 April 1963, tentang Perhimpunan Theosofi Cabang Indonesia (PT TIFA Surabaya) berkedudukan di Jakarta beserta loge-loge dan Federasi Loge-logenya di seluruh Indonesia sebagai Organisasi Terlarang.<sup>278</sup>

---

<sup>275</sup> Lihat, Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2001: hal 222

<sup>276</sup> Posmo, Edisi 75. op.cit hal 22

<sup>277</sup> Lihat Herry Nurdi, *Jejak Freemason & Zionis di Indonesia*, Cakrawala, Jakarta, 2005 hal 1, lihat juga hal 59 A. Yogaswara, *Aliran sesat dan nabi-nabi palsu, riwayat aliran dan para nabi palsu di Indonesia*, Narasi, Yogyakarta, 2008 hal 59

<sup>278</sup> Lihat, Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, 2001. op.cit hal 222

- Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-08/DA/10.1971, tertanggal 29 Oktober 1971, melarang Islam Jamaah/ Darul Hadits di seluruh Indonesia.<sup>279</sup>
- Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 085/JA/9/1985 tertanggal 7 September 1985, menyatakan aliran inkar sunnah terlarang di Indonesia.<sup>280</sup>
- Keputusan pelarangan oleh Kejaksaan Tinggi masing-masing daerah Sumatera Barat, Aceh dan Sumatra Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur. Nusa Tenggara Barat dan Jakarta terhadap aliran Darul Arqam menyeleweng dari ajaran pokok Islam.<sup>281</sup>
- Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Bandung, menyatakan Sekte Gereja Hari Kiamat sebagai aliran sesat dan dilarang beraktifitas sejak tahun 2000<sup>282</sup>
- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar menyatakan ajaran Ahmadiyah sebagai terlarang dalam SK Bupati Lobar No. 35/2001. Instruksi pelarangan tersebut diterbitkan setelah Pemkab Lobar berkoordinasi dengan MUI Lobar dan Departemen Agama.<sup>283</sup>
- Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Indramayu, menyatakan sesat aktivitas ritual Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu, dan secara resmi dibekukan pada akhir tahun 2007<sup>284</sup>
- Terakhir, adalah terbitnya Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tertanggal 5 Mei 2008, yang intinya memberikan peringatan keras kepada Jamaat Ahmadiyah Indonesia untuk menghentikan menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya.<sup>285</sup>

Berdasarkan contoh-contoh kebijakan pembubaran dan pelarangan terhadap aliran sesat di atas, hampir sebagian besar dilakukan oleh Kejaksaan, baik oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negari. Kenyataan ini tidak terlepas dari aspek sejarah dan aturan

---

<sup>279</sup> M. Yuanda Zara, et al, *Aliran-aliran Sesat di Indonesia*, Banyu Media, Yogyakarta, 2007:hal 19

<sup>280</sup> A. Yogaswara, 2008. op.cit. hal 102

<sup>281</sup> Lihat, *Sudah Sembilan Kejakti Melarang Darul Arqom. Larangan tak sangkutkan aqidah* KOMPAS. 27 Agustus 1994. hal. 1.

<sup>282</sup> A. Yogaswara, 2008.op.cit. hal 80

<sup>283</sup> Gatra, Edisi VI 13 Maret 2006

<sup>284</sup> A. Yogaswara, 2008. op.cit. hal 95

<sup>285</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). diakses 15 Mei 2008

perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan serangkaian kebijakan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 UU No 1 Pnps 1965, apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/ atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun

Selanjutnya, berdasarkan pasal 3 UU No 1 Pnps 1965, Penuntutan baru dapat dilakukan bila setelah menerima tindakan peringatan ataupun pembubaran tersebut masih terus juga melakukan delik tersebut. Ancaman hukuman yang ditentukan oleh undang - undang ini maksimum 5 (lima) tahun pidana penjara.

Jadi, jika diteliti rumusan perundang-undangan yang ada, maka pada dasarnya aparaturnya baru bertindak bila suatu aliran keagamaan membahayakan masyarakat, negara, mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Perbuatan suatu aliran keagamaan tersebut dapat berupa perbuatan yang menyalahgunakan agama, penodaan terhadap suatu agama, pelanggaran terhadap kesusilaan, kepatutan, ketidaktaatan terhadap hukum.

Ketaatan terhadap hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari atribut suatu negara hukum, ketaatan ini menuntut kepada setiap warga negara tanpa kecuali baik orang perorangan atau organisasi yang dibuat oleh warga negara untuk mentaati hukum negara yang berlaku. Secara eksplisit konstitusi RI menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, (Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945).

#### **A.1.2. Kebijakan Menurut Pasal 156 KUHP**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam hal suatu gerakan agama/aliran kepercayaan menampakkan tanda-tanda dan kecenderungan ke arah penyimpangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965, maka Tim Pakem Harus Mengambil tindakan pencegahan, yakni diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya.

Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia *dapat* membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila mereka masih terus melanggar maka orang, penganut, anggota dan/ atau anggota Pengurus Organisasi yang

bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun.

Berbeda halnya dengan kebijakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP. Pasal ini diadakan berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Dalam UU ini, khususnya pada Pasal 4, menyebutkan penambahan pasal baru dalam KUHP, yaitu pasal 156a. Bunyi pasal tersebut adalah:

”Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dan (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Esa”.

Inilah awalnya ”delik agama” dalam pengertian delik *terhadap* agama masuk dalam KUHP. Pasal tersebut dimasukkan dalam Bab V KUHP yang mengatur tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.” Dari sudut tertentu, misalnya, peletakan pasal tersebut dalam Bab V bisa dilihat bahwa, yang dimaksud delik agama adalah kejahatan terhadap agama yang melanggar atau yang merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. Jadi, siapapun (termasuk aliran keagamaan/ kepercayaan) yang melanggar<sup>286</sup> pasal 156a ini merupakan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

Kalau diperhatikan secara seksama, inti terlarang pasal 156a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan di muka umum,

---

<sup>286</sup> Kasus cerpen Ki Panji Kusmin dengan tersangka H.B. Yassin, kasus Tabloid Monitor dengan tersangka Arswendo Atmowiloto, kasus Lia Eden dengan tersangka Lia Aminuddin, kasus YKNCA dengan tersangka M Hussen, dan lain sebagainya diproses di pengadilan proses pengadilan melibatkan pasal 156a



sedangkan unsur-unsur mengeluarkan perasaan dan perbuatan di muka umum dalam huruf (a) adalah bersifat sebagai berikut;<sup>287</sup>

- Permusuhan berasal dari kata musuh, yaitu lawan, sehingga yang dimaksud dengan permusuhan adalah bermusuhan, perseteruan, perlawanan.
- Penyalahgunaan merupakan kata majemuk terdiri dari 2 (dua) asal kata salah dan guna, yaitu kata salah dapat diartikan tidak betul, tidak benar, khilaf, cela, cacat, keliru. Sedangkan kata guna dapat diartikan manfaat, faedah, fungsi, kebaikan, memakai. Penyalahgunaan dapat diartikan sebagai penggunaan sesuatu yang tidak benar, tidak betul atau keliru, tidak sesuai dengan manfaat, faedah atau fungsinya.
- Penodaan berasal dari kata noda yaitu kotoran, bercak, sesuatu yang mencemari, menodai, sehingga menjadi kotor, ternoda, mencemarkan, merusak nama baik, merusak kesucian, merusak keluhuran, merusak keagungan. Penodaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang mencemari, mengotori kesucian, merusak keagungan.

Selanjutnya unsur-unsur mengeluarkan perasaan dan perbuatan di muka umum dalam huruf (b) adalah bermaksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Esa. Unsur Pasal ini melarang upaya-upaya meniadakan agama. Tujuan utama dari pasal ini menurut Oemar Senoadji adalah melindungi kesuciaan agama, tetapi karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi para penganut agama.<sup>288</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kasus-kasus aliran keagamaan/kepercayaan yang dianggap sesat, misalnya Lia Eden akhirnya diadili dan divonis dua tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 29

---

<sup>287</sup> Lihat catatan seminar, *Kriminalisasi Atas Penghinaan Agama Dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP*, yang diadakan oleh Komnas HAM, ELSAM, PUSHAM Ubaya, KAHAM Undip, PAHAM Unpad, di Surabaya pada tanggal 13 Desember 1965, hal 17

<sup>288</sup> Ifdal Kasim, *Perkembangan Delik Agama Dari Masa Kemasa*, Makalah yang disampaikan pada “Konsultasi Publik RUU KUHP: Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Reformasi Hukum Pidana”, yang diadakan oleh Aliansi Nasional RKUHP dan Komnas HAM, di Hotel Santika Jakarta, 3-4 Juli 2007. hal 4

Juni 2006 lalu melalui putusan No. 677/PID.B/2006/PN.JKT.PST. Lia Aminudin dianggap oleh majelis hakim secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan yang melanggar pasal 156a Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan.<sup>289</sup> Artinya seseorang yang di dakwa melakukan pelanggaran pasal 156a KUHP langsung diproses melalui serangkaian penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana terdapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Singkatnya, pelanggar Pasal 156a KUHP adalah sebagai berikut;

- “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama, delik dengan maksud tidak menganut/meniadakan agama
- langsung diproses melalui serangkaian penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan
- ancaman hukuman maksimum 5 (lima) tahun pidana penjara.

Bertitik tolak uraian di atas, secara normatif ada perbedaan kebijakan antara Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 dengan Pasal 156 a KUHP. Dengan kata lain, seseorang/ badan/ aliran yang melanggar Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965, prosedur yang harus dilakukan adalah dengan cara sebagaimana dinyatakan Pasal 2 dan 3 UU No 1 Pnps 1965.

Sedangkan seseorang/ badan/ aliran yang melanggar Pasal 4 UU No 1 Pnps 1965 jo Pasal 156 a KUHP langsung diproses melalui serangkaian penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

---

<sup>289</sup> Selain Lia Aminuddin, “penganut” aliran sesat yang juga didakwa melanggar pasal 156a KUHP adalah, kasus YKNAC Probolinggo, Ustad Roy yang mengajarkan solat dua bahasa di Malang, Ahmad Musaddeq Jakarta dengan Aliran Al-Qiyadah dll.

Kebijakan berbeda demikian, tentu sangat tidak menguntungkan. Artinya, bisa jadi seseorang/ badan/ atau aliran seharusnya melanggar delik penistaan/ penghinaan/ penodaan terhadap agama, bergeser menjadi melanggar delik penyimpangan/ penyelewengan agama. Demikian sebaliknya, seseorang/ badan/ atau aliran yang seharusnya melanggar delik penyelewengan, bisa berubah menjadi melanggar delik penistaan/ penghinaan/ penodaan terhadap agama.

Terhadap hal tersebut di atas, setidaknya ada dua alasan sebagai berikut;<sup>290</sup>

- delik-delik agama norma hukumnya cenderung bersifat kabur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah yang sifatnya subyektif. Sementara dalam beberapa Pasal yang ada penjelasannya sekalipun tetap tidak jelas maknanya.
- seperti diketahui, unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah bersifat abstraks, karena berkaitan dengan "alam pikiran" (*mind*). Selain terkait dengan penilaian terhadap nilai-nilai agama atau kepercayaan. Tidak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang nilai-nilai agama, karena tergantung pada aliran keagamaan yang diikuti oleh yang bersangkutan.

Selain dua alasan di atas, hampir semua unsur-unsur delik-delik agama, khususnya dalam UU No 1 Pnps1965 memiliki arti yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan kontroversial. Sekedar contoh adalah sebagai berikut;

- Bahwa unsur-unsur Pasal dalam UU No 1 Pnps 1965 dan Pasal 156 a KUHP adalah sebagai berikut;

Pasal 1

---

<sup>290</sup> Ifdal Kasim, Makalah 3-4 Juli 2007. op.cit. hal 7

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana ***menyimpang*** dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 156 a KUHP;

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, ***penyalahgunaan*** atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kalu diperhatikan secara seksama, syarat dilarangnya suatu perbuatan dalam Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 adalah apabila “menyimpang” dari pokok-pokok ajaran agama. Sedangkan syarat dilarangnya perbuatan dalam Pasal 156 a KUHP adalah bersifat permusuhan, “***penyalahgunaan***”, penodaan, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, antara *kata menyimpang dan penyalahgunaan walaupun dirumuskan secara berbeda, namun sebenarnya memiliki kandungan makna yang sama*. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, bahwa semua perbuatan yang dilarang adalah perilaku menyimpang.

Ada beberapa istilah yang dapat memperjelas arti dari kata-kata penyimpangan/ menyalahgunakan agama sebagai berikut;

“penyimpangan” berasal dari kata “simpang” yang berarti sesuatu yang memisah dari yang lurus, sehingga “penyimpangan” berarti perbuatan yang memisah dari yang lurus/ *tidak sesuai* dengan jalan yang lurus.<sup>291</sup>

“Menyalahgunakan” persamaannya adalah “menyeleweng”, berasal dari dua suku kata “salah guna”, yang berarti tidak sebagaimana mestinya, menyimpang dari jalan yang benar, sehingga “menyalahgunakan” berarti melakukan sesuatu *tidak sebagaimana mestinya*.<sup>292</sup>

Merujuk hal tersebut di atas, maka agama mempunyai maksud dan tujuan, sehingga penyalahgunaan agama dapat diartikan sebagai “penyalahgunaan terhadap suatu ajaran agama dengan tujuan yang tidak sesuai/ menyimpang dengan tujuan dari agama itu sendiri”. Oleh karena itu, arti menyalahgunakan memiliki makna yang sama dengan menyimpang. Titik persamaannya adalah “perbuatan yang tidak sesuai dengan suatu keharusan”.

Bertolak dari hal tersebut di atas, jika ada ajaran yang diduga melanggar ketentuan UU No 1 Pnps 1965 maupun Pasal 156 KUHP, sepatutnya dilakukan kebijakan yang sama, yakni sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 UU No 1 Pnps 1965. Artinya, dalam hal seseorang diduga melakukan tindak pidana agama, sepatutnya dilakukan kebijakan yang sama tanpa perbedaan.

---

<sup>291</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990.op.cit. hal 841

<sup>292</sup> Ibid hal 771

### A.1.3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Aliran Sesat Saat Ini

KUHP sebagai dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, memiliki tujuan-tujuan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya. Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara, terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.<sup>293</sup>

Ajaran moderen berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan,<sup>294</sup> di samping tujuan-tujuan lainnya.<sup>295</sup> Artinya masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban baik yang membahayakan jiwa, harta benda atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan dalam kehidupan beragama.

Jadi, kebijakan *penal* (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya.

---

<sup>293</sup> Untuk menjamin pergesekan kepentingan itu tidak menjadi konflik berkepanjangan, maka dibuatlah aturan-aturan (hukum) tertentu (di antaranya dikenal dengan hukum pidana) , baik dibuat secara sepihak maupun dibuat bersama-sama sebagai hasil kesepakatan bersama, untuk mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan. lihat Jhon Gilissen dan Firts Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, edisi terjemahan, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 42-43

<sup>294</sup> lihat Lili Rasjidi, 1990, op.cit hal 65

<sup>295</sup> Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara memiliki makna penting sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, yaitu menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Ajaran moderen berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban. Lihat Lili Rasjidi, 1990. op.cit. hal 65

Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan aliran sesat, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidak sukaan masyarakat (*Social dislike*) atau pencelaan/ kebencian sosial (*Social disapproval/ Social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*Social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*Penal policy*” merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (*Social Defence Policy*) yang memiliki sifat universal di semua negara.”<sup>296</sup>

Patut dicatat, digunakannya **hukum pidana** sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang **lazim digunakan** di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

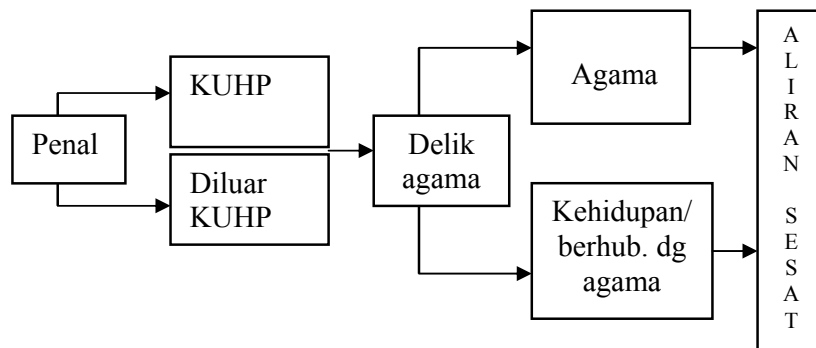
Oleh karena itu, dengan diformulasikannya delik-delik agama dalam berbagai aturan, terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana, berarti merupakan kebijakan penal, yaitu

---

<sup>296</sup> Menurut Soedarto, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) , harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual **berdasarkan Pancasila**. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat Barda Nawawi Arief, 1996 op.cit hal 35-36

usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, serta merupakan bagian dari kebijakan sosial untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. .

Terkait dengan aliran sesat sebagai bagian dari masalah-masalah agama dan atau kehidupan beragama (kehidupan sosial pada umumnya) maupun kejahatan, maka penanggulangan terhadap aliran sesat dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) akan tampak sebagai berikut;



Skema di atas menggambarkan bahwa aliran sesat merupakan bagian dari masalah-masalah agama dan masalah-masalah kehidupan / berhubungan dengan agama. Hal ini juga berarti bahwa aliran sesat merupakan bagian dari cakupan delik-delik agama sebagaimana terdapat dalam KUHP mupun di luar KUHP. Pada posisi inilah, hukum pidana (penal) berfungsi sebagai sarana/alat untuk menanggulangi aliran sesat sebagai kelompok yang memiliki haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan sekte tertentu dalam agama yang menyimpang dari kebenaran pokok-pokok ajaran



agama, sedangkan keberadaannya/ kehadirannya memiliki tingkat ketegangan yang tinggi dengan lingkungan sekitarnya.

Secara singkat, dalam perspektif hukum pidana, aliran sesat merupakan bagian dari cakupan delik-delik agama, dan merupakan bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana delik-delik agama dalam UU No 1 Pnps 1965, dan Pasal 156 a KUHP. Pada posisi inilah, negara<sup>297</sup> memiliki kewajiban untuk mengatur, melarang, mengawasi, menanggulangi dan seterusnya terhadap aliran sesat atas nama *perlindungan masyarakat* maupun *ketertiban umum*.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini terurai sebagai berikut;

1. Secara filosofis, perlindungan terhadap agama maupun dan kehidupan beragama sebagaimana terdapat dalam substansi (ruh dan semangat) KUHP dan UU No 1 Pnps 1965 merupakan kebijakan yang sangat rasional. Dikatakan sangat rasional mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat agamis yang menghendaki agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimiliki bangsa Indonesia itu seberapa dapat harus menyerap nilai-nilai hukum agama sebagai konsekuensi logis dari sebuah bangsa dan negara yang mengaku diri religius.

---

<sup>297</sup> Menurut **Yusril Ihza Mahendra**, negara memiliki hak untuk memaksakan hukum demi tercapainya tata tertib dalam masyarakat. "Pro Kontra Syariat Islam" Debat Publik TV One 16 Juli 2008. 19.00

2. Selain hal tersebut di atas tentu saja sangat Pancasilais dan benar-benar sah menurut hukum. Sebab, seperti diketahui, Pancasila terutama sila pertamanya -Ketuhanan Yang maha Esa - memberikan landasan/ asas yang sangat kokoh bagi setiap pembangunan peradaban dan kebudayaan yang ingin ditegakkan di bumi Indonesia.
3. Negara RI yang berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak saja meletakkan dasar moral di atas negara dan pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama karena salah satu yang pokok dari kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi kehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha membangun negara.
4. Landasan/ asas teologis ini semakin memperoleh bentuk konkret dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>298</sup>

Uraian di atas dapat ditegaskan, bahwa dilihat dari aspek idiel (Pancasila) dan Konstitusional (Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945), maka agama merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi, hal ini

---

<sup>298</sup> Muh. Amin Suma, *Telaah Kritis Sumbangan Konstruktif Terhadap RUU KUHP*, Makalah, Disampaikan pada “Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jakarta, 08 September 2004, hal 2

merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tidak bisa dipisahkan dengan agama, sebagai landasan moral dan landasan kesatuan nasional.<sup>299</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka adalah wajar dan sepatutnya jika perlindungan terhadap agama dituangkan dalam perangkat hukum yang menjamin, melindungi agama dari perbuatan penyimpangan dan menodai agama bahkan ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang banyak menimbulkan bahaya bagi persatuan nasional dan bahaya bagi agama serta ketentraman beragama.

Selain itu, agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum di Indonesia merupakan faktor fundamental, dapatlah dimengerti apabila “perlindungan terhadap agama” diformulasikan dalam berbagai produk perundang-undangan di Indonesia. Hal demikian merupakan konsekuensi logis dari adanya asas fundamental pengaturan berbangsa dan bernegara yang menegaskan,” Indonesia ialah Negara yang berdasarkan hukum”.

Menurut bagir Manan, bahwa negara harus menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah (supremasi hukum). Sedangkan hukum yang supreme mengandung makna bahwa suatu tindakan hanya sah bila dilakukan berdasarkan hukum. Hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki, atau penerapan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan

---

<sup>299</sup>Pancasila hakikatnya mengandung nilai-nilai kesusilaan/kesepakatan nasional, yang di dalamnya antara lain mengandung nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya.

yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu supreme mengandung makna adanya jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang, baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.<sup>300</sup>

Bertolak dari uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa hukum merupakan sendi dasar sekaligus panglima yang mengatur segenap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian setiap komponen bangsa harus tunduk dan patuh pada hukum. Hal ini berarti bahwa segenap tatanan nilai dan perilaku hak serta kewajiban warga negara atas dasar nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang didasarkan pada peraturan hukum.

Ini berarti bahwa hukum sebagai “pengaturan perbuatan-perbuatan manusia” seharusnya/ sepatutnya sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila sebagai ukuran pandangan hidup dan dasar negara. Oleh karena itu kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan, atau kebebasan dalam tertib/ tatanan hukum yang berlandaskan nilai-nilai nasional (Pancasila). Dengan tertib/ tatanan hukum inilah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan sebelumnya menunjukkan, bahwa dari sekian banyak praktek perbuatan yang dilakukan oleh aliran keagamaan/ kepercayaan tertentu justru banyak yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia (khususnya delik-delik agama),

---

<sup>300</sup> Bagir Manan, *Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945*. Makalah pada ceramah ilmiah di hadapan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 3 September 1994. hal. 18.

bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang menyebabkan terganggunya perasaan tertib dan tentramnya suatu masyarakat,<sup>301</sup> dan bahkan dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa dan lain sebagainya.

Patut dicatat, ketika keberadaan suatu aliran kepercayaan masyarakat ternyata perbuatannya melewati batas tertentu, misalnya saja mengarah pada perbuatan kriminal, membahayakan ketertiban umum, meresahkan masyarakat dan lain sebagainya, maka hubungan antar masyarakat umum dengan anggota aliran tertentu, dapat berubah menjadi hubungan yang tidak harmonis bahkan bisa jadi sampai ke tingkat kerisauan atau keresahan.

Fakta-fakta di atas jika hal ini dibiarkan, pada akhirnya akan mengganggu stabilitas negara, bahkan memecah persatuan nasional. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum, memiliki kewajiban untuk menjalankan amanat sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni kewajiban untuk menjamin terciptanya kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan beragama.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, dilihat dari sudut kebijakan, maka kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi (dengan menggunakan sarana penal, khususnya pasal 156a KUHP dan UU No 1 Pnps 195) aliran sesat ini, merupakan usaha yang sangat rasional dan mutlak diperlukan. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan

---

<sup>301</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dan Santet*, makalah pada Seminar “Relevansi KUHP Dalam Upaya Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia” FH UNUD, 30 April 2005 hal 10-11

demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Selain itu, hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara memiliki makna penting sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, yaitu menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.<sup>302</sup>

Secara umum, substansi hukum (pidana) dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Oleh karena itu terdapat hal-hal menarik sebagai berikut;

- a. bahwa yang menjadi objek perlindungan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 dan Pasal 156 KUHP, secara tegas adalah “sesuatu agama”. Hal ini berarti bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 dan Pasal 156 KUHP adalah agama, bukan terhadap perasaan kehidupan beragama,<sup>303</sup> juga bukan terhadap persatuan nasional<sup>304</sup>. Sedangkan penjelasan umum (bab I) UU No 1 Pnps 1965 yang menjadi objek perlindungan adalah;

- “Dasar Negara” (penjelasan umum angka 1 alinea ketiga, pen)

---

<sup>302</sup> Ajaran moderen berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban. Lihat Lili Rasjidi, 1990. op.cit. hal 65

<sup>303</sup> lihat penjelasan umum angka 4 alinea pertama UU No 1 Pps 1965

<sup>304</sup> lihat penjelasan umum angka 1 alinea kedua UU No 1 Pps 1965

- “persatuan nasional”. (penjelasan umum angka 1 alinea kedua, pen)
- “ketentraman beragama” (perasaan kehidupan beragama, penjelasan umum angka 4 alinea pertama).

Jadi melihat sistematika demikian, menyebabkan divergensi atau ketidak harmonisan antara “status dan penjelasan delik” dengan “teks dan rumusan delik”<sup>305</sup>. Selain itu, Pasal 4 UU No1/PNPS/1965 memerintahkan agar satu ketentuan pasal UU tersebut yang mengatur tentang delik agama dimasukkan dalam KUHP pasal 156a.

Pasal 156a KUHP tersebut dimasukkan dalam Bab V KUHP yang mengatur tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.” Dari sudut tertentu, misalnya, peletakan pasal tersebut dalam Bab V bisa dilihat bahwa, yang dimaksud delik agama adalah kejahatan terhadap agama yang melanggar atau yang merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum.

- Penyebutan “agama” dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tersebut adalah mengacu pada penjelasan pasal dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut, yaitu enam agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu). Bertolak dari hal demikian, maka Pasal tersebut hanya terkesan berlaku untuk melindungi agama utama di Indonesia, tidak termasuk agama yang dianggap bukan agama utama apalagi kepercayaan atau aliran kepercayaan yang selama ini dikenal hidup di Indonesia.

---

<sup>305</sup> **Oemar Senoadji** menyatakan hal yang sama, selanjutnya lihat Barda Nawawi Arief 2007, op.cit hal 6

Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam KUHP maupun UU No 1 Pnps 1965, patut dicatat, ruh dan semangat yang terdapat ada dalamnya terkandung nilai/ norma/ kaedah yang luhur sebuah perlindungan terhadap negara (persatuan nasional), agama, dan kehidupan beragama secara damai dan dalam bingkai kerukunan hidup bersama.

Artinya, jika di negeri ini terjadi ketidak rukunan dalam kehidupan beragama, tidak mustahil jika dibiarkan akan mengakibatkan terjadinya perpecahan kesatuan nasional yang bisa mengancam eksistensi negara. Wajar kalau kemudian negara melakukan serangkain kebijakan perlindungan agama melalui delik-delik agama dalam KUHP maupun di luar KUHP, khususnya UU No 1 Pnps 1965.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan penanggulangan tindak pidana terhadap agama (termasuk terhadap aliran sesat) berarti hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang telah diterima dan disepakati bersama, sehingga diharapkan pula terciptanya kehidupan yang rukun, damai dan tentram.



## **A.2. Kebijakan Penanggulangan Aliran Sesat Untuk Masa Yang Akan Datang**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sampai saat ini delik-delik agama terutama pasal 156 KUHP dan UU No 1 Pnps 1965 diterapkan (dijadikan sebagai upaya rasional) menanggulangi aliran sesat. Kebijakan demikian (pendekatan penal) banyak menimbulkan kontroversi, diversi opini di kalangan masyarakat luas terhadap langkah yang di tempuh dalam menghadapi masalah ini.

Artinya, kebijakan hukum pidana ((khususnya substansi hukum pidana mengenai delik-delik agama) sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang seharusnya menurut Sudarto sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan,<sup>306</sup> di samping secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*),<sup>307</sup> namun faktanya, usaha dan upaya tersebut, seolah-olah masih belum terpenuhi, indikasinya adalah meningkatnya masalah-masalah kejahatan<sup>308</sup> dan maraknya aliran sesat yang berakibat pada aksi kekerasan-kekerasan berlatar belakang agama dan aliran kepercayaan.

Kondisi demikian dan perkembangan di Indonesia, memunculkan gagasan untuk melakukan upaya “pemikiran kembali” yang berarti “re-evaluasi, review, reorientasi, reformasi atau reformulasi” dan “penggalan

---

<sup>306</sup> Sudarto. 1996.op.cit hal. 38

<sup>307</sup> Barda Nawawi Arief. 2002. op.cit. hal. 2

<sup>308</sup> Pada sisi lain, pelaku yang telah divonis sesat merasa hak-hak dasarnya berupa bebas untuk memeluk agama dan keyakinannya tidak dipenuhi oleh undang-undang

hukum” dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah dengan melakukan pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach , baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan.

#### **A.2.1. Kebijakan Dalam Konsep KUHP**

Gagasan perumusan delik agama berasal dari Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. Dalam salah satu resolusinya dikatakan, bahwa dalam reformasi hukum pidana yang akan datang, perlu ditelaah secara mendalam tentang adanya delik-delik agama dalam KUHP. Selanjutnya dikatakan, bahwa tidakkah pengakuan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan kausa prima dalam negara Pancasila, dengan Pasal 29 UUD 1945 yang harus menjadi dasar dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, membenarkan bahkan mewajibkan penciptaan delik-delik agama dalam KUHP.<sup>309</sup>

Agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum kita merupakan faktor fundamental, dapatlah dimengerti apabila faktor tersebut digunakan sebagai landasan yang kuat dan kokoh dihidupkannya delik-delik agama. Delik-delik agama dapat hidup berdampingan dengan delik-delik lainnya, bahkan bisa mengambil unsur agama sebagai sumber inspirasinya.

---

<sup>309</sup> Catatan Seminar “ *Kriminalisasi Atas Penghinaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP*” yang diadakan oleh Komnas HAM, ELSAM, PAHAM UNPAD, KAHAM UNDIP, PUSHAM Univ. Surabaya pada tanggal 13 Desember 2005, hal 2

Bertolak dari hal tersebut di atas, dikeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Dalam UU ini, khususnya pada Pasal 4, menyebutkan penambahan pasal baru dalam KUHP, yaitu pasal 156a. Bunyi pasal tersebut adalah:

”Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dan (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Esa”.

Inilah awalnya ”delik agama” dalam pengertian delik *terhadap* agama masuk dalam KUHP, dan kemudian mempengaruhi perumusan RUU KUHPidana. Yang terutama ingin dilindungi dalam konsep ”delik terhadap agama” ini adalah kesucian agama itu sendiri dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski ditujukan untuk melindungi kesucian agama, tetapi karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi para penganut agama.

Perkembangan selanjutnya, dalam Konsep KUHPidana yang terakhir, delik agama dikategorisasi dan disistematisasi kembali dari KUHP yang sekarang berlaku sehingga disusun ke dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab VII (yang berisi 8 pasal --Pasal 341 sampai 348). Bab ini terdiri atas dua bagian, “Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dan sarana ibadah”. Selengkapnya sebagai berikut;

BAB VII  
TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN  
BERAGAMA  
Bagian Kesatu  
Tindak Pidana terhadap Agama  
Paragraf 1  
Penghinaan terhadap Agama

Pasal 341

Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 342

Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 343

Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 344

(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Paragraf 2

Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama

Pasal 345

Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang *sah* dianut di

Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua  
Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah

Paragraf 1  
Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan

Pasal 346

(1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 347

Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 2  
Perusakan Tempat Ibadah

Pasal 348

Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Jadi kalau dicermati lagi, dalam konsep KUHP 2006 maupun konsep KUHP 2008 terdapat bab khusus, yakni bab VII yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama”. Menurut **Barda Nawawi Arief**, diadakannya bab khusus ini dimulai sejak konsep pertama buku ke II tahun 1977 yang dikenal dengan istilah konsep BAS (konsep yang disusun oleh tim basaroedin), yaitu dimasukkan dalam Pasal 181 s/d 196 bab VI. Sampai

dengan perkembangan konsep 1993-1998, tetap dimasukkan dalam bab VI (menjadi Pasal 257-264). Dalam konsep selanjutnya dimasukkan dalam bab VII buku II, yaitu dalam Pasal 290-297, konsep 2000-2002 dalam Pasal 336-343 konsep 2004 dalam Pasal 342-345 konsep 2005; dan Pasal 342-346 konsep 2006.<sup>310</sup>

Ruang lingkup Tindak Pidana agama dalam Konsep di atas, sama dengan yang diatur dalam tahun-tahun sebelumnya. Tindak pidana/ delik agama dalam konsep KUHP terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang “tindak pidana terhadap agama”. Sedangkan bagian kedua tentang “Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah”

Bagian kesatu tentang “tindak pidana terhadap agama”, terdiri dari dua paragraf, yaitu;

1. Paragraf penghinaan terhadap Agama (Pasal 341-344) yang dirinci menjadi;
  - menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341)
  - menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (Pasal 342)
  - mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (Pasal 343)
  - delik penyiaran Pasal 341 atau Pasal 343 (Pasal 344)
2. Paragraf penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama (Pasal 345 )

Bagian kedua tentang “tindak pidana terhadap agama”, terdiri dari dua paragraf, yaitu “Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah”, terdiri dari dua paragraf ;

---

<sup>310</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, op.cit hal 8

- a. Paragraf kesatu tentang “gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan” sebagaimana dalam Pasal 346-347, yaitu;
  - Pasal 346 ayat (1) ; mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan
  - Pasal 346 ayat (2) membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung,
  - Pasal 347 mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya
2. Paragraf kedua tentang “Perusakan Tempat Ibadah” yaitu;
  - Pasal 348 menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah

Menurut **Barda Nawawi Arief**, dari perincian di atas terlihat, bahwa delik-delik agama yang diatur dalam Konsep itu, semuanya tergolong dalam delik agama dalam pengertian tindak pidana /delik “terhadap agama”; dan tindak pidana /delik “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”.<sup>311</sup>

Kebijakan pengaturan Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama dalam KUHP khususnya KUHP Konsep menuai kritik dari banyak pihak terkait efektifitas sekaligus eksese pengaturan delik tersebut. Ada pihak yang pro dan tidak sedikit yang menolak bahkan merekomendasikan untuk dihapus saja.

Perbedaan yang menghasilkan pro dan kontra opini publik tersebut, pada dasarnya berkuat pada persoalan agama itu sebagai urusan privat atau urusan publik, perlu tidaknya hukum melindungi Tuhan, agama dan simbol-simbolnya serta pengaturan oleh hukum dalam kehidupan keagamaan

---

<sup>311</sup> Ibid hal 11

masyarakat dianggap intervensi berlebihan negara dalam urusan privat yang membawa eksese pemberangusan hak individu, masyarakat dalam mengespresikan pengalaman imannya. Dalam prespektif kontemporer, intervensi publik yang berlebihan ini akan bersingungan bahkan bersitegang dengan konsep-konsep fundamental HAM liberal sekuler barat dalam konvensi-konvensi HAM internasional dalam ranah sipil khususnya sosial budaya.

Terlepas dari perdebatan pro dan kontra mengenai delik-delik agama sebagaimana terdapat dalam RUU KUHP, menarik apa yang dikatakan muladi **Muladi** mengatakan; pengaturan Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam bab tersendiri (Bab VII) guna menunjukkan bahwa Indonesia memang bukan negara yang berdasarkan atas agama, tetapi juga bukan negara sekuler, melainkan negara yang berkeTuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini yang dilindungi adalah perasaan hidup keagamaan, ketentraman hidup beragama dan agama yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sendiri sebagai kepentingan hukum yang besar.<sup>312</sup>

---

<sup>312</sup> Muladi. *Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas dalam RUU KUHP*. Makalah. Dalam Beberapa tulisan Terkait kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP. Bahan Bacaan untuk *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (*Democratic Reform Support Program*) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: “Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”. Hotel Ibis Tamrin, Jakarta 28 September 2006, hal 24



### **A. 2.2. Penanggulangan Aliran Sesat Dalam Perbandingan**

Sehubungan dengan pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan hukum pidana, maka menurut Barda Nawawi Arief, dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan hukum pidana (termasuk delik-delik agama maupun aliran sesat, pen) perlu ditunjang dengan pengkajian yang bersifat komparatif.<sup>313</sup>

Menurut **Rene David** dan **Jhon E Brierley**, perbandingan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi ilmu hukum serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional.<sup>314</sup>

Jadi, terkait penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk masa yang akan datang, diperlukan kajian komparatif dengan berbagai negara, khususnya dalam rangka penyusunan KUHP baru dan undang-undang lainnya, dengan kata lain, perbandingan hukum pidana merupakan hal yang sangat penting dan mutlak diperlukan.

Berikut contoh-contoh pengaturan delik-delik agama dalam berbagai negara;

#### **1. Malaysia**

Pada prinsipnya, Negara Malaysia menetapkan Islam dalam konstitusinya sebagai agama resmi negara. Namun demikian, Malaysia tetap menghargai kebebasan beragama di negaranya.<sup>315</sup>

---

<sup>313</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003 hal V

<sup>314</sup> Ibid

<sup>315</sup> Lihat Iwan Gayo, *Buku Pintar Seri Senior*, Upaya Warga Negara, Jakarta 1993: hal 518

Sebagai implementasi dari penetapan Islam sebagai agama resmi negara, maka urusan agama Islam ditangani oleh Dewan Nasional Malaysia untuk masalah-masalah Islam. Salah satu tugas dari dewan ini adalah melakukan pengawasan terhadap ajaran-ajaran Islam yang dikembangkan oleh aliran-aliran yang ada dalam masyarakat.

Dewan dapat menetapkan bahwa suatu ajaran dinyatakan bid'ah atau menyimpang dari prinsip-prinsip agama Islam seperti yang dianut oleh umumnya rakyat Malaysia (yang berpaham Sunni). ***Pemerintah Malaysia dapat mengambil tindakan terhadap aliran yang menyimpang*** tersebut di atas berupa tindakan pelarangan menyebarkan ajaran-ajaran tersebut atau membubarkan organisasi yang menganut ajaran-ajarannya.<sup>316</sup>

## 2. Brunei

Brunei adalah negara agama, dimana sistem pemerintahan dan sistem hukumnya didasarkan pada dogma-dogma agama. Ruang lingkup delik yang berhubungan dengan agama diatur dalam Chapter XV tentang *Offences relating to Religion* meliputi Pasal ;

Pasal 295: menghancurkan/merusak/ mencemari objek yang dipandang sakral oleh sekelompok orang tempat ibadah dengan maksud menghina agama setiap golongan agama,

Pasal 296: Mengganggu pertemuan keagamaan,

Pasal 297: Pelanggaran ditempat pemakaman,

Pasal 298: menulis, mengucapkan kata-kata, suara atau sikap, dengan maksud ***melukai perasaan keagamaan***.

---

<sup>316</sup> Muhammad Hashim, ***Kebebasan berpendapat dalam Islam***, Mizan, Bandung 1996 :hal 338-339

Menurut Barda Nawawi Arief, Pasal 295 KUHP Brunei di atas, dapat dimasukkan dalam perumusan delik yang mengandung unsur “merusak/ mencemarkan objek yang dipandang suci oleh setiap golongan”, “*menghina agama*”, melukai perasaan keagamaan.<sup>317</sup>

Jadi, dilihat dari redaksi Pasalnya, walaupun Brunei tampaknya tidak mengatur secara khusus delik terhadap Tuhan, namun objek yang hendak dilindungi adalah “agama” di samping “perasaan beragama” sendiri. Rumusan Pasal 295, 298 mencantumkan secara tegas “mencemari objek yang dipandang sakral”, “melukai perasaan keagamaan”, hal ini bisa berarti bahwa kehadiran aliran sesat dengan ajarannya yang “dikategorikan” sesat, secara implisit dapat dikategorikan “mencemari objek yang dipandang sakral”, “melukai perasaan keagamaan”.

Selanjutnya Pasal 296 tentang mengganggu pertemuan keagamaan dan 297 tentang pelanggaran ditempat pemakaman. Untuk delik ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan KUHP Indonesia, yaitu tersebar dalam Pasal-Pasal, hanya saja lebih jelas dan kongkrit dasar kriminalisasinya, mengingat Brunei adalah negara yang berdasarkan syariat agama Islam.

### **3. Inggris,**

Negara Inggris terkenal dengan sistem *common law* yang tidak mengkodifikasikan berbagai peraturan hukumnya yang sejenis kedalam satu kitab (*single code*), dan tradisi ini dilakukan sudah berabad-abad

---

<sup>317</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, op.cit hal 81

lamanya. Terkait dengan delik blasphemy, pengaturannya dalam berbagai undang-undang khusus, antara lain;<sup>318</sup>

- dalam Undang-Undang Pencemaran/Penghinaan (*The Criminal Libel Act 1819* dan *The Law of Libel Amendment Act 1888*)
- Dalam Undang-Undang tentang Kuburan (*The Cemeteries Clauses Act 1847* dan *The Burial laws Amendment Act 1880*)
- Dalam Undang-Undang Yurisdiksi Pengadilan Gereja (*The Ecclesiastical Court Jurisdiction Act 1860*), dan
- Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terhadap Orang (*The Offences Against the Persons Act 1861*)

Ruang lingkup delik blasphemy yang diatur keempat undang-undang tersebut di atas, meliputi perbuatan;

- a. Pasal 1 *The Criminal Libel Act 1819*, menyangkut dua perbuatan yaitu penghinaan yang bersifat menghasut (*sedition libel*) dan penghinaan terhadap tuhan (*blasphemous libel*),
- b. Pasal 2 *The Ecclesiastical Court Jurisdiction Act 1860*, melarang perbuatan;
  - yang bersifat mengacau, melakukan kekerasan, atau perbuatan tidak senonoh didalam Gereja Katherdral, Gereja Wilayah/distrik atau kepel dari Gereja Inggris....., atau dalam setiap Capel umat beragama atau..., si setiap tempat peribadatan yang sah, yang dilakukan baik sewaktu berlangsungnya penyelenggaraan kebaktian/upacara ketuhanan maupun pada setiap waktu lainnya ;
  - mengganggu, menghalangi, menjengkelkan, atau menyusahkan/mengacau atau dengan sarana-sarana lainnya yang melawan hukum menggelisahkan pendeta/ pastor yang sedang memimpin sakramen atau upacara ketuhanan, upacara ritual, pelayanan jasa disetiap katedral, gereja atau capel atau di halaman gereja atau makam.
- c. Pasal 36 *The Offences Against the Persons Act 1861* yang didalamnya mengatur antara lain tindak pidana mengenai penggunaan ancaman atau paksaan untuk merintangi atau berusaha merintangi pendeta atau petugas lain di dalam menyelenggarakan upacara/kebaktian ketuhanan didalam gereja, kepel, rumah pertemuan, atau ditempat peribadatan lainnya;

---

<sup>318</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, 2007, op.cit. hal 58

- d. Pasal 7 *The Burial laws Amendment Act* 1880, yang mengatur tindak pidana;
- mengacau, melakukan kekerasan, atau perbuatan tidak senonoh di pekuburan, dan
  - mengemukakan penghinaan atau mengkritik/ mencela agama Kristen, kepercayaan atau peribadatan setiap gereja atau sekte golongan agama Kristen, anggota pendeta/ petugas gereja/ sekte itu maupun setiap orang lain.

Delik agama di Inggris bukan merupakan delik baru, melainkan delik yang sudah lama ada bahkan sering disebut delik peninggalan abad XIX.<sup>319</sup> Delik agama ini secara khusus bertujuan melindungi kepercayaan keagamaan masyarakat Inggris yaitu Kristen dan segala bentuk sekte-sekte nya, sedangkan agama-agama lain yang bersifat minoritas seperti Islam, Yahudi dan Budha tidak mendapat perlindungan undang-undang ini, akibatnya perbuatan yang dinilai *menistakan agama* Islam, atau Yahudi dan juga Budha tidak bisa diajukan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan delik blasphemy.

Patut dicatat, terkait dengan pembahasan ini, walaupun Inggris hanya “melindungi” satu agama, yakni Kristen, namun yang hendak ditekankan di sini, bahwa Inggris yang dianggap sebagai negara sangat moderenpun masih tetap memberikan perlindungan terhadap agama. Jadi, melihat Inggris saja memberikan perlindungan terhadap agama, maka merupakan sebuah “keharusan” bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap agama, yaitu agama sebagai sesuatu yang sangat

---

<sup>319</sup> Ibid 60

sakral dan suci dan patut dilindungi, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang mendasarkan dirinya kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pada tahun 2002, **Lord Avebury** anggota parlemen Inggris mengajukan RUU *blasphemy* yaitu RUU Delik Agama (*Relegion Offence Bill*, atau *RO Bill* atau *lord Aveburu Bill*) ke parlemen Inggris. Selanjutnya parlemen Inggris membentuk panitia khusus/ terpilih yang bertugas secara khusus menguji eksistensi, relevansi, dan kegunaan delik-delik peninggalan abad 19 di masa sekarang, karena kondisi dulu dengan kondisi saat ini berbeda di samping itu penduduk Inggris dewasa ini juga semakin heterogen.

Dalam RO Bill ini, ruang lingkup blasphemy diperluas keseluruhan agama, jadi bukan hanya untuk golongan mayoritas yang bergama Kristen tetapi juga agama-agama lain seperti Islam, Yahudi dan Budha, karena bagaimanapun juga mereka yang minoritas itu juga warga negara Inggris, sehingga tidak patut jika mereka mendapat perlakuan yang tidak adil terhadap kepercayaan mereka. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 133 RO Bill.

#### **4. Belanda,**

Secara historis, Belanda adalah negara yang memberikan pengaruh besar dalam tata hukum Indonesia, terutama dalam KUHP. Terlebih KUHP Indonesia adalah warisan dari Belanda. Bertitik tolak dari hal demikian, ada baiknya melihat delik agama di negeri Belanda

sebagai bahan perbandingan kebijakan hukum pidana mengenai delik-delik agama di Indonesia.

Sebagaimana di Indonesia, WvS Belanda tidak jauh berbeda dengan KUHP WvS yang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) , delik-delik agama tidak dimasukkan dalam bab yang secara khusus, akan tetapi dimasukkan dalam Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, yang meliputi Pasal;

**a. Delik “terhadap agama” di Belanda**

- Pasal 147 Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda kategori kedua  
(1) Barangsiapa di muka umum, denga lisan, tulisan atau lukisan, *melukai perasaan keagamaan* dengan *menghina Tuhan*.
- Pasal 147 a, Barangsiapa menyebarkan, mempertontonkan secara umum atau menempelkan tulisan atau gambar yang mengandung pernyataan *meghina perasaan keagamaan* disebabkan sifatnya yang menghina Tuhan, atau diancam penjara paling lama dua bulan atau denda kategori kedua, apabila ia mengetahui atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa tulisan atau gambar itu mengandung pernyataan demikian.

**b. Delik “berhubungan dengan agama” di Belanda**

- Pasal 145 tentang tindakan merintangi/mengganggu pertemuan agama, penguburan jenazah;
- Pasal 146 tentang tindakan mengganggu pertemuan agama, penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh.
- Pasal 147 perbuatan dimuka umum dengan tulisan, lisan atau lukisan yang *melukai perasaan keagamaan* dengan *menghina Tuhan*, mengejek, mentertawakan petugas agama, pernyataan menghina benda-benda keperluan ibadah pada saat ibadah berlangsung.

Jadi, melihat rumusan delik agama di Belanda, hususnya Pasal 147 dan 147a yang melarang melukai perasaan keagamaan dengan “menghina Tuhan” dan “melukai perasaan keagamaan” dengan jelas dan tegas bahwa “kepentingan hukum” yang harus dilindungi adalah “agama” dan kehidupan beragama dari perbuatan-perbuatan yang dapat

merusak kesucian agama maupun ketentraman kehidupan beragama itu sendiri.

#### 5. Irlandia,<sup>320</sup>

Pasal 40.6 konstitusi Irlandia, pada prinsipnya Negara menjamin kebebasan menyatakan pendapat, namun meetapkan bahwa publikasi ucapan yang bersifat *menghina Tuhan*, yang bersifat *menghasut* atau *tidak senonoh*<sup>321</sup> merupakan perbuatan yang dapat dipidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

#### 6. Amerika Serikat<sup>322</sup>

Di Negara bagian Maryland, Chapter 272 Massachusetts General Laws, section 36;

*Whoever willfully blasphemes the holy name of god by denying, cursing or contumeliously reproaching God, His creation, government or final judging of the world, or by cursing or contumeliously reproaching Jesus Christ or the Holy Ghost, or by cursing or contumeliously reproaching or exposing to contempt and ridicule, the holy word of God contained in the holy scriptures shall be punished by imprisonment in jail for not more than one year or by a fine of not more than three hundred dollars, and may also be bound to good behavior*

(Barangsiapa dengan sengaja menghina kesucian nama Tuhan atau dengan mengutuk atau mencela secara menghina Jesus Kristus atau

---

<sup>320</sup> Ibid hal 72

<sup>321</sup> Bisa bermakna menghina, menafsirkan semena-mena, merendahkan dan lain sebagainya

<sup>322</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/blasphemy>



Roh Kudus, atau dengan mengutuk atau mencela secara menghina atau mengungkapkan penghinaan dan ejekan firman-firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil, dipidana dengan pidana penjara atau “jail” tidak lebih dari satu tahun atau dengan denda tidak lebih dari 300 dollar, dan juga dapat digabung dengan perbuatan baik.)

## 7. **Polandia**<sup>323</sup>

Ruang lingkup delik agama yang diatur dalam bab 28 terutama;

- Pasal 194, dalam melaksanakan ritual dan fungsi keagamaan, **menyalahgunakan**<sup>324</sup> kebebasan agama untuk merusak/merugikan kepentingan Republik Polandia
- Pasal 195 dalam **mengambil keuntungan**<sup>325</sup> dari keyakinan agama seseorang, **menyesatkan** orang lain atau menyebabkan gangguan ketertiban umum

Pasal-pasal di atas identik dan bahkan perumusannya hampir sama dengan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 dan Pasal 156a KUHP Indonesia, yakni unsur menyalahgunakan dan menyesatkan.

## 8. **Finlandia**

Perumusan dalam pasal 10 KUHP Finlandia intinya menyatakan;<sup>326</sup>

- Seseorang yang (1) **menghina Tuhan** di muka umum, atau dengan tujuan **melukai perasaan**, **mencemarkan** atau **menodai** sesuatu yang dipandang suci oleh gereja atau masyarakat agama, atau (2) dengan menimbulkan kegaduhan atau ancaman, mengganggu peribadatan, upacara kegerejaan atau upacara keagamaan lainnya, atau upacara penguburan, diancam karena

---

<sup>323</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, op.cit hal 40

<sup>324</sup> Rumusan Pasal ini mirip dengan redaksi pasal 156 a KUHP

<sup>325</sup> Pasal ini mirip dengan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965

<sup>326</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, op.cit hal 75-76

pelanggaran kesucian agama dengan pidana denda atau penjara paling lama 6 bulan

Pasal 8 dari chapter 11 menyatakan;

- Barangsiapa menyebarkan pernyataan atau informasi lain kepada publik sehingga suatu ras tertentu, kelompok keagamaan/ etnis/ bangsa, atau kelompok sejenis terancam, tercemar, atau terhina, diancam karena agitasi etnik dengan pidana denda atau penjara paling lama dua tahun

Delik-delik agama sebagaimana di atas, sangat mirip sekali dan bahkan dalam banyak hal, banyak berkesesuaian dengan delik-delik agama dalam KUHP Indonesia.

Masih banyak negara-negara lain yang memberikan pengaturan serupa, namun demikian, intinya sama. Di berbagai negara delik-delik agama dari segi pengaturan dan ruang lingkupnya berbeda-beda tergantung dari politik hukum masing-masing negara. Di Belanda delik delik agama diatur kemudian dengan mengamandemen WvS, sedangkan di Inggris tidak dimasukkan dalam KUHP, tetapi diatur dalam undang-undang khusus karena negara ini tidak mengenal sistem hukum yang kodifikatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup objek yang dilindungi dalam delik agama di berbagai negara, mencakup agama (keyakinan/kepercayaan)-nya itu sendiri, perasaan keagamaan, kebebasan beragama, praktek dan upacara keagamaan, tempat-tempat ibadah, benda-benda keperluan ibadah, atau objek yang dianggap sakral, mencegah permusuhan, kebencian/ konflik keagamaan, penyalahgunaan kebebasan beragama yang menimbulkan pelanggaran

ketertiban umum/ perdamaian, upacara penguburan, perlidungan terhadap petugas agama dan lain sebagainya

Ringkasnya, delik-delik agama di berbagai negara, pada umumnya tertuju pada agama dan berhubungan dengan kehidupan beragama, baik berupa penginaan, penyalahgunaan, penghasutan, penodaan/ penistaan, penyesatan, perbuatan idak senonoh dan lain sebagainya.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, agama dan segenap aspeknya merupakan kepentingan sakral dan suci yang patut dilindungi. Kajian komparatif ini setidaknya dapat memberikan kontribusi yang baik dalam Konsep KUHP, khususnya delik-delik agama yang dapat dipergunakan sebagai antisipasi yuridis terhadap aliran sesat untuk masa yang akan datang, pada akhirnya diharapkan difungsikan melindungi hak asasi manusia dan kepentingan publik (*public interest*).<sup>327</sup>

Oleh karena itu diperlukan upaya mencari sintesis antara hak-hak individu (*human rights*) dan hak-hak komunal (*communal rights*) dengan tetap menjaga kepentingan politik negara (*state policy*), misalnya kebijakan hukum pidana mengenai delik-delik agama sebagaimana terdapat dalam Konsep KUHP.<sup>328</sup>

---

<sup>327</sup> Lihat Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Mengkritisi RUU KUHPidana Dalam Perspektif HAM*. Makalah. Dalam Beberapa tulisan Terkait kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP. Bahan Bacaan untuk *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (*Democratic Reform Support Program*) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: *"Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP"*. Hotel Ibis Tamrin, Jakarta 28 September 2006. hal 47.

<sup>328</sup> Ibid

### **A.2.1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Aliran Sesat Yang Akan Datang**

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang lazim<sup>329</sup> digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Praktik selama ini menunjukkan, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan sesuatu yang lazim digunakan dalam mencegah dan menanggulangi aliran sesat. Konkretnya, delik-delik agama yang ada dalam KUHP maupun di luar KUHP, khususnya UU No 1 Pnps 1965 selalu digunakan sebagai alat untuk mencegah dan menanggulangi hampir semua peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan aliran sesat.

Bertolak dari hal tersebut di atas, terdapat hal-hal menarik terurai sebagai berikut;

Khusus delik agama “terhadap agama” dalam KUHP yang diterapkan untuk menanggulangi pelaku aliran sesat, baru muncul setelah lahirnya UU

---

<sup>329</sup> **H.L. Packer** mengemukakan perlunya penggunaan (hukum) pidana -dengan segala keterbatasannya- sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan alasan bahwa sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. sanksi pidana merupakan ‘penjamin yang utama/ terbaik’ apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. Pendapat senada dikemukakan Bassiouni, von liszt, A Print, van hammel dan sarjana-sarjana lainnya. Selengkapnya lihat, Barda Nawawi Arief, 1996, op.cit. hal155-156. Van Bemmelen, 1984 op.cit hal. 30

No1/PNPS/1965. Pasal 4 UU tersebut memerintahkan agar satu ketentuan Pasal UU tersebut dimasukkan dalam KUHP Pasal 156a. Pasal tersebut dimasukkan dalam Bab V KUHP yang mengatur tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, dan prakteknya dipergunakan untuk menanggulangi aliran sesat.

Konsekuensi dari peletakan Pasal tersebut dalam Bab V KUHP terlihat bahwa yang dimaksud delik agama adalah seolah-olah kejahatan (aliran sesat) terhadap agama yang melanggar terhadap ketertiban umum. Namun dalam praktiknya tidak demikian. Dari berbagai kasus proses pengadilan yang melibatkan Pasal 156a, hampir semuanya berkaitan dengan pendapat dan ide mereka yang diprotes oleh kelompok tertentu di dalam masyarakat karena dianggap menyimpang dari pendapat *mainstream* pihak yang melakukan protes.

Artinya, penjatuhan pidana atas mereka (aliran sesat) yang melanggar Pasal 156 a lebih mendasarkan pada pengertian tentang delik agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 Pasal 1, khususnya” Melakukan penafsiran agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

Penjatuhan hukuman terhadap mereka yang demikian, menimbulkan kesan seolah-olah lebih disebabkan oleh tekanan massa dan tokoh tertentu atas kasus tersebut di luar pengadilan, ketimbang pembuktian di ruang pengadilan atas gangguan ketertiban umum. Jadi, delik agama sebagaimana dalam Pasal

156a KUHP tersebut cenderung diberi pengertian melakukan “Penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

Selain hal-hal tersebut diatas, masih banyaknya dijumpai masalah-masalah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat diantaranya sebagai berikut ;

**Pertama**, penerapan atas Pasal 156a KUHP lebih ditujukan kepada perbuatan “menafsirkan dan kegiatan agama” yang menyimpang dari agama utama di Indonesia daripada perbuatan mengganggu atau kejahatan terhadap ketertiban umum.

**Kedua**, penjelasan Pasal dalam UU No 1 Pnps 1965 tersebut,<sup>330</sup> dalam pandangan umum “seolah-olah” hanya berlaku untuk melindungi agama yang diakui secara resmi<sup>331</sup> oleh pemerintah melalui berbagai peraturan<sup>332</sup>, tidak termasuk agama yang dianggap bukan agama utama apalagi kepercayaan atau aliran kepercayaan yang selama ini dikenal hidup di Indonesia.

**Ketiga**, bahwa tindak pidana/ delik agama baik dalam pengertian tindak pidana “terhadap agama” maupun tindak pidana “ berhubungan

---

<sup>330</sup> Penjelasan Pasal dalam UU No 1 Pnps 1965 menyatakan, bahwa gama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang di berikan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya; Jahudi, Zarasuastrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkannya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain

<sup>331</sup> Dalam perspektif Siti Muzdah Mulia, yang diproteksi dan dilindungi itu pun terbatas pada kelompok *mainstream* dari masing-masing agama. Lihat, Siti Muzdah Mulia, **Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Beragama**, makalah pada acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tgl 4 Juli 2007 di Jakarta, hal 8

<sup>332</sup> Faktanya, di antara peraturan yang secara eksplisit menyebut agama-agama yang diakui pemerintah adalah UU Adminduk yang disahkan pada 8 Desember 2006, pasal 8 ayat 4, yaitu yaitu 6 agama saja: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu

dengan kehidupan agama” selain di atur tersebar dalam KUHP, juga tersebar di luar KUHP seperti UU Pokok Pers, UU Penyiaran dan lain sebagainya. Pengaturan semacam ini tentu sangat tidak menguntungkan.

Pada posisi seperti diuraikan diatas, realisasi delik-delik agama menghadapi banyak hambatan, sebab bagi sebagian kalangan, pada delik-delik agama, norma hukumnya cenderung bersifat kabur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah yang sifatnya subyektif. Sementara dalam beberapa Pasal yang ada penjelasannya sekalipun tetap tidak jelas maknanya.<sup>333</sup>

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, sampai saat ini, keberadaan aliran sesat masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, akibatnya tidak jarang menimbulkan aksi-aksi kekerasan dan instabilitas sosial, bahkan dapat mengganggu ketertiban umum dan diawatirkan memecah persatuan bangsa.

Antisipasi dan penanggulangan aliran sesat di Indonesia tampaknya perlu ditempuh strategi total dan menyeluruh. Antisipasi terhadap kejahatan aliran sesat dimasa yang akan datang minimal dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu upaya-upaya mencegah dampak negatif dan meluasnya aliran sesat terhadap masyarakat, dengan mempersiapkan berbagai produk legislatif yang bisa menjadi katup pengaman masyarakat dari masalah aliran sesat.

Atas dasar hal tersebut di atas, diperlukan kajian mendalam untuk setiap langkah kebijakan, terutama mengenai aliran sesat sebagai bagian cakupan

---

<sup>333</sup> Selengkapnya, lihat, Siti Muzdah Mulia, *Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Beragama*, makalah pada acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tgl 4 Juli 2007 di Jakarta, hal 8

substansi delik agama maupun delik yang berhubungan dengan kehidupan agama, dengan cara re-evaluasi, re-orientasi, re-formulasi dan lain sebagainya, karena bagaimanapun juga kajian ini pada akhirnya diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi penegakan hukum dan pembaharuan hukum dalam rangka menopang pencapaian cita hukum dan tujuan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Makna pentingnya re-evaluasi, re-orientasi, re-formulasi substansi pengaturan aliran sesat sebagai bagian cakupan substansi delik agama maupun delik yang berhubungan dengan kehidupan agama terurai sebagai berikut;

1. Produk legislatif yang ada saat ini masih jauh dari kata memadai, dalam hal ini delik-delik agama yang ada dalam KUHP<sup>334</sup> maupun yang ada di luar KUHP, khususnya UU No 1 Pnps 1965 sebagai sarana untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan<sup>335</sup> berlatar belakang agama (aliran sesat) dianggap kurang memadai dan bahkan dianggap ketinggalan zaman,<sup>336</sup> sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat luas.

---

<sup>334</sup> Sampai saat ini dalam KUHP Indonesia warisan Belanda (Wvs) tidak ada "bab khusus" yang mengatur delik (terhadap) agama maupun delik yang berhubungan dengan agama. Dalam KUHP hanya ada "delik yang berhubungan dengan agama" yang ditempatkan sebagai bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum. Walaupun dalam perkembangannya pada tahun 1965 ditambahkan delik penodaan agama ke dalam KUHP, namun tetap saja dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum. Di dalam KUHP juga tidak ada perumusan secara tegas mengenai delik penghinaan terhadap Tuhan (*Blasphemy/Godslastering*), apalagi delik mengenai "aliran sesat".

<sup>335</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sarana pengendalian sosial, yaitu dengan sanksinya dijadikan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya untuk mengatur dan memelihara ketentraman antar dan intra umat beragama

<sup>336</sup> Kongres-kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" sering menyatakan dan mensinyalir, bahwa sistem hukum pidana yang ada selama ini di beberapa negara, berasal (diimpor) dari hukum asing semasa zaman kolonial, pada umumnya telah usang dan tidak adil ("*obsolete and unjust*") serta sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan ("*outmoded and unreal*") karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya



Atas dasar hal tersebut, antisipasi yuridis terhadap aliran sesat (dengan mempersiapkan berbagai produk legislatif) dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan/ penggantian. Jadi, antisipasi yuridis terhadap aliran sesat berkaitan erat dengan ide “*penal reform*” (pembaharuan hukum pidana) yang pada hakikatnya juga merupakan bagian dari ide yang lebih besar, yaitu pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional.

2. Antisipasi yuridis dengan cara menyiapkan produk perundang-undangan (melakukan pembaharuan hukum) mengenai aliran sesat pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*social policy*”.

Ini berarti, antisipasi yuridis terhadap aliran sesat pada hakikatnya:<sup>337</sup>

- a. merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*), khususnya substansi hukum pidana mengenai aliran sesat sebagai bagian dari cakupan delik-delik agama dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan (dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”);

---

dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat serta “tidak responsif” terhadap kebutuhan sosial masa kini. Lihat Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 102

<sup>337</sup> Disarikan dari pokok-pokok pikiran Barda Nawawi Arief dalam makalahnya berjudul, **Kebijakan Krimialisasi Kumpul Kebo dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP**, disajikan pada Seminar “Relevansi KUHP Dalam Upaya Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia”, di FH UNUD, 30 April 2005, hal 4

- d. merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan re-evaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana (mengenai aliran sesat) selama ini .
3. Bertolak dari pemikiran di atas, maka antisipasi yuridis dengan cara mempersiapkan berbagai produk legislatif mengenai aliran sesat sebagai bagian dari cakupan delik-delik agama di masa yang akan datang, sepatutnya berorientasi pada pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("*policy oriented approach*") dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ("*value oriented approach*"),<sup>338</sup> agar hukum pidana (khususnya delik-delik agama) bisa mencegah tindak pidana dan tidak menjadi sumber penyulut konflik antar umat beragama sekaligus faktor kriminogen baru di masyarakat.

Menurut **Mardjono Reksodiputro** Konsep KUHP dibangun di atas prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>339</sup>

- Bahwa hukum pidana juga dapat dipergunakan untuk menegaskan (atau menegaskan kembali) nilai-nilai sosial yang mendasar (*basic social values*) bagi pembentukan perilaku hidup bersama;

---

<sup>338</sup> Jelasnya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/ atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa". Jadi, pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional. Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan nilai/paradigma moral religius, nilai/ paradigma kemanusiaan (humanis), nilai/paradigma kebangsaan, nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan), dan nilai/paradigma keadilan sosial. Lihat, Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2005 hal 2 atau lihat pula Barda Nawawi Arief, *Sistem Pidana dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004*, Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.

<sup>339</sup> Mardjono Reksodiputro, *Arah Hukum Pidana dalam Konsep RUU KUHPidana*. Makalah. Dalam Beberapa tulisan Terkait kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP. Bahan Bacaan untuk *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (*Democratic Reform Support Program*) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: "*Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP*". Hotel Ibis Tamrin, Jakarta 28 September 2006 hal 76

- Bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya digunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian sosial (social control) tidak dapat efektif (asas ultimum-remedium dan asas subsidiaritas);
- Dalam menggunakan hukum pidana sesuai kedua aturan (a) dan (b) di atas, harus di usahakan agar caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kebebasan individu (tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektifitas dalam masyarakat demokratik yang modern).

Prinsip-prinsip dasar yang dijadikan dasar membangun hukum pidana yang menjunjung tinggi HAM sepatutnya dapat dipergunakan untuk menegaskan kembali nilai-nilai sosial yang mendasar (*basic social values*) bagi pembentukan perilaku hidup bersama. Nilai-nilai sosial yang mendasar. Dalam konteks inilah dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk Hukum Pidana) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap.<sup>340</sup>

Bertolak dari ide dasar di atas, antisipasi yuridis terhadap aliran sesat di masa yang akan datang kebijakan (terutama pembangunan substansi) hukum pidana pada dasarnya adalah untuk menegakkan nilai-nilai sosial dasar dalam aspek kehidupan religius, keagamaan masyarakat ditujukan untuk memelihara toleransi dan penghormatan harkat dan martabat manusia.

Pada akhirnya diharapkan dalam konteks ini difungsikan sebagai stabilisasi dan harmoni dalam kehidupan keagamaan masyarakat, karena keragaman agama dan kepercayaan masyarakat tidak jarang menjadi sumber konflik, oleh karena itu berbagai tindakan, perbuatan yang mengancam aspek

---

<sup>340</sup> Lihat, Moeljatno dalam Barda Nawawi Arief, ***Wawasan Hukum Pidana***, Bahan Matrikulasi Program Magister Ilmu Hukum Undip tanggal 23 Agustus 2006, hal 15

kehidupan keagamaan bahkan agama itu sendiri dianggap sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Muladi dalam berbagai seminar menegaskan bahwa latar belakang kriminalisasi delik agama dalam RUU KUHP bukan semata-mata memangkas dan memberangus kebebasan beragama masyarakat, tetapi justru ditujukan untuk melindungi kebebasan umat beragama dalam menjalankan agama dan kepercayaan, serta melindungi agama Tuhan dan simbol-simbolnya dari kelompok-kelompok yang bermaksud menodai dan menistakannya.<sup>341</sup>

Selain itu, upaya mencari solusi melalui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat di masa yang akan datang bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu menarik sebuah *qoidah* Arab yang menyatakan;

*Al Muhafadotu 'alal Qodimis Solih, Wal akhdu bil jadidil ashlah.*  
(Peliharalah tradisi lama (kebiasaan/ *qoidah*/ pendapat, cara, pen) yang baik, dan ambillah juga tradisi baru (yang baik) yang datang kemudian)<sup>342</sup>

*Qoidah* di atas berarti, bahwa dalam mengambil suatu metode atau cara untuk mengambil keputusan (termasuk kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk masa yang akan datang), dapat dilakukan dengan cara memelihara kebaikan/ manfaat dari sesuatu yang terdahulu (peninggalan, pemikiran, kebiasaan, hukum dan lain sebagainya), dan mengambil kebaikan/ manfaat dari sesuatu yang datang kemudian (baru).

---

<sup>341</sup> Muladi. *Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas dalam RUU KUHP*. Makalah. Dalam Beberapa tulisan Terkait kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP. Bahan Bacaan untuk *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (*Democratic Reform Support Program*) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: “Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”. Hotel Ibis Tamrin, Jakarta 28 September 2006

<sup>342</sup> Abdullah Moenasyik, *Aspek Dasar Budaya Masyarakat Madura*, Makalah pada dialog “Mencari Format Baru Gerakan Pemuda Ansor”, PAC GP Ansor Klampis, 26 September 2007 hal 9

Bertolak dari hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa hal penting yang perlu mendapat kajian dan pembahasan lebih lanjut sebagai antisipasi yuridis terhadap aliran sesat, diantaranya adalah terurai sebagai berikut;

**Pertama**, Pancasila pada hakikatnya mengandung nilai-nilai Ketuhanan, jadi mengandung nilai-nilai religius. Sebagai dasar pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas negara, tetapi juga memastikan bahwa pengakuan sila pertama Pancasila adalah salah satu tiang pokok dari perikehidupan manusia sekaligus sendi kehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Soekarno** menyatakan;

Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat Indonesia ber-Tuhan secara kebudayaan yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber Tuhan.<sup>343</sup>

Selain Soekarno, Muh. Yamin menyatakan;<sup>344</sup>

Bangsa Indonesia yang akan merdeka itu ialah bangsa yang beradaban luhur dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu maka dengan sendirinya kita insyaf bahwa Negara Kesejahteraan Indonesia Merdeka itu akan berke-Tuhanan. Tuhan akan melindungi negara Indonesia Merdeka itu.

Selain hal tersebut di atas, dalam menghadapi realitas hidup yang serba kompleks, manusia secara fisik maupun psikis selalu terhadang oleh berbagai

---

<sup>343</sup> Sumber, dari Yamin. Naskah. 1, hal. 115-116, dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, pustaka Perpustakaan Salam ITB. 1981 hal. 77

<sup>344</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, pustaka Perpustakaan Salam ITB. Bandung, 1981, Hal. 94

situasi krisis, terutama tiga bentuk situasi krisis yang abadi, yaitu ketidakberdayaan, ketidakpastian, dan kelangkaan. Agama dengan wawasan supra-empirisnya dipandang sebagai satu-satunya solusi yang dapat membantu manusia menyesuaikan diri dengan situasi krisis eksistensial tersebut. Agama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendensikan tuntutan dari kehadiran sosial.

Bertolak dari hal tersebut di atas, Sila pertama Pancasila ( Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak bisa dipisahkan dengan agama, dan merupakan landasan moral, salah satu tiang pokok dari perikehidupan manusia sekaligus sendi kehidupan negara.<sup>345</sup> Oleh karena itu secara umum adalah wajar dan bahkan sepatutnya jika nilai dan norma yang baik dalam delik-delik agama (baik yang ada dalam KUHP maupun UU No 1 Pnps 1965) tetap dipertahankan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang berdimensi keagamaan, khususnya aliran sesat. Dengan kata lain, negara-negara lain saja yang tidak mendasarkan dirinya kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengatur delik-delik agama dalam KUHP mereka, apalagi Indonesia yang mendeklarasikan sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Kedua**, dirumuskannya delik-delik agama dalam KUHP maupun Konsep KUHP, sesuai dengan tujuan asas legalitas, dimaksudkan sebagai

---

<sup>345</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, Pancasila pada hakikatnya mengandung nilai-nilai kesusilaan/kesepakatan nasional, yang di dalamnya antara lain mengandung nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi mengandung di dalamnya nilai-nilai moral religius. Lihat, Barda Nawawi Arief dalam makalahnya berjudul, *Kebijakan Krimialisasi Kumpul Kebo dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP*, disajikan pada Seminar “Relevansi KUHP Dalam Upaya Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia”; di FH UNUD, 30 April 2005, hal 10

upaya pencegahan (prevensi) atau peringatan bagi masyarakat, bahwa perbuatan penghinaan terhadap agama dan kehidupan beragama di Indonesia dilarang karena merupakan tindak pidana (*criminal act*).

**Ketiga,** berdasarkan kajian komparatif sebagaimana diuraikan sebelumnya, terlepas dari perbedaan penempatan delik-delik agama di berbagai negara, satu hal penting yang patut dipahami adalah bahwa di berbagai negara, agama dan segenap aspeknya merupakan kepentingan sakral dan suci yang patut dilindungi. Oleh karena itu objek-objek dan bentuk-bentuk delik agama “terhadap agama” dan yang “berhubungan dengan agama” di berbagai negara adalah, menghina Tuhan, menghina agama/ keyakinan, melukai perasaan keagamaan, menyalahgunakan kebebasan agama, menyesatkan orang lain, menghina benda-benda untuk tempat upacara keagamaan, objek yang dipandang sakral dan lain sebagainya

Jadi, di berbagai negara, delik “terhadap agama” dan delik yang “berhubungan dengan agama” juga diatur dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya. Bahkan ada yang menempatkannya secara eksplisit yang mengatur delik agama berupa penyalahgunaan dan penyimpangan/ sesat seperti di Polandia dan lain sebagainya.

Ruang lingkup objek yang dilindungi dalam delik agama di berbagai negara mencakup; agama (keyakinan/kepercayaan), perasaan keagamaan, kebebasan agama, praktek dan upacara keagamaan, objek-objek agama yang bersifat sakral, penyalahgunaan kebebasan agama, dan lain sebagainya.

Menarik apa yang dinyatakan **Barda Nawawi Arief**;

“tidak banyaknya orang dituntut atau dikenakan delik-delik agama di berbagai negara, bukan merupakan indikator adanya gerakan atau keinginan untuk melakukan de-kriminalisasi, tetapi sekedar indikator adanya “kematian dari UU Blasphemy” (delik-delik agama, pen).<sup>346</sup>

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas, adalah wajar jika delik-delik agama sebagaimana diformulasikan dalam RUU KUHP dipertahankan sebagai suatu upaya antisipasi yuridis untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang berdimensi keagamaan, khususnya aliran sesat di masa yang akan datang. Dengan kata lain, negara-negara lain saja yang tidak mendasarkan dirinya kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengatur delik-delik agama dalam KUHP mereka, apalagi Indonesia yang mendeklarasikan sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, secara umum rumusan formulasi delik-delik agama yang terdapat dalam RUU KUHP, pada prinsipnya merupakan upaya antisipatif dalam menanggulangi aliran sesat untuk masa yang akan datang, dengan alasan, bahwa di samping substansi ajaran aliran sesat bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama yang berakibat menciderai kesucian, kesakralan agama<sup>347</sup>, dan keberadaan maupun kegiatannya dapat mengganggu kehidupan beragama.<sup>348</sup>

---

<sup>346</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, op.cit

<sup>347</sup> Kesimpulan dan rekomendasi simposium “ Pengaruh Kebudayaan dan Agama Terhadap Hukum Pidana” di Bali pada tahun 1975 antara lain menyatakan, bahwa delik agama diberikan prioritas kepada dasar “perlindungan agama”, dimana agama dilihat sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Lihat, Barda Nawawi Arief, 2007. op.cit. hal 10

<sup>348</sup> Menurut **Muladi**; pengaturan Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam bab tersendiri (Bab VII) guna menunjukkan bahwa Indonesia memang bukan negara yang berdasarkan atas agama, tetapi juga bukan negara sekuler, melainkan negara yang berkeTuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini yang dilindungi adalah perasaan hidup keagamaan, ketentraman hidup beragama dan agama yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sendiri sebagai kepentingan hukum yang besar. Lihat Muladi. *Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas dalam RUU KUHP*. Makalah. Dalam



Satu hal penting yang patut di catat, bahwa diformulasikannya delik-delik agama dalam Konsep KUHP harus diartikan sebagai keseriusan/kesungguhan bangsa ini untuk berupaya memperbaiki dan melakukan pembaharuan terhadap hukum sekaligus sebagai wujud kebijakan antisipasi yuridis terhadap aliran sesat untuk masa yang akan datang.

Namun tanpa menafikan upaya yang telah digagas oleh para penyusun Konsep KUHP, upaya pengkajian terhadap delik-delik agama (diantaranya mengenai aliran sesat sebagai cakupan delik-delik agama) harus tetap dilakukan. Bertolak dari hal tersebut, terdapat hal-hal menarik sebagai berikut;

1. Konsep KUHPidana terakhir, delik agama dikategorisasi dan disistematisasi kembali dari KUHP yang sekarang berlaku sehingga disusun ke dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab VII (yang berisi 8 pasal -- Pasal 341 sampai 348). Bab ini terdiri atas dua bagian, “Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dan sarana ibadah”.

Melihat kontruksi Bab VII Konsep KUHP, terkesan kuat bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah “agama”, “kehidupan beragama” dan “sarana ibadah”,<sup>349</sup> namun demikian, dari sekian Pasal

---

Beberapa tulisan Terkait kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP. Bahan Bacaan untuk *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (*Democratic Reform Support Program*) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: “Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”. Hotel Ibis Tamrin, Jakarta 28 September 2006, hal 24

<sup>349</sup> Melihat konstruksi demikian, maka pembentukan delik agama terkait erat dengan teori yang disampaikan oleh Oemar Senoadji, yaitu;

1. **Religionsschutz Theorie** (teori perlindungan “agama”), yaitu teori yang memandang “agama” itu ansich sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/ diamankan oleh negara
2. **Gefühlsschutz Theorie** (teori perlindungan “perasaan keagamaan), yaitu teori yang memandang rasa (perasaan, pen) keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi
3. **Friedensschutz Theorie** (teori perlindungan “perdamaian/ ketentraman umat beragama), yaitu yang memandang kedamaian/ ketentraman beragama interkonfessional (di antara

yang ada dalam Bab VII Konsep KUHP masih belum ada rumusan yang jelas/ konkret mengenai “agama”, padahal Bab VII Konsep KUHP berisi tentang delik-delik agama.

Patut dicatat, karena yang hendak dilindungi dalam delik-delik agama ini diantaranya adalah agama, maka untuk menghindari kontroversi filosofis dan ideologis serta polemik yang terjadi selama ini, maka dipandang perlu untuk menentukan satu definisi dalam rumusan legal,<sup>350</sup> bukan definisi seperti yang ada dalam undang-undang selama ini, misalnya yang dimaksud adalah agama, adalah “agama yang utama di Indonesia”, yaitu mengacu pada penjelasan Pasal dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut, yaitu enam agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu).

2. Menurut Freddy Haris, produk hukum harus mampu mengangkat peristiwa-peristiwa (gejala hukum) dalam masyarakat ke dalam hukum sebagai sarana pengatur masyarakat.<sup>351</sup> Bertolak dari hal tersebut, maka aliran sesat merupakan peristiwa-peristiwa (gejala hukum) dalam

---

pemeluk agama/ kepercayaan). Jadi lebih tertuju pada ketertiban/ ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi  
Selengkapnya, lihat, Oemar Senoadji, 1976 loc.cit hal 75. Lihat juga, Barda awawi Arief, , 2007, op.cit hal 2

<sup>350</sup> Misalnya, menurut **Koentjaraningrat**, Agama mencakup emosi keagamaan, sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan, sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib, umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan sebagaimana diuraikan, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara Koentjaraningrat, 1985, op.cit hal 144-145

<sup>351</sup> Sarwirini, *Tinjauan Yuridis-Kriminologis Terhadap KUHP:”Kriminalisasi” Atas Penghinaan Agama Dan Kehidupan Beragama*, Makalah disampaikan pada seminar , *Kriminalisasi” Atas Penghinaan Agama Dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP*, yang diadakan oleh Komnas HAM, ELSAM, PAHAM UNPAD, KAHAM UNDIP, PUSHAM Univ. Surabaya pada tanggal 13 Desember 2005, hal 4

masyarakat, oleh karena itu sepatutnya diangkat dalam produk hukum sebagai sarana pengatur masyarakat.<sup>352</sup>

Patut dicatat, sampai saat ini aliran sesat merupakan istilah umum bukan istilah yuridis,<sup>353</sup> bahkan peristilahan aliran sesat menjadi perdebatan dan keberadaannya menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, sementara Konsep KUHP sebagai upaya antisipatif juga tidak merumuskannya. Sebagai antisipasi yuridis di masa yang akan datang, maka dirasakan sangat perlu untuk merumuskan istilah aliran sesat dalam RUU KUHP. Bahkan sebagai bahan perbandingan, Pasal 195 KUHP Polandia merumuskan “.....*menyesatkan* orang lain atau menyebabkan gangguan ketertiban umum....”. Oleh karena itu adalah wajar jika istilah aliran sesat dipertegas dalam Konsep KUHP.

3. Pengaturan sanksi delik-delik agama dalam Konsep KUHP sepatutnya mengandung arti bahwa sanksi berupa pidana merupakan “obat terakhir” bukan sebagai sanksi utama. Sanksi pidana diberikan, manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak mampu lagi mengatasi masalah yang ada
- Untuk delik-delik agama dalam Konsep KUHP sebaiknya mengadopsi ancaman pidana yang terdapat dalam UU No 1 Pnps 1965 yang lebih dahulu memberikan peringatan sebelum menerapkan sanksi pidana

---

<sup>352</sup> Makna penting pengaturan aliran sesat dalam produk hukum, merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat. Selain itu merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”. Lihat Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif perbandingan*, Citra Aditya Bakti Bandung 2005, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2005, hal 3

<sup>353</sup> Dalam UU No 1 Pnps 1965 hanya dinyatakan sebagai “aliran terlarang”

penjara. Bahkan sejak ditangani polisi, untuk delik agama yang tidak/ kurang serius, polisi seharusnya menerapkan diversi. Jika dimungkinkan juga diterapkan dulu sanksi peringatan keras dan kewajiban melapor dalam jangka waktu tertentu.

Hal-hal tersebut di atas sangat sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana terdapat dalam Konsep KUHP, yaitu; mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; membebaskan rasa bersalah pada terpidana; Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

4. Penyiaran/ penyebaran agama hakikatnya merupakan tugas utama (ulama/ pendeta, pen) setiap manusia dengan tujuan menunjukkan dan membawa umat dari kegelapan kesesatan kepada cahaya hidayah versi masing-masing. Tugas penyiaran/ penyebaran agama (tidak terkecuali aliran sesat) ini melekat pada setiap manusia untuk menyampaikan risalah kepada orang yang belum tahu dan mengungkapkan ajakan kepada kebenaran dan petunjuk versi masing-masing. Namun demikian, penyiaran agama merupakan masalah yang cukup rawan dalam hubungannya dengan masalah kerukunan hidup beragama, terutama masalah penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama.

Perumusan secara eksplisit mengenai hal ini (penyiaran/penyebaran agama ) tidak dijumpai di dalam Konsep. Di dalam Konsep hanya ada Pasal mengenai “penghasutan untuk meniadakan kepercayaan/keyakinan terhadap agama”. Di dalam Pasal ini ditegaskan, bahwa yang dilarang adalah “menghasut dalam bentuk apapun”, sehingga dapat dipermasalahkan apakah penyiaran agama kepada orang lain yang sudah beragama dapat dimasukkan disini. Patut dicatat, bahwa pengaturan mengenai hal ini tampaknya dibangun atas norma yang terdapat pada pasal 156a KUHP, sedangkan di KUHP asing dapat dilihat pada Pasal 195 KUHP Polandia dengan dalam *mengambil keuntungan*<sup>354</sup> dari keyakinan agama seseorang, *menyesatkan* orang lain atau menyebabkan gangguan ketertiban umum

Istilah “menghasut dalam bentuk apapun” sebenarnya cukup luas, sehingga apabila penyiaran itu memang dimaksudkan agar orang lain itu tidak lagi menyakini/ mempercayai (“mengimani”) agama apapun juga, maka hal yang demikian sebenarnya dapat masuk dalam Pasal 345, karena hakikatnya pasal ini di bangun atas dasar perlindungan terhadap landasan idiil bangsa Indonesia, yaitu Sila pertama Pancasila; Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk masa yang akan datang adalah sebagai berikut;

---

<sup>354</sup> Pasal ini mirip dengan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965

Kebijakan hukum pidana ((khususnya substansi hukum pidana mengenai delik-delik agama) sebagai bagian dari kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, di samping secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Praktek selama ini yang terjadi, delik-delik agama terutama pasal 156 KUHP dan UU No 1 Pnps 1965 hampir selalu diterapkan (dijadikan sebagai upaya rasional) menanggulangi aliran sesat. Kebijakan demikian (pendekatan penal) banyak menimbulkan kontroversi, diversi opini di kalangan masyarakat luas terhadap langkah yang di tempuh dalam menghadapi masalah ini.

Bertolak dari hal tersebut di atas, antisipasi dan penanggulangan aliran sesat di Indonesia tampaknya perlu ditempuh strategi total dan menyeluruh. Antisipasi terhadap kejahatan aliran sesat dimasa yang akan datang minimal dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu upaya-upaya mencegah dampak negatif dan meluasnya aliran sesat terhadap masyarakat, dengan mempersiapkan berbagai produk legislatif yang bisa menjadi katup pengaman masyarakat dari masalah aliran sesat.

Kondisi demikian dan perkembangan di Indonesia, memunculkan gagasan untuk melakukan upaya “pemikiran kembali” yang berarti “re-evaluasi, review, reorientasi, reformasi atau reformulasi” dan “penggalian hukum” dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah dengan melakukan pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach , baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan.

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka antisipasi yuridis terhadap aliran sesat pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*social policy*”. Oleh karena itu, maka antisipasi yuridis terhadap aliran sesat dapat dilakukan dengan cara menyiapkan produk perundang-undangan (melakukan pembaharuan hukum), tentunya dengan memelihara/ mengambil manfaat dari sesuatu yang lama dan mengambil manfaat pula dari sesuatu yang datang kemudian.

Oleh karena itu, maka antisipasi yuridis terhadap aliran sesat untuk masa yang akan datang harus berorientasi pada pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (“*policy oriented approach*”) pendekatan yang berorientasi pada nilai (“*value oriented approach*”)

Bertolak dari hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, delik-delik agama yang ada saat ini (baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, khususnya UU No 1 Pnps 1965) pada hakikatnya dibangun atas dasar nilai-nilai dasar dan moral bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila pada hakikatnya

mengandung nilai-nilai Ketuhanan, jadi mengandung nilai-nilai religius. Sebagai dasar pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas negara, tetapi juga memastikan bahwa pengakuan sila pertama Pancasila adalah salah satu tiang pokok dari perikehidupan manusia sekaligus sendi kehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha pembangunan nasional

Sila pertama Pancasila ( Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak bisa dipisahkan dengan agama, dan merupakan landasan moral, salah satu tiang pokok dari perikehidupan manusia sekaligus sendi kehidupan negara. Oleh karena itu secara umum adalah wajar dan bahkan sepatutnya jika nilai dan norma yang baik dalam delik-delik agama (baik yang ada dalam KUHP maupun UU No 1 Pnps 1965) tetap dipertahankan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang berdimensi keagamaan, khususnya aliran sesat.

Dirumuskannya delik-delik agama dalam KUHP maupun Konsep KUHP, sesuai dengan tujuan asas legalitas, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan (prevensi) atau peringatan bagi masyarakat, bahwa perbuatan penghinaan terhadap agama dan kehidupan beragama di Indonesia dilarang karena merupakan tindak pidana (*criminal act*). Dengan kata lain, agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum kita merupakan faktor fundamental, dapatlah dimengerti apabila faktor tersebut digunakan sebagai landasan yang kuat dan kokoh dihidupkannya delik-delik agama.



Oleh karena itu, maka Konsep KUHP bukan semata-mata memangkas dan memberangus kebebasan beragama masyarakat, tetapi justru ditujukan untuk melindungi kebebasan umat beragama dalam menjalankan agama dan kepercayaan, serta melindungi agama Tuhan dan simbol-simbolnya dari kelompok-kelompok yang bermaksud menodai dan menistakannya.

Diformulasikannya delik-delik agama dalam Konsep KUHP harus diartikan sebagai keseriusan/ kesungguhan bangsa ini untuk berupaya memperbaiki dan melakukan pembaharuan terhadap hukum sekaligus sebagai wujud kebijakan antisipasi yuridis terhadap aliran sesat untuk masa yang akan datang. Pada posisi inilah diharapkan munculnya kesadaran bersama untuk saling menghormati, menghargai agama dan kehidupan beragama yang rukun, damai dan tentran di masa yang akan datang.

## **B. KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN ALIRAN SESAT.**

### **B.1. Penelusuran Historis Kebijakan *Non penal***

Penelusuran secara historis pemikiran orang-orang tentang agama, jika diapresiasi dengan baik niscaya akan sampai pada kesimpulan sederhana bahwa gagasan tentang agama telah ada sejak manusia ada. Hal ini berawal ketika manusia dalam menjalani hidupnya pasti menemukan sesuatu yang ia sendiri tidak bisa menyelesaikan dan memahaminya.

Agama mengajarkan manusia tentang makna dan tujuan hidup, agama merupakan tempat dimana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan harapan yang kukuh dalam kesungguhan memperjuangkan dan melakukan tahap-tahap kegiatan dalam rangka mencapai tujuan hidup abadi.<sup>355</sup>

Agama sebagai sumber kedamaian, membawa pesan kepada seluruh umat manusia tentang kasih sayang, keadilan, dan saling memahami. Sebagai berkah bagi semua makhluk, agama merupakan pengingat abadi bagi seluruh umat manusia tentang adanya percikan Ilahiyah pada setiap orang.<sup>356</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara substansial manusia sudah sejak awalnya mengakui dan meyakini adanya agama, meyakini adanya satu kekuatan (Tuhan) yang mampu mengatasi segala permasalahan yang diyakininya telah menciptakan dan menguasai kehidupan alam raya ini. Ini artinya, pengetahuan tentang adanya Tuhan telah secara sadar dimiliki oleh setiap manusia. Inilah yang kemudian yang menjadikan manusia disebut sebagai Homo Religious.

---

<sup>355</sup> Muhammad Wahyuni Nafis, *Passing Over melintasi batas agama*, Gramedia Pustaka Agama, Jakarta 1999 hal 78

<sup>356</sup> Kompas, 18 Juni 2007.op.cit. hal 39

Banyak peristiwa luar biasa yang datang dari kekuatan alam, yang manusia sama sekali tidak bisa mengatasinya. Dari pengalaman semacam itulah kemudian manusia kemudian mengakui akan kelemahan dirinya yang melahirkan pengakuan akan kebesaran dan kemahakuasaan yang selain dirinya. Dari kondisi semacam inilah kemudian lahir konsep Tuhan dan agama.<sup>357</sup>

Namun demikian, mengingat agama dan sifat Tuhan bersifat abstrak yang tidak dapat ditangkap oleh kemampuan nalar manusia, kemudian begitu sulit dipahami kehadiran-Nya oleh manusia. Sehingga Tuhan yang diyakini sebagai serba Mahakuasa itu tidak dapat diterima secara tunggal, yang akhirnya dari ketidakmampuan cara berpikir manusia semacam itu melahirkan cara beragama dan berkeyakinan yang berbeda.

Sepanjang perjalanan sejarah pemikiran manusia, Tuhan dan agama ditemukan oleh manusia dengan berbagai nama dan istilah. Artinya, jalan untuk menemukan Tuhan dan agama itu tidak selalu mulus dan sampai pada sasaran yang dituju. Dalam sejarah pemikiran filsafat pernah muncul sekian banyak pemikir, teolog, pendeta, pastur, mubaligh yang berusaha meyakinkan orang dan menjajakan teorinya bahwa satu-satunya agama yang benar, yang menjamin keselamatan hanyalah agama yang ia anut, sementara agama yang lain membawa kesesatan<sup>358</sup>

Ini berarti bahwa sejak dahulu, agama selalu menampilkan diri sebagai sebuah cermin retak. Secara internal, keretakan terjadi karena perbedaan cara pemaknaan dan penafsiran atas simbol-simbol dan ajaran agama. Cara pandang

---

<sup>357</sup> Muhammad Wahyuni Nafis, 1999, op.cit hal 84

<sup>358</sup> Komarudin Hidayat, *Agama-agama Besar Dunia; Masalah Perkembangan dan Interelasi*, Makalah disampaikan pada Kajian Agama, Paramadina, 23 Januari 1992

yang berbeda dari para tokoh yang berbeda menimbulkan ketegangan-ketegangan, dan bahwa akibatnya selalu ada pihak yang dinyatakan salah, sesat menyimpang dan keluar dari rel keagamaan umum.

Memperhatikan masa lampau dan menggunakan metode pendekatan sejarah akan diperoleh keterangan yang sangat berarti bahwa dalam sejarah perkembangan agama-agama di dunia, hampir bisa dipastikan terdapat sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual-ritual menyimpang atau nyeleneh dari agama yang dianutnya. Dengan cara ini pula akan terlihat bahwa akar sejarah munculnya aliran sesat, fenomena pengkafiran terhadap kelompok lain, dan kekerasan dalam kehidupan beragama, sesungguhnya telah lama ada dan muncul jauh sejak munculnya agama itu sendiri.

Berikut contoh-contoh masalah perbedaan pemahaman agama/ aliran sesat dalam lintasan sejarah;

- sejarah perkembangan agama Islam pernah pecah perang Jamal atau perang ontar pada tahun 658 M yang melibatkan Siti Aisyah, isteri Nabi, melawan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Sejak itu lahir perbedaan pandangan dan pemikiran mengenai hubungan ketaatan pada pemimpin, dosa besar dan iman yang antara lain berkaitan dengan perebutan kekuasaan khalifah. Pembelaan setiap pihak dengan menggunakan wahyu dan sunnah, melahirkan madzhab-madzhab ketuhanan (akidah) atau tauhid dan syari'ah (fikih) serta sufisme.<sup>359</sup>
- Konflik akibat perbedaan pandangan dan pemikiran seperti di atas juga muncul akibat perpecahan politik antara Syi'ah, pendukung fanatik Ali bin Abi Tholib dengan pendukung Mu'awiyah dan Khawarij yang menolak tunduk kepada kedua elite politik yang sedang konflik tersebut. Sesudah itu muncul aliran ketuhanan yang populer di antaranya; Murji'ah, Mu'tazilah, Qodariyah, Asy'ariyah, sunni, Maturidiyah dan Jabariyah.<sup>360</sup>

---

<sup>359</sup> Abdul Munir Mulkhan, 2002.op.cit. hal 21

<sup>360</sup> Ibid

- Imam Ahmad Bin Hambal mendapat tekanan hingga siksaan dalam kasus perbedaan pendapat; terpaksa meringkuk dalam tahanan selama lima belas tahun karena mempertahankan pandangannya terhadap Al-Qur'an. Sementara itu Ahmad Al-Khaza'i beserta pengikutnya mengalami penyiksaan, penangkapan dan pengrusakan, bahkan kepala Ahmad Al-Khaza'i dipajang di atas tiang selama 6 tahun. Baru kepala Ahmad Al-Khaza'i diturunkan sebagai sarana untuk mencegah timbulnya pemberontakan.<sup>361</sup>
- Ibn Rusyd mendapat vonis diasingkan ke Lucienne setelah karya-karyanya tentang filsafat diharamkan dan dianggap sesat. Karya-karya monumentalnya di bidang filsafat dihancurkan, murid-muridnya ditangkap dan diperlakukan dengan sangat kasar.<sup>362</sup>
- Al-Husayn ibn Manshur Al-Hallaj yang terkenal dengan paham *wihdatul wujud (kesatuan wujud)*, harus dieksekusi mati atas dirinya dengan tuduhan kafir. Dengan alasan ingin menghentikan efek doktrin wahdatul wujud, Al-Hallaj diadili dan dihukum mati. Yang sangat menyedihkan, Setelah mati mengenaskan, tangan, kaki dan kepalanya dipotong. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa vonis mati terhadap dirinya memiliki target politis yang dibungkus dengan bingkai keagamaan.<sup>363</sup>
- Pada abad pertengahan, perbedaan antara kalangan gereja dan ilmuwan seringkali menimbulkan pertentangan yang tidak terselesaikan. Nicholas Copernicus (1473-1543) seorang astronom Polandia melalui observasi empirik dan perhitungan matematik yang cermat sampai pada sebuah kesimpulan bahwa matahari merupakan pusat yang dikitari oleh benda benda angkasa lainnya (*heliocentrism*). Karena gereja berpegang pada geosentrism sebagai ajaran resmi, maka heliocentrisme dianggap sebagai penyimpangan dan penganutnya bisa dikenai hukuman ekskomunikasi.<sup>364</sup>

Meluasnya ajaran Copernicus dianggap dapat menggoyahkan para penganut geosentrism sebagai ajaran resmi, sehingga dianggap perlu untuk menindak tegas para penganut Copernicus. Akibatnya, seorang pendeta bernama Giordano Bruno (1548-1600) yang menganut pandangan Copernicus dijatuhi hukuman bakar pada tiang pancang, nasib yang sama dialami oleh filsuf Italia, Lucilio Vanini (1585-1619).<sup>365</sup>

---

<sup>361</sup> Mohammed Yunis, **Politik pengkafiran & Petaka Kaum Beriman**. sejarah-politik-HAM. Pilar Media, Yogyakarta 2006 hal 43

<sup>362</sup> Ibid. hal 150

<sup>363</sup> Labib MZ dan Moh. Al'Asiz, **Tashawwuf dan Jalan Hidup para Wali**, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000 69-74.

<sup>364</sup> Deni SB Yuherawan, **Kebebasan Akademik**. Makalah Seminar Demokrasi dan Kekerasan, Unijoyo 5 September 2003

<sup>365</sup> Ibid

Ilmuan tenar lainnya bernama Galileo Galilei (1564-1642) mengalami nasib yang lebih buruk. Ia berhasil membuat teleskop yang efektif untuk melakukan pengamatan terhadap sistem galaksi. Berdasarkan pengamatannya sampailah ia pada titik kesimpulan yang menegaskan dukungannya terhadap heliosentrisme; karena kegigihannya mendukung pendapat yang digagas Copernicus ini maka ia dan segala karyanya dinyatakan terkutuk, dan kepadanya dijatuhkan penjara seumur hidup<sup>366</sup>

- dalam sejarah mutakhir (kontemporer) kehidupan beragama di Indonesia, khususnya di pulau Jawa pasti mengenal sosok Syekh Siti Jenar yang terkenal dengan ajarannya *Manunggaling Kawula Gusti*, suatu ajaran yang hampir sama dengan ajaran seorang sufi Al-Husayn ibn Manshur Al-Hallaj yang terkenal dengan paham *wihdatul wujud (kesatuan wujud)*.

Doktrin Jenar dan Al-Hallaj tidak saja dipandang asing, tapi malah dinilai merongrong ortodoksi Islam. Tentu saja paham yang demikian mendapat tentangan yang hebat dari *Dewan Wali Songo*. Kedua kekuatan ini masing-masing bersikukuh bahwa pihaknyalah yang paling benar, tentu saja, pihak lain sesat dan berbahaya bagi banyak pihak. Syekh Siti Jenar harus mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh Al-Hallaj, yakni hukuman mati.<sup>367</sup>

- kasus-kasus terkini misalnya; Data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 mengungkapkan, dari 245 aliran kepercayaan yang terdaftar, jumlah total penghayat mencapai 400 ribu jiwa lebih.<sup>368</sup>
- laporan Gatra, Edisi VI 13 Maret 2006 perilaku menyimpang (Aliran sesat) dalam kehidupan beragama, sepanjang tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Tahun 2004;

- 21 Pebruari 2004 , Bandung, Gereja Gerakan Pantekosta ditutup Muspika.
- 22 Maret 2004, Bandung, GPINI Sidang Penuaian ditutup MUI berdasarkan Surat No. 01/MUI-DS/2004.

<sup>366</sup> disarikan dari berbagai sumber, lihat; Deni SB Yuherawan, Makalah 2003, lihat juga "[http://id.wikipedia.org/wiki/Galileo\\_Galilei](http://id.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei)", lihat juga "[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_gereja](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_gereja)" diakses pada tanggal 18 Januari 2008

<sup>367</sup> Sudirman Tebba, Syaikh Siti Jenar; **Pengaruh Tasawwuf Al- Hallaj Di Jawa**. Pustaka Hidayah, Bandung 2003, hal 18, lihat juga Mohammad Sobary dalam Abdul Munir Mulkhan, 2002.op.cit. hal IX. Dalam perspektif Mohammad Sobary, kasus Syekh Siti Jenar tidak lebih merupakan kecemburuan profesional dan pertarungan memperebutkan hegemoni antara "Dewan Wali". Ini berarti tragedi Syekh Siti Jenar berdimensi politis, di sini tampaknya kepentingan-kepentingan politik dan agama campur aduk menjadi satu dan sukar dipilih secara jelas

<sup>368</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Agama\\_Asli\\_Nusantara](http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Asli_Nusantara), Ibid

- 3 Oktober 2004, Ciledug, Bangunan sekolah Sang Timur yang digunakan sebagai tempat ibadah umat Katolik Santa Bernadette ditutup FPI Karang Tengah.

Tahun 2005;

- 23 Pebruari 2005, Banggai Kepulauan, Polisi menangkap Zikrullah bin Ali Taetang dengan tuduhan menyebarkan Islam aliran sesat kepada masyarakat animisme.
- 7 Mei 2005, Malang, Pencetus shalat dua bahasa M. Yusman Roy difatwa sesat oleh MUI Malang dan MUI Jawa Timur. Roy divonis 2 tahun penjara.
- 14 Mei 2005, Indramayu, Gereja Kristen Kemah Daud ditutup dan tiga pembina Minggu Ceria ditangkap dengan tuduhan pemurtadan dan Kristenisasi
- 16 Mei 2005, Probolinggo, MUI Probolinggo memfatwa sesat M. Ardi Husen, Pimpinan Yayasan Kanker dan Narkoba. Cahaya Alam.
- 31 Mei 2005, Surabaya, Polisi menghentikan ritual di Ponpes Al Mardhyah karena tidak memiliki ijin, setelah dinilai sesat oleh warga.
- 15 Juli 2005, Parung, Ratusan massa Gerakan Umat Islam dipimpin Habib Abdurrahman Assegaf merusak Kampus al-Mubarak milik Jemaat Ahmadiyah.
- 16 Juli 2005, Bandung, Gereja Sidang Jemaat Allah dan Huria Kristen Batak Protestan ditutup Muspika.
- 27 Juli 2005, Bandung, Gereja Kristen Pasundan ditutup massa.
- 29 Juli 2005, Brebes, Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Brebes membubarkan ajaran Kanjeng Patih Kala Janggal pimpinan Kasnawi setelah difatwa sesat MUI.
- 31 Juli 2005, Semarang, Tempat Pembinaan Iman Gereja Isa Almasih dibongkar Camat.
- 7 Agustus 2005, Purwakarta, Gereja Kristen Kemah Daud ditutup FPI.
- 14 Agustus 2005, Bandung, Gereja Anglikan, Gereja Sidang Pantekosta, Gereja Pantekosta di Indonesia, GSPDI, GKI Anugrah, dan Gereja Bethel Injil Sepenuh diserang massa dan ditutup.
- 22 Agustus 2005, Padang, Forum Tokoh Peduli Syariah Sumatera Barat mengultimatum LSM PUSAKA, untuk menghentikan aktivitas memperjuangkan pluralisme.
- 22 Agustus 2005, Bandung, Gereja Kristen Pasundan Dayeuhkolo ditutup massa.

- 4 September 2005, Jakarta Timur, Sekelompok orang mendatangi Komunitas Utan Kayu menuntut pembubaran Jaringan Islalm Liberal
- 14 Nopember 2005, Sumedang, MUI Kec Paseh menyesatkan ajaran Husnul Huluq. Massa membakar rumah pengikut ajaran itu.
- 29 Desember 2005, Jakarta, Lia Eden ditahan Polda Metro Jaya atas sangkaan penodaan agama. Ia dijerat Pasal 156 a, 157,335, dan 336 KUHP.

### **Tahun 2006**

- 17 Januari 2006, Polmas, Ajarkan shalat bersiul, Sumardi ditahan dengan tuduhan sesat.
- 4 Pebruari 2006, Lom Bar, Jemaat Ahmadiyah di BTN Bumiasri diserbu massa.
- 17 Pebruari 2006, Bulukumba, Penyegehan tempat ibadat oleh Bupati atas desakan massa Laskar Jundullah dan Ormas Islam yang tergabung dalam Ikatan Aliansi Gerakan Muslim Bulukumba.
- 22 Pebruari 2006, Bulukumba, Ketua Komite Penegakan Syariat Islam Bulukumba, Zainal Abidin dan puluhan masa mendatangi kantor LSM LAPAR di Bulukumba. Mereka mengintimidasi agar LSM itu menghentikan aktivitasnya karena dinilai tidak memperjuangkan syariat Islam.
- Dalam laporan PGI dan KWI ke Komnas HAM baru-baru ini, tercatat 108 kasus penutupan, penyerangan dan pengrusakan gereja yang terjadi pada tahun 2004-2007. rinciannya, pada tahun 2004 terdapat 30 kasus, tahun 2005 ada 39 kasus, tahun 2006 ada 17 kasus, dan tahun 2007 ada 22 kasus. Provinsi yang terbanyak terjadi kasus-kasus tersebut adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Poso dan Bengkulu.<sup>369</sup>

Bertitik tolak dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akar sejarah munculnya aliran sesat, fenomena pengkafiran terhadap kelompok lain, dan kekerasan dalam kehidupan beragama, sesungguhnya telah lama ada dan muncul jauh sejak munculnya agama itu sendiri.

Aliran sesat merupakan sesuatu yang dibenci oleh kelompok dominan. Sikap seperti itu bukan diambil bukan karena alasan teologis semata, tetapi juga karena

---

<sup>369</sup> Tommy Su, **Kebebasan beragama terusik kekerasan**, Jawa Pos, 21 Desember 2007 hal 4



alasan sosiologis. Sesat dipandang dapat membuat seseorang mengalami *kelimbungan* psikologis, karena ia harus “menjungkirbalikkan” kebiasaan yang dibentuk dalam *setting* nilai agama tertentu, dan kemudian harus berubah mengikuti *setting* nilai agama lain.<sup>370</sup>

Pihak yang mapan, baik dari elite agama maupun dari kalangan yang berkuasa, acapkali tidak melihatnya sebagai dinamika yang konstruktif melainkan sebagai bahaya yang memecah persatuan dan menimbulkan kegelisahan sosial. Oleh karena itu, kehadiran sebuah aliran baru (baca: aliran sesat) seringkali mengalami penolakan yang keras dari kalangan yang mapan, bisa secara halus tapi bukan mustahil secara licik dan kasar. Cara-cara penyikapan/ respon/ penyelesaian/ penanggulangan terhadap aliran sesat banyak yang dilakukan dengan kekerasan, bahkan tidak jarang memicu aksi anarkis.

Sampai saat ini keberadaan aliran sesat merupakan fakta yang tidak terelakkan, dan kekerasan demi kekerasan masih terus terjadi. Artinya, fenomena seperti ini seolah-olah sudah lazim dalam sejarah gerakan-gerakan keagamaan; dapat berlaku di lingkungan kultur keagamaan mana pun dan di mana pun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ada satu hal yang patut dicatat; bahwa respon/ penyikapan/ penanggulangan terhadap aliran sesat dan kekerasan antar pemeluk agama/ kepercayaan yang dilakukan dengan kekerasan tidak selamanya menyelesaikan masalah. Bahkan penyelesaian demikian (kekerasan) seringkali memicu kekerasan baru sebagai aksi balasan.

---

<sup>370</sup> Thoha Hamim, et al, 2007.op.cit hal 16

Pemeluk agama apapun menginginkan kedamaian, bukan konflik. Kedamaian adalah inti agama. Karena itu, ketika seseorang beragama tapi dalam hatinya terdapat kecenderungan untuk melakukan kekerasan, dia telah terjauhkan dari pesan agama untuk memakmurkan kemanusiaan.<sup>371</sup> Faktor dominan pemicu kekerasan dalam perbedaan pandangan agama/ kepercayaan di Indonesia hingga saat ini masih *debatable*.

Menurut **Kasman Singodimejo**, faktor pemicu munculnya aliran sesat disebabkan oleh dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama, fanatisme negatif, propaganda dan objek dakwah yang salah, subversiv sisa G 30 S/PKI, perlakuan tidak adil penguasa, dan *Religio-politik*.<sup>372</sup>

Bertolak dari kenyataan demikian, **Muladi** menyatakan, “bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan (baca: aliran sesat, pen) secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan (baca: aliran sesat, pen) itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan (aliran sesat) merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks”.<sup>373</sup>

Atas dasar pendapat Muladi di atas, berikut contoh-contoh metode alternatif pencegahan dan penanggulangan aliran sesat maupun penyikapan terhadap perbedaan pandangan/ faham keagamaan melalui upaya *non penal*;

---

<sup>371</sup> Nur Syam, *Agama Dalam Spiral Kekuasaan*, Jawa Pos, 5 Januari 2008 hal 4

<sup>372</sup> Thoha Hamim, et al, 2007.op.cit: hal 54

<sup>373</sup> Muladi, 1995. op.cit. hal. 7

- Dalam sejarah perkembangan Islam Menurut **Munawir Sjadzali**, perjanjian yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah meletakkan dasar-dasar bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk yang berisi:<sup>374</sup>
  1. semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetap merupakan satu komitmen.
  2. hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas-komunitas lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip:
    - a. Bertetangga baik.
    - b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
    - c. Membela yang mereka teraniaya
    - d. Saling menasehati
    - e. Menghormati kebebasan beragama

Dari piagam tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu materi yang cukup penting dan relevan dengan uraian ini adalah ***adanya toleransi/ jaminan kebebasan beragama***. Artinya, masing-masing komunitas yang mempunyai sistem kepercayaan dan agama masing-masing bebas untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntunan agamanya atau kepercayaannya.

Patut dicatat, bahwa dipergunakannya istilah kepercayaan mengingat suku-suku Arab non muslim masih banyak yang mempunyai keyakinan sebagai penyembah berhala dan dengan demikian keyakinan mereka tersebut tidak dapat disetarakan dengan agama samawi (wahyu). Namun ada yang mengatakan sistem kepercayaan itu sebagai agama.<sup>375</sup>

Selain Piagam Madinah, berikut contoh-contoh sikap maupun kebijakan masa lalu terhadap perbedaan pemahaman dan keagamaan:

- Ketika Umar bin Khattab memasuki kota Yerusalem. Ia menyatakan bahwa keamanan gereja-gereja berikut upacara keagamaan memperoleh perlindungan pihak pemerintah. “Inilah janji ***perlindungan keamanan***

<sup>374</sup> Munawir Sjadzali, 1990. op.cit. hal. 19.

<sup>375</sup> Harun Nasution, ***Falsafat agama***, Jakarta, Bulan Bintang 1973, hal. 41-47

yang diberikan oleh hamba Allah, Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Illiya yaitu keamanan bagi mereka, harta benda, gereja-gereja, salib-salib serta keperluan peribadatan mereka. Bangunan gereja mereka tidak diduduki, dirobuhkan ataupun apa saja dari harta benda mereka. Tidak pula mereka akan dipaksa meninggalkan agama mereka atau diganggu dengan suatu gangguan dan tidak diperbolehkan seseorang dari kaum Yahudi bertempat tinggal di Illiya bersama-sama".<sup>376</sup>

- Khalid bin Walid ketika memasuki/menaklukkan kota Damaskus (membebaskannya dari penjajahan Romawi). Dalam sebuah dokumen, Khalid bin Walid menuliskan janjinya menjamin keamanan atas diri mereka, harta benda dan tempat peribadatan mereka." 377
- Amru bin Ash ketika membebaskan Mesir, juga dari Bangsa Romawi, larangan menghancurkan tempat peribadatan bangsa Mesir kuno secara konsisten diterapkan, sekaligus mempersilahkan peradilan agama Mesir untuk mengadili perkara antara rakyat diteruskan. Bangsa Mesir diberikan *kebebasan untuk menetapkan dan memilih seorang Uskup Agung* seperti zaman dahulu. *Pendirian gereja baru dan kuil-kuil pun tetap dinijinkan* tanpa halangan suatu apa pun, karena hal itu memang dibutuhkan. Tentu saja semuanya itu tidak dengan tujuan demonstratif yang mengesankan suatu penantangan terhadap perasaan kaum muslimin.<sup>378</sup>
- Khusus mengenai kasus orang-orang yang murtad di jaman Nabi dan jaman Abu Bakar ternyata bukanlah disebabkan mereka murni meninggalkan agama Islam. Mereka itu diperangi karena memobilisir kekuatan untuk tindakan pembangkangan dan menentang pemerintahan serta menolak mengakui kedaulatan pemerintahan.<sup>379</sup>
- Operasi pembersihan terhadap kaum pembangkang dilakukan tidak hanya terhadap orang-orang yang murtad, tetapi juga mereka yang tidak bersedia menyerahkan kewajiban zakat. Dalam kasus ini Khalifah Abu Bakar menugasi Khalid bin Walid untuk memerangi Malik bin Nuwairah, seorang pejabat pengumpul zakat untuk wilayah kaumnya Bani Yarbu'. Malik dituduh membangkang pemerintah pusat dengan tindakannya tidak bersedia menyerahkan hasil pengumpulan zakatnya ke pemerintahan pusat.<sup>380</sup>

<sup>376</sup> Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*, Karisma, Bandung 1994, hal. 46

<sup>377</sup> Yusuf Ali Al mudhar, *Toleransi-toleransi Islam, Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Lawan-lawannya*, Iqra, Bandung. 1983, hal. 51

<sup>378</sup> Redaksi, *Toleransi-toleransi Islam, Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Lawan-lawannya*, Iqra, Bandung. 1983, hal. 57

<sup>379</sup> Subhi Mahsassani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern*, Tintamas dan Litera Antarnusa, 1993 hal 97

<sup>380</sup> Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad Sulit dilakukan, Tetapi Perlu*, dalam Jalaluddin Rahmat, Editor tamu, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Mizan, Bandung, 1988, hal 173, 174.

- Selama 500 tahun di bawah pemerintahan Islam, membuat Spanyol untuk tiga agama dan "satu tempat tidur": Islam, Kristen, dan Yahudi hidup rukun dan bersama-sama menyertai peradaban yang gemilang.<sup>381</sup>

Melihat fakta-fakta di atas, setidaknya terdapat nilai-nilai yang patut dijadikan contoh untuk menangani masalah aliran-aliran keagamaan sebagai berikut;

- dalam Piagam Madinah terdapat nilai-nilai penghargaan terhadap kebebasan agama. Artinya, *adanya toleransi/ jaminan kebebasan beragama*. Dampak psikologisnya adalah; bahwa seseorang akan merasa tentram dan damai dalam meyakini agamanya. Dengan demikian, seseorang merasa terpenuhi kebutuhan spiritualnya, dan mencegah untuk mencari alternatif ajaran lain (baca:sesat) yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya.
- dalam menghadapi masalah perbedaan agama, para pemimpin (sepatutnya setiap individu) *memiliki pemahaman dan penghayatan yang benar* akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agamanya
- kebijakan *non penal* yang dilakukan adalah dengan selalu menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia. Sehingga tercipta;<sup>382</sup>
  - landasan **budaya keagamaan** yang sudah berkembang dalam masyarakat yang positif;

---

<sup>381</sup> Muhammad Wahyuni Nafis, 1999. op.cit. hal 175

<sup>382</sup> Lihat, Rumusan Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VINII, angka INI sub B.7, termuat dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VINII, Buku 1, BPHN Depkeh dan HAM, 2003, hal 7.

- penghargaan **perkembangan keberagamaan** dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa;
- **mencegah konflik sosial** antar umat beragama dan meningkatkan ( “meningkatkan kerukunan” ) antar umat bangsa.

Selanjutnya, berikut contoh-contoh respon/ sikap dan metode alternatif pencegahan dan penanggulangan aliran sesat /perbedaan pandangan/ faham keagamaan melalui upaya *non penal* terkini;

- Tobatnya Ahmad Musaddeq, pimpinan Alqiyadah Al Islamiyah dari “kesesatannya” setelah **dilakukan dialog intensif** antara kalangan tokoh-tokoh agama dan Majelis Ulama Indonesia. Model pendekatan seperti ini menurut **Komaruddin Hidayat** dinamakan dialog *sinkretikal-resiprokal*, yaitu kedua belah pihak saling membuka diri dan berbagi pikiran, pengalaman dan perasaan yang pada urutannya keduanya secara sukarela saling menerima dan memberi perihal pengalaman masing-masing.<sup>383</sup>
- **KH. Abdurrahman Wahid** (Gus Dur) tampaknya mengadopsi **pendekatan kultural** para *muballigh* awal (wali) Islam. Seperti diketahui bahwa para muballigh tersebut menanggalkan perangkat simbol eksklusif Islam (Arab) dan menggantinya dengan perangkat simbol lokal, agar Islam dapat bersinergi dengan kultur Indonesia. Dengan akulturasi seperti itu, maka transformasi ajaran Islam ke alam pikiran masyarakat Indonesia bisa berjalan dengan efektif.<sup>384</sup>
- Kasus Aliran RKM Ali di Klampis Bangkalan Madura yang diduga sesat, pada awalnya hampir memicu aksi kekerasan, namun perkembangan berikutnya, masalah ini “sudah selesai” setelah dilakukan **dialog intensif** dengan berbagai tokoh ulama setempat. Masyarakat dapat kembali beraktifitas keagamaannya dengan damai dan tentram.<sup>385</sup>
- Masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) pernah dinyatakan sesat/ ahli *bid'ah* gara-gara menjalankan mauludan, tahlilan, ziarah kubur, *qunut* dan lain sebagainya<sup>386</sup>. Masalah ini hampir mengarah pada konflik yang keras

---

<sup>383</sup> Muhammad Wahyuni Nafis, 1999 .opcit.hal 211

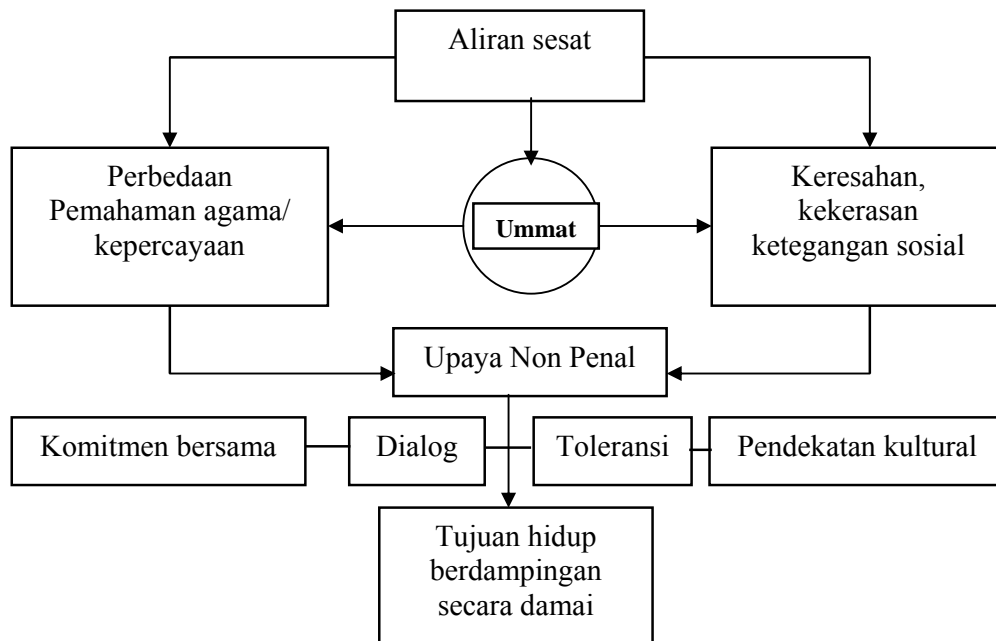
<sup>384</sup> Thoha Hamim, et al, 2007.op.cit. hal 3

<sup>385</sup> Data Muhaimin, SE, Ketua MWC NU Klampis Bangkalan, 2008

<sup>386</sup> Masdar F Mas'udi, Hentikan Kekerasan Pada Ahmadiyah, dalam Jawa Pos, 26 Desember 2007 hal 2

dan berskala luas melibatkan hampir semua kelompok masyarakat.<sup>387</sup> Perkembangan berikutnya, kedua kelompok bisa berinteraksi (baca: hidup rukun dan damai) dengan baik, dan konflik mereda setelah adanya *membangun sikap saling pemahaman, toleransi, dengan mengisi “ruang kosong” humanitas melalui pendekatan kultural.*<sup>388</sup>

Uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan dalam bentuk skema sebagai berikut



Hal ini berarti;

- Bahwa aliran sesat merupakan bagian dari perbedaan pandangan, paham/ aliran keagamaan/ kepercayaan yang ada dalam sepanjang sejarah agama
- Bahwa keberadaan aliran sesat/ perbedaan pandangan keagamaan seringkali menimbulkan Keresahan, kekerasan ketegangan sosial

<sup>387</sup> selengkapnya baca Nur Syam; *Konflik NU dan Muhammadiyah, perbedaan paham agama dalam teori fungsional konflik*, dalam Toha Hamim, et al, 2007.op.cit. hal 247- 260.

<sup>388</sup> Toha Hamim, et al, 2007. op.cit. hal 260

- Bahwa metode dan alternatif pencegahan dan penanggulangan terhadap aliran sesat/ perbedaan pandangan keagamaan yang pernah dilakukan adalah dengan cara/ dalam bentuk;

#### **Preventif**

- Membangun komitmen bersama (model piagam madinah/ zaman khalifah)
- membangun sikap saling pemahaman dan toleransi (lihat model penyelesaian konflik NU dan Muhammadiyah)

#### **Penanggulangan**

- membangun dialog intensif (model dialog *sinkretikal-resiprokal* terhadap Ahmad Musaddeq Pimpinan Alqiyadah Al Islamiyah)
- pendekatan kultural (model para Wali Songo dan Gus Dur)

Jadi, kebijakan *non penal* yang pernah dilakukan terhadap aliran sesat, perbedaan pemahaman aliran kepercayaan dan keagamaan intinya dilakukan dengan cara-cara pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.<sup>389</sup>

---

<sup>389</sup> Pendekatan non penal demikian selaras dengan konsep Karl O. Christiansen, Lihat, Barda Nawawi Arief, 2005.op.cit hal 77



## B.2. Kebijakan Pendekatan Non Penal Terhadap Aliran Sesat

Kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*” menyatakan hal-hal sebagai berikut;<sup>390</sup>

Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan “strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan” (*the basic crime prevention strategy*).

(- “*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*”; - “*The basic crime prevention strategy must consist in eliminating the causes and conditions that breed crime*”);

Bertolak dari kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*” di atas, maka Pencegahan terhadap aliran sesat (sebagai kejahatan menurut UU No 1 Pnps 1965), sepatutnya harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya aliran sesat (kejahatan). Sebab-sebab/ kondisi munculnya aliran sesat adalah sebagai berikut;

- menurut **Komaruddin Hidayat** ada faktor pemicu selain masalah psikiatrik dan psikologis, yaitu masalah ekonomi, ketidakadilan, ketidakseimbangan sosial, pendidikan, dan kultural.<sup>391</sup>
- **Nalini Muhdi Agung**, komunitas seperti itu dipelopori oleh pemimpin yang sejatinya sedang menampilkan gejala psikiatrik berupa suatu delusi atau waham kebesaran (*delusions of grandeur* atau *megalomania*) yang melekat sebagai gejala gangguan delusional. Jadilah mereka pemimpin kelompok keagamaan yang sangat karismatik bagi pengikutnya, atau menjadi dukun, paranormal, atau orang yang punya kesaktian. Meskipun bukannya menuduh semua orang yang mempunyai “kelebihan” ini mengidap gangguan jiwa.<sup>392</sup>

---

<sup>390</sup> dalam Barda Nawawi Arief, 2005.op.cit. hal 77-78

<sup>391</sup> Kompas, 3 Januari 2006

<sup>392</sup> Nalini Muhdi Agung, *Aliran Sesat atau Gangguan Delusi*, OPINI, 06 Januari 2006

- **Aibdi Rahmat**, faktor timbulnya aliran sesat cukup kompleks, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. **Pertama**, dari faktor internal yang dimaksud adalah keadaan atau kondisi kejiwaan manusia yang membawa kepada perbuatan atau tindakan-tindakan yang menjerumuskannya kepada hal yang tidak baik. **Kedua**, dari faktor eksternal yang dimaksud adalah pengaruh sosial budaya yang melatar belakangi kehidupan seseorang.<sup>393</sup>
- **Soerjono Soekanto**<sup>394</sup> membagi masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Ini artinya, setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan paut dengan kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial

Selain pendapat-pendapat di atas, berikut ini dipaparkan pendapat para pakar agama, politik, sosial dan hukum terkait dengan penyebab merebaknya aliran sesat di tanah air;

- **Sunyoto Usman** melihat kemunculan aliran sesat dalam Islam ini merupakan salah satu wujud kesalahan ulama sekaligus bentuk protes atas ketidakpuasan umat terhadap pemimpin agama atau ulama yang sibuk dengan hiruk pikuk politik<sup>395</sup>
- **Tarmidzi Taher** melihat berkembangnya aliran sesat dalam perspektif kemiskinan ekonomi, orang yang berada di tengah kondisi ketidakpastian, tekanan hidup yang kuat, kecemasan, keterasingan dan keputusasaan dalam memandang masa depan, sulit untuk berpikir panjang dan rasional. Pilihan-pilihan yang diambil pun akan cenderung instan dan tanpa pertimbangan.<sup>396</sup>
- **M. Ali Haidar**, kemunculan aliran sesat akibat dari kurangnya peran negara dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun keadilan.

“Menurut beberapa teori sosial munculnya kelompok aliran sesat itu pada umumnya disebabkan oleh sekelompok masyarakat yang merasa dizalimi pemerintah sebagai pengatur negara yang tidak memberi

---

<sup>393</sup> Aibdi Rahmat, *Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2007, hal 93-103

<sup>394</sup> Soerjono Soekanto, 1990, op.cit. hal 401

<sup>395</sup> Suara Muhammadiyah; 2007:3

<sup>396</sup> Ibid hal 4

berbagai kemudahan untuk memperoleh hak-hak mereka, sehingga mereka membentuk kelompok sendiri,”<sup>397</sup>.

- **Achmad Satori Ismail**, menurutnya setelah MUI melakukan survei, ternyata aliran sesat itu merupakan skenario asing. “Kesimpulan MUI yang demikian itu diperoleh dari temuan adanya pemimpin aliran yang tidak dapat membaca Al-Qur’an, target dari skenario itu untuk memecah belah persatuan pemeluk agama”<sup>398</sup>.
- **Ma'ruf Amin**, menurutnya kurang efektifnya metode dakwah yang selama ini dilakukan kepada masyarakat<sup>399</sup>
- **Hasyim Muzadi**, mengkaji dalam perspektif hukum positif yaitu aturan yang ada saat ini, seperti soal penistaan agama, dirasa sudah kurang memadai. Terbukti, pemerintah seringkali terkesan bingung dan ragu menyikapi aliran sesat yang muncul dan marak belakangan ini. “Untuk keselamatan bangsa ke depan, maka perlu ada modifikasi aturan perundangan terkait aliran sesat”<sup>400</sup>
- Presiden Konferensi Dunia Agama-agama untuk Perdamaian (WCRP) menilai kelonggaran yang muncul sejak reformasi bergulir, juga memberi peran pada maraknya kemunculan aliran sesat.<sup>401</sup>
- **Nasaruddin Umar**, mengkaji aliran sesat sebagai fenomena universal akibat dari proses globalisasi yang membawa isu sekulerisme, liberalisme agama tidak hanya di Indonesia, di negara Islam seperti Pakistan, Timur Tengah, Syria.

Dimana-mana ada aliran sesat, cuma di negara luar lebih kondusif karena hukumnya tegas. Di Indonesia dulunya tiarap, sekarang mulai bermunculan kembali. Aliran yang belakangan marak kembali, sebenarnya aliran lama, tetapi karena dulunya takut, sekarang baru bermunculan. Pada masa yang akan datang, perlu dilakukan pendalaman materi dan metode dakwah.<sup>402</sup>

Berdasarkan uraian para tokoh tersebut di atas, ternyata penyebab aliran sesat sangat kompleks tidak semata-mata karena keawaman pemahaman terhadap agama akan tetapi akar persoalannya justru menyentuh persoalan-persoalan mendasar bangsa ini sebagaimana tampak dalam skema sebagai berikut;

---

<sup>397</sup> Ibid

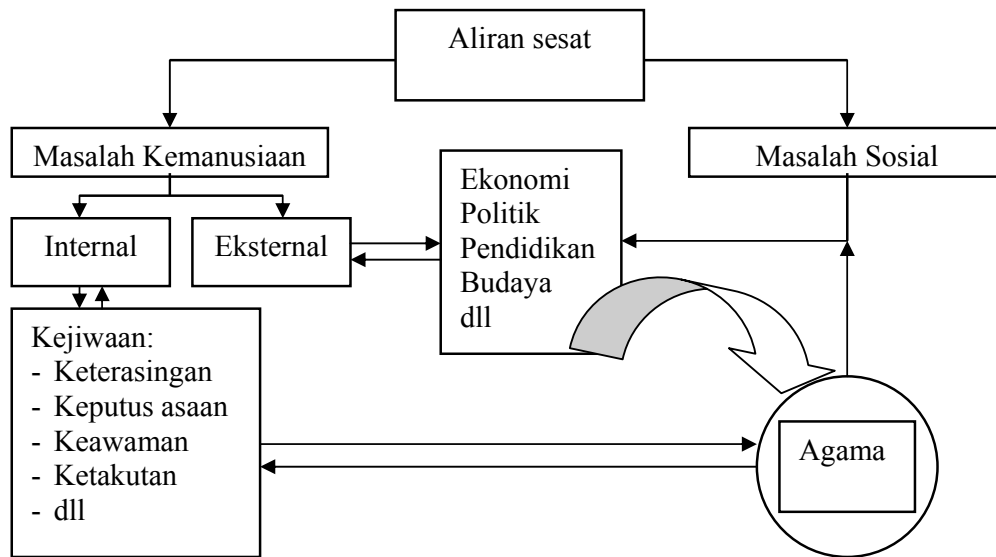
<sup>398</sup> Ibid. hal5

<sup>399</sup> TEMPO Interaktif, 2007:1

<sup>400</sup> Harian Berita Sore, 2007:2

<sup>401</sup> Harian Berita Sore, 2007:3

<sup>402</sup> [www.nu-online.com](http://www.nu-online.com).



Skema di atas berarti;

- Aliran sesat merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial
- Sebagai masalah kemanusiaan berarti menyangkut masalah internal dirinya yang terkait dengan masalah-masalah kejiwaan.
- Sebagai masalah sosial, aliran sesat merupakan masalah-masalah yang terkait dengan masalah mendasar bangsa, yaitu ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan lain-lain.
- dilihat sebagai masalah kemanusiaan dan masalah sosial, maka agama menjadi "faktor kunci" masalah-masalah aliran sesat.

Dilihat dari politik kriminal, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan aliran sesat, pen) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana "penal"), tetapi harus ditempuh pula dengan

**pendekatan integral/sistemik.**<sup>403</sup> Dengan kata lain, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi masalah aliran sesat, maka upaya penanggulangannya sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana “*non-penal*”, terlebih mengingat karena keterbatasan dari sarana penal itu sendiri.

Selain penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan penerapan hukum pidana, upaya non hukum pidana (*non penal*) menurut **G P. Hoefnagels** adalah sebagai berikut;<sup>404</sup>

- pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan
- dan pemidanaan melalui media masa ( *influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Upaya penggulangan aliran sesat melalui sarana *non penal* akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Fakto-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan munculnya aliran-aliran sesat.

Skema di atas juga menggambarkan, bahwa faktor penyebab aliran sesat sangat kompleks. Oleh karena itu, penanggulangan aliran sesat melalui upaya non penal, tidak bisa hanya dilakukan terhadap satu faktor penyebab saja, melainkan

---

<sup>403</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime Dan Cyber Sex*, Diedit dari judul asli “Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cyber Crime di Bidang Kesusilaan”, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, FH UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, 20 Agustus 2005. hal 11

<sup>404</sup> Muladi, 1995.op.cit. hal. 48

juga harus menyentuh akar/ faktor-faktor penyebab yang lainnya. Misalnya sebagai berikut;

- **ekonomi;** seseorang muslim (misalnya) karena terhimpit masalah ekonomi, kemudian mencari pesugihan dengan melakukan ritual pesugihan, seperti menyembah setan, jin, ritual telanjang dan lain sebagainya.<sup>405</sup> Perbuatan semacam ini tentu dalam perspektif Islam dapat dinyatakan sesat, juga merupakan perbuatan yang tercela dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penanggulangannya tentu harus ada perbaikan ekonomi. Namun dengan upaya perbaikan ekonomi saja belum tentu cukup, bisa jadi yang bersangkutan menempuh ritual sesat karena keawamannya dalam agama misalnya. Kenyataan banyak sekali orang yang miskin, tetapi tidak melakukan perbuatan semacam ini seperti ini.

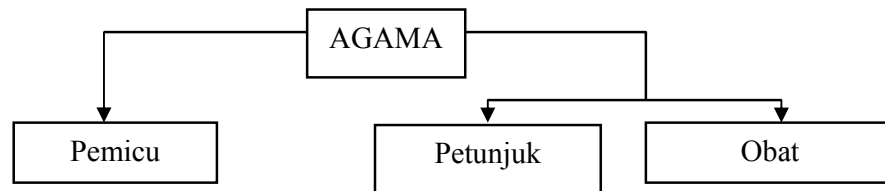
- **Sosial/ lingkungan;** ada seseorang "terpaksa" menjadi pengikut "aliran sesat" tertentu, karena kalau tidak mengikuti kelompok tersebut, dia akan terkucil dari lingkungannya. Jadi, harus ada perbaikan sosial. Tapi hal ini tidak cukup kalau tidak melibatkan perbaikan faktor penyebab lainnya.
- **Pendidikan;** dalam banyak hal, seseorang karena "keawamannya" terjerumus pada pemahaman yang salah terhadap agama.

---

<sup>405</sup> lihat; *Berburu Pesugihan di Sendang Pangilon di Kawasan Saradan*, Posmo, Edisi 463, 19 Maret 2008 hal 24, lihat juga, *Mengungkap Pesugihan Sumber Gothe Nglungur Kediri, Jatim*, Posmo, Edisi 249, edisi 249, 20 Januari 2004 hal 8

Dari sekian banyak faktor tersebut, dalam banyak hal, agama ternyata merupakan “faktor kunci” atau “faktor terpenting” sebagai;

- “penyumbang/ pemicu utama” munculnya aliran sesat,
- petunjuk bagi manusia dalam bertingkah laku
- sekaligus “obat non penal” yang sangat tepat dalam menanggulangi aliran sesat.



Menurut **Haryatmoko**, agama sering tampil dalam dua wajah yang saling bertentangan. Dari satu sisi, agama merupakan tempat dimana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan harapan yang kukuh. Dalam posisi inilah agama menjadi petunjuk bagi manusia untuk bertingkah laku, sekaligus sebagai ”obat” ketika terjadi kepincangan (sakit) dalam kehidupannya.

Agama itu sendiri bersifat abstrak, sehingga agama memang membuka peluang terjadinya perbedaan dalam pandangan keagamaan. Bermuara dari sinilah, agama menjadi ”pemicu” timbulnya aliran sesat. Namun patut dicatat, bukan agama dan ajaran agamanya yang salah, sebab agama pasti selalu mengajarkan kebaikan, kedamaian, hanya manusianya yang salah menafsirkan, menghayati, mengamalkannya, bahkan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga menyulut stigma sesat, kafir dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ada satu hal yang patut dicatat, bahwa substansi masalah aliran sesat, hakikatnya adalah sakitnya “kehidupan beragama”. Artinya ada sesuatu yang “sakit” dalam praktek kehidupan beragama. Oleh karena

itu, yang “diobati” sepatutnya adalah “penyakit” yang ada dalam “kehidupan beragama” itu sendiri.

Sebagai salah satu bentuk dari “penyimpangan agama”, adalah wajar upaya penanggulangan *aliran sesat* juga harus ditempuh dengan **pendekatan agama** (*religion prevention*).<sup>406</sup> Di samping itu diperlukan pula **pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif** karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya aliran sesat juga terkait erat dengan budaya dan keawaman (pendidikan) penganutnya.

Artinya, Jika yang sakit adalah “kehidupan beragama”, maka sepatutnya “obat” yang paling tepat adalah “resep” yang bernama “agama” sendiri, dengan kata lain menjadikan agama sebagai “petunjuk” dalam setiap pengambilan keputusan maupun bertingkah laku, sekaligus menjadikan agama melalui ajarannya sebagai “obat” media penyadaran umat dari sakitnya. Misalnya, upaya peningkatan penghayatan setiap individu akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agamanya.

Agama sebagai sumber kedamaian, membawa pesan kepada seluruh umat manusia tentang kasih sayang, keadilan, dan saling memahami. Sebagai berkah bagi semua makhluk, agama merupakan pengingat abadi bagi seluruh umat manusia tentang adanya percikan Ilahiyah pada setiap orang<sup>407</sup>

---

<sup>406</sup> Bandingkan dengan logika/ konsep Barda Nawawi Arief dalam konsep penanggulangan *Cyber crime*. Dalam konsep ini, menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan *Cyber crime*, harus ditempuh dengan **pendekatan teknologi** (karena *cyber crime* merupakan bagian dari penyalahgunaan/ penyimpangan dari teknologi, pen). Lihat Barda Nawawi Arief, ***Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime Dan Cyber Sex***, op.cit hal 11

<sup>407</sup> Kompas, 18 Juni 2007.op.cit. hal 39



Salah satu kesimpulan dan rekomendasi (saran pemecahan masalah) Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VINII tahun 2003 di Kuta, Denpasar, Bali, ditegaskan antara lain : <sup>408</sup>

Menjadikan ajaran *agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif* dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, sehingga **wajib dikembangkan** upaya-upaya konkret dalam **muatan kebijakan pembangunan hukum nasional** yang dapat :

- memperkuat landasan **budaya keagamaan** yang sudah berkembang dalam masyarakat;
- memfasilitasi **perkembangan keberagaman** dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa;
- **mencegah konflik sosial** antar umat beragama dan meningkatkan ( “meningkatkan kerukunan” ) antar umat bangsa.

Berpijak pada hal-hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada agama, kongres PBB mengenai PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*”<sup>409</sup>, dan metode penanggulangan kejahatan sebagaimana konsep **G P. Hoefnagels**<sup>410</sup>, maupun pendapat-pendapat ilmiah lainnya, maka bentuk/ cara penanggulangan terhadap masalah aliran sesat/ perbedaan pandangan keagamaan melalui *non penal* yang bersifat preventif (pencegahan) dan *kausatif* (pengobatan).

Secara konkret upaya *non penal* yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode masa lampau, maupun dengan menggunakan metode baru sesuai dengan *Qoidah* yang menyatakan ;

---

<sup>408</sup> Lihat Rumusan Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VINII, angka INI sub B.7, termuat dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VINII, Buku 1, BPHN Depkeh dan HAM, 2003, hal 7, selanjutnya lihat Barda Nawawi Arief, 2005. op.cit. hal 4

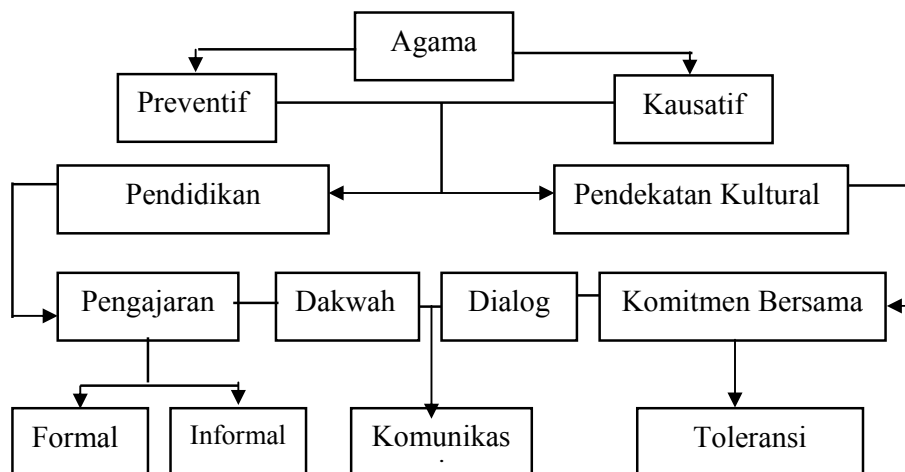
<sup>409</sup> penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan, lihat Barda Nawawi Arief, 2005. op.cit. hal 77-78

<sup>410</sup> pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan, dan pembedaan melalui media masa ( *influencing views of society on crime and punishment/mass media*) Muladi, 1995.op.cit. hal. 48

*Al Muhafadotu 'alal Qodimis Solih, Wal akhdu bil jadidil ashlah.*  
(Peliharalah tradisi lama (kebiasaan/ *qoidah*/ pendapat, cara, pen) yang baik, dan ambillah juga tradisi baru yang baik pula)<sup>411</sup>

Hal ini berarti, bahwa dalam mengambil suatu methode atau cara untuk mengambil keputusan (termasuk kebijakan penanggulangan terhadap aliran sesat), dapat dilakukan dengan cara memelihara kebaikan/ manfaat dari sesuatu yang terdahulu (peninggalan, pemikiran, kebiasaan, hukum dan lain sebagainya), dan mengambil kebaikan/ manfaat dari sesuatu sesuatu yang baru.

Bertolak dari hal tersebut, upaya non penal yang dapat dilakukan terhadap aliran sesat dan perbedaan keagamaan/ aliran keagamaan, terutama solusi menurut agama, secara skematis akan tampak sebagai berikut;



Jadi, melihat skema di atas, penanggulangan aliran sesat/ perbedaan pandangan keagamaan/ kepercayaan, dapat dilakukan dengan melakukan “pendekatan agama” sebagai sarana non penal. Atau dengan kata lain, pendekatan agama merupakan salah satu upaya non penal dalam menanggulangi aliran sesat

<sup>411</sup> Abdullah Moenasyik, *Aspek Dasar Budaya Masyarakat Madura*, Makalah pada dialog “Mencari Format Baru Gerakan Pemuda Ansor”, PAC GP Ansor Klampis, 26 September 2007 hal 9

perbedaan pandangan keagamaan/ kepercayaan. Sedangkan bentuk konkretnya berupa; Pendekatan Pendidikan/ edukatif maupun Pendekatan kultural dengan cara membangun komitmen bersama, dakwah, dialog, dan lain sebagainya

### **B.2.1. Pendekatan Pendidikan/ Edukatif**

Dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda:

- *“Seorang manusia yang dilahirkan bak kertas putih, terserah kepada ibu bapaknya, apakah ia nanti menjadi Nasrani, Majusi atau Muslim” ( Al Hadist ).*
- *“ Diwajibkan kepada kedua orang tua untuk mengajar manusia memanah, berenang dan menunggang kuda....”( Al Hadist ).*

Hadits di atas berarti;

*Pertama*, pendidikan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi manusia dalam pembentukan karakter dan bertingkah laku dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. *Kedua*, kewajiban orang tua (semua pihak) untuk membekali anaknya dengan pendidikan, agar bisa menjadi orang yang diharapkan.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, berbagai dalil/ teori tentang perkembangan manusia tampaknya para pakar memiliki pandangan tersendiri terkait dengan perkembangan kepribadian manusia sebagai berikut;

**Arthur Scopenhauer** dalam teorinya Nativisme berpandangan bahwa perkembangan seorang manusia semata-mata tergantung pada faktor bawaan (dasar). Dalam kesimpulannya yang tergolong ekstrim, Arthur menegaskan bahwa keistimewaan orang tua akan dapat begitu saja diwariskan kepada manusianya dan sebaliknya manusia yang sudah

berpembawaan buruk tidak akan ada gunanya dididik dan dilatih menjadi manusia yang baik dan terampil.<sup>412</sup>

Manusia dapat berperilaku anti sosial, melanggar ketentuan umum bahkan melakukan tindak pidana dalam konteks Nativisme sepenuhnya adalah karena faktor keturunan dan pembawaan (*hereditas*)<sup>413</sup>. Artinya benih perilaku menyimpang memang sudah diturunkan oleh keluarga melalui ayah dan ibu.

**John Locke**<sup>106</sup> dengan teorinya yang sangat terkenal (Tabularasa) Empirisme memiliki pendapat lain yaitu perkembangan manusia sepenuhnya tergantung dari lingkungan atau pendidikan yang diperoleh. Seorang manusia dilahirkan ibarat meja lilin (Tabula-rasa), kertas kosong yang putih bersih kemudian dapat ditorehkan tinta hitam, merah tergantung dari lingkungan yang mendidiknya.<sup>414</sup>

Artinya, dalam konsep Empirisme, justru lingkungan atau pendidikan dan pengalaman yang diterimanya berperan membentuk keribadian manusia.<sup>415</sup> Manusia dapat baik atau melanggar kelaziman, melakukan kejahatan termasuk mengikuti aliran sesat sepenuhnya adalah faktor lingkungan.

---

<sup>412</sup> Endang Poerwanti dan Nurwidodo. **Perkembangan Peserta Didik**. FKIP-UMM:Malang. 2001.hal 49.

<sup>413</sup> .Lihat M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan, teoritis dan praktis*, Remaja Karya, Bandung 1988: hal 61

<sup>106</sup> Ibid. hal 49-50.

<sup>414</sup> Ibid

<sup>415</sup> M. Ngalim Purwanto, 1988. op.cit. hal 61.

**Louis William Stem**<sup>416</sup> dalam teorinya Konvergensi berusaha untuk mempertemukan/ menggabungkan di antara tokoh sebelumnya. Teori ini menekankan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor keturunan (*hereditas*) dan faktor lingkungan (*environmental*) dengan pengertian sebagai berikut faktor pembawaan tidak ada artinya bila tidak didukung oleh pengalaman, kesempatan dan usaha belajar, sebaliknya lingkungan juga tidak bermanfaat bila manusia ternyata tidak membawa kecenderungan yang potensial untuk dikembangkan.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, menurut kajian disiplin Psikologi Pendidikan ditegaskan; bahwa manusia dalam perkembangannya dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor pendidikan. Karena, secara filosofis manusia yang dicita-citakan terbentuk melalui proses pendidikan, adalah manusia yang utuh berdasarkan prinsip monodualis<sup>104</sup>.

Prinsip manusia monodualis menekankan bahwa manusia Indonesia harus sadar bahwa di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk Tuhan. Hakikat sebagai makhluk Tuhan, maka manusia harus hormat dan *takzim* kepada Tuhan, memuliakan Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Manusia dalam konteks makhluk pribadi, maka manusia harus berkembang dan selalu berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai kosekuensi dari hukum alam, hukum *Allah (Sunatullah)* dengan menghormati sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan Allah.

---

<sup>416</sup> Endang Poerwanti dan Nurwidodo. 2001.op.cit. hal 50.

<sup>104</sup> Sunarjo Wreksosuharjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Andi Yogyakarta:Yogyakarta.2001.hal. 36.

Oleh karena itu, UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan;

**Pertimbangan**

- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang **meningkatkan keimanan dan ketakwaan** kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk **menghadapi tantangan** sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, terdapat beberapa aspek mendasar sebagai berikut ;

1. proses karakterisasi manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, budaya dan kebiasaan yang terpolakan dalam masyarakat itu.
2. di antara faktor penting pembentukan manusia adalah pendidikan

Terkait dengan Ini berarti;

1. pendidikan memberikan kontribusi yang besar bagi manusia dalam menentukan pilihan keyakinan agama maupun dalam tata pergaulan masyarakat, berbangsa dan bernegara
2. sehingga wajar apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang **meningkatkan keimanan dan ketakwaan** kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia

3. pendidikan diharapkan dapat ***menghadapi tantangan*** sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global (termasuk di dalamnya menghadapi aliran sesat)

Bertolak dari uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa menurut pemikiran yuridis filosofis-konstitusional, penanggulangan aliran sesat/ perbedaan pandangan keagamaan dapat dilakukan melalui pendidikan. Pasal 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan;

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Selanjutnya Pasal 3 Pasal 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan;

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan ***membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat*** dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Konsekuensi dari hal tersebut di atas berarti, bahwa upaya antisipasi dan penanggulangan aliran sesat melalui pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Hal ini berarti pula, bahwa upaya antisipasi terhadap munculnya aliran sesat dapat dilakukan upaya preventif dengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus penguatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pemantapan keyakinan terhadap agama melalui *pendidikan agama*.

Nabi Muhammad SAW, menekankan akan pentingnya pengenalan dan penghayatan (pendidikan, pen) agama semenjak anak masih kecil.<sup>417</sup> Bahkan, menurut **Jhon Locke**, sejak anak dilahirkan, ia hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga. Jadi, keluargalah, lingkungan yang pertama kali memberi pendidikan kepada anak.<sup>418</sup>

Tokoh pendidikan Amerika Serikat **Crow** pernah menyatakan bahwa, “ yang membedakan antara dunia binatang dan dunia manusia, ialah manusia membutuhkan agama, dan binatang tidak. Tingkah laku orang dewasa terhadap agama tergantung akan pendidikannya tatkala kecil, perbuatan kelewat batas yang tidak menentramkan jiwa, umumnya, karena material berlebihan, dan tidak didasari agama dan nilai-nilai rohaniyah.”<sup>419</sup>

Secara *pedagogis*, pendidikan agama harus ditanamkan sejak dini, sejak anak masih kecil. Orang tua yang menyadari pentingnya agama bagi

---

<sup>417</sup> Sukarsono, *Pendidikan Agama Di Sekolah*, Majalah bulanan Mimbar Pendidikan Agama, Edisi Juli 1979. hal 56

<sup>418</sup> *Pendidikan Keluarga Dan Sekolah Merupakan Peletak Dasar Kepribadian Anak*, Majalah Mimbar Pendidikan Agama No 62, Nopember 1991 hal 49.

<sup>419</sup> Sukarsono, Majalah 1979. op.cit hal 56



perkembangan jiwa anak dan bagi kehidupan manusia pada umumnya, mereka akan berusaha menanamkan pendidikan agama pada anak-anaknya sejak kecil sesuai dengan agama yang dianutnya. Ini berarti bahwa pendidikan agama bukan hanya sekedar memberi pengetahuan tentang keagamaan, tetapi justru yang lebih utama adalah membiasakan anak taat dan patuh menjalankan ibadat dan berbuat serta bertingkah laku di dalam kehidupannya sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam agama masing-masing.<sup>420</sup>

Secara *pedagogis*, pendidikan agama harus ditanamkan sejak dini, sejak anak masih kecil. Orang tua yang menyadari pentingnya agama bagi perkembangan jiwa anak dan bagi kehidupan manusia pada umumnya, mereka akan berusaha menanamkan pendidikan agama pada anak-anaknya sejak kecil sesuai dengan agama yang dianutnya. Ini berarti bahwa pendidikan agama bukan hanya sekedar memberi pengetahuan tentang keagamaan, tetapi justru yang lebih utama adalah membiasakan anak taat dan patuh menjalankan ibadat dan berbuat serta bertingkah laku di dalam kehidupannya sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam agama masing-masing.<sup>421</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut;

- keluarga merupakan faktor yang turut andil dalam membentuk pribadi seseorang

---

<sup>420</sup> M. Ngalim Purwanto, 1988.op.cit. hal 197

<sup>421</sup> Ibid

- bertolak dari butir pertama di atas, maka pendidikan (terutama agama) merupakan peletak dasar kepribadian dan cara untuk mempengaruhi seseorang dalam menjalankan dan menetapkan pilihan kehidupannya,
- pendidikan agama merupakan landasan bagi seseorang untuk memperkuat keyakinan agamanya.

Ditinjau dari kebijakan kriminal, maka pendidikan demikian sebenarnya merupakan upaya rasional *non penal* yang bersifat mencegah dan menanggulangi kejahatan (aliran sesat). Artinya, dengan membekali anak/ seseorang dengan pendidikan agama sejak dini, maka ajaran agama tersebut secara tidak langsung terpatri dengan kuat dalam hatinya, sehingga tidak mudah untuk terombang-ambing dengan tawaran-tawaran ajaran baru yang bertentangan dengan agama yang dianutnya.

Selain itu, semua ajaran agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, keadilan, kemanusiaan dan seterusnya. Konsekuensi berikutnya, seseorang yang sudah memahami agamanya yang benar, bukan tidak mungkin akan selalu bersikap toleran terhadap orang lain, sehingga dalam memahami perbedaan pandangan keagamaan, pasti akan mengkedepankan nilai-nilai luhur sesuai agamanya, dan tidak mengkedepankan kekerasan.

Artinya, selama masih bisa menggunakan jalan-jalan damai, cara-cara yang arif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa, maka cara-cara itu merupakan sesuatu yang sepatutnya ditempuh, demi menghindari jatuhnya korban dari anak-anak, wanita dan orang-orang kecil seperti kasus-kasus yang menimpa Indonesia akhir-akhir ini.

### **B.2.2. Pendekatan Kultural**

#### **a. Membangun Komitmen bersama**

Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa bumi ini hanya satu, sementara penghuninya, manusia terkotak-kotak dalam berbagai suku, ras, bangsa, profesi, kultur, bahkan agama. Masing-masing memiliki tujuan hidup berbeda yang pada akhirnya diharapkan bisa menerima keanekaragaman sosial budaya, toleransi satu sama lain yang memberi kesempatan bagi setiap orang menjalani kehidupannya, termasuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing.

Meski praktik keagamaan kita sering diapresiasi kalangan mancanegara hingga 62 tahun Indonesia merdeka, RI masih menghadapi ancaman anarki yang menciderai nilai-nilai pluralitas. Misalnya umat kristiani atau kelompok Ahmadiyah yang susah beribadah. Tempat ibadah mereka masih rentan diganggu yang seolah memiliki legitimasi dari Tuhan untuk menjadi hakim.

**Al Mawardi** dalam *Al Ahkam al Sulthoniyah* menyebutkan; kelompok umat Islam yang memiliki pandangan berbeda dari mayoritas serta mencoba mengembangkan suatu pendapat sendiri tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang selama mereka tidak melakukan pemberontakan terang-terangan. Mereka harus diperlakukan secara adil, tanpa dikurangi sedikitpun hak dan kewajiban mereka.<sup>422</sup>

---

<sup>422</sup> Abd. A'la, *Dialog sebagai Inti Ajaran Agama*, Jawa Pos 16 Nopember 2007 hal 4

**Abdurrahman Wahid** saat menghadiri simposium bertema *Dialogue among Civilization: Toward a Culture of Peace* di gedung PBB pada tanggal 13 Juni 2000 menegaskan pentingnya para tokoh agama memiliki pandangan dan wawasan yang luas serta tidak mencurigai agama lain. Para tokoh agama yang satu hendaknya bisa belajar dari agama lain. *Jika ajaran agama dijalankan dengan baik, maka problem masyarakat bisa diatasi*. Pemahaman secara sempit dan kaku terhadap agama tertentu diharapkan bisa di atasi melalui pendidikan dan toleransi.<sup>423</sup>

Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, **Jajat Burhanuddin** berkomentar bahwa bangsa ini tengah menghadapi masalah serius dalam pluralisme.<sup>424</sup>

Dalam tataran wacana, masyarakat memahami keniscayaan kehidupan yang plural, tetapi pada tataran empiris masih rendah. Pemahaman masyarakat terhadap pluralisme mengalami kesenjangan. Pluralisme masih sering ditentang karena dianggap menghilangkan batas agama dan mengaburkan identitas.

Kenyataan di atas, Menurut Abdullah Hakam Shah dalam setidaknya ada beberapa faktor mendasar yaitu:<sup>425</sup>

1. Parsialisasi pemahaman mayoritas umat terhadap agama yang dianutnya.

Model pemahaman ini tampaknya telah menjadi fenomena umum tidak hanya Islam, Kristen, Hindu maupun Budha. Agama ternyata lebih dipandang sebagai simbol daripada *addin* yang sebenarnya bersubstansikan keimanan. Dalam cara pandang

---

<sup>423</sup> Lihat <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0006/16/nasional/haru06.htm>

<sup>424</sup> Jawa Pos, 21 Desember 2007 hal 4

<sup>425</sup> [is-lam@isnet.org](mailto:is-lam@isnet.org), 2000:3

semacam ini, agama tidak lebih sebagai gugusan praktek jasmaniah dan ritus-ritus seperti sembahyang, nyanyian, puasa, semedi, upacara kematian, yang kering akan nilai-nilai rohaniah. Dampaknya yang terasa adalah hilangnya kekuatan dan akses agama untuk menjadi penuntun dan *control of life*. Shalat misalnya menjadi tidak lagi mampu mencegah seorang muslim agar jangan sampai berbuat nista dan dosa, sebagaimana firman Allâh Swt. **"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar"** (Qs. 29; 45). Dan agama lain tampaknya juga tidak jauh beda dengan kenyataan itu.

2. Keterikatan mayoritas umat terhadap agama yang dipeluknya ternyata cenderung didasari oleh ikatan emosional daripada ikatan keimanan.

Relasi yang berkembang antara agama dan pemeluknya kemudian mengalami pergeseran dari tataran iman yang tumbuh secara organis dalam bingkai pengetahuan dan kesadaran yang utuh, menuju tataran fanatisme buta yang dilandasi oleh sentimen-sentimen serta emosi belaka, akibatnya cenderung menjerumuskan umat pada cara-cara pandang yang serba subjektif, egois, emosional, bahkan anarkis.

Dalam perspektif seperti inilah agama sebagai *the way of life* akan jatuh pada posisi terendahnya. Ia hanya menjadi simbol yang mati, statis, serta hampa akan muatan nilai-nilai luhur. Pada fase selanjutnya, agama pun bisa menjelma sebatas identitas diri yang amat sensitif dan rawan akan pertikaian.

3. Adanya aspek-aspek eksternal yang berusaha merekayasa hubungan antar umat beragama agar terjadi bentrokan di lapisan *grass root* umat beragama demi mewujudkan kepentingan sesat mereka.

Dalam kondisi demikian adalah wajar jika seharusnya bangsa ini terutama masyarakat Islam sebagai mayoritas mengingat kembali Piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Piagam itu menjadi jaminan bahwa minoritas di negara Islam yang mayoritas Islam tidak boleh diperlakukan semena-mena.

Piagam Madinah menggaris bawahi bahwa kebebasan memeluk agama yang berbeda<sup>426</sup> selain Islam pun dijamin, semua kelompok dapat berpartisipasi tanpa pandang posisi. Dalam posisi ini, Nabi SAW memilih membangun pusat pendidikan dan perekonomian. Masjid difungsikan dengan baik sebagai pusat pendidikan. Perdagangan dioptimalkan untuk mengembangkan kualitas umat. Keduanya mutlak. Karena umat yang kuat adalah umat yang cerdas serta makmur. Cerdas maksudnya berperadaban dan sanggup berinteraksi dengan segala perubahan zaman. Sementara makmur tak berarti kaya. Yang penting tidak miskin dan fakir. Aspek ekonomi dan aspek pendidikan tetap menjadi fokus Nabi SAW ketika diri dan umatnya bahkan ketika menjadi mayoritas. Dengan modal ini, toleransi dalam perbedaan pandangan keagamaan dapat berjalan dengan baik.

Selain piagam Madinah, ada Resolusi Konflik model Rosulullah yang dikenal dengan “Resolusi Makkah”; menekankan bahwa setiap orang Islam adalah individu yang harus mengekspresikan ide-ide perdamaian. Sesuai dengan namanya, masyarakat Muslim sudah sejak awal diingatkan harus menjadi masyarakat yang cinta damai, *nir* kekerasan dan menegakkan dimensi positif bagi kehidupannya. Karakter dasar dari resolusi konflik ini adalah menghindari konflik dan menawarkan sifat-sifat kesamaan Islam dengan kaukus *abrahamic religion*. Bentuk resolusi ini;

- lebih ***mengkedepankan pendekatan kultural*** dengan solusi psikologis ini dapat diketahui dari penyampaian doktrin agama

---

<sup>426</sup> Allah berfirman dalam surat Al- Kafirun, “*Lakum Dinukum Waliya din*” (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).

yang sejuk<sup>427</sup>, sehingga dapat menyadarkan seseorang dalam kesesatannya

- ***menghindari konflik terbuka*** dan mengembangkan mentalitas kesabaran kalangan umat.

Penggunaan cara demikian memiliki efek preventif;

- mencegah seseorang berbuat sesat, yaitu seseorang lebih menyadari bahwa agama yang dianutnya merupakan agama yang ***mengkedepankan solusi psikologis*** ini menyentuh umat dalam memahami agamanya.
- mencegah terjadinya konflik perbedaan agama/ aliran

Dilihat dari perspektif kebijakan kriminal, maka metode “pendekatan kultural dengan membangun komitmen bersama” ini merupakan suatu upaya rasional dan merupakan bagian/ bentuk upaya *non penal* yang berfungsi sebagai berikut;

- (1) pencegahan bagi seseorang untuk beralih ke aliran sesat sebab metode ini mengkedepankan solusi psikologis bagi umat dalam menjalankan kehidupan agamanya.
- (2) mencegah terjadinya konflik perbedaan agama/ keyakinan/ kepercayaan.

Oleh karena itu di masa yang akan datang, model “pendekatan kultural dengan membangun komitmen bersama” merupakan suatu tawaran yang patut diperhitungkan dalam rangka menanggulangi merebaknya aliran sesat maupun konflik kekerasan dalam kehidupan beragama.

---

<sup>427</sup> Thoha Hamim, et al, 2007.op.cit hal 65

## **b. Pendekatan Dakwah**

Seperti diketahui, sejarah agama-agama sejak masa lampau sampai masa kini selalu saja menampilkan sisi “cermin retak”. Dalam sejarah agama dijumpai hal-hal sebagai berikut;

- tak pernah luput dari sejarah kekerasan dan perang.
- banyak korban yang berjatuhan atas nama agama.
- terorisme,
- pengusiran umat beragama minoritas,
- politisasi agama demi kepentingan sepihak
- para ahli agama yang kerap kali keluar dari norma-norma agama,
- dan lain sebagainya

Dalam keadaan seperti di atas, sisi psikologis manusia memimpikan “sang juru selamat”. Juru selamat yang bisa membawa manusia ke dalam ketenangan baru, ketika agama-agama yang ada tidak mampu memberikannya. Kenyataan-kenyataan negatif yang ditemukan dalam agama-agama di atas, menarik manusia pada suatu pemikiran;

**Pertama**, sebagian orang enggan beragama. Ini yang menjadi salah satu argumen ateisme.

**Kedua**, sebagian yang lain merindukan dan menciptakan agama baru. Banyak orang kembali mencari kesempurnaan, ketenangan, dan harapan yang lain, yang tidak didapatkan dari agama sebelumnya. Inilah salah satu yang menjadi alasan mengapa agama (aliran sesat) baru banyak diminati.<sup>428</sup>

---

<sup>428</sup> Terasa benar tesis Feuerbach dalam bukunya, *The Essence of Christianity* (1881), bahwa agama merupakan proyeksi tentang kesempurnaan dari dimensi-dimensi dasariah manusia.



*ketiga*, agama baru dan ketertarikan banyak orang terhadapnya tak lain merupakan “ketidakpuasan” manusia atas kenyataan “buruk” yang dibawa oleh agama-agama sebelumnya.

Hal ini berarti, bahwa agama seolah-olah gagal memenuhi jawaban atas masalah-masalah kehidupan dan keinginan-keinginan umatnya. Padahal yang benar adalah, agama telah cukup memberikan rambu-rambu/ tuntunan bagi manusia dalam bersikap, bertindak dan berbuat dalam kehidupannya. Jadi, ada kesalahan umat (terutama kalangan agamawan) dalam menafsirkan, mempraktekkan dan menyampaikan risaalah ajaran-ajaran agamanya.<sup>429</sup>

Bertitik tolak dari hal demikian, munculnya aliran sesat (agama baru), bukan berarti agama yang patut disalahkan, melainkan umat, terutama kalangan agamawan (orang-orangnya) telah gagal meyakinkan / menyampaikan dakwah pada umatnya. Mereka membutuhkan kejujuran para ulama dan pemimpinnya, bukan hanya ayat-ayat dan janji-janji yang mereka langgar sendiri. Umat membutuhkan perdamaian, bukan cela kelompok dan teror atas kelompok yang lain.

Dalam konteks inilah, umat memerlukan keteladanan, bimbingan, ketika mereka merasa dirinya terpinggirkan, bukan hanya kitab-kitab yang berisi aturan-aturan wajib dan haram. Oleh karena itu, menurut **Nasaruddin Umar**, pada masa yang akan datang, perlu dilakukan pendalaman materi dan

---

Kenyataannya, manusia adalah makhluk yang serba kekurangan, maka dia merindukan “yang mahasempurna”, tempat dia berharap, berlindung, dan menenangkan diri. Saat itulah manusia membutuhkan agama. Tempo, 14 November 2007

<sup>429</sup> Suatu contoh, banyak kalangan para agamawan lebih tertarik dunia politik dan bisnis daripada membimbing umatnya.

metode dakwah, yaitu metode dakwah harus sesuai dengan kondisi obyektif.<sup>430</sup>

Pesan-pesan agama, seperti kejujuran, solidaritas, dan perdamaian - tiga hal yang sangat tak diacuhkan oleh kaum agamawan sekarang- harus menjadi pijakan dalam ruang-ruang tata kehidupan. Umat tentu membutuhkan sikap-sikap keteladanan dari para ulama untuk menjalankan agama mereka. Bagaimana mungkin seseorang mempertahankan agamanya bila ulama yang seharusnya jadi panutan terjerembap dalam pusaran korupsi, egoisme, dan kekayaan duniawi.

Oleh karena itu, menjawab persoalan tersebut, tentu tak ada cara lain kecuali semua orang yang menganggap dirinya beragama, berusaha memulihkan agama dengan menjadikan agama sebagai norma dalam keseharian. Menjadikan agama bukan sekadar ritual, tapi memasukkan norma-norma agama ke jantung kehidupan keseharian manusia, misalnya melalui serangkaian ***dakwah*** <sup>431</sup>, baik secara lisan (*bil lisan*) maupun perbuatan (*bil hal*).

Dakwah merupakan tugas utama (ulama/ pendeta, pen) setiap manusia dengan tujuan menunjukkan dan membawa umat dari kegelapan kesesatan kepada cahaya hidayah. Tugas dakwah ini melekat pada setiap

---

<sup>430</sup> [www.nu-online.com](http://www.nu-online.com).

<sup>431</sup> agama apapun namanya, pasti memiliki tujuan sebagaimana terdapat dalam tuntunan ajarannya masing-masing. Untuk mewujudkannya/ merealisasikan tujuan agama, maka, maka setiap umat/ pemeluk agama selalu berusaha untuk menyampaikan ajaran agama melalui bermacam-macam sarana, di antaranya melalui dakwah, misalkan agama Islam.

manusia untuk menyampaikan risalah kepada orang yang belum tahu dan mengungkapkan ajakan kepada kebenaran dan petunjuk.<sup>432</sup>

Terdapat ungkapan/ metode/ strategi dakwah menarik dalam Al-Qur'an yang perlu ditempuh setiap orang dalam mengajak atau membimbing orang kepada kebenaran dan hidayah, yaitu;

Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" (QS- An-Nahl 125).<sup>433</sup>

Sayyid Qutub memberikan penjelasan yang cukup baik tentang ayat ini. Menurutnya, Al-Qur'an melalui ayat ini meletakkan prinsip dasar dan kaidah-kaidah dakwah, menentukan jalan dan menggambarkan methodenya bagi manusia, sebagai berikut.<sup>434</sup>

- Strategi pertama adalah mengajak dengan bijaksana (hikmah). Untuk itu yang harus diperhatikan adalah kondisi orang yang akan diajak kepada hidayah dan juga ruang lingkup sosialnya. Oleh karena itu, penyampaian dakwah adalah menurut tingkat kemampuan pribadi dan kondisi sosialnya. Bila dapat memahami dan mengenali kondisinya, maka penyampaian dakwah akan mudah dilakukan dan tidak menyulitkan karena tidak siangnya orang yang menerima. Oleh karena itu, perlu beragam cara dan metode yang ditempuh, menurut kesiapan masing-masing orang yang menerimanya.
- Strategi kedua, yaitu pengajaran yang baik yang dapat masuk ke dalam hati melalui cara yang lembut sehingga terhunjam perasaan yang dalam karena kelembutan tersebut. Dalam memberi pengajaran tidak boleh membentak dan mencela bila tidak perlu, dan tidak membuka keburukan atau kesalahan yang telah berlalu. Lemah lembut dalam memberi pengajaran dapat memberi pengaruh yang lebih besar dalam memberi petunjuk kepada hati

---

<sup>432</sup> Aibdi Rahmat, 2007.op.cit. hal 197-198

<sup>433</sup> Imam Jalaluddin Al- Mahalliy dan As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, 1990, op.cit. hal 118-119

<sup>434</sup> Aibdi Rahmat, 2007. op.cit. hal 197-198

yang bingung dan melembutkan hati yang keras. Pengajaran yang baik lebih berkesan daripada herdikan dan celaan.

- Strategi yang ketiga yaitu berdiskusi atau berdialog dengan cara yang baik, yaitu tanpa membebani dan menekan terhadap orang yang berbeda pendapat, menghina dan menjelekkan. Dengan adanya ketenangan dan keyakinan pada sang da'i dan merasakan bahwa ia tidak bertujuan mengalahkan seseorang dalam dialog itu, tetapi bertujuan untuk menyampaikan kebenaran, maka dakwah dapat dilaksmanusiaan dengan baik. Jiwa manusia memiliki sifat sombong dan menentang. Ia tidak akan beranjak dari pendapatnya kecuali diajak dengan cara yang lembut, sehingga tidak merasa dikalahkan.

Ada dua hal penting bagi seseorang, yaitu pendapatnya dan harga dirinya. Ia berpandangan bahwa meremehkan pendapatnya merupakan suatu bentuk merendahkan harga diri dan kehormatannya. Berdialog dengan baik akan menghilangkan rasa sombong itu, dan seseorang merasa bahwa eksistensi dan harga dirinya tetap terjaga. Seseorang hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran.<sup>435</sup>

**Yusuf al-Qordlowi** mengemukakan methodologi dakwah, yaitu membidik rasio dan hati, berdialog dengan cara yang baik, berkomunikasi dengan bahasa mereka.<sup>436</sup> Artinya, jika dakwah dilakukan dengan benar, yaitu menyentuh rasio dan hati, maka diharapkan, seseorang dapat merasa menghayati kebenaran ajaran-ajaran agamanya. Secara psikologis, yang bersangkutan seseorang merasa bahwa eksistensi dan harga dirinya tetap terjaga. Dengan demikian dia merasa keinsyafan, kesadaran yang tidak dipaksakan.

---

<sup>435</sup>Ibid hal 198

<sup>436</sup> Yusuf al-Qordlowi, 2001. op.cit. hal 622-6

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dilihat dari perspektif kebijakan non penal, upaya dakwah ini merupakan suatu upaya strategis dalam rangka mencegah munculnya dan mengobati “menyadarkan” umat dalam kesesatannya, maupun pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dalam kehidupan beragama, karena dakwah pada hakikatnya adalah penyadaran terhadap manusia dalam meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya dengan benar.

### c. Pendekatan dialog

“Jika sekiranya Tuhanmu menghendaki, niscaya berimanlah semua orang yang ada di muka bumi. Maka, apakah pantas engkau memaksa manusia agar semua beriman” Alquran 10:99

Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan *hikmah* dan *nasihat yang baik*, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya *Rabbmu* Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS- An-Nahl 125).<sup>437</sup>

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan;

***pertama***, bahwa masalah keyakinan, keimanan, sesat dan tidak sesatnya seseorang bukan hak manusia untuk memaksakannya.

***Kedua***, bahwa hak kemanusiaan hanyalah mengajak dengan baik dan dengan nasihat yang baik.

Jika dua hal tersebut dirangkai akan memiliki makna penting, bahwa masalah keyakinan, keimanan, sesat dan tidak sesatnya seseorang bukan hak

---

<sup>437</sup> Imam Jalaluddin Al- Mahalliy, dan As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, 1990. loc.cit. hal 118-119

manusia untuk memaksakannya, hak kemanusiaan hanyalah mengajak dengan baik dan dengan nasihat yang baik. Oleh karena itu komunikasi memiliki makna penting dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan, terutama menghadapi perbedaan pemahaman keagamaan/ aliran sesat. Jadi, upaya konkret yang dapat dilakukan adalah dengan dialog/ komunikasi.

Filsuf Jerman, Jurgen Habermas, dalam *Theorie de Kommunikaten Handelns* (1988) mengatakan komunikasi efektif mensyaratkan tiga unsur dasarnya;<sup>438</sup>

- Pertama, dalam mengungkapkan sesuatu, seseorang harus benar-benar mengemukakan kebenaran.
- Kedua, dalam mengemukakan kebenaran itu, seseorang harus mengupayakan keadilan terhadap yang lain.
- Ketiga, disyaratkan adanya ketulusan hati saat menjalin relasi dengan yang lain, meskipun terhadap rival sekalipun.

Tiga pilar komunikasi ala Habermas tampaknya kurang diperhatikan oleh komunitas yang mengklaim diri tidak sesat, padahal dalam mengkomunikasikan kebenaran hendaklah kebenaran yang diakui secara umum, bukan kebenaran sepihak (*truth-claim*).

Menurut **Muhammadun AS**, di kalangan umat Islam (juga berlaku bagi semua umat agama yang lain, pen) perlu dibangun kembali komunikasi yang konstruktif dan efektif, yang bisa memfasilitasi pemahaman yang berbeda terhadap tafsir agama. Bahkan lebih dari itu, perlu adanya pembangunan sumber daya umat Islam untuk menjadi penganut agama Islam yang dewasa, demokrat dan cerdas dalam menyikapi fenomena sosial

---

<sup>438</sup> dalam wordpress.com, diakses pada tanggal 7 Januari 2008

keagamaan yang selalu dinamis dalam masyarakat sekaligus sebagai modal awal memantapkan *national building* dengan meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, yang bersendikan prulalisme suku, agama, ras agama dan golongan.<sup>439</sup>

Modal sosial bangsa Indonesia berupa keragaman suku, agama, ras agama dan golongan, jika tidak secara profesional dikelola sebagai asset bangsa, maka akan berbalik menjadi potensi ancaman konflik yang besar dan menghambat roda reformasi politik, sosial, hukum dan budaya.

Sejauh ini, wacana dialog antar agama cenderung menjadi konsumsi kalangan elit umat beragama saja. Sementara pada tingkatan *grass root* umat, wacana ini relatif asing. Padahal, potensi konflik antar umat beragama justru menguat pada level akar rumput. Maka diperlukan pengembangan wacana dialog antar agama dengan lebih intens lagi melibatkan kalangan grass root umat.

**Pada tahap awal**, dialog tersebut bisa berupa kajian masing-masing umat terhadap ajaran agamanya tentang pesaudaraan, kemanusiaan, interaksi antar umat beragama, dan seterusnya. Karena bagaimanapun juga, pada setiap agama itu terdapat nilai-nilai universal yang bisa menyatukan persepsi setiap pemeluk agama yang berbeda akan hubungan sosial yang sehat dan wajar. Dan pada **tahapan berikutnya**, umat dari agama yang berbeda tersebut bisa mulai membicarakan permasalahan yang mereka hadapi secara bersama-sama.

---

<sup>439</sup> Suara Merdeka, Pemasungan Kebebasan Berpikir Kamis, 06 Desember 2007

Jadi, pemaknaan dialog ini terdiri atas dua pilar;

- Dialog internal agama
- Dialog antar agama

**a. Dialog internal agama;**

Dialog semacam ini diharapkan bisa **mencegah** munculnya aliran sesat, misalnya berupa kajian masing-masing umat terhadap ajaran agamanya tentang pesaudaraan, kemanusiaan, interaksi antar umat beragama

Melalui kajian-kajian semacam ini, pemantapan akidah, nilai, norma, dan ritual keagamaan mulai ditanamka. Cara-cara seperti ini juga ditujukan untuk pelestarian tradisi dan praktik-praktik agama, .di samping memberikan pemahaman dan penanaman sikap ketika berintegrasi dengan orang yang berlainan agama.

**b. Dialog antar agama/ kepercayaan/ aliran**

Model pendekatan seperti ini menurut **Komaruddi Hidayat** dapat dilakukan dengan menggunakan dialog *sinkretikal-resiprokal*, yaitu kedua belah pihak saling membuka diri dan berbagi pikiran, pengalaman dan perasaan yang pada urutannya keduanya secara sukarela saling menerima dan memberi perihal pengalaman masing-masing.<sup>440</sup>

Rasional dialogis, yaitu dialog keagamaan di mana masing-masing pihak akan berusaha menerangkan doktrin, faham dan pengalaman

---

<sup>440</sup> dalam Muhammad Wahyuni Nafis, *Passing Over melintasi batas agama*, Gramedia Pustaka Agama, Jakarta 1999 hal 211



imannya, sehingga pihak lain bisa memahami keyakinan agama/ kepercayaan yang dipeluknya secara rasional dan seobyektif mungkin. Dialog semacam ini dimungkinkan jika masing-masing pihak memahami ajaran agama secara baik dan mendalam, dan, lebih dari itu, masing-masing sudah terbiasa atau setidaknya memiliki kesediaan mental dan intelektual untuk menerangkan dan mendengarkan argumen-argumen, doktrin dan pengalaman keberagaman secara dewasa.<sup>441</sup>

Berikut contoh-contoh dialog antar agama/ aliran/ kepercayaan yang dapat menumbuhkan kedewasaan berpikir dalam menyikapi pluralitas keagamaan;

- Sri Ramakhrisna dan muridnya Swami Vivekananda adalah tokoh yang terkenal karena dialog dan pengembaraan spiritual mereka. Sri Ramakhrisna (1834-1886) adalah seorang mistikus Hindu yang sangat berani melakukan pengembaraan spiritual, bahkan ke agama-agama yang lain. Pengembaraan spiritualnya tidak membuatnya berpindah ke dalam ( salah satu) agama-agama lain.<sup>442</sup>
- DT Suzuki (1870-1966) adalah penganut agama Budha, dia mendialogkan persamaan visi fundamental pengertian-pengertian spiritual berbagai aliran agama. Titik puncaknya adalah menekankan dialog dalam menghadapi perbedaan pemahaman aliran-aliran agama.<sup>443</sup>
- Thomas Merton (1915-1968) seorang Katolik Roma, dia menekankan tentang perlunya dialog spiritual karena didorong pengalaman dan pengetahuan pribadinya yang mendalam tentang tradisi kristen<sup>444</sup>

---

<sup>441</sup> Muhammad Wahyuni Nafis, 1999. op.cit. hal 210

<sup>442</sup> Ibid hal272

<sup>443</sup> Ibid

<sup>444</sup> Ibid. hal 273

- Abdurrahman Chisti (w.1683) adalah *Sufi* yang berusaha mencari titik temu pemikiran Hindu dan pemikiran Islam dan lain sebagainya.<sup>445</sup>

Contoh-contoh di atas setidaknya memberikan makna bahwa dengan menggunakan dialog seperti ini, setidaknya diharapkan dapat tumbuhnya kesadaran/ keinsyafan bagi setiap individu tentang ajaran dan keyakinan agamanya dan tidak terjerumus menjadi pengikut aliran sesat, di samping memperkecil potensi konflik antar agama dan kepercayaan.

Dialog tampaknya mulai ditoleh kembali oleh kalangan elit agama untuk menyelesaikan persoalan. Sisi menarik dari tobatnya Ahmad Musaddeq (pemimpin Al-Qiyadah Al-Islamiyah) misalnya, adalah melalui dialog panjang dengan beberapa elite kelompok muslim dominan.

Patut dicatat, akhir-akhir ini elite kelompok dan lembaga keagamaan dominant tertentu cenderung mengkedepankan kekerasan kultural dan psikis dalam bentuk klaim kebenaran sepihak dan sejenisnya dalam mereaksi perkembangan kehidupan, khususnya terhadap munculnya aliran-aliran baru dalam agama.

Realitas menunjukkan, kekerasan ini pada gilirannya berefek domino pada terjadinya kekerasan anarkis dengan segala dampak negative yang dibawanya. Dilihat dari sudut manapun, kemanusiaan, politik, apalagi agama, kekerasan terhadap aliran keagamaan merupakan

---

<sup>445</sup> Ibid hal 274

tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan, dan tidak boleh dilakukan, baik secara individual, kelompok, bahkan Negara.

Al Mawardi dalam Al Ahkam al Sulthoniyah menyebutkan; kelompok umat Islam yang memiliki pandangan berbeda dari mayoritas serta mencoba mengembangkan suatu pendapat sendiri tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang selama mereka tidak melakukan pemberontakan terang-terangan. Mereka harus diperlakukan secara adil, tanpa dikurangi sedikitpun hak dan kewajiban mereka.<sup>446</sup>

Patut dicatat, bahwa mereka rentan menjadi pengikut setia dari kelompok "aliran sesat" maupun yang dianggap "tidak sesat" adalah orang-orang yang sedang mencari "ketenteraman hati" untuk mengatasi kecemasan, tekanan hidup, ketegangan, labilitas emosi, keterasingan, dan serba ketidakpastian dalam memandang masa depan.<sup>447</sup>

Bertolak dari kondisi di atas, terdapat tawaran menarik dalam Al-Qur'an surat An Nahl: 125;

Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan *hikmah* dan *nasihat yang baik*, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya *Rabbmu* Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" (QS- An-Nahl 125).<sup>448</sup>

Ayat di atas menandakan tentang keharusan pengedepanan argumentasi logis dan bertanggung jawab, dialog, dan sejenisnya dalam mendakwahkan ajaran agama penuh hikmah dan nasihat yang baik.

---

<sup>446</sup> Jawa Pos 16 Nopember 2007 hal 4

<sup>447</sup> Nalini Muhdi Agung, *Aliran Sesat atau Gangguan Delusi?* OPINI Jumat, 06 Januari 2006

<sup>448</sup> Imam Jalaluddin Al- Mahalliy, dan As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, 1990. loc.cit. hal 118-119

Artinya, agama tidak bisa dikembangkan di atas kekerasan, sebab, agama adalah persoalan keberimanan, keyakinan yang sangat bergantung kepada ketulusan, ketajaman nurani, dan sejenisnya, dan bukan kepada kekerasan yang penuh keangkuhan. Demikian pula, kekerasan bertolak belakang seutuhnya dengan misi agama yang dihadirkan untuk kebahagiaan umat manusia.

Hal itu yang diperkuat **Jurgen Herbermas** (1983) melalui model komunikasi kritisnya, dia menekankan signifikansi sikap;<sup>449</sup>

- saling memahami antar sesama manusia, atau antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.
- interaksi dan komunikasi di antara mereka perlu merujuk pada dialog yang harus dipijakkan atas sikap pengakuan satu sama lain.

Sejalan dengan itu, negara memiliki tugas utama untuk menjamin terwujudnya ranah publik untuk yang bebas penguasaan (sepihak) dan penyediaan ruang diskusi yang dapat mengantarkan setiap orang dan kelompok bisa membangun sikap saling memahami dalam kebebasan kebersamaan.

Atas dasar itu, umat dengan keberagaman dominan yang mayoritas urgen melakukan refleksi kritis mengenai keberagaman mereka. Sebab, tidak tertutup kemungkinan muncul dan maraknya sekte agama yang beragam dan berbeda dari anutan mayoritas, karena para penganutnya tidak puas dengan pola keberagaman yang saat ini berkembang.

---

<sup>449</sup> Jawa Pos 16 Nopember 2007 hal 4

Kesan kuat yang tampak, pola keberagaman hegemonik saat ini masih bersifat *defensive apologia*. Keberagaman ini lebih menitik beratkan keimanan ke “dalam” semata, ke diri sendiri, tanpa mempedulikan manusia-manusia lain, dan kurang responsif atas krisis yang menimpa umat manusia.

Semua itu perlu diletakkan atas landasan sikap, perilaku, dan wawasan yang seutuhnya mencerminkan kedewasaan. Agama hadir untuk mendewasakan manusia, bukan untuk mengerdilkannya. Karena itu, umat beragama perlu mengembangkan aspek kecerdasan mereka, intelektual, spiritualitas, dan emosional. Sebab, sejatinya misi agama berada sepenuhnya pada ranah itu. Oleh karena itu model dialog seperti telah di uraikan merupakan tawaran yang menarik yang bisa dilakukan untuk masa yang akan datang.

Dilihat dari perspektif kebijakan kriminal, maka upaya dialog ini merupakan suatu upaya non penal yang strategis dalam rangka mencegah munculnya aliran sesat dan mengobati “menyadarkan” umat dalam kesesatannya, maupun pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dalam kehidupan beragama, karena dialog pada hakikatnya adalah mencari kebenaran dengan bersandarkan etika dan kesadaran manusia secara rasional dalam meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya dengan benar.

Jadi, berdasarkan hal-hal di atas, dan bertitik tolak dari konsep “resep” menjadikan “agama” sebagai “obat” sebagaimana diuraikan,

sepatutnya di masa yang akan datang benar-benar menjadi rujukan semua pihak dalam rangka penanggulangan aliran sesat dengan mengikhtiarkan sekuat tenaga membangun komunikasi<sup>450</sup> secara positif konstruktif.

Selain itu, dalam komunikasi perlu menyertakan tenggang rasa terhadap pihak-pihak yang memiliki pemikiran berbeda untuk meminimalisir ketegangan akibat pemahaman yang berbeda. Hal ini sejalan model penanggulangan kejahatan sebagaimana konsep G P. Hoefnagels yaitu,<sup>451</sup> pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan melalui media masa ( influencing views of society on crime and punishment/mass media)

Hanya dengan sikap bijak dalam menampilkan sisi spiritualitas dan religiusitas terdalam dari suatu agama, maka orang akan terbebas dari belenggu-belenggu lahiriyah. Sebab sisi spiritualitas dan religiusitas agama pada dasarnya memiliki wajah yang lebih humanis, manusiawi, universal. Menarik apa yang tersurat dalam Al-Qur'an;<sup>452</sup>

Tak ada pemaksaan dalam soal agama. Jelas bedanya yang benar dari yang sesat. Barangsiapa menolak setan dan beriman kepada Allah, ia telah berpegang teguh dengan genggam tangan yang tak kan lepas. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Tahu. (Al-Baqoroh:256)

Maka berlombalah kamu dalam kebaikan. Kepada Allah tempat kamu kembali, lalu ditunjukkan kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (Al-Maidah: 48)

---

<sup>450</sup> Di antara faktor bertobatnya Ahmad Musaddeq pimpinan aliran Al-Qiyadah Al Islamiyah dari kesesatannya adalah dengan cara komunikasi yang baik, sehingga yang bersangkutan menyadari kekeliruannya dan menyatakan pertobatannya

<sup>451</sup> Muladi, 1995. op.cit. hal. 48

<sup>452</sup> Departemen Agama RI, 1965, op.cit hal 63, 168

Hal yang paling esensial dari keberadaan suatu agama bukanlah penyelenggaraan ritus-ritus dan upacara praksis keagamaan lainnya; melainkan bagaimana nilai-nilai keluhuran, keadilan, kemanusiaan, rahmat dan kedamaian -yang notebene merupakan pesan pokok turunnya agama itu sendiri-bisa teraplikasi dalam keseharian para pemeluknya.

Agama bukanlah sekumpulan doktrin yang mati, statis, simbolis, ataupun utopis. Agama harus benar-benar dipahami sebagai kesatuan nilai-nilai tersebut di atas yang amat personal dan realistis. Sebab itulah penghayatan keagamaan yang baik bisa dilihat dari amal perbuatan, moralitas, serta praktek kehidupan sosial setiap umat. Oleh karena itu menarik apa yang dinyatakan dalam Al-Quran;

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya.(Qs al-Baqarah 2:272)

Jadi, ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa kewajiban manusia hanya sekedar menyampaikan agar sadar akan nilai-nilai luhur suatu agama, selanjutnya, insyaf atau tidaknya seseorang, hanya Tuhan yang menentukan. Dengan kata lain, manusia hanya sekedar berusaha, namun Tuhanlah yang menentukannya.

Oleh karena itu upaya untuk menyadarkan manusia dari kesesatan bukanlah perbuatan yang mudah ditengah-tengah masyarakat yang plural dengan pemahaman agama yang beragama. Merebaknya aliran sesat, kekerasan /konflik agama ditambah anarkisme gerakan atau kelompok

agama tertentu, hanyalah memperpanjang deret alasan matinya suara hati nurani.

Diakui atau tidak, merebaknya aliran sesat yang seringkali berujung pada konflik kekerasan semacam ini merupakan kendala terbesar bagi pembangunan bangsa, karena berpotensi menyuburkan *culture of violence*, sebuah “patologi” yang marak beberapa tahun terakhir di Indonesia. Budaya kekerasan yang mencatut nama Tuhan sebagai legitimasi bisa menjadi bahaya laten bagi integritas bangsa dan bagi perdamaian dunia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, akhirnya dapat disimpulkan, bahwa untuk menanggulangi masalah aliran sesat ini, pendekatan hukum tetap diperlukan sebagai konsekuensi negara hukum dan mencegah negara bertindak berlebihan, akan tetapi tidak cukup jika masalah ini didekati hanya dengan sarana *penal*. Sebagai gambaran merujuk kasus Lia Eden, pemenjaraan Lia Eden ternyata tidak menyelesaikan masalah karena ajaran ritualitasnya masih tetap berjalan dimasyarakat. Fakta antilogis ini terjadi karena pranata hukum dan perundang-undangan yang ada tidak bisa memberikan solusi dan memangkas lingkaran yang terbentuk dalam aliran ini.

Bagi golongan tertentu, menghakimi pemikiran lain yang dianggap tidak sejalan adalah sebuah kebenaran. Namun parameter yang digunakan adalah nalar kelompoknya sendiri, bukan nalar kebenaran yang diakui secara umum sebagai warga negara. Akibatnya kelompok



yang di cap sesat merasa diperlakukan tidak adil karena telah dihakimi oleh kebenaran sepihak.

Bertolak dari uraian-uraian di atas, akhirnya patut untuk direnungkan bersama, bahwa agama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendensikan tuntutan dari kehadiran sosial. Karena itu, agama adalah bersifat sungguh-sungguh pribadi dan sungguh-sungguh sosial.

Kebebasan beragama, adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu prinsip-prinsip kebebasan yang saat ini semakin kencang dihembuskan, sepatutnya kebebasan itu tetap dalam koridor dan konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Posisi yang demikian ini mengharuskan semua pihak tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip negara hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Sebuah ungkapan lama menyatakan, dimana bumi kupijak, di situ langit kujunjung.

Pelanggaran atas prinsip-prinsip tersebut baik dalam wujud doktrin materi pemahaman maupun bentuk-bentuk pengamalan ajaran keagamaan dapat menyebabkan negara melakukan tindakan pengawasan baik preventif maupun represif. Tindakan pengawasan ini dilakukan terhadap siapa saja tidak memandang apa madzhab dan aliran keagamaannya.

Keharusan untuk taat kepada prinsip negara hukum di atas juga mengantarkan umat beragama, apapun aliran keagamaannya untuk melakukan penafsiran kembali doktrin agama yang selama ini dipahami sehingga sesuai dengan prinsip negara hukum RI yang berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu konsepsi kebijakan penanggulangan aliran sesat yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi aliran sesat harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi aliran sesat dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha yang bersifat “non-penal”. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional

Dengan demikian, dalam penanggulangan aliran sesat tersebut adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan *non penal* dan *penal* itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh dan suburnya aliran sesat di Indonesia. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan penanggulangan aliran sesat benar-benar dapat berhasil, sehingga umat dapat hidup berampingan secara damai dalam menjalankan agama, keyakinan, ibadah dan kepercayaannya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Maraknya aliran sesat, sampai saat ini menjadi masalah serius dalam praktek kehidupan beragama yang rukun dan damai. Kondisi demikian diperlukan suatu kebijakan rasional baik dengan menggunakan *penal* (hukum pidana) maupun dengan *non penal* dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Bertolak dari hal demikian, maka kebijakan penanggulangan aliran sesat dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*)
  - kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama UU No 1 Pnps 1965. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana, berarti bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana dijadikan sarana menanggulangi kejahatan (aliran sesat). Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi

yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

- kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkutan-paut dengan aliran sesat sebagai bagian dari tindak pidana agama, terutama dalam Konsep KUHP.

2. Penanggulangan terhadap aliran sesat melalui upaya *non penal* dapat ditempuh dengan melakukan **pendekatan agama** (*religion prevention*). Di samping itu diperlukan pula **pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif**. Atau dengan kata lain, pendekatan agama merupakan salah satu upaya non penal dalam menanggulangi aliran sesat perbedaan pandangan keagamaan/kepercayaan. Sedangkan bentuk konkretnya berupa;

- Pendekatan Pendidikan/ edukatif. Hal ini berarti , bahwa upaya antisipasi terhadap munculnya aliran sesat dapat dilakukan upaya preventif dengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus penguatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pemantapan keyakinan terhadap agama melalui ***pendidikan agama***.
- Pendekatan kultural dengan cara membangun komitmen bersama, dakwah, dialog yang mengkedepankan solusi psikologis. Penggunaan cara demikian memiliki efek preventif

mencegah seseorang berbuat kesesatan, juga mencegah terjadinya konflik perbedaan agama/ aliran kepercayaan.

Konsepsi kebijakan penanggulangan aliran sesat adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan *non penal* dan *penal* itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh dan suburnya aliran sesat di Indonesia. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan penanggulangan aliran sesat benar-benar dapat berhasil, sehingga umat dapat hidup beramprangan secara damai dalam menjalankan agama, keyakinan, ibadah dan kepercayaannya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

## **B. SARAN**

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut;

1. Kehidupan beragama yang rukun dan damai merupakan tujuan sekaligus amanat UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, segenap pihak, baik pemerintah maupun bersama-sama hendaknya mengikhtiarkan/ mengusahakan pencapaian tujuan dimaksud.

2. Kebijakan rasional dalam menanggulangi aliran sesat sebaiknya ditempuh dengan pendekatan/ kebijakan integral, baik dengan menggunakan “penal” maupun dengan sarana “non-penal”
3. Pencegahan terhadap aliran sesat janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogya-nya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh.
4. agar tidak menimbulkan masalah sosial, pencegahan terhadap aliran sesat sepatutnya didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan aliran sesat”
5. menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam menanggulangi aliran sesat
6. memfasilitasi perkembangan keberagamaan dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa.
7. mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan ( “meningkatkan kerukunan” ) antar umat bangsa, baik dengan pendekatan kultural maupun keagamaan.

## PUSTAKA

- Andenaes, J. *Does Punishment Deter Crime? Philosophical Perspective on Punishment*, Gertrude Ezorsky (Ed), New York, 1972
- Al- Mahalliy, Imam Jalaluddin . dan As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Ayat*. Sinar Baru, Bandung 1990
- Apeldoorn, Van . *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi terjemahan, Pradnya Paramita, Jakarta 2001
- Almudhar, Yusuf Ali. *Toleransi-toleransi Islam, Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Lawan-lawannya*, Iqra, Bandung. 1983
- Al –Qur'an dan terjemahnya. Mujamma' Khadim al Haramain Asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at aal Mús.-haf asy-Syarif,Medinah al Munawwaroh, 1971
- Al Qur'an dan Tafsirnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemaha/ Pentafsir Al Qur'an, Departemen Agama, 1975
- Bemmelen, Van . *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bhina Cipta, Jakarta, 1984
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnja*, Djamunu, Jakarta, 1965
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005
- Ezorsky, Gertrude . (Ed), *Philosophical Perspective on Punishment*, New York, 1972
- Gayo, Iwan . *Buku Pintar Seri Senior*, Upaya Warga Negara, Jakarta 1993
- Gilissen Jhon, dan Firts Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, edisi terjemahan, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Hanafi A, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977
- Hanitijo Soemitro , Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982Rozak, Abd. dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Pustaka Setia, Bandung,2006
- Hamim, Thoha et al, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, LkiS Pelangi Aksara, LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007
- Hamidi, Jazim , dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta:1997
- Hartono, Sunaryati, *Kembali Ke Metode Penelitian Hukum*, FH UNPAD, Bandung, 1984

- Hashim, Muhammad . *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, Mizan, Bandung 1996
- Kansil, CST . *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989
- Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Paragonatama Jaya, Jakarta, 1991
- Kasim, Ikdhal, **Hak Sipil dan Politik**, Esai-esai pilihan, ELSAM, Jakarta 2001
- Krissantono ED, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1976
- Labib MZ dan Moh. Al'Asiz, *Tashawwuf Dan Jalan Hidup Para Wali*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000
- Lubis, Solly . *Serba-serbi Politik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, tanpa nama penerbit, Jakarta, 2003
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta 1985
- Mahsassani, Subhi . *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Moderen*, Tintamas dan Litera Antarnusa, 1993
- Mangkusasmito, Prawoto, *Pertumbuhan Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, ha12.
- Mertokusumo, Sudikno . *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Muladi, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005
- Mulkhan, Abdul Munir. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam*, Rajawali Pers, Jakarta 1989
- , *Syekh Siti Jenar Pergumulan Islam-Jawa*, yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta 2002
- Muin, Thahir Abdul . *Ichtisar Ilmu Tauhid*, Djajanurni, Jakarta, tanpa tahun
- Mustofa, Ahmad , *Ilmu Budaya Dasar*, Pustaka Setia, Bandung 1997
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2000
- Moeloeng , Lexy j., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1996



- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002
- **Masalah Penegakan Hukum & dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung:2001
- **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2005
- **Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan**, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2005
- **Delik-delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara**, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2007
- Nasution, Harun . **Falsafat agama**, Jakarta, Bulan Bintang1973
- Noeh, Zaini Ahmad, **Berawal dari mobilisasi Tokoh Pergerakan Islam**, Artikel pada Republika, 6 Januari 1995, hal. 8.
- Nurdi, Herry . **Jejak Freemason & Zionis di Indonesia**, Cakrawala, Jakarta, 2005
- Peters A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, **Hukum dan Perkembangan Sosial**, Sinar Harapan, Jakarta: 1998
- Peursen Van, C.A. **Orientasi di Alam Filsafat**, edisi terjemahan, Gramedia Jakarta, 1988
- Poernomo, Bambang . **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Yakarta 1978
- Purwanto, M. Ngalim. **Ilmu Pendidikan, Teoritis Dan Praktis**, Remaja Karya, Bandung 1988
- Poerwanti, Endang dan Nurwidodo.**Perkembangan Peserta Didik**. FKIP-UMM:Malang. 2001
- Prakoso , Djoko . **Tugas-Tugas Kejaksaan Di Bidang Non Yustisial**, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu**, Eresco, Bandung 1986
- Qardhawi, Yusuf. **Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam**, Karisma, Bandung 1994
- Rasjidi, Lili. **Dasar Dasar Filsafat Hukum**, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1990
- Redaksi, **Era Pembangunan 25 Tahun**. CV Sumadjaja, Bandung. 1973
- Redaksi, **Toleransi-toleransi Islam, Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Lawan-lawannya**, Iqra, Bandung. 1983

- Rahmat, Aibdi, *Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2007
- Rahmat, Jalaluddin. (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Mizan, Bandung, 1988
- Rozak, Abd. dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Pustaka Setia, Bandung, 2006
- Saleh, K. Wantjik. *Pelengkap KUHPidana*, Ghalia Indonesia, 1976
- Sahetapy, JE. *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Alumni, Bandung 1981
- Salman, Otje, dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. PT Alumni, Bandung, 2004
- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta Press, 1990
- Senoadji, Oemar. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta 1976
- Sadijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governace*, LaksBang, Yogyakarta, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982
- *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung 1996
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung 1993
- Thahir Abdul Muin, *Ichtiisar Ilmu Tauhid*, Djajanurni, Jakarta, tanpa tahun
- Tebba, Sudirman. *Syaikh Siti Jenar; Pengaruh Tasawwuf Al-Hallaj Di Jawa*. Pustaka Hidayah, Bandung 2003
- Team Dokumentasi Presiden RI, *Jejak Langkah Pak Harto, 27 Maret 1973-23 Maret 1978*, Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1991
- Wahyuni Nafis, Muhammad. *Passing Over melintasi batas agama*, Gramedia Pustaka Agama, Jakarta 1999
- Wisnubroto, Al. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999
- Wreksosuharjdo, Sunarjo. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Andi Yogyakarta: 2001

- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959
- Yogaswara, A. *Aliran Sesat Dan Nabi-Nabi Palsu, Riwayat Aliran Dan Para Nabi Palsu Di Indonesia*, Narasi, Yogyakarta, 2008
- Yunis, Mohammed. *Politik pengkafiran & Petaka Kaum Beriman. sejarah-politik-HAM*. Pilar Media, Yogyakarta 2006
- Zanti Arbi, Sutan dan Wayan Ardana , *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan Rajawali, Jakarta 1984
- Zara, M. Yuanda et al, *Aliran-aliran Sesat di Indonesia*, Banyu Media, Yogyakarta, 2007

#### MAKALAH

- Abdullah, Saiful . *Tindakan Pamswakarsa dan Oknum ABRI pada saat Sidang Istimewa MPR 1998 Ditinjau Dari Segi Perundang-undangan dan Peradilan Yang Berwenang Mengadili*, Skripsi, Universitas Bangkalan, 1999
- Atmasasmita, Romli, *Hubungan Negara Dan Masyarakat Dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Makalah, disampaikan pada Seminar Dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh DEPKEH HAM, Bali, 14 – 18 Juli 2003
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP- Komnas HAM – USAID – DRSP, Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaharuan KUHP, Notulensi diskusi panel C, Konsultasi Publik RUU KUHP dengan tema “Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Reformasi KUHP” Jakarta 4 Juli 2007
- Atmasasmita, Romli .*Hubungan Negara Dan Masyarakat Dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Makalah, disampaikan pada Seminar Dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh DEPKEH HAM, Bali, 14 – 18 Juli 2003
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim . *Mengkritisi RUU KUHPidana Dalam Perspektif HAM*. Makalah. Dalam Beberapa tulisan Terkait kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP. Bahan Bacaan untuk Focus Group Discussion yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (Democratic Reform Support Program) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: “Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”. Hotel Ibis Tamrin, Jakarta 28 September 2006

- Hidayat, Komarudin. ***Agama-agama Besar Dunia; Masalah Perkembangan dan Interelasi***, Makalah disampaikan pada Kajian Agama, Paramadina, 23 Januari 1992
- Kasim, Ifdal. ***Perkembangan Delik Agama Dari Masa Ke Masa***, Makalah disampaikan pada “Konsultasi Publik RUU KUHP: Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Reformasi Hukum Pidana”, yang diadakan oleh Aliansi Nasional RKUHP dan Komnas HAM, di Hotel Santika Jakarta, 3-4 Juli 2007
- Moenasyik, Abdullah, ***Aspek Dasar Budaya Masyarakat Madura***, Makalah pada dialog “ Mencari Format Baru Gerakan Pemuda Ansor”, PAC GP Ansor Klampis, 26 September 2007
- Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional. Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, 17 Januari 2004
- Muladi. Politik Hukum Pidana, ***Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas dalam RUU KUHP***. Makalah. Dalam Beberapa tulisan Terkait kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP. Bahan Bacaan untuk Focus Group Discussion yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (Democratic Reform Support Program) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: “Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”. Hotel Ibis Tamrin, Jakarta 28 September 2006
- ***Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan terhadap Martabat Dilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia***. Makalah disampaikan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) FH Universitas Udayana. 20-21 Maret 2006
- Nawawi Arief, Barda. ***Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama***, Makalah pada Forum “Debat Publik RUU Tentang KUHP”, diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, di Jakarta, tgl. 21 – 22 Nopember 2000
- ***Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dan Santet***, makalah pada Seminar “Relevansi KUHP Dalam Upaya Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia” FH UNUD, 30 April 2005
- Noeh, Zaini Ahmad . ***Berawal dari mobilisasi Tokoh Pergerakan Islam***, Artikel pada Republika, 6 Januari 1995
- Rahardjo, Satjipto, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 15 Desember 2000

- , ***Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun***, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, edisi 2 April 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. ***Arah Hukum Pidana dalam Konsep RUU KUHPidana***. Makalah. Dalam Beberapa tulisan Terkait kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP. Bahan Bacaan untuk Focus Group Discussion yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (Democratic Reform Support Program) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: “Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”. Hotel Ibis Tamrin, Jakarta 28 September 2006
- Sukarsono, ***Pendidikan Agama Di Sekolah***, Majalah bulanan Mimbar Pendidikan Agama, Edisi Juli 1979
- Suma, Muh. Amin . ***Telaah Kritis Sumbangan Konstruktif Terhadap RUU KUHP***, Makalah, Disampaikan pada “Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jakarta, 08 September 2004
- Yuherawan, Deni SB. ***Kebebasan Akademik***. Makalah Seminar Demokrasi dan Kekerasan, Unijoyo 5 September 2003

#### JURNAL/ MAJALAH

- Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, edisi 2 April 2006
- Gatra, Edisi VI 13 Maret 2006
- Majalah Mimbar Pendidikan Agama No 62, Nopember 1991
- Mimbar Pendidikan Agama No 62, Nopember 1991PosmoEdisi 68, 1 Juli 2000
- Mimbar Pendidikan Agama, Edisi Juli 1979Posmo Edisi 75, 25 Agustus 2000
- Posmo, Edisi 183, 30 September 2002
- Posmo, Edisi 241, 19 Nopember 2003
- Posmo, Edisi 249, edisi 249, 20 Januari 2004
- Posmo, Edisi 296, Desember 2004
- Posmo, Edisi 327, 27 Juli 2005
- Posmo, Edisi 342, 16 Nopember 2005
- Posmo, Edisi 344, tahun 2005
- Posmo, Edisi 449 12 Desember 2007
- Posmo, Edisi 451 26 Desember 2007

Posmo, Edisi 463, 19 Maret 2008

Tempo Nomor 24 Tahun XXIII, 14 Agustus 1993

SIMPONI. Nomor pengenalan 27 September - 3 Oktober 1994

## **KAMUS**

Ali, Attabik dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003

Bahreisj, Hussein, *Kamus Lengkap Pengetahuan Islam Populer*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1995: hal 192

Henry Campbell Black, et.al., **Black's Law Dictionary**, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002

**Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta 1990

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1986

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

## **KORAN**

KOMPAS. 27 Agustus 1994

Kompas, 3 Januari 2006

Kompas, 18 Juni 2007

Jawa Pos 15 Juni 2007

Jawa Pos 16 Nopember 2007

Jawa Pos, 31 Oktober 2007

Jawa Pos, 21 Desember 2007

Jawa Pos, 23 Desember 2007

Jawa Pos, 26 Desember 2007

Jawa Pos, 5 Januari 2008

Suara Merdeka 06 Desember 2007

## **INTERNET**

alatsar.wordpress.com

[is-lam@isnet.org](mailto:is-lam@isnet.org),

[http://id.wikipedia.org/wiki/Agama\\_Asl\\_Nusantara](http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Asl_Nusantara)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Agama>

"[http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran\\_sesat](http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_sesat)"

<http://en.wikipwdia.org/wiki/blasphemy>

"[http:// id.wikipedia.org/ wiki/ Galileo Galilei](http://id.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei)"

"[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_gereja](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_gereja)

"<http://id.wikipedia.org/wiki/Sekte>"

[www.erasuslim.com](http://www.erasuslim.com).

[www.nu-online.com](http://www.nu-online.com).

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0006/16/nasional/haru06.htm>

## **Daftar Undang-Undang, RUU dan Peraturan-peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 (amandemen ke-2)

UUDS 1950.

TAP MPR No. VI Tahun 2001

TAP MPR No. VII Tahun 2001

UU No 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP konsep 2006)

UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers,

UU No. 32 tahun 2002 (Penyiaran).

UU No 3 tahun 1971 jo Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah

UU No 32 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah

UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No 13 tahun 1961 Jo UU No 28 tahun 1997 jo UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI

UU No 20 tahun 1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia jo UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,

Keputusan Perdana Menteri RI ( Ir. Djuanda No. 122/PROMOSI/1959, tertanggal 21 Maret 1950, tentang Melarang adanya Organisasi Agama Eyang yang berada di desa Maparah, kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis beserta cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.

Keputusan Presiden RI Ir. Soekarno, Nomor 264 Tahun 1962, tertanggal 15 Agustus 1962, tentang larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi. Rotary Club, Devine Life Society, Vrijmentselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), agama baha'i.

Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1963, tertanggal 3 April 1963, tentang Perhimpunan Theosofi Cabang Indonesia (PT TIFA Surabaya) berkedudukan di Jakarta beserta loge-loge dan Federasi Loge-logenya di seluruh Indonesia sebagai Organisasi Terlarang.

Keputusan Presiden RI No 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

SK Menteri Kehakiman RI No JA 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 dan Tambahan Berita Negara RI No 26 tanggal 31 Maret 1953 Pelarangan Ahmadiyah

Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-08/DA/10.1971, tertanggal 29 Oktober 1971, melarang Islam Jamaah/ Darul Hadits di seluruh Indonesia.

Surat Keputusan Jaksa Agung RI No Kep-108/J.A/1984 tertanggal 15 Januari 1984, tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 085/JA/9/1985 tertanggal 7 September 1985, menyatakan aliran inkar sunnah terlarang di Indonesia.

Surat Edaran Departemen Kejaksaan Biro Pakem Pusat No. 34/Pakem/S.E./61 tertanggal 7 April 1961

Surat Instruksi Jaksa Agung No. 1/Insr/Secr/1963 tugas-tugas Pakem.